

membangun bersama rakyat 2

by Siti Masulah

Submission date: 20-Oct-2020 11:55PM (UTC+1100)

Submission ID: 1376233614

File name: BAB_ISI_MEMBANGUN_BERSAMA_RAKYAT.docx (8.23M)

Word count: 49849

Character count: 330977

MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT
BERPRINSIP *MAQÂSHID AL-SYARÎAH*
DI ERA KEPEMIMPINAN JOKO WIDODO

Penulis

Dr Moh Dahlan, M.Ag.

Kata Pengantar

Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin

Penerbit

Serpico

Desain Sampul

Arief Timor

Tata Letak

Widya Nugroho

Cetakan Pertama: Oktober 2018

ISBN: 978-602-51447-1-4

3

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras menjerjemah,
menfotocopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa
izin tertulis dari penerbit

Dicetak oleh Serpico Printing Utama, Bekasi
Isi diluar tanggung jawab Percetakan

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam hal ini, saya bersyukur atas segala nikmat kesehatan lahir dan batin sehingga bisa menyelesaikan penulisan karya tulis ini. Demikian juga salawat dan salam, semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad saw yang telah membimbing umat menuju jalan yang mulia dan diridlai Allah swt.

Membicarakan pemikiran dan kebijakan Presiden Joko Widodo pada dasarnya sulit dirumuskan dalam karya tulis yang sederhana ini, karena prestasi dan inovasi kerjanya yang empiris dan fenomenal dalam melakukan pembangunan berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, karya tulis ini fokus pada paradigma *maqâshid al-syari'ah* dalam membaca pemikiran, kiprah dan perannya dalam membangun berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai karya tulis ilmiah, karya tulis ini juga tidak lepas dari analisis dan pengembangan dari karya tulis ilmiah terdahulu baik dari karya tulis penulis itu sendiri maupun karya tulis ilmiah ilmuwan lainnya. Di samping itu, data-data foto sebagai dokumen pendukung bersumber dari sumber online yang bersifat resmi dan juga dari sumber data personal seperti facebook, dll. Karenanya, karya ilmiah buku ini tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan, sehingga saran dan masukan dari para pembaca yang budiman penting untuk penyempurnaan karya tulis ini baik dari sisi analisis maupun sumber data.

Dalam penulisan buku ini, saya menyadari bahwa karya tulis buku ini tidak bisa selesai tanpa ada berbagai dukungan dan masukan dalam penyelesaian penulisan buku ini, karenanya dalam kesempatan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak, di antaranya:

1. H Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama RI, melalui arahannya dalam berbagai pertemuan/rapat kerja yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI yang telah memberikan wawasan pluralitas keagamaan dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Deputi IV Kantor Staf Presiden RI, Drs Eko Sulistiyo, yang mana melalui tulisan-tulisan ilmiahnya mengenai Presiden Joko Widodo

telah memberikan inspirasi dan memperkaya wawasan dalam proses penulisan buku ini.

3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, Prof Dr. Phil. H Kamaruddin Amin, MA, Inspektur Jenderal Kemenag RI, Prof Dr. Phil. H. M. Nurcholis Setiawan, MA, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, Prof. Dr. H. M Ishom, MA., dan Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI, Prof. Dr. Arskal Salim, MA, yang mana melalui berbagai forum ilmiah memberikan pencerahan dan wawasan keilmuan, keislaman, nasionalisme, dan manajemen birokrasi.
4. Prof Dr H Sirajuddin M, M.Ag., MH, Rektor IAIN Bengkulu, juga Mustasyar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Bengkulu, yang banyak memberikan saran dan masukan mengenai wawasan Islam moderat dan kajian keilmuan Nahdlatul Ulama.
5. KH Moh Zuhri Zaini, Pengasuh PP Nurul Jadid Probolinggo, yang telah memberikan dasar-dasar kajian khazanah *kitab kuning* dan kajian ilmu ushul fiqih selama nyantri di Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo Jatim.
6. Prof Dr H Rohimin, M.Ag, Ketua Majelis Ulama Indonesia Propinsi Bengkulu atas saran dan masukan mengenai wawasan Islam kebangsaan dan nasionalisme.
7. Kawan-kawan diskusi selama mengajar di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang di antaranya Prof Dr H Tobroni, M.Si., Prof Dr H Syamsul Arifin, M.Si., dan Prof Dr Ir Jabal Tarik.
8. Prof Dr. H Syahabuddin, Dr. Muhammad Zain, M.Ag., Dr H. Mastuki HS, M.Ag., dan Burhan S, yang berkenan memberi masukan dalam mengembangkan wawasan keilmuan dan keislaman.
9. Siti Mas'ulah, M.Pd.I, Istri, dan anak-anak, M Maulana Malik Az-Zhahir, Syarifatus Syakurah, dan M Hirzan Haedar Ar-Razi atas pengertian dan dukungannya.
10. Kawan-kawan yang memberikan saran dan masukan dalam proses editing buku selama penulisan buku di antaranya M Arif Rahman Hakim, M.Pd., Dedi Efrizal, M.Pd., dan Intan Permatasari, M.Si.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof Dr KH Ma'ruf Amin, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang telah berkenan memberikan kata pengantar bagi buku ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan balasan atas segala bantuan dan dukungannya. Amin...

Bengkulu, 20 Juli 2018

Penulis,

Dr Moh Dahlan, M.Ag.

KATA PENGANTAR
Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin
(Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU))

44

الحمد لله الذي هدانا لهذا سبيل السلام، وأفهمنا بشريعة النبي الكريم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ¹

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan nikmat dan hidayah yang diberikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW -beserta keluarga dan para sahabatnya- yang telah menunjukkan kepada jalan yang benar dan baik serta menjauhkan dari jalan yang bathil.

Dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU), sikap *tawadlu'*, jujur, mandiri, giat bekerja dan ikhlas menjadi perhatian serius dalam membentuk dan mendidik santri/umat agar kelak menjadi Muslim sejati.² Islam ahlussunnah wal jamaah yang menjadi paham Nahdlatul Ulama memberikan arah pendidikan dan pengajaran dengan muatan akhlakul karimah tersebut kepada umat Islam, sehingga diharapkan lahir generasi umat Islam yang bisa berjuang untuk membangun bangsa dan negara baik dari aspek lahir maupun batin, sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Salah satu tokoh penting di negeri ini yang memiliki sikap tersebut adalah Joko Widodo yang saat ini sedang menjabat sebagai Presiden RI. Komitmen Joko Widodo dalam membangun bangsa dan negara berangkat dari landasan fundamental, yaitu revolusi mental yang bisa menjadi penyangga dalam membangun keadilan dan kesejahteraan bangsa yang

¹ Naskah Muqaddimah dengan beberapa revisi dikutip dari Khutbah Jum'at, Muhammad Ishom, *Berkumpul dan Berpisah karena Allah*, <http://www.nu.or.id/post/read/77188/berkumpul-dan-berpisah-karena-allah>, diakses 30 Juni 2018.

² KH Muhammad Hasyim Asy'arie, "Irsyad al-Mu'min ila sairah Sayyid al-Mursalin wa Man Tabi'ahu min al-Shahabah wa al-Tabi'in", *Irsyad al-Syari fi Jam'i Mushannifah al-Syaiikh Hasyim Asy'ari*, (Jombang: Maktabah al-Masruriyah, t.th), hlm.12-22.

diselenggarakan melalui “program-program pembangunan ekonomi produktif bukan konsumtif” dan “pemerataan pembangunan infrastruktur” untuk mendukung terwujudnya cita-cita keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Maka dari sudut pandang hukum Islam (*hifdz ad-din*), hal itu menjadi wajib diadakan karena hal itu dapat mewujudkan persatuan yang berbasis pada keadilan dan kesejahteraan, bukan hanya bingkai wilayahnya saja yang bersatu, tetapi jiwa dan raganya bersatu dalam wadah NKRI.

Dalam pembangunan bidang agama (*hifdz ad-din*), agama Islam memberikan ruang kebebasan berkeyakinan (*hurriyah al-‘aqidah*) dan kebebasan beragama, sehingga dengan paradigma *hifdz ad-din* ini, kita berharap bahwa pembangunan tata kehidupan berakidah dan beragama yang toleran, moderat, dan inklusif dapat berjalan dengan baik. Pembangunan bidang akidah yang toleran dan moderat ini penting karena akan menentukan perilaku hidup manusia dalam pembangunan kehidupan empiris baik dalam menjaga eksistensi hidup manusia (*hifdz an-nafs*), *hifdz al-‘aql* (memelihara akal), *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan) maupun *hifdz al-‘ird* (memelihara kehormatan/martabat). Hal ini juga merupakan bagian dari implementasi sila pertama dari Pancasila, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, dan sila kedua, *Kemanusiaan yang adil dan beradab*.

Hifdz al-mâl dan *hifdz al-bi’ah* merupakan dua sisi pembangunan yang saling terkait karena kemajuan ekonomi sangat ditentukan dengan lingkungan dalam hal ini infrastruktur yang memadai, sehingga akses pengiriman dan peredaran barang itu mudah dan biaya murah. Dengan demikian, sistem ekonomi yang produktif dan didukung dengan infrastruktur yang memadai akan memberikan dampak yang luar biasa dalam membangun pemerataan/ ekonomi dan membangun daya saing bangsa baik level nasional maupun internasional. Dengan adanya pemerataan di segala aspek kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka persatuan Indonesia akan semakin kokoh, tidak hanya dalam bingkai wilayah teritorial, tetapi juga jiwa dan raga bangsa merasakannya dengan nyata. Hal ini juga merupakan bagian dari implementasi dari sila kelima, *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, dan sila ketiga, *Persatuan Indonesia*.

Inilah program empiris Presiden Joko Widodo yang sesungguhnya sesuai dengan prinsip *hifdz al-mâl* (memelihara harta) yang menjadi salah satu *maqâshid al-syarî'ah* dalam pembangunan hukum Islam, sehingga pembangunan sistem ekonomi yang produktif itu adalah substansi dari tujuan *hifdz al-mâl*. Demikian juga *hifdz al-bi'ah* (pemeliharaan lingkungan) yang berwujud pembangunan infrastruktur merupakan bagian yang penting dari *maqâshid al-syarî'ah*.

Pada bagian *hifdz an-nafs*, Presiden Joko Widodo mengeluarkan program *Kartu Indonesia Sehat* (KIS), dengan *hifdz al-'aql* Presiden Joko Widodo mengeluarkan program *Kartu Indonesia Pintar* (KIP), dan dengan *hifdz an-nasl/hifdz al-'ird* Presiden Joko Widodo mengeluarkan program *Kartu Keluarga Sejahtera* (KKS). Program-program tersebut dapat mendukung pembangunan fondasi keilmuan dan kecerdasan serta kemandirian ekonomi bagi keluarga dan masyarakat, sehingga harkat dan martabatnya bisa terjaga dan terhormat di mata dunia.

Akhirnya, saya selaku Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyambut baik hadirnya buku saudara Moh Dahlan yang telah mengeksplorasi program kerja Presiden Joko Widodo yang insyaallah merupakan cerminan dari sikap dan sosok *Muslim Sejati*.

Jakarta, Juni 2018

Rais 'Aam PBNU,



Prof Dr. KH. Ma'ruf Amin



DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH.....	I
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latarbelakang.....	1
B. Signifikansi Kajian.....	21
C. Rumusan Masalah dan Metode Kajian.....	24
BAB II NILAI-NILAI KEISLAMAN	
DAN <i>MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH</i> PEMBANGUNAN JOKO WIDODO	
1. Nilai-Nilai Keislaman Pribadi Joko Widodo.....	26
2. <i>Maqâshid al-syarî'ah</i> Pembangunan Joko Widodo.....	78
BAB III MEMELIHARA NILAI-NILAI KEHIDUPAN MANUSIA	
(<i>Hifdz al-Qimah al-Hayâh al-Insâniyyah</i>)	
1. Nilai-nilai Agama Islam Sebagai Fitrah Manusia	117
2. Al-Qur'an Sebagai Petunjuk dan Rahmat bagi Seluruh Alam Semesta.....	124
BAB IV MEMELIHARA ESENSI MANUSIA	
(<i>Hifdz al-Zât al-Insâniyyah</i>)	
1. Akal dan Jiwa sebagai Esensi Manusia.....	141
2. Pendidikan sebagai Pemelihara Akal dan Jiwa.....	151
BAB V MEMELIHARA KEPENTINGAN PUBLIK	
(<i>hifdz al-mujtama'</i>)	
1. Rumah Tangga Sebagai Pondasi Keluarga Harapan.....	161
2. Prinsip-Prinsip Agama dalam Hidup Bermasyarakat.....	168
BAB VI BAB VI MEMELIHARA EKSISTENSI LINGKUNGAN FISIK	
(<i>Hifdz al-muhîth al-mâddî</i>)	
1. Lingkungan Hidup Sebagai Kebutuhan Dasar Manusia.....	190
2. Pembangunan Alam Semesta sebagai Keniscayaan <i>Syar'i</i>	200
BAB VII PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	216
2. Saran-saran.....	219
DAFTAR PUSTAKA.....	215

BAB I PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7)

Melihat kepada jalan yang digariskan Allah dengan ketiga ayat ini, kita diberi peringatan bahwa *kekayaan batin sejati* ialah shilatur-rahmi dengan masyarakat, takwa kepada Allah dan cinta akan kebaikan.³

Sebagai agama rasional-universal, segala problematika hidup manusia dan alam semesta dapat dijawabnya. Rasionalitas Islam dapat dibaca salah satunya dari nalar fiqih Islam yang mengajarkan pentingnya ijtihad hukum. Dengan berdasarkan nas al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum fundamental, maka pendekatan ijtihad dapat dilakukan berdasarkan rujukan ketentuan nas secara langsung dan juga dapat menggunakan pendekatan ijtihad *istimbathi* yang bertujuan menggali maksud dan tujuan hukum dari nas itu sendiri. Salah satu pendekatan ijtihad hukum yang progresif dalam pembangunan hukum fiqih adalah pendekatan *istimbathi* yang mana hal ini dijadikan dasar ijtihad oleh Najm al-Din al-Tufi.⁴ Dalam

³ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Juz 30, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t.th.), hlm. 8026.

⁴ Syamsuri menjelaskan bahwa “secara historis, pada abad ke 4 Hijriyah muncul kitab yang pertama kali menggunakan judul *maqāshid*. Kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Ali bin al-Hasan bin Bashir al-Tirmidzi (w. 320 H) itu berjudul *al-shalah wa maqāshiduha* yang menjelaskan secara rinci tentang hikmah dan rahasia gerakan-gerakan shalat, tetapi bahasan konsep *al-ushūl al-khamsah* belum secara konkrit disebutkan, bahkan konsep *hifdz al-dīn* juga belum muncul. Konsepsi *al-Ushūl al-Khamsah* juga tidak ditemukan pada kitab *Mahāsin al-Syari’ah* yang ditulis oleh Muhammad bin ‘Ali bin Isma’il Abu Bakr al-Shasi (w. 365 H). Pelacakan terhadap konsep *al-Ushūl al-Khamsah* atau *al-dlarūriyyat al-khams* mendapatkan titik terang dalam karya tulis Abu al-Hasan al-Amiri (w. 381 H) yang berjudul *al-I’lām bi Manāqib al-Islām* yang mulai menjelaskan secara lebih terang komponen dari *al-Ushūl al-Khamsah* misalnya dia menjelaskan masalah larangan bunuh diri atau menenggelamkan diri (*hifdz al-nās*). Dalam perkembangan selanjutnya, Imam al-Haramain ‘Abd al-Malik ‘Abd Allah bin Yusuf al-Juwaini (w 478 H) yang kemudian dikenal sebagai tokoh *maqāshid* melalui karyanya al-Burhan sudah mulai menjelaskan lebih rinci masalah *al-Ushūl al-Khamsah* dan tingkatan al-maslahah. Al-Juwaini juga merupakan tokoh ushul fiqih yang kemudian banyak melahirkan terminologi yang populer di kalangan ulama berikutnya, misalnya konsepsi *al-kulliyat*, *al-istidlāl*, *al-mashālih al-‘ammah*, dan *al-istishlāh*. Ia juga yang membuat kategori membagi masalah kepada *dlarūriyyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder), dan *tahsiniyyah* (kompleminter). Setelah masa Imam al-Ghazali, pembahasan ushul fiqih dalam tema *al-ushul al-khamsah* semakin rinci dan progresif. Hadir beberapa ulama’ ushul fiqih yang melengkapi kajian *maqāshid al-syari’ah*, antara lain : Imam al-Razi (w. 606 H) yang menulis karya berjudul *al-Mahshūl fi ‘Ilm Ushūl al-Fiqh*, al-Amidi (w. 631 H) yang menulis karya berjudul *al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām*, al-‘Iz bin ‘Abd al-Salam (w 660 H) yang menulis karya berjudul *Qawā’id al-Ahkām fi Mashālih al-Anam*, Imam at-Tufi (w 716 H) yang menulis karya berjudul *Risālah al-Tufi*, dan Imam al-Syatibi (w. 790 H) yang menulis

membangun ijtihad hukum berdasarkan *mashlahah* (*mursalah*), al-Tufi menggunakan empat pilar, yakni *Pertama*, akal (rasio) berdiri sendiri (memiliki otoritas lebih) dalam menentukan masalah atau mafsadatnya perbuatan. *Kedua*, masalah menjadi sumber hukum yang berdiri sendiri, tidak perlu merujuk kepada panduan nas. *Ketiga*, penetapan hukum yang menggunakan metode masalah hanya berlaku dalam wilayah mu'malah/rasional, bukan ibadah. *Keempat*, masalah merupakan sumber hukum (fiqih) yang memiliki kedudukan paling kuat secara umum.⁵

Dalam deratan ulama ushul fiqih yang menggunakan ijtihad kemaslahatan di antaranya Imam Al-Ghazali, Imam al-Syatibi, dan Said Ramdhan al-Buthi, tetapi belum lahir pemikiran hukum fiqih/Islam yang memberikan ruang lingkup kebebasan beragama dan keharmonisan hidup berbangsa seperti pembahasan *hurriyah al-aqidah* ketika membahas masalah *hifdz al-din*. Demikian juga ketika membahas masalah lingkungan hidup (*hifdz al-bi'ah*) belum juga muncul pembahasan yang jelas.⁶

Dalam tata kehidupan *nation-state*, adanya doktrin pembayaran jizyah (pajak per-kepala) yang pada awalnya merupakan tugas penggalan militer kemudian menyebabkan lahirnya paham fiqih konservatif yang menempatkan non-Muslim sebagai warga negara kelas dua, sedangkan warga negara Muslim berada dalam kelas satu. Padahal, dalam dokumen Konstitusi Nabi (Piagam Madinah), semua warga negara termasuk non-Muslim berhak untuk melakukan tugas-tugas kemiliteran dalam upaya pertahanan nasional. Oleh sebab itu, ketidaksetaraan status kewarganegaraan antara Muslim dan non-Muslim dalam bangunan negara *nation-state* tersebut kemudian menjadi bahan kritik Abdullahi Ahmed An-Na'im⁷ yang ahli di bidang hukum Islam/fiqih dan Hak Asasi Manusia.

karya berjudul *al-Muwafaqat*. Syamsuri, "Membangun Maqasid Al-Shari'ah Melalui Al-Usul Al-Khamsah: Studi Kritis Terhadap Konsep Al-Ghazali dan Abd Al Majid Al-Najjar", *Kumpulan Makalah Mata Kuliah Reading Arabic Texts Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 2016*, hlm. 74-76.

⁵ Lalu Supriadi, "Konsep Masalah Mursalah Najm al-Din al-Tufi", *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 8, No. 1, Januari 2012, hlm.72 dan 87.

⁶ Lihat, Syamsuri, "Membangun Maqasid Al-Shari'ah Melalui Al-Usul Al-Khamsah: Studi Kritis Terhadap Konsep Al-Ghazali dan Abd Al Majid Al-Najjar", *Kumpulan Makalah...*, hlm. 74-76.

⁷ Konsepsi *nāsikh-mansūkh* Abdullahi Ahmed An-Na'im yang merujuk kepada Mahmud Muhammad Thaha. Sirāj al-Dīn Abi Khafs 'Umar bin 'Ali bin Ahmad al-Anshāri al-

Bahkan upaya membangun kesetaraan warga negara juga tidak bisa diselesaikan dengan paradigma ijtihad kemaslahatan versi ulama-ulama ushul fiqh konservatif.⁸

Demikian juga paradigma ijtihad kemaslahatan Imam at-Tufi dan Imam asy-Syatibi yang dikenal relatif liberal, tetapi liberalitasnya tidak mampu mendorong lahirnya dinamika hidup beragama dan berbangsa yang harmonis, setara dan berkeadilan, terbukti ruang keharmonisan hidup beragama dan berbangsa di Timur Tengah sangat sulit dijumpai. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan berbagai upaya untuk melakukan pembaruan paradigma ijtihad kemaslahatan dari ulama ushul fiqh pada dekade terakhir ini, salah satunya ditawarkan 'Abd al-Majid al-Najjâr, *Maqâshid al-Syari'ah bi Ab'âd Jadidah*, terbitan Beirut : Dâr al-Gharb al-Islâmi, 2008.

Dengan adanya pendekatan ijtihad kemaslahatan, konsistensi nilai-nilai ajaran Islam yang hendak membawa kemaslahatan hidup bagi seluruh alama semesta/*rahmatan lil alamin* diharapkan dapat terwujud. Pembangunan kehidupan seharusnya tidak hanya berdasarkan kepentingan hidup manusia saja, tetapi juga kelestarian lingkungan hidup harus diperhatikan untuk menjaga kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kita harus meneladani pemikiran, sikap dan tindakan Nabi saw dalam mewujudkan Islam *ramatan lil alamin*. Dengan harapan akan tegaknya keadilan dan terwujudnya “masyarakat yang berkeadaban, mengedepankan dialog sebagai cara mengatasi perbedaan, saling mengerti, mewujudkan solusi”. Ini menunjukkan bahwa ajaran (hukum) Islam adalah ajaran yang sempurna.⁹

Syafi'i, *al-Taudlîh li Syarkh al-Jami'i al-Shahih*, Jili 21, (Beirut: Dâr al-Nûr, 2008), hlm. 37-38; Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Rights and International Law*, (Syracuse: Syracuse University Press, 1990).

⁸ Nugroho, "Islam dan Human Rights dalam Bingkai Toleransi Beragama", dalam *Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* Vol. 15, No. 2, Desember 2015, hlm. 317; Abdullahi Ahmed An-Na'im, "Mahmoud Muhammed Taha and The Crisis In Islamic Law Reform: Implications for Interreligious Relations", *Jurnal of Ecumenical Studies*, 25: 1, Winter 1988.

⁹ *Kita Bangun Islam Yang Tebarkan Perdamaian*, <http://ksp.go.id/kita-bangun-islam-yang-tebarkan-perdamaian/>, diakses 14 September 2017; Luqman Zakariyah, "Harmonising legality with morality in Islamic banking and finance: A quest for Maqâsid al-Shari'ah paradigm", *Intellectual Discourse*, Vol 26, No 1, 2018, hlm. 170; Ribas (Reporter), *Hamim Ilyas: Dakwah Islam untuk Tujuan Mewujudkan Hidup Baik*, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2018/05/26/hamim-ilyas-dakwah-islam-untuk-tujuan-mewujudkan-hidup-baik/>, diakses Juli 2018.

Dalam tataran kehidupan *nation state* di Indonesia, prinsip Islam yang *rahmatan lil alamin* tersebut juga menjadi perhatian pemerintahan, Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, yakni “*Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara... Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya... Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan*”. Kalau kita telusuri arah kebijakan pemerintahan Joko Widodo tersebut, maka hal itu dapat dijumpai dalam Trisakti Bung Karno, yakni *Berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya*.¹⁰

Berbicara kebijakan publik itu pada dasarnya merupakan tindakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam mengatasi hambatan atau untuk memanfaatkan kesempatan pada lingkungan tertentu demi mencapai tujuan tertentu atau merealisasikan suatu sasaran yang hendak dicapai (baca: Carl Friedrich). Definisi yang lainnya dinyatakan bahwa kebijakan publik adalah sebuah daftar pilihan tindakan yang memiliki keterkaitan masing-masing yang dirumuskan oleh instansi atau pejabat pemerintah, misalnya dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian tindakan kriminal, dan pembangunan daerah (baca: W. N. Dunn).¹¹

Sebagai upaya mengatasi permasalahan rakyat Indonesia dan sekaligus menggunakan peluang untuk membangun kesejahteraan umum, kebijakan pemerintahan Joko Widodo (yang berpasangan dengan Wakil Presiden M Jusuf Kalla) saat ini pada dasarnya sesuai dengan prinsip Islam *rahmatan lil alamin* yang hendak memelihara kepentingan hidup umat manusia yang hakiki, yang tidak cukup hanya dengan memenuhi kepentingan manusia semata, tetapi juga perlu memperhatikan unsur lingkungan sekitarnya yang menjadi salah satu aspek yang menentukan

¹⁰ Eko Sulistiyo, *Jokowi & Trisakti: Amanat Konstitusi untuk Menyejahterakan Rakyat*, (Jakarta: Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 2017), hlm. 21 dan 23-24.

¹¹ Sofian Effendi, “Kebijakan Publik: Konsep Konsep”, *Diklat Tehnik dan Manajemen Kebijakan Publik*, Jakarta, 18 November -3 Desember 1998, <http://sofian.staff.ugm.ac.id/kuliah/AKP-Konsep.pdf>, diakses 2 Juli 2018.

keselamatan hidup manusia. Dalam konteks Indonesia, membela tanah air adalah bagian dari menjaga lingkungan/wilayah teritorial, tanpa tanah air, kita tidak akan memiliki eksistensi jati diri dan kebanggaan diri. Oleh sebab itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap cinta pada tanah air kita, Ir Soekarno menyatakan:

Dan saya berkata, Isya Allah subhanahu wa ta'ala, asal kita tetap cinta tana air, asal kita tetap berjalan di atas jalan yang diridai Tuhan sampai akhir zaman, bendera merah putih ini tetap berkibar di angkasa, Saudara-saudara. Kalau kita meninggalkan rel yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kalau kita tidak lagi diridai oleh Tuhan, Saudara-saudara, bendera merah putih pun akan turun dari angkasa. Tidakkah aku selalu berkata, jikalau kita diridai oleh Tuhan, kita pasti akan hancur, kita pasti akan kalah. Perang ini, Saudara-Saudara. Oleh sebab itulah, saya selalu minta kepada seluruh rakyat Indonesia supaya kita tetap berjalan di atas jalan yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.¹²

Fenomena *global warming* (pemanasan global) yang menjadi isu krusial saat ini menjadi perhatian negara-negara di dunia dengan berupaya menjaga eksistensi lingkungan hidup, sebab lingkungan hidup yang tidak baik, akan mengancam eksistensi hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam konteks ini, Islam sebagai agama fitrah mengajarkan segala aspek kehidupan manusia baik secara eksplisit maupun implisit. Agama Islam mengajarkan pentingnya menjaga dan melestarikan kemaslahatan hidup manusia dan lingkungan hidup. Doktrin Islam ini berlaku universal. Universalitas ajaran Islam itu kemudian dirangkai dalam rumusan yang baik oleh ulama-ulama fiqh/ushul fiqh dalam lima kategori.¹³ Dalam perkembangannya, konsepsi tersebut dikembangkan menjadi enam kategori, yaitu memelihara agama (*hifdz al-dîn*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-'aql*), memelihara keturunan atau kehormatan (*hifdz al-nasl/al-'ird*), memelihara harta (*hifdz al-mâl*) dan memelihara lingkungan hidup (*hifdz al-bi'ah*).¹⁴

¹² Soekarno, "Agama Mengatur Hubungan Manusia dengan Tuhan", Amanat pada Kongres Muhammadiyah Bandung, 24 Juli 1965, dalam R Soemarjoto (peny), *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin*, (Jakarta: Putra Sang Fajar, 2015), hlm 349.

¹³ Abû Ishâq al-Syâthibi, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah* Jilid I, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1997).

¹⁴ 'Abd al-Majid al-Najjâr, *Maqâshid al-Syarî'ah bi Ab'âd Jadidah* (Beirut : Dâr al-Gharb al-Islâmi, 2008).

Islam sebagai agama universal dan lengkap juga disampaikan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya, Amanat pada Kongres Muhammadiyah Bandung, 24 Juli 1965 yang berjudul “Agama Mengatur Hubungan Manusia dengan Tuhan”, yakni:

Agama adalah satu hal yang lengkap, absolut, apalagi agama Islam, lengkap Saudara-saudara, selengkap-lengkapnya, mengatur segala hal. Mengatur segala hal hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengatur segala hal hubungan kita manusia dengan manusia. Sampai kepada hal yang kecil-kecil diatur oleh agama. Sampai mengatur keuangan, sampai mengatur urusan ketatanegaraan, sampai mengatur urusan peperangan.¹⁵

Sebagai sebuah teori ijtihad, teori kemaslahatan yang dirumuskan oleh ulama fiqih/ushul fiqih itu menjadi keniscayaan untuk dikembangkan karena paham fiqih konservatif belum bisa menjawab masalah-masalah aktual yang dihadapi umat manusia di era kontemporer ini, misalnya masalah kesetaraan kewarganegaraan, kebebasan beragama, kerukunan umat beragama, dan kerjasama dalam kehidupan sosial, ekonomi, serta kenegaraan. Hal itu merupakan masalah baru yang belum dibahas secara memadai dalam bahasan ijtihad kemaslahatan konservatif. Kondisi inilah yang kemudian mendorong ‘Abd al-Majid al-Najjâr, untuk merumuskan kembali paradigma ijtihad kemaslahatan kontemporer dalam karyanya yang berjudul, *Maqâshid al-Syari’ah bi Ab’âd Jadidah*, yang memberikan penjelasan sebagai berikut: *Pertama*, Memelihara Nilai-Nilai Kehidupan Manusia (*Hifdz al-Qîmah al-Hayâh al-Insâniyyah*). Bagian ini memberikan penjelasan nilai-nilai hidup manusia yang harus dipenuhi berupa nilai keberagamaan, sehingga dalam bahasa al-Najjâr, beragama dinilai sebagai pilihan dasar dan fitrah yang diberikan pada manusia secara bebas, yakni bersumber dari kebebasan berkehendak (*hurriyah al-irâdah*). Dengan adanya kebebasan berkehendak sebagai dasar bagi kebebasan berpikir, maka iman menjadi dasar bagi kebebasan berpikir (*hurriyah al-fikr*). Ini membuktikan bahwa ajaran Islam dalam bidang akidah dan syariat tidak ada kontradiksi dengan paradigma berpikir rasional. Oleh sebab itu, berpikir bebas itu

¹⁵ Soekarno, “Agama Mengatur Hubungan Manusia dengan Tuhan”, Amanat pada Kongres Muhammadiyah Bandung, 24 Juli 1965, dalam R Soemarjoto (peny), *Bung Karno....*, hlm. 349.

merupakan salah satu jalan asasi dalam beragama.¹⁶ Dalam bagian ini, al-Najjâr mengulas masalah pemeliharaan unsur jasad dan ruh yang rasional.¹⁷ Karena itu, al-Najjâr menekankan pentingnya memelihara hal tersebut sebagai nilai-nilai fitriyah dari manusia, yakni memelihara eksistensi raga (unsur materi) dan jiwa (unsur ruh yang rasional), unsur manusia dan unsur agama, sehingga dengan demikian yang dipelihara dalam bagian ini adalah eksistensi fitrah manusia dan agama (baca: *hifdz al-dîn*).¹⁸ Oleh sebab itu, *hurriyah al-'aqidah* (kebebasan berkeyakinan) dijamin oleh agama Islam sebagai realitas fitrah manusia, karena faktanya, manusia tidak hanya beragama Islam, tetapi juga ada yang beragama lain. Kalau melihat pemahaman ini, kita menjadi sangat apresiatif terhadap paradigma kebijakan Presiden RI Ir H Joko Widodo yang menekankan pentingnya mengakui dan menerima eksistensi keberagaman dalam beragama sebagaimana diajarkan oleh para kiai sepuh dan ulama dalam meneladani ajaran Nabi Muhammad saw.¹⁹ Oleh sebab itu, revolusi mental yang tawarkan Joko Widodo itu tepat sekali dimulai sejak dini, mulai dari nilai-nilai akidah hingga perilaku empiris (di dalam hidup kebangsaan) untuk mencapai tata kehidupan yang masalah yang ditandai dengan adanya hidup yang toleran, rukun, adil dan makmur sebagaimana ajaran al-Qur'an. Paradigma berpikir kemaslahatan umat yang berbasis pada al-Qur'an ini juga menjadi arahan kebijakan Presiden RI Pertama, Ir Soekarno yang telah menyatakan:

Al-Qur'an mendatangkan revolusi batin manusia. Al-Qur'an mendatangkan revolusi dalam pandangan manusia terhadap Tuhan. Al-Qur'an mengadakan, mendatangkan revolusi ekonomi, Pak Muljadi tadi menceritakan ayat-ayat yang mengenai ekonomi. Al-Qur'an mendatangkan revolusi yang mengenai hubungan manusia dan manusia, *dus* revolusi sosial. Al-Qur'an mendatangkan revolusi yang

¹⁶ 'Abd al-Majîd al-Najjâr, *Maqâshid al-Syari'ah* ..., hlm. 75.

¹⁷ Pemetaan konsepsi dan pemahaman *Maqâshid al-Syari'ah* 'Abd al-Majîd al-Najjâr juga pernah dirumuskan oleh Syamsuri, tetapi belum mengurai pada aspek empiris kenagaraan dan politik kebijakan empiris. Syamsuri, "Membangun Maqasid Al-Shari'ah Melalui Al-Usul Al-Khamsah: Studi Kritis Terhadap Konsep Al-Ghazali dan Abd Al Majid Al-Najjar", *Kumpulan Makalah* ..., hlm. 82.

¹⁸ 'Abd al-Majîd al-Najjâr, *Maqâshid al-Syari'ah* ..., hlm. 28-61.

¹⁹ Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw 1437 H dan Silaturahmi Bersama Kiai Sepuh*, Gedung Gp Ansor, Jakarta 11 Desember 2016, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=13113&Itemid=26, diakses 3 Juni 2017.

mengadakan perubahan mutlak, membentuk manusia baru. Al-Qur'an mendatangkan revolusi moral, moral yang meliputi seluruh dunia.²⁰

Dalam membangun kemaslahatan hidup beragama dan berbangsa, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi sosial keagamaan yang besar di Indonesia juga memiliki komitmen yang jelas dan kongkrit. Baginya, Islam sebagai agama harus diyakini secara totalitas, walaupun dalam pelaksanaannya, tentunya memerlukan pembaruan agar bisa berkembang sesuai dengan dinamika kemaslahatan hidup beragama dan berbangsa. Salah satu bentuk dinamikanya, lahirnya Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga tidak lepas dari kontribusi para pendiri bangsa dari kalangan Muslim, seperti Ki Bagus Hadikusumo, yang memberikan solusi dari tujuh kata pada Piagam Jakarta menjadi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa demi keutuhan Indonesia. Oleh sebab itu, Muhammadiyah sebagai kekuatan Islam moderat yang besar di Indonesia dituntut untuk menjadi peredam, mediator, fasilitator dan uswah hasanah dalam membangun kemaslahatan hidup beragama, bermasyarakat dan berbangsa. Dalam hal ini, kita setuju dengan pemikiran Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dr H Haedar Nashir, M.Si., yang menyatakan bahwa Muhammadiyah harus menjadi pengikut Nabi Muhammad saw dalam menyebarkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.²¹

²⁰ Dalam tata cara penulisan, yang tertera dalam naskah aslinya "Quran", tetapi dalam penulisan ini diubah menjadi "Al-Qur'an". Soekarno, "Al-Quran Membentuk Manusia Baru", Amanat pada Peringatan Nuzulul Quran, Jakarta, 6 Maret 1961, dalam R Soemarjoto (peny), *Bung Karno...*, hlm. 236-237.

²¹ Tim PresdenRI.go.id-Kantor Staf Kepresidenan RI, *2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: Akselerasi Mewujudkan Indonesia Sentris*, (Jakarta: Tim PresdenRI.go.id-Kantor Staf Kepresidenan RI, 2016), hlm. 458-459; Haedar Nashir, "Memahami Wawasan Kemajemukan Bangsa", dalam *Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan*, Edisi Nomor 17/101, 1-15 September 2016, hlm. 17. Dalam hasil riset Alvira, "Dari total penduduk Indonesia tahun 2016 yang berjumlah 254 juta, dengan estimasi penduduk Indonesia berusia di atas 17 tahun mengaku memiliki kedekatan dengan Nahdlatul Ulama 79,05 juta jiwa. Dan 22.47 juta jiwa mengaku memiliki kedekatan dengan Muhammadiyah. Laporan Utama, "NU Masih Teratas", dalam *Risalah: Mencerahkan dan Menyejukkan*, Edisi 69/X, Februari 2017, hlm. 22.



(Presiden Joko Widodo saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1437 H sekaligus silaturahmi dengan sejumlah Kyai Sepuh yang digelar oleh Gerakan Pemuda (GP) Ansor pada Minggu, 11 Desember 2016, di Kantor Pusat GP Ansor Jakarta)²²

Demikian juga NU sebagai kekuatan Islam moderat yang terbesar di Indonesia diuntut untuk memajukan dan melayani umat serta menghindarkan umat dari paham radikal. Karenanya, kita sependapat dengan paradigma berpikir dan gerakan NU yang konsisten menjaga dan menegakkan *ukhuwah Islamiyah*, *ukhuwah wathaniyah*, *ukhuwah insaniyah* dan *ukhuwah nahdliyah*. Selain tugas keumatan itu, NU juga telah

²² <http://ksp.go.id/implementasikan-keteladanan-rasulullah-dalam-kehidupan/>, diakses 14 September 2017

melakukan penguatan dan perbaikan tata kehidupan sosial, budaya, pendidikan, ekonomi maupun kemakmuran Masjid demi kemajuan bangsa dan keutuhan NKRI. Titik temu antara paham keagamaan dan paham kebangsaan yang diracik oleh Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy'ari hingga berhasil meraih kemerdekaan NKRI tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus dilestarikan dan dikembangkan untuk menjawab tantangan hidup masyarakat dan bangsa Indonesia.²³

Dalam hal ini, kita juga sepakat dengan pemikiran Haedar Nashir yang menyatakan bahwa Muhammadiyah berkomitmen tetap menjaga “rumah Indonesia”. Bangunan kebangsaan Indonesia sebagai rumah bersama yang mulai ada gejala gejala retak harus segera dibenahi. Segala potensi yang akan menyebabkan retak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diantisipasi dan dibendung, sehingga NKRI tetap kokoh. Menurut Haedar Nashir, “Kita hidup dalam keragaman. Kita berbangsa dan bernegara dalam keragaman. Mayoritas harus mengayomi yang minoritas. Demikian juga yang minoritas. Kalau ada gangguan, jangan cepat panas.”²⁴ Pluralitas hidup ini harus disadari bersama sebagai *sunnatullah* yang harus kita jaga dan pelihara sebagai keniscayaan dan sebagai komitmen hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Sebagai penerus kebijakan para pendiri bangsa, Presiden Joko Widodo terus bekerja dan berkhidmat untuk menjaga persatuan NKRI secara hakiki dengan menerjemahkannya secara aktual, yakni Visi “Indonesia Sentris” Joko Widodo. Adanya potensi perpecahan yang timbul dari dalam negeri karena terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan yang dirasakan daerah atas pembangunan dan sumber daya alam dibendung dengan program kebijakan pemerintahannya, yang salah satunya dalam program Nawacita Joko Widodo yang hendak mengatasi permasalahan ketimpangan antar daerah dan sumber daya manusia dengan “*prioritas pemerintahannya adalah*

²³ Laporan Utama, “NU Mengembangkan Tugas Keumatan dan Kenegaraan”, dalam *Risalah: Mencerahkan dan Menyejukkan*, Edisi 69/X, Februari 2017, hlm. 17 dan 19.

²⁴ “Islam Indonesia, Antara Cita dan Fakta”, *Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan*, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/11/15/islam-indonesia-antara-cita-dan-fakta/>, diakses 25 November 2017.

membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah-daerah terluar'.²⁵ Program Nawacita Presiden RI Joko Widodo itu berusaha mengatasi ketimpangan antar daerah dan sumber daya manusia dengan target terwujudnya peradaban bangsa yang maju dan unggul dalam segala bidangnya, sehingga sarana-prasarana yang diperlukan juga terus diusahakan untuk dipenuhi.



(Presiden Joko Widodo melakukan konsolidasi dengan jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta, Selasa, 8 November 2016 yang disambut Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'tij)²⁶

Senada dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo, dalam paradigma gerakan Muhammadiyah, Haedar Nashir menyatakan bahwa peradaban umat dan bangsa yang maju dan unggul harus diupayakan tidak hanya sekadar melalui nama dan formalitas, tetapi harus ada usaha nyata untuk menunjukkan yang terbaik dalam kenyataan, sehingga agama Islam dapat menjadi peradaban utama. Melalui amal usaha yang dikelola, Muhammadiyah telah ikut serta berkontribusi nyata dalam menjadikan umat

²⁵ Eko Sulistiyo, *Jokoway: Cara Memahami Kepemimpinan Jokowi*, (Jakarta: Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 2017), hlm. XIII.

²⁶ <http://ksp.go.id/muhammadiyah-sejukkan-suasana-saat-demo/>, diakses 14 September 2018

dan bangsa ini dapat menjadi *uswatun hasanah*, meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan *skill* umat yang tinggi dan berakhlak mulia.²⁷ Salah satu bentuk amal usaha yang fenomenal dalam mencerdaskan umat dan bangsa, adalah lembaga pendidikan yang maju dan unggul, seperti Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur yang telah mencetak sarjana-sarjana yang profesional dan religius.



41

(Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari hadir di acara Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa (LKMM)²⁸

Kedua, Memelihara Esensi Manusia (*Hifdz al-Zât al-Insâniyyah*). Esensi itu meliputi jasad dan ruh secara totalitas yang memiliki unsur seperti emosi, akal dan lainnya. Dalam bagian ini, memelihara esensi manusia sama dengan menjaga dan melindungi manusia dengan semua unturnya. Perlindungan terhadap esensi manusia mencakup perlindungan terhadap akal sebagai unsur yang memiliki nilai terpenting dari ruh manusia,

²⁷ Haedar Nashir, ¹Islam di Dunia Nyata, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/08/24/islam-di-dunia-nyata/>, diakses 24 November 2017.

²⁸ Hajriyanto Y Thohari: Para Pendiri Bangsa adalah Aktivis Mahasiswa, <http://www.umm.ac.id/id/berita/hajriyanto-y-thohari-para-pendiri-bangsa-adalah-aktivis-mahasiswa.html>, diakses 29 November 2017.

memelihara akal pikiran (*hifdz al-'aql*) dan perlindungan terhadap seluruh bagian manusia yang menyokong kekuatan jasad dan ruh manusia, yakni memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*).²⁹ Dalam memelihara esensi manusia, tidak boleh ada diskriminasi. Semua warga negara harus terlindungi kepentingan dan hak-haknya secara adil, baik golongan atas maupun golongan yang paling lemah. Dalam hal ini, kita juga sepakat dengan pemikiran Soekarno yang mengulas sejarah pergulatan Islam dalam membela kaum lemah sebagai berikut:

Sayyidina Umar menjadi kepala pemerintahan. Pada suatu malam, Sayyidina Umar, seperti kemudian dikerjakan oleh Harun Alrasyid, sebagai kemudian lagi dijalankan oleh orang berkampung untuk melihat kehidupan rakyat. Sayyidina Umar sedang dia berjalan di kampung itu, ia mendengar anak menangis. Dia pelan-pelan cari rumah yang suara anak menangis datang daripadanya. Rumah ini. Dia pergi ke rumah itu, dia mengintip melihat ke dalam. Apa yang dia lihat? Seorang wanita sedang memangku anak kecil. Anak kecil ini menangis. Dan wanita memangku anak kecil ini yang menangis sedang menghadapi pawon (dapur) api. Di atas api itu, ada tempat periuk penggorengan. Dan Sayyidina Umar perhatikan benar, apa yang digoreng itu. Kiranya batu, Saudara-saudara. Batu-batu kecil digorengnya. Dan ini wanita, saya betul-betul terharu, berkata kepada anaknya; kalau zaman sekarang katanya barangkali, 'Nak, sabarlah jangan menangis, ibu sudah menggoreng entah kacang atau nasi atau apa untukmu; tunggu-tunggu, tunggu, sebentar lagi ini makanan selesai. Dimakan oleh Ibu dan engkau'. Sayyidina Umar sesudah dia melihat begitu, dia lari lekas ke istananya.... Dia memikul sendiri karung gandum, Saudara-saudara, dibawa ke rumah itu, diberikan kepada wanita itu, supaya dimakan dengan anaknya seterusnya.³⁰

Dalam perlindungan kepentingan dan hak-hak dasar hidup manusia, kita menilai bahwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki persamaan pandangan dan gerakan dalam menjaga keselamatan esensi manusia baik aspek akal pikiran melalui pendidikan sekolah dan madrasah maupun aspek kejiwaan melalui pendidikan karekater keagamaan. Gerakan

²⁹ 'Abd al-Majid al-Najjar, *Maqāshid al-Syari'ah...*, hlm. 86-89.

³⁰ Soekarno, "Islam, Agama yang Toleran", Amanat pada Hari Raya Idul Fitri di Masjid Baiturrahim, Istana Merdeka, Jakarta, 23 Januari 1966, dalam R Soemarjoto (peny), *Bung Karno...*, hlm 389-390.

dakwah tersebut telah ikut serta berkontribusi dalam mendidik generasi umat dan bangsa yang unggul dan berpaham moderat.³¹

Senada dengan prinsip pemeliharaan akal (*hifdz al-'aql*) al-Najjâr, gerakan Muhammadiyah juga melakukannya dalam tataran aplikatif berupa pembangunan amal usaha lembaga pendidikan yang bertujuan untuk memajukan dan memperbaharui sistem pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan perkembangan tuntutan zaman.³² Amal usaha lembaga pendidikan itu sudah terbukti hingga kini turut serta dalam memberikan sumbangan besar dalam memajukan peradaban pendidikan dan intelektual umat yang religius di Indonesia.

Ketiga, Memelihara Kepentingan Publik (*Hifdz al-Mujtama'*) menjadi bagian esensial dari usaha menjalankan amanah manusia sebagai *khalifatullah fi al-ard*. Oleh sebab itu, umat manusia berkewajiban menjaga dan melestarikan kepentingan publik. Islam tidak hanya memberikan tugas dan tanggung jawab personal (*fard al-'ain*), tetapi juga bersifat kolektif (*fard al-kifâyah*). Salah satu usaha memelihara kepentingan publik adalah *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan) yang berarti bahwa setiap manusia diwajibkan melangsungkan pernikahan sebagai fitrahnya untuk keberlangsungan keturunan di muka bumi. Sebagai anggota dari masyarakat, setiap person yang lahir akan menjadi tiang penyangga keberadaan dan kemajuan masyarakat sebagai kumpulan dari setiap person. Pernikahan sebagai salah satu bagian terkecil dari pembentukan lembaga kemasyarakatan memiliki peran penting karena rumah tangga sebagai bagian terkecil dari komunitas masyarakat sangat menentukan kebaikan dan kemajuan komunitas masyarakat itu. Jika setiap rumah tangga itu terbangun spirit *mawaddah wa rahmah*, cinta kasih, maka juga akan

³¹ Haedar Nashir, "Penguatan Peran Keumatan dan Kebangsaan", dalam *Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan*, Edisi Nomor 4/102, 16-28 Februari, 2017, hlm. 14-15; Abdurrahman Wahid, "Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 546.

³² Haedar Nashir, *Islam di Dunia Nyata*, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/08/24/islam-di-dunia-nyata/>, diakses 24 November 2017.

mengalir spirit cinta kasih dalam tata kehidupan masyarakat. Inilah rahasia perlunya melestarikan prinsip *hifdz al-mujtama'*, yakni membangun tata hubungan antara personal yang baik dan kondusif terutama dalam rumah tangga sebagai entitas masyarakat terkecil yang diharapkan dapat melahirkan tatanan masyarakat luas yang baik dan kondusif.³³

Kondisi masyarakat yang baik dan kondusif itu akan menjadi titik tolak dalam menentukan dan menjalankan kebijakan kepemimpinan yang teratur dan adil berdasarkan prinsip kebebasan dan musyawarah, sehingga dengan demikian, kepentingan kolektif masyarakat menjadi kebutuhan primer (*maqâshid al-dlarûri*) yang perlu dijaga untuk membangun tata kehidupan manusia yang damai, harmonis, gotong royong dan sejahterah. Dalam membangun tata kehidupan masyarakat tersebut, ada banyak relasi yang menentukan dan harus dipelihara, yakni hubungan antar person, hubungan person dengan komunitas masyarakat, hubungan person dengan negara, hubungan person dengan kehidupan rumah tangganya baik dalam tataran relasi spiritual etik maupun relasi legal formal. Keberadaan hal tersebut itulah yang dikenal dengan sebutan "*al-kiyân al-ijtima'*" (eksistensi masyarakat).³⁴ Dalam memelihara kepentingan publik atau bangsa, kita sependapat dengan pemikiran Soekarno yang menyatakan bahwa kita harus senantiasa berbuat kebajikan "*untuk sesama manusia, untuk bangsa, untuk masyarakat, untuk umum, bahkan untuk seluruh persaudaraan manusia di muka bumi ini, itu adalah fardhu kifayah*".³⁵ Dengan meminjam bahasa Yunahar Ilyas,³⁶ kita dapat berpendapat bahwa implementasi perlindungan kepentingan publik (*al-mashlahah al-'ammah*) sebagai bagian esensial syariat Islam akan dapat dilaksanakan dengan optimal jika memiliki kita memiliki komitmen keimanan yang kokoh dan tangguh. Oleh sebab itu, kekuatan

³³ 'Abd al-Majid al-Najjar, *Maqâshid al-Syari'ah ...*, hlm. 31; Syamsuri, "Membangun Maqasid Al-Shari'ah Melalui Al-Usul Al-Khamsah: Studi Kritis Terhadap Konsep Al-Ghazali dan Abd Al Majid Al-Najjar", *Kumpulan Makalah ...*, hlm. 84-85.

³⁴ 'Abd al-Majid al-Najjar, *Maqâshid al-Syari'ah ...*, hlm. 143-144 dan 157-158.

³⁵ Soekarno, "Isra dan Mikraj adalah Mukjizat kepada Nabi Besar Muhammad", Amanat pada Peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad Saw, Jakarta, 16 Januari 1961, dalam R Soemarjoto (peny), *Bung Karno....*, hlm. 229.

³⁶ Salah satu tokoh Muhammadiyah.

iman sangat kita butuhkan untuk membangun kerja dan khidmad secara maksimal untuk umat dan bangsa.³⁷

Dengan menyitir pemikiran Abdurrahman Wahid, kita dapat menyatakan bahwa keselamatan umat menjadi pertimbangan esensial daripada formalisasi syariat Islam. Karena tujuan syariat Islam tidak lain, kecuali hanya untuk mewujudkan keselamatan umat manusia secara umum. Sebagai bangsa religius yang majemuk, keselamatan keyakinan agama (*hifdz al-din*) masing-masing warga menjadi landasan penting dalam menjalin hubungan antar warga atas dasar saling menghargai dan kerjasama untuk mewujudkan kemaslahatan hidup umat manusia.³⁸

Senada dengan Abdurrahman Wahid yang juga tokoh Nahdlatul Ulama, perlindungan kepentingan publik di Indonesia juga menjadi bagian penting dari agenda gerakan Muhammadiyah yang bertujuan menghadirkan peran strategis umat Islam dalam kehidupan kebangsaan, sehingga daya saing dan keunggulan umat Islam dapat ditingkatkan, baik dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, pendidikan maupun budaya.³⁹

Sebagai organisasi sosial keagamaan yang besar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sama-sama berkomitmen untuk menjaga kepentingan publik bangsa dan negara sebagai hal yang final. Indonesia harus tetap berdiri tegak dalam ideologi Pancasila. Walaupun keduanya memiliki anggota mayoritas Muslim di Indonesia, tetapi mereka berdua tidak bercita-cita dan tidak berkehendak untuk menegakkan Negara Islam.⁴⁰ Pemikiran dan gerakan keagamaan Muhammadiyah dan NU tersebut mendapat momentum yang tepat di saat negara kita sedang menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Senada dengan Muhammadiyah dan NU, Joko Widodo mengemukakan bahwa kita sebagai

³⁷ Yunahar Ilyas, "Ihsan dan Akhlak Mulia", dalam *Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan*, Edisi Nomor 4/102, 16-28 Februari, 2017, hlm. 18.

³⁸ Abdurrahman Wahid, "Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam ...*, hlm. 546.

³⁹ Haedar Nashir, "Penguatan Peran Keumatan dan Kebangsaan", dalam *Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan*, Edisi Nomor 4/102, 16-28 Februari, 2017, hlm. 14-15.

⁴⁰ Tim PresdenRI.go.id-Kantor Staf Kepresidenan RI, *2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: Akselerasi Mewujudkan Indonesia Sentris*, (Jakarta: Tim PresdenRI.go.id-Kantor Staf Kepresidenan RI, 2016), hlm. 459.

seorang Muslim harus menghayatinya sebagai bagian dari komunitas umat yang ingin agar kehidupan kita bersama dapat berjalan harmonis, gotong rotong, sejahterah, dan tidak ada gesekan sosial yang menyebabkan ambruknya sebuah jembatan kebangsaan.⁴¹

Sesuai dengan prinsip *maqāshid al-syari'ah*, Presiden Joko Widodo berusaha mewujudkan kemaslahatan umat (baca: *li taqbiḡ mashāliḡ al-'ibād*) dengan bentuk kebijakan yang salah satunya, yakni mengubah orientasi budaya birokrasi dari “pelayan kekuasaan” menjadi “pelayanan publik”. Kebijakan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi perlu kerja keras, sehingga Presiden Joko Widodo harus menjalankan gerakan “revolusi mental” dalam lingkup pemerintahannya, yakni pemerintah berkewajiban melayani kepentingan publik, bukan melayani kepentingan kekuasaan.⁴²

Dalam konteks ini, Eko Sulistiyo menyatakan bahwa pemerintahan yang melayani (kepentingan) publik itulah yang sesuai dengan amanah UUD-NRI tahun 1945, yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.⁴³ Di sini program Nawacita Presiden Joko Widodo tampak, peran negara seharusnya dirasakan kehadirannya dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi kepentingan hidup bangsa, bukan untuk kepentingan kekuasaan. Demikianlah etika hidup berbangsa yang benar dan baik menurut Muhammad Natsir.⁴⁴

Secara historis, pergeseran paradigma (baca: Thomas Kuhn) tersebut juga terjadi dalam bidang ilmu akidah atau keislaman yang digagas Hassan Hanafi dalam karyanya *Min al-'Aqidah ila al-Tsaurah*. Paradigma akidah atau keislaman Hassan Hanafi itu merumuskan tata kerja yang berpusat pada bagaimana pemikiran itu harus ada korelasi dengan praktik dan ada pembaruan terhadap tradisi lama. Karena itu, Hassan Hanafi

⁴¹ Kita Bangun Islam Yang Tebarkan Perdamaian, <http://ksp.go.id/kita-bangun-islam-yang-tebarkan-perdamaian/> diakses 14 September 2017

⁴² Eko Sulistiyo, *Jokoway: Cara Memahami Kepemimpinan Jokowi*, (Jakarta: Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 2017), hlm. XIII.

⁴³ Eko Sulistiyo, *Jokoway...*, hlm. XIII.

⁴⁴ Ris'an Rusli, “The State Concept: The Political Thinking of Mohammad Natsir”, *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 13: (June) Tahun 2018, hlm. 110

mempertanyakan, bagaimana pembahasan ilmu akidah atau keislaman hanya berbicara masalah teori tanpa ada korelasi dengan praktik-empiris? Pertanyaan ini sesungguhnya hendak mengubah orientasi ilmu akidah atau ilmu keislaman yang bersifat melangit kemudian menjadi membumi. Dengan kata lain, agama Islam seharusnya mampu memberikan perhatian terhadap kepentingan empiris kemaslahatan umat, bukan abstrak-tendesius.⁴⁵

Keempat, Memelihara Eksistensi Lingkungan Fisik (*Hifdz al-muhith al-māddī*) adalah tugas dan tanggung jawab setiap manusia. Sebab, kondisi lingkungan fisik sangat menentukan eksistensi keselamatan manusia. Jika kondisi lingkungan fisik tidak baik sebagaimana kasus *global warming* yang sedang terjadi, maka kondisi itu juga akan mengancam eksistensi keselamatan manusia, seperti adanya ancaman banjir dan longsor akibat adanya penebangan liar. Oleh sebab itu, untuk menjaga keselamatan eksistensi manusia, kita wajib merawat dan menjaga eksistensi lingkungan fisik untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan bagi manusia (Q.S. al-Jatsiyah [45]: 13).⁴⁶ Syariat Islam juga datang untuk mengatur hukum-hukum bagi manusia dalam mengelola dan melestarikan eksistensi lingkungan fisik yang menjadi tempat tinggalnya.⁴⁷ Allah swt berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman (Q.S. al-A'raf [7]: 85)

Dari ayat tersebut, kita dapat menjelaskan pentingnya menjaga dan memakmurkan harta benda yang dimanahkan kepada umat manusia, yakni *Pertama*, *hifdz al-māl* dengan cara *memelihara harta benda dengan cara bekerja dan mengembangkannya, memelihara harta dari kerusakan,*

⁴⁵ Hasan Hanafi, *Min al-'Aqidah ila al-Tasurah*, Jilid I, (Maktabah Madbūlah, t.th), hlm. 67.

⁴⁶ 'Abd al-Majid al-Najjār, *Maqāshid al-Syari'ah* ..., hlm. 32; Syamsuri, "Membangun Maqasid Al-Shari'ah Melalui Al-Usul Al-Khamsah: Studi Kritis Terhadap Konsep Al-Ghazali dan Abd Al Majid Al-Najjar", *Kumpulan Makalah Mata Kuliah Reading Arabic Texts Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 2016*, hlm. 83-84.

⁴⁷ 'Abd al-Majid al-Najjār, *Maqāshid al-Syari'ah* ..., hlm. 183-184.

memelihara harta benda dengan melindungi hak kepemilikannya, memelihara harta dengan menjaga nilai harganya, dan memelihara harta dengan mengedarkan secara adil dan merata sebagaimana upaya pemerataan pembangunan yang sedang digalakkan oleh Presiden Joko Widodo. Spirit pemerataan pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat juga telah digariskan oleh al-Qur'an yang menjelaskan: "supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu". (Q.S. al-Hasyr [59]:7).⁴⁸ *Kedua, memelihara lingkungan fisik* yang menjadi tempat tinggal dimana manusia hidup, sehingga eksistensi lingkungan fisik harus menjadi perhatian semua kalangan agar kepentingan dan keselamatan hidup manusia dapat terjaga dan aman dari segala bahaya. Oleh sebab itu, syariat/fiqih Islam melarang tindakan pengrusakan lingkungan karena hal itu akan menimbulkan bencana bagi diri manusia itu sendiri dan juga mengharuskan umat manusia untuk senantiasa berpegang teguh pada hukum-hukum Allah dan tidak boleh kufur dengan aturan-Nya (Q.S. al-Anbiyaa' [21]: 22).⁴⁹

Dalam tataran empiris, kita sependapat dengan program-program Presiden Joko Widodo yang memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur yang sangat diperlukan untuk mendukung kemajuan bangsa, misalnya selama dua tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Propinsi Maluku berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional karena adanya infrastruktur yang mampu mendukungnya, konektivitas yang menghubungkan antara wilayah kepulauan dalam Propinsi atau antara Propinsi lain di Indonesia. Alasan rasional inilah yang dikemukakan Presiden Joko Widodo, "kenapa kita mulai membangun jalan, jembatan, pelabuhan hingga bandara".⁵⁰

⁴⁸ 'Abd al-Majid al-Najjar, *Maqāshid al-Syari'ah* ..., hlm. 185-204.

⁴⁹ 'Abd al-Majid al-Najjar, *Maqāshid al-Syari'ah* ..., hlm. 207-210.

⁵⁰ Berita tanggal 21 Februari 2017, <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 6 Juli 2017



(Foto Dokumentasi: Kementerian PUPR)⁵¹

Perlindungan lingkungan fisik itu tidak cukup hanya yang ada di planet bumi, tetapi juga perlindungan lapisan atmosfer yang menjadi lapisan pelindung bagi seluruh spesies baik biotik maupun abiotik yang berada di lapisan bumi. Oleh sebab itu, “*ruang atmosfer sebagai pelindung bagimu*” juga harus menjadi perhatian umat manusia di muka bumi.⁵² Dalam konteks ini, program-program pembangunan Presiden Joko Widodo pada dasarnya memiliki orientasi tidak hanya jangka pendek, tetapi juga jangka panjang sebagaimana pembangunan infrastruktur yang mana hal itu akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat yang berdampak luas dan jangka panjang. Di samping itu, Presiden Joko Widodo memiliki perhatian terhadap sejauh mana setiap kegiatan yang kita lakukan, tidak terpaku pada usaha dan prosesnya, tetapi

⁵¹ Berita tanggal 21 Februari 2017, <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 6 Juli 2017

⁵² Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 50.

harus memperhatikan hasil atau dampaknya,⁵³ misalnya dalam hal *memelihara lingkungan fisik* dilakukan salah satunya dengan *Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar*. Program gerakan nasional itu tidak boleh hanya terpaku pada seberapa banyak dilaksanakan seminar atau sosialisasi yang dihadiri oleh sekian ribu orang, tetapi yang menjadi target adalah bagaimana *impact*-nya, dampaknya dalam memelihara tumbuhan dan satwa Liar, yakni berapa jenis tumbuhan yang bertambah, berapa satwa liar yang diselamatkan, berapa kadar polusi yang berkurang. Yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo tersebut adalah hasilnya “*konkret, nyata, jelas, dan tertulis regulasinya. Hasil-hasil yang benar, hasil-hasil yang ada manfaatnya itu yang saya ingin lihat, yang rakyat ingin lihat*”.⁵⁴ Program pembangunan nasional itulah yang hendak dibedah dalam kerangka konsep *maqâshid al-syari’ah*, yakni *li tadbîq mashâlih al-’ibâd* (merealisasikan kemaslahatan hidup manusia) secara hakiki dan memiliki jangkauan luas bagi kehidupan bangsa dalam wadah NKRI.

B. Signifikansi Kajian Buku

Kajian ini menjadi penting karena program-program pembangunan Joko Widodo tergolong fenomenal dan mampu menembus kebuntuan dalam pembangunan nasional yang selama ini belum merata dan adil, sehingga banyak ilmuwan, peneliti maupun praktisi yang melakukan penelitian terhadap pemikiran dan kebijakan Joko Widodo baik sebelum maupun sesudah menjadi Presiden RI. Adapun sederat kajian yang membedah pemikiran dan program pembangunan Joko Widodo di antaranya: *Pertama*, Eko Sulistiyo, *Jokoway: Cara Memahami Kepemimpinan Jokowi*, Jakarta: Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 2017, yang mengungkapkan gaya kepemimpinan Joko Widodo dalam menjalankan amanah sebagai Presiden

⁵³ Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Penganangan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar Kepulauan Seribu*, Jakarta, 14 April 2016, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11385&Itemid=26 4 juni 2016.

⁵⁴ Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Penganangan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar Kepulauan Seribu*, Jakarta, 14 April 2016, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11385&Itemid=26 4 juni 2016.

RI yang khas, milsanya dalam merajut dan mempertahankan persatuan NKRI bukan dengan slogan dan pendekatan militeristik teritorial, tetapi dengan memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan yang hakiki. *Kedua*, Tim PresdenRI.go.id-Kantor Staf Kepresidenan RI, *2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: Akselerasi Mewujudkan Indonesia Sentris*, Jakarta: Tim PresdenRI.go.id-Kantor Staf Kepresidenan RI, 2016 yang membedah berbagai capaian kerja selama dua tahun. *Ketiga*, Eko Sulistiyo, *Jokowi & Trisakti: Amanat Konstitusi untuk Menyejahterakan Rakyat*, Jakarta: Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 2017 yang menjelaskan arah kebijakan Presiden Joko Widodo yang pada prinsipnya berlandaskan prinsip Trisakti. *Keempat*, Alberthiene Endah, *Jokowi: Memimpin Kota, Menyentuh Jakarta*, Cetakan Ketiga, Solo: Tiga Serangkai, 2014 yang mendeskripsikan gaya kepemimpinan Joko Widodo selama menjadi Walikota Surakarta yang juga mengantarkan menjadi Gubernur DKI Jakarta. *Kelima*, Domu D Ambarita dkk, *Jokowi: Spirit Bantaran Kali Anyar*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014 yang menggambarkan kisah hidup Joko Widodo yang terbatas tidak membatasi untuk berprestasi dalam kerja dan berkhidmad untuk agama dan masyarakat serta dorongan doa orang tuanya untuk kesuksesan Joko Widodo. *Keenam*, Moh Dahlan, *Membumikan Islam dalam Kerangka Kebijakan: Membaca Pemikiran dan Kebijakan Joko Widodo dalam Nalar Fikih Ke-NU-an*, terbitan Kaukaba Press, Yogyakarta, 2016 yang menjelaskan tema-tema fikih untuk memberikan kerangka fikih keislaman ala NU terhadap pemikiran dan kebijakan Joko Widodo, sehingga tidak spesifik berbicara dari paradigma *maqâshid al-syarî'ah*.

Adapun dari sisi materi kajian pemerintahan juga memiliki signifikansi karena apa yang dilakukan Joko Widodo saat ini telah berusaha menjawab kegelisahan berbagai kalangan ilmuwan, praktisi, dan peneliti yang termuat dalam buku terbitan Kompas tahun 2007 yang berjudul *Membongkar Budaya: Visi Indonesia 2030 dan Tantangan Menuju Raksasa Dunia*. Salah satu artikel yang menarik yang perlu dijelaskan di sini adalah kegelisahan Susie Berindra, yang berjudul “Jeritan dari Sabang dan Merauke”, yang menjelaskan bahwa era otonomi daerah masih belum memberikan jawaban terhadap masalah kesenjangan antara pembangunan Jawa dan luar Jawa,

misalnya daerah Sabang dan Merauke masih berkuat dengan masalah pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, Suku Asmat dan juga masyarakat di Puncak Jaya masih belum mendapat perhatian yang sepatasnya. Demikian juga masih adanya kesenjangan antara pusat dan daerah.⁵⁵ Demikian juga Simon Saragih yang menulis artikel berjudul "Tindakan-Tindakan Kita Masih Tetap Artifisial" menggambarkan bahwa Indonesia pada dasarnya masuk dalam radar pantauan futurolog sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2020, bahkan Badan Intelijen AS, CIAI, memasukkan negara Indonesia ke dalam daftar sebagai kekuatan ekonomi dunia di masa depan yang dipublikasikan pada tahun 2005. Negara Indonesia akan menjadi *global power* walaupun pengaruhnya dalam percaturan geopolitik tidak besar. Indikator yang bisa dijelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak penduduk muda, dan sumber daya alam yang melimpah yang kedua-duanya akan menjadi pondasi kekuatan ekonomi.⁵⁶

Asumsi itu relatif lengkap, tetapi jika asumsi itu tidak dipenuhi, maka dapat melahirkan potensi perpecahan wilayah Indonesia. Di samping itu, adanya ancaman dari kelompok fundamentalis, ekstrimis kanan yang sewaktu-waktu bisa melakukan tindakan makar dan radikal. Demikian juga yang berbahaya adalah tidak memadainya kapasitas pemerintah dalam melayani kebutuhan rakyat, juga akan memunculkan kekacauan sosial politik. Oleh sebab itu, kita perlu memenuhi asumsi-asumsi yang dibutuhkan, antara lain integrasi dengan ekonomi dunia, peningkatan kapasitas pemerintahan, perbaikan sistem layanan publik, perbaikan prasarana untuk mendorong tumbuhnya iklim investasi. Itulah yang diulis Fred Kaplan dari *National Intelligence Council* dalam *Mapping the Global Future: Report of the National Intelligence Council's 2020 Project*.⁵⁷

⁵⁵ Susie Berindra, "Jeritan dari Sabang dan Merauke", dalam Chris Verdiansyah (ed), *Membongkar Budaya: Visi Indonesia 2030 dan Tantangan Menuju Raksasa Dunia*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 208

⁵⁶ Simon Saragih, "Tindakan-Tindakan Kita Masih Tetap Artifisial", dalam Chris Verdiansyah (ed), *Membongkar Budaya...*, hlm. 68.

⁵⁷ Simon Saragih, "Tindakan-Tindakan Kita Masih Tetap Artifisial", dalam Chris Verdiansyah (ed), *Membongkar Budaya...*, hlm. 68-69.

Dari hasil kajian tersebut, Simon Saragih kemudian menyimpulkan bahwa persoalan Indonesia bukanlah tidak ada pemikir-pemikir dan peneliti andal dan juga tidak kekurangan contoh-contoh negara lain yang memiliki program ke depan, yang bisa kita tiru. Semuanya terhambat pada tataran implementasi, karena sistem yang ada tidak kondusif untuk mendukung dan melancarkan semua program yang direncanakan.⁵⁸ Karena itu, *power distance*⁵⁹ yang digerakkan Presiden Joko Widodo telah mulai menampakkan hasil terutama selama tiga tahun terakhir pada program pembangunan pemerintahannya. Selogan *kerja, kerja, kerja*, atau *kerja bersama* memiliki relevansi yang sangat tepat untuk menjawab masalah riil yang dihadapi bangsa Indonesia.

C. Rumusan Masalah dan Metode Kajian

Dari deskripsi tersebut, kita dapat merumuskan kajian buku ini sebagai berikut: apa landasan program-program pembangunan Presiden Joko Widodo? bagaimana program-program pembangunan Presiden Joko Widodo dilaksanakan dan relevansinya dengan paradigma *maqâshid al-syarî'ah*? Adapun tujuan kajian buku ini adalah untuk menjelaskan landasan program-program pembangunan Presiden Joko Widodo dan pelaksanaan program-program pembangunan Presiden Joko Widodo serta relevansinya dengan paradigma *maqâshid al-syarî'ah*.

Adapun pendekatan kajian ini adalah pembangunan yang bermakna garis perjuangan yang diyakini mampu mengantarkan masyarakat atau bangsa menuju kehidupan yang dicita-citakan. Adapun pilar penyangga pembangunan yang menjadi karakteristik Islam, yakni pembangunan yang merupakan usaha optimalisasi daya dukung lingkungan untuk keadilan dan

⁵⁸ Simon Saragih, *Tindakan-Tindakan Kita Masih Tetap Artifisia*”, dalam Chris Verdiansyah (ed), *Membongkar Budaya...*, hlm. 70-71.

⁵⁹ Mengapa pemimpin memiliki peran penting dalam melakukan perubahan di Indonesia? Ahli sosial dari Belanda, Geertz Hofstede, menganalisis sisi budaya di banyak negara. Salah satu aspek budaya yang ditemukan adalah yang disebut *Power Distance*. Ini merupakan julukan bagi fenomena masyarakat umumnya di Asia, dimana senioritas, pemimpin, dan penguasa adalah pihak yang harus dihormati dan dituruti. Karakter seperti ini memudahkan pemerintah atau elite menggerakkan massa. Simon Saragih, *Tindakan-Tindakan Kita Masih Tetap Artifisia*”, dalam Chris Verdiansyah (ed), *Membongkar Budaya...*, hlm. 71-72.

kesejahteraan hidup manusia dan manusia sebagai makhluk pembangunan, sehingga hakikat pembangunan adalah hoslistik-integralistik. Demikian juga pembangunan bisa berhubungan dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam.⁶⁰ Adapun kerangka teori ini adalah paradigma *maqâshid al-syariah* 'Abd al-Majîd al-Najjâr, dalam karyanya *Maqâshid al-Syari'ah bi Ab'âd Jadîdah*, terbitan Beirut, Dâr al-Gharb al-Islâmî, 2008 yang dilengkapi dengan analisis pemikiran keislaman KH M Hasyim Asy'arie, dalam karyanya *Irsyâd al-Sârî fi Jam'i Mushannifât al-Syaikh Hâsyim Asy'arî*, editor M Ishom Hadziq, terbitan Maktabah al-Masruriyah, Jombang, serta pemikiran keislaman Muhammadiyah. Sementara itu, teknik penulisan karya ilmiah buku ini menggunakan teknis analisis deduktif yang berarti berusaha mengungkapkan teori-teori umum dalam meneliti dan mengkaji pemikiran dan kebijakan empiris Joko Widodo, sedangkan teknis analisis induktif adalah untuk meneliti berbagai pemikiran dan kebijakan empiris Joko Widodo dalam sinaran kerangka teori umum dari *Maqâshid al-Syari'ah*. Dari dua analisis tersebut, kita kemudian menggunakan analisis sintesis untuk mengeksplorasi pemikiran dan kebijakan Joko Widodo dalam pembangunan nasional.

⁶⁰ Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan...*, hlm. 66-69.

BAB II **NILAI-NILAI KEISLAMAN DAN** **MAQÂSHID AL-SYARĪAH PEMBANGUNAN JOKO WIDODO**

Kata “Islam” diambil dari kata “salam” yang berarti damai. Nabi Muhammad saw juga diutus untuk membawa misi perdamaian (*message of peace*). Allah swt berfirman: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ yang artinya: *Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam* (Q.S. al-Anbiya’ [21]: 107).⁶¹ Ahm Ershad Uddin, dalam karyanya berjudul “The Fanatical ISIS through the Lens of Islamic Law”, *International Journal of Islamic Thought*, menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw diutus untuk membawa misi perdamaian di dunia (*message for the peace of the world*), sehingga umatnya diharapkan mampu mengikuti jalan hidup ideal Nabi saw itu di dunia. Nabi saw juga bersabda bahwa Ia diutus untuk mendidik umatnya dalam jalan keberlangsungan hidup yang ideal. Oleh sebab itu, Islam mengajak umat manusia pada jalan Allah swt dengan bijaksana (*wisdom*) dan *maw’idlah hasanah* (*debate with a best way*). Allah berfirman: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ yang artinya: *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.* (Q.S. an-Nahl [16]: 125). Dengan misi perdamaian itu, perspektif Islam kontemporer dalam memahami jihad dengan tujuan utama (*the main objective of jihad*), yakni menegakkan prinsip perdamaian, kesetaraan dan kebebasan (*the principle of peace, equality, and freedom*) serta kesejahteraan baik lahir maupun batin.⁶²

1. Nilai-Nilai Keislaman Pribadi Joko Widodo

Sebagai Pendiri dan Rais Akbar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Muhammad Hasyim Asy’arie berkepentingan dan mendorong

⁶¹ Terjemahan ini merujuk pada Terjemahan Digital al-Qur’an Departemen Agama RI.

⁶² Ahm Ershad Uddin, “The Fanatical ISIS through the Lens of Islamic Law”, *International Journal of Islamic Thought* ISSN 2232-1314 Vol. 12: (dec.) 2017, <https://doi.org/10.24035/ijit.12.2017.001>, hlm. 8.

santri-santri di pesantren⁶³ yang menjadi basis warga NU untuk mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad saw. Santri-santri atau para murid yang belajar ilmu-ilmu agama Islam baik di madrasah, sekolah ataupun pesantren diharuskan mengamalkan akhlak mulia dengan mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad saw, yakni: *Pertama*, sifat pemberani (*al-syajā'ah*), yang mana ia adalah pribadi manusia yang paling berani dan tidak takut mati dalam menegakkan syi'ar-syi'ar Islam dan kebenaran serta berada di garda depan dalam jihad. *Kedua*, sifat *tawādlu'* dalam diri Nabi Muhammad saw, yang mana ia adalah pribadi manusia yang paling *tawādlu'*, menghormati manusia, tidak melihat dirinya lebih utama dari lainnya, menyampaikan salam lebih dahulu pada manusia, memperhatikan keadaan manusia, berbicara dengan santun, dan menyapa manusia dengan seyum dan wajah ceria. *Ketiga*, zuhud dan taqwa yang mana Nabi adalah paling zuhud dan taqwanya manusia, dimana ia memenuhi kebutuhan yang dasarnya saja dalam makan, minum dan pakaian, gaya hidup Nabi sangat sederhana, tidak makan makanan mewah, tidak memakai baju mewah, tidak tidur di dipan yang mewah, hadir tidak untuk mengumpulkan harta dan tidak minta dihormati serta tidak mencari kenikmatan perhiasan dunia, tetapi ia hadir untuk membawa petunjuk jalan yang baik dan menunjukkan pada umat manusia agar keluar dari jalan yang gelap menuju jalan yang benar. Adapun

⁶³ Pesantren adalah sebuah kehidupan yang unik yang berbeda dari kehidupan sekitarnya. Dalam dunia pesantren ada unsur-unsur khas yang dapat dipahami sebagai berikut: *Pertama*, kompleks pesantren itu terdiri atas beberapa bangunan yaitu: rumah kediaman pengasuh (kiai), sebuah surau atau mesjid, tempat pengajaran diberikan, dan asrama tempat tinggal para siswa pesantren/santri. *Kedua*, akar kata pondok pesantren. Menurut Ziemek, kata pondok kemungkinan besar dari kata funduq yang berarti ruang tidur, wisma atau hotel sederhana, sehingga kata pondok dipakai untuk menekankan kesederhanaan bangunan. Adapun kata pesantren berarti tempat para santri. Sementara itu, kata santri terkadang dihubungkan dengan akar kata sant (manusia baik) dihubungkan dengan suku kata tra (suka menolong), sehingga kata pesantren dapat pula berarti tempat pendidikan manusia baik-baik. *Ketiga*, ciri dan fungsi pendidikan pesantren, yakni (a) mendidik santri menjadi orang alim dan memiliki sikap hormat, takzim dan kepatuhan kepada kiai; (b) pesantren tradisional dikenal metode pembelajaran yang sangat khas yaitu sorogan, sehingga kiai dapat mengenal santrinya secara langsung dan intensif karena santri harus berhadapan langsung satu per satu dengan kiai; (c) Santri juga dididik tidak hanya mempelajari ilmu Islam, tetapi dibimbing oleh kiai/ustadz untuk bisa mengamalkan ilmu yang diperoleh; dan (d) santri perlu membiasakan diri memiliki sikap dan akhlak yang mulia, berani, hati-hati, qana'a dan hormat kepada siapa pun terutama kepada kiai/ustadz. Loubna Zakiah & Faturochman, "Kepercayaan Santri Pada Kiai", *Buletin Psikologi*, ISSN : 0854 - 7108, Tahun XII, No. 1, Juni 2004 , hlm. 38-39 dan Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. (Jakarta:LP3ES, 1994).

sifat taqwa Nabi saw adalah yang paling tinggi, yang mana ia banyak berdzikir/ibadah, dan banyak berpikir, sehingga ibadahnya terus-menerus baik siang maupun malam. *Keempat*, sifat *hilm* dan *ihsân* dalam diri Nabi saw, dimana ia adalah orang yang paling halim, tidak membalas keburukan dengan keburukan, sehingga ia memberikan maaf pada musuh-musuhnya terutama bagi yang tidak tahu, sedangkan sifat *ihsân* Nabi saw adalah sifat yang mana ia senang berbuat baik pada sesamanya terutama pada kaum du'afa', fakir dan anak yatim. Jika Nabi saw memiliki harta, tidak digunakan untuk kepentingan kesenangan pribadi dan hal-hal yang tidak berguna, tetapi digunakan untuk membantu orang-orang yang memerlukannya. Adapun distribusi harta Nabi saw paling banyak di jalan Allah adalah untuk mencari ridla-Nya, melindungi agama, berdakwah, memelihara kaum du'afa', fakir dan membebaskan buda'. *Kelima*, sifat *al-shidq* dan *al-wafâ'* dalam diri Nabi saw, dimana ia adalah orang jujur dalam segala perkataan, perbuatan dan amanah dalam menjaga hak-hak, bahkan dua sifat ini adalah sifat yang wajib bagi semua rasul Allah, sehingga Nabi saw menegaskan pada umatnya untuk mengamalkan dua sifat itu. *Keenam*, sifat *al-ittihâd* dan *al-shuhbah* dalam diri Nabi saw, dimana ia sejak masa kecil mengasihani kawan-kawannya sebagaimana ia mengasihani dirinya, menjaga hak-hak manusia dan memperlakukan manusia dengan perlakuan yang terbaik, dan menunjukkan pada jalan yang baik dan mencegahnya jatuh dalam perbuatan yang tidak baik seperti *ghibah* (membicarakan keburukan orang lain) dan *namimah* (mengadu domba). Nabi saw menyukai persaudaraan dan persatuan, dan tidak suka dengan perpecahan dan permusuhan. *Ketujuh*, sifat Nabi saw adalah *hubb al-'amal* dan *karâhiyah al-tasyadduq*, dimana ia memiliki pribadi yang tidak suka menunda-nunda pekerjaan, tetapi ia melakukan segala kewajiban dan pekerjaannya pada saat itu juga, sedangkan *karâhiyah al-tasyaduq* adalah sifat dimana Nabi saw tidak suka dengan orang yang banyak bicara karena orang yang banyak bicara akan banyak salahnya dan sedikit ilmunya, bahkan Nabi saw memerintahkan banyak berpikir. Oleh

sebab itu, Nabi saw menjadikan diam sebagai tandanya iman dan akhlak mulia.⁶⁴

Zamakhshari Dhofer dalam karyanya berjudul “Tradisi Pesanten: Studi tentang Pandangan Kiyai”, mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan pesantren bukan hanya sekadar memperkaya pikiran murid dengan penjelasan-penelasan atau ilmu saja, tetapi yang lebih penting adalah untuk meninggikan moral, melatih dan mempertinggi semangat kemandirian, kebersamaan, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, dan menyiapkan murid/peserta didik menjadi orang yang sederhana dan bersih hati, serta mengajarkan kejujuran dan akhlakul karimah. Oleh sebab itu, tujuan pendidikan pesantren bukanlah untuk mengejar kepentingan kekuasaan dan materi-duniawi, tetapi menunaikan kewajiban dan pengabdian pada Allah swt.⁶⁵

Nilai-nilai dan sifat-sifat itulah yang tertanam dan berkembang dalam jati diri Joko Widodo sebagai seorang Muslim sejati dalam hal ini dapat digambarkan di antaranya: *Pertama*, sifat *tawâdhu'* Joko Widodo tersebut digambarkan oleh Eko Sulistiyo, bahwa Joko Widodo dengan kerendahan hatinya, menawarkan gaya kepemimpinan yang lebih sesuai dengan karakter bangsa kita dan yang diajarkan agama.⁶⁶ *Kedua*, sifat pemberani (*al-syajâ'ah*) dalam diri Joko Widodo ditampilkan dengan gaya kepemimpinan yang *out of the box* dengan wajah *ndeso* yang muncul dari lingkaran sosial rakyat kebanyakan. Karena itu gaya kepemimpinan yang sering *blusukan* bertemu rakyat biasa merupakan *chemistry* yang ada dalam jati diri politiknya.⁶⁷ *Ketiga*, sifat zuhud ini dapat dilihat dari kebijakan Joko Widodo dalam membangun sistem birokrasi yang melayani, transparan, efisien dan bebas dari korupsi. *Keempat*, sifat *hilm* dan *ihsân* dalam diri Joko Widodo tampak dalam sikapnya terhadap semua elit politik, tokoh dan elemen warga baik yang mendukung pada saat pilpres maupun yang berseberangan. Semuanya

⁶⁴ KH Muhammad Hasyim Asy'arie, “Irsyâd al-Mu'mîn ila sairah Sayyid al-Mursalin wa Man Tabi'ahu min al-Shahabah wa al-Tabi'in”, *Irsyâd al-Sâri fî Jam'i Mushannifât al-Syaiikh Hâsyim Asy'ari*, (Jombang: Maktabah al-Masruriyah, t.th), hlm.12-21.

⁶⁵ Zamakhshari Dhofer, *Tradisi Pesanten: Studi tentang Pandangan Kiyai*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 21.

⁶⁶ Eko Sulistiyo, *Jokoway....*, hlm. 17.

⁶⁷ Eko Sulistiyo, *Jokoway....*, hlm. 6.

dirangkul oleh Joko Widodo untuk membangun bersama-sama NKRI. *Kelima*, sifat *al-shidq* dan *al-wafâ'* dalam diri Joko Widodo ditampilkan dengan berusaha menjalankan amanah konstitusi yang hal itu sudah dimulai sejak di Surakarta, yakni memenuhi amanah yang diberikan rakyat dengan menerapkan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) dan Bantuan Pendidikan Masyarakat Surakarta (BKMKS). Ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo kemudian menginisiasi Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dalam usaha memenuhi kebutuhan pokok warga masyarakat Jakarta baik bidang pendidikan maupun kesehatan. Program itu kemudian dilanjutkan ketika beliau menjabat Presiden RI saat ini dengan membuat kebijakan program **Kartu Indonesia Pintar (KIP)**, dan **Kartu Indonesia Sehat (KIS)**. Dengan dua program tersebut, pemerintah telah hadir dan memenuhi amanah konstitusi dalam bidang pendidikan dan kesehatan.⁶⁸ *Keenam*, sifat *al-ittihâd* dan *al-shuhbah* dalam diri Joko Widodo tampil dalam bentuk kedekatannya dengan rakyat. Joko Widodo selalu *blusukan* untuk mendekati diri dengan rakyat dan untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Itulah sebabnya, Joko Widodo menyatakan bahwa “demokrasi adalah mendengar suara rakyat”.⁶⁹ *Ketujuh*, sifat *hubb al-‘amal* dalam diri Joko Widodo yang mana suka bekerja dan mencapai target kerja. Sifat ini tercermin dari arah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berusaha *menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara* yang berarti bahwa bagaimana pemerintah bekerja untuk kepentingan pelayanan publik dan kemaslahatan publik, tidak hanya sekadar teori saja tanpa penerapan.⁷⁰

Selanjutnya, dalam tradisi pesantren atau pendidikan keagamaan Islam, para murid diajari ilmu-ilmu agama dan duniawi, santri juga digembleng dengan pendalaman, pengamalan ilmu dan tanggung jawab atas ilmu yang diperolehnya. Selain itu, proses rasional pendidikan dan pembelajaran yang dijalani para santri/pelajar Muslim, pesantren juga

⁶⁸ Eko Sulistiyo, *Jokoway...*, hlm. XII-XXIII.

⁶⁹ Eko Sulistiyo, *Jokoway...*, hlm. 6.

⁷⁰ Eko Sulistiyo, *Jokowi & Trisakti: Amanat Konstitusi untuk Menyejahterakan Rakyat*, (Jakarta: Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 2017), hlm. 2.

mengajarkan proses *taqarrub ila Allah* (mendekatkan diri kepada Allah swt) melalui doa, dzikir dan ibadah ritual. Proses belajar mengajar yang diterapkan di pesantren mengedepankan nilai-nilai dan tata kehidupan yang sederhana, mandiri, gotong royong, dan tulus-ikhlas.⁷¹



(Di sela-sela kunjungannya ke Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk shalat Tarawih berjamaah di Pondok Pesantren Attauhidyyah di Dukuh Giren, Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Kamis 16 Juni 2016)⁷²

²⁰ Dalam tradisi pesantren, doa, dzikir dan ibadah ritual memiliki peran penting dalam menggapai cita-cita luhur dan dakwah untuk pemberdayaan umat baik bidang agama maupun bidang kehidupan umumnya. Tradisi tersebut juga berjalan di Pesantren Nurul Huda Panarukan Situbondo Jawa Timur di bawah asuhan Dr KH Mursyid Romli, M.Pd.I. (almarhum), dan Pesantren Nurul Jadid Probolinggo Jawa Timur di bawah asuhan KH Moh Zuhri Zaini. Tradisi yang mendorong agar orang tua selalu mendoakan anaknya yang sedang menuntut ilmu di Pesantren menjadi bagian hal yang lumrah dan niscaya, lebih-lebih *masyayikh* atau para kiai, hampir setiap malam *istiqamah* mendoakan para santrinya agar ilmu yang diperoleh

⁷¹ Ahmad Muhakamurrohman, "Pesantren: Santri, Kiai, dan Tradisi", dalam *Ibda': Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 12, No. 2, Juli - Desember 2014, hlm.111.

⁷² <http://ksp.go.id/cinta-tanah-air-bagian-dari-iman/>, diakses 14 September 2017.

bermanfaat dan barakah. Demikian juga santri memiliki tradisi rutinitas ibadah, ngaji, belajar, dan mengabdikan ilmunya untuk kemaslahatan hidup sesama. Adapun sifat santri yang dijalankan adalah tradisi tawadu', ikhlas, tulus, dan sederhana yang bernafaskan al-Qur'an dan Sunnah.⁷³ Sifat itulah yang menjadi prinsip hidup dan kebijakan Joko Widodo yang selalu mendorong umat Islam untuk berpikir dan bertindak bernafaskan al-Qur'an:

Umat Islam sudah -dan perlu terus- menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang cinta damai, agama yang menjauhi fitnah, agama yang menjauhi kekerasan, dan agama yang *rahmatan lil alamin*. Semangat untuk membaca, mendalami, menghayati, dan mengamalkan isi serta ajaran Al-Qur'an harus menjadi bagian dari nafas kehidupan sehari-hari setiap umat muslim. Yang paling penting dari semua adalah mengamalkan ajaran Al-Qur'an di luar kompetisi musabaqah ini.⁷⁴

⁷³ Hasil Catatan pribadi selama di Pesantren Nurul Huda Panarukan Situbondo dan Pesantren Nurul Jadid di Probolinggo.

⁷⁴ Pidato ini disampaikan dalam silaturahmi dengan para peserta Musabaqah Hafalan Alquran dan Hadis Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Alu Su'ud Tingkat ASEAN dan Pasifik ke-8 Tahun 2017. Musabaqah ini berlangsung selama dua hari, tanggal 2-3 Mei 2017, di Masjid Istiqlal, Jakarta. <https://www.facebook.com/Jokowi/> diakses 26 Mei 2017.



(Dokumentasi Foto: Biro Pers Setpres)⁷⁵

Demikian juga keridlaan dan doa orang tua bagi para murid menjadi salah satu bagian yang penting dalam meneguhkan semangat jihad/*rûh al-jihâd* dalam mencari ilmu yang barakah dan bermanfaat. Dalam hal yang sama, Ibu Sujiatmi Notomiharjo, Ibunda Joko Widodo, adalah salah satu orang tua yang memiliki perhatian, doa, dan spiritualitas yang kokoh untuk selalu mendoakan anak keturunannya menjadi orang yang berguna bagi agama dan bangsa.

Sujiatmi Notomiharjo, Ibunda Joko Widodo, rajin bangun tengah malam untuk menunaikan shalat tahajud. Dalam doanya, ibu empat anak itu sering membawakan nama putra tunggalnya agar berhasil menuju cita-cita. “Doa itu rahasia. Tapi saya memang tahajud tiap malam. Ketika saya tidur, biarpun sudah larut malam, jam dua atau jam tiga pasti saya selalu bangun, lalu tahajud. Sejak dulu sudah

⁷⁵ <https://www.facebook.com/Jokowi/> diakses 26 Mei 2017.

begitu”, kata Sujiatmi di kediamannya, di Jalan Pleret Raya RT 01 RW 17, Solo, Jawa Tengah (18/8/2012).⁷⁶

Pada tahun 2000, Sujiatmi bersama suaminya, Notomiharjo, pergi ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Sang suami meninggal pada tahun yang sama. Saat itu, mereka naik haji bersama Jokowi beserta Iriana, istrinya. Adapun ketiga putrinya beserta menantu pergi belakangan. Dengan kekuatan doa dan kesalehan yang dia miliki, Sujiatmi mendidik anak-anaknya, termasuk Jokowi, dalam iman Islam yang moderat dan toleran. “Dulu Jokowi itu penurut, tidak perlu dijewer dalam belajar. Ia... rajin shalat dan lancar ngaji”.⁷⁷

Selanjutnya, dalam tradisi pendidikan Islam, Hasyim Asy’arie memberikan beberapa uraian yang harus dimiliki murid:⁷⁸ *Pertama*, seorang murid harus membersihkan hatinya (*ayyuthahhira qalbahu*) dari sifat buruk, akidah dan akhlaknya harus baik agar bisa memahami dan mendalami ilmunya secara mendalam.⁷⁹ Dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa Nabi Muhammad saw memiliki akhlak yang agung, sehingga umat Islam seharusnya mengikuti suri tauladan Nabi. Karena itu, tujuan diutusnya Nabi saw adalah untuk menyempurnakan akhlak (*innama bu’itstu li utammima makârima al-akhlâk/* aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia (H.R. Malik). Akhlak mulia menjadi tuntutan bagi umat manusia dalam segala aktivitasnya untuk mencapai kesuksesan dan kesejahteraan hidupnya.⁸⁰

وَأَنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Artinya: Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
(Q.S. al-Qalam [68]: 4)

⁷⁶ Domu D Ambarita dkk, *Jokowi: Spirit Bantaran Kali Anyar*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 2.

⁷⁷ Domu D Ambarita dkk, *Jokowi...*, hlm. 17. Menurut KH Hasyim Asy’arie, salah satu ciri santri adalah belajar ilmu-ilmu fardu a’in yang diutamakan semisal belajar ngaji al-Qur’an. KH Muhammad Hasyim Asy’arie, “Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim”, *Irsyad al-Syari fi Jam’i Mushannifah al-Syaikh Hasyim Asy’ari*, (Jombang: Maktabah al-Masruriyah, t.th), hlm. 44.

⁷⁸ KH Muhammad Hasyim Asy’arie, “Adâb al-‘Alim wa al-Muta’allim”, *Irsyad al-Sâri* ..., hlm. 24.

⁷⁹ KH Muhammad Hasyim Asy’arie, “Adâb al-‘Alim wa al-Muta’allim”, *Irsyad al-Sâri* ..., hlm. 25.

⁸⁰ M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2014), hlm. 336.

Dengan menyitir pemikiran Hasyim Asy'arie, kita dapat menjelaskan bahwa ayat tersebut memberikan persaksian bagi Nabi saw yang kedudukannya berada dalam derajat akhlak mulia yang tidak mungkin seorang pun dapat menyamai sepenuhnya, sehingga Sayyida 'Aisyah ketika ditanya mengenai Akhlak Nabi saw, ia menjawabnya, bahwa Akhlak Nabi adalah al-Qur'an (*kana khuluquhu al-Qur'an*). Hal ini berarti bahwa setiap keutamaan yang disebutkan dalam al-Qur'an terdapat dalam pribadi Nabi saw.⁸¹ Dengan demikian, santri harus memiliki sifat dan kesadaran yang *istiqamah* dalam mengikuti suri tauladan atau akhlak mulai Nabi saw baik dalam ibadah ritual maupun ibadah sosial, kalau di pesantren mengikuti suri tauladan kiai-nya.

Dalam kaitannya dengan sikap tersebut, Slamet Suripto, Guru Fisika, SMA 6 tahun 1978, mengajarkan kepada muridnya untuk tetap berada pada jalur kehidupan atau akhlak mulia. Walaupun guru fisika, ia tetap menyelipkan pendidikan akhlak tersebut sebagai bekal dalam perilaku dan tingkah pola anak didiknya setelah keluar.⁸² Dalam kaitannya dengan melestarikan akhlakul karimah yang diajarkan Nabi Muhammad saw dan yang disyiarkan oleh para sahabat beserta penerusnya termasuk ulama-ulama penyebar Islam di Nusantara sebagaimana juga di Sumatera Utara, maka Joko Widodo menyadari akan pentingnya *ahlakul karimah* yang membumi dalam tradisi Islam Nusantara yang berkarakter damai, toleran, dan rukun.

Pemakaman Mahligai Barus, di Desa Sihorbo, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara bukan sekadar obyek wisata sejarah dan religi. Ia juga menjadi penanda bahwa hubungan antara Indonesia dan Timur Tengah sudah berlangsung sangat lama, sejak abad ke-6. Satu nisan di pemakaman Mahligai ini bertuliskan: Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi atau tahun 48 Hijriah. Itu baru seabad setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selain itu ada sejumlah makam ulama asal Timur Tengah di kompleks pemakaman seluas tiga hektare ini. Bagaimana sang syekh bisa berada di Barus? Mereka datang berdagang, sekaligus syiar agama. Wilayah Barus merupakan penghasil kapur barus dan rempah-rempah yang terkenal hingga ke Timur Tengah, bahkan Eropa. Mereka ke sini mencari kapur barus, merica, kemiri, kemenyan, dan lain-lain. Itulah sebabnya, dalam

⁸¹ KH Muhammad Hasyim Asy'arie, "Irsyād al-Mu'min ila sairah Sayyid al-Mursalīn wa Man Tabi'ahu min al-Shahabah wa al-Tabi'in", *Irsyād al-Sāri* ..., hlm. 6.

⁸² Domu D Ambarita dkk, *Jokowi...*, hlm. 43

kunjungan ke Sumatera Utara, Jumat 24 Maret, saya meresmikan satu tugu di Barus, Tugu Titik Nol Pusat Peradaban Islam Nusantara. Dari titik ini, saya menitipkan harapan agar para ulama yang ada di Sumatera Utara terus menyebarkan ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin sehingga masyarakat Indonesia dapat memandangi perbedaan yang ada sebagai sebuah kekuatan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Tanah Air. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Menjaga kerukunan antarsuku dan antarpemeluk agama sangat penting.⁸³



(Dokumen Data Foto: Biro Pers Setpres)⁸⁴

Sehubungan dengan signifikansi bersih dan tulusnya hati, David J Schwartz⁸⁵ dalam karyanya yang berjudul *Berpikir dan Menjadi Sukses* menyebutkan bahwa “manajer rata-rata mangkir kira-kira dua hari, sedangkan bukan manajer rata-rata mangkir 18 hari, sembilan kali lipat”. Kenapa hal itu terjadi? Jawabannya yang pokok adalah bahwa para manajer lebih puas dengan pekerjaannya dibanding dengan bukan manajer, sehingga

⁸³ <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 2 Juni 2017

⁸⁴ <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 2 Juni 2017

⁸⁵ David J Schwartz, *Berpikir dan Menjadi Sukses: Penuntun Pribadi Anda Menuju Kemandirian Keuangan dan Kehidupan yang Damai*, terj. Anton Adiwiyoto, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996).

penelitian ini menyimpulkan bahwa orang-orang yang tidak menikmati pekerjaannya lebih mungkin “jatuh sakit” daripada orang yang menikmati pekerjaannya. Efek buruk dari karyawan yang tidak suka dengan pekerjaannya adalah bisa menimbulkan rendahnya produktifitas kinerja, fitnah yang mengganggu kinerja, menimbulkan konflik dan bahkan menimbulkan tindakan tidak jujur.⁸⁶

Dalam hal kepemimpinan, Joko Widodo adalah tipe pemimpin yang merangkul perbedaan dan memperhatikan kondisi objektif lingkungan kerja. Joko Widodo meneguhkan persatuan dan keutuhan NKRI dengan mempercepat pembangunan kesejahteraan dan keadilan di wilayah Timur Indonesia dan daerah-daerah terluar/terdepan, bukan dengan persatuan yang menggunakan konsepsi ke-Indonesia-an yang dipaksakan. Dengan tekad yang kuat untuk membangun kesejahteraan dan keadilan hidup berbangsa, Joko Widodo berulang kali berkunjung ke Papua untuk mendalami potensi perpecahan di sana dan sekaligus mencari solusi empiris atas masalah ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi di daerah Papua. *“Dengan cara inilah Jokowi merajut persatuan bukan dengan selogan dan pendekatan militeristik teritorial. Jokowi menterjemahkan solidarity makers dengan caranya sendiri, tapi dengan tujuan yang sama untuk mempersatukan bangsanya dengan memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan”*.⁸⁷

Dalam pendekatan kebijakan yang positif dan tulus ini, apa-apa yang selama ini dipandang negatif dan diselesaikan dengan pendekatan kebijakan yang represif kemudian diubahnya. Joko Widodo menilai bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah cara kreatif rakyat untuk melakukan keberterimaan ekonomi tanpa merepotkan pemerintah. PKL menjadi ujung tombak perekonomian masyarakat kelas bawah yang tidak meminta bantuan dan berutang pada Bank. Oleh sebab itu, Joko Widodo menilainya bahwa sebuah kota baru akan kuat jika potensi lokalnya diperhatikan. Di Solo ada ribuan PKL, demikian juga kota lain. PKL telah menciptakan solusi atas ketertindihan ekonomi dengan kemandirian berpikir dan bertindak. Dalam membenahi Kota Solo, sewaktu menjadi Walikota Surakarta, Joko Widodo

⁸⁶ David J Schwartz, *Berpikir dan Menjadi Sukses...*, hlm. 74.

⁸⁷ Eko Sulistiyo, *Jokoway...*, hlm. XIII.

menegaskan: “Saya maju terus. Saya kuatkan hati para staf. Saya katakan pada mereka bahwa kunjungan-kunjungan itu tidak akan sia-sia, karena kami juga membicarakan banyak hal yang penting bersama pedagang”.⁸⁸

Apa yang dapat kita garis bawahi dari teori-teori keislaman, teori ilmiah dan cara penyelesaian yang dilakukan Joko Widodo tersebut adalah cara berpikir yang berpijak dari paradigma santri/murid yang mengedepankan nilai-nilai pengayoman, perlindungan, ketulusan dan keikhlasan yang kemudian memberikan dukungan positif terhadap sukses atau tidaknya program yang dilakukan, yakni penataan PKL yang kondusif dan humanis untuk perkembangan usaha mereka di Solo.

Tradisi ibadah, kesederhanaan, dan pengamalan ilmu untuk kepentingan kemaslahatan sesama menjadi perhatian serius dan menjadi spirit hidup Joko Widodo hingga kini sebagai Presiden RI. Beliau rajin dan rutin menjalankan ibadah ritual untuk kepentingan *taqarrub ila Allah*, mengikuti dan mengadakan pengajian keagamaan Islam untuk membangun spiritualitas, persaudaraan dan solidaritas dalam membina dan melestarikan kebersamaan hidup dan semangat kebangsaan. Di bulan ramadhan, Joko Widodo *istiqamah* menegakkan kewajiban ibadah puasa ramadhan.

⁸⁸ Alberthiene Endah, *Jokowi: Memimpin Kota, Menyentuh Jakarta*, Cetakan Ketiga, (Solo: Tiga Serangkai, 2014), hlm. 112-118



(Dokumen Foto)⁸⁹

Kedua, seorang murid harus memiliki niat yang baik dalam mencari ilmu dengan mengharap ridla Allah swt (*ayyuhsina an-niyah fi thalab al-‘ilmi bi ayyaqshida wajhallah*) dan mengamalkannya serta mendekatkan diri pada Allah swt, bukan mencari tujuan duniawi seperti sikap *riya’* (suka pamrih), mencari kedudukan, harta dan penghormatan di hadapan manusia.⁹⁰ Selama masa menempu pendidikan, Joko Widodo memiliki kesabaran dengan segala keterbatasan yang dihadapinya. Kondisi itu ternyata sebagai

⁸⁹ <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 26 Mei 2017

⁹⁰ KH Muhammad Hasyim Asy’arie, “Adâb al-‘Alim wa al-Muta’allim”, *Irsyâd al-Sâri* ..., hlm. 24.

pondasi dalam mengejar cita-cita mulia untuk mencari ilmu dengan senantiasa bertawakkal pada Allah swt. Dengan bekal ilmu itu, ia menyadari bahwa “apa yang dikatakan pemerintah ternyata tidak selalu sama dengan kenyataan yang ada di masyarakat”. Kesadaran kritis ini kemudian menjadi bekal untuk mengembangkan ilmunya untuk memperbaiki masyarakat di kemudian hari. Dengan kata lain, ilmu yang dicari bukan hanya untuk kepentingan pribadinya, tetapi ilmu yang diperoleh selama menempu pendidikan diusahakan untuk memberikan manfaat bagi sesamanya yang dimulai dari yang kecil-kecil dengan mendirikan Meubel CV Rakabu.⁹¹

“Sebuah kios kecil di sudut Kota Solo saya sewa. Tepatnya di daerah Sekip, Kadipiro, Solo. Usaha saya diberi nama CV Rakabu. Mantap. Tiga orang pekerja kayu saya rekrut. Kepada mereka saya katakan bahwa saya akan ikut bekerja, menggergaji, memahat, memoles, mengecat, mengemas, bahkan juga mengangkut. Jadi, sebenarnya kekuatan kami ada empat. Kami mulai bekerja”.⁹²

Niat yang baik dan tulus karena Allah akan memberi dampak positif dan mendukung karir kita. Demikian juga kebijakan Joko Widodo sewaktu menjabat Walikota Surakarta tampak diselenggarakan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan dalam menata pedagang kaki lima (PKL) yang tidak melalui cara-cara penertiban atau kekerasan, tetapi melalui musyawarah dan kunjungan yang dilakukan berkali-kali untuk mencari titik temu keinginan atau aspirasi para PKL. Hasil kebijakan Joko Widodo itu sangat mengembirakan bahwa para PKL kemudian dengan sukarela pindah untuk menempati lokasi baru sesuai dengan aspirasinya.

Kebijakan yang diklaim sederhana oleh Joko Widodo sesungguhnya memiliki nilai filosofis dan kearifan yang luas biasa. David J Schwartz dalam karyanya yang berjudul *Berpikir dan Menjadi Sukses* menyebutkan bahwa berikan layanan yang lebih dari apa yang menjadi tugas dan fungsi kerja kita, kita akan mendapatkan nilai lebih dari kerja kita. “Anda bisa menggunakan prinsip “menambah” dalam setiap segi kehidupan: Berikan pelayanan

⁹¹ “Dan Tuhan menolong saya. Dalam tes masuk perguruan tinggi negeri, saya lulus”. Alberthiene Endah, *Jokowi: Memimpin Kota, Menyentuh Jakarta*, Cetakan Ketiga, (Solo: Tiga Serangkai, 2014), hlm. 30-35 dan 53.

⁹² Alberthiene Endah, *Jokowi: Memimpin Kota, Menyentuh Jakarta*, Cetakan Ketiga, (Solo: Tiga Serangkai, 2014), hlm. 53.

tambahan yang tidak terduga-duga kepada majikan anda dan anda menjadi seorang calon untuk mendapat kenaikan gaji, keuntungan sampingan lebih banyak, dan untuk kenaikan pangkat”; dan “menunaikan tugas yang diberikan dengan seefisien dan secepat mungkin dan kemudian mengajukan diri secara sukarela untuk melakukan pekerjaan lebih banyak lagi. Ingat, “Kalau anda memotong rumput, pangkaslah semak belukarnya”.⁹³ Dari sisi itu, kebijakan Joko Widodo pada level nasional saat ini sedang bekerja untuk membangun dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia sebagai prioritas programnya.



8.749 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Harga Rp112-141 juta.
Uang muka satu persen
Cicilan Rp700-900 ribu per bulan
Bantuan pemerintah
Rp4 juta

PRESIDEN JOKO WIDODO
Peresmian hunian layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Villa Kencana Cikarang, Jalan Raya Pulo Sirih, Sukakarya, Kabupaten Bekasi.
Kamis, 4 Mei 2017.

Foto: Agus Suparto/Presidential Palace

(5 Mei 2017, Sumber Data Foto)⁹⁴

⁹³ David J Schwartz, *Berpikir dan Menjadi Sukses...*, hlm. 187 dan 190.

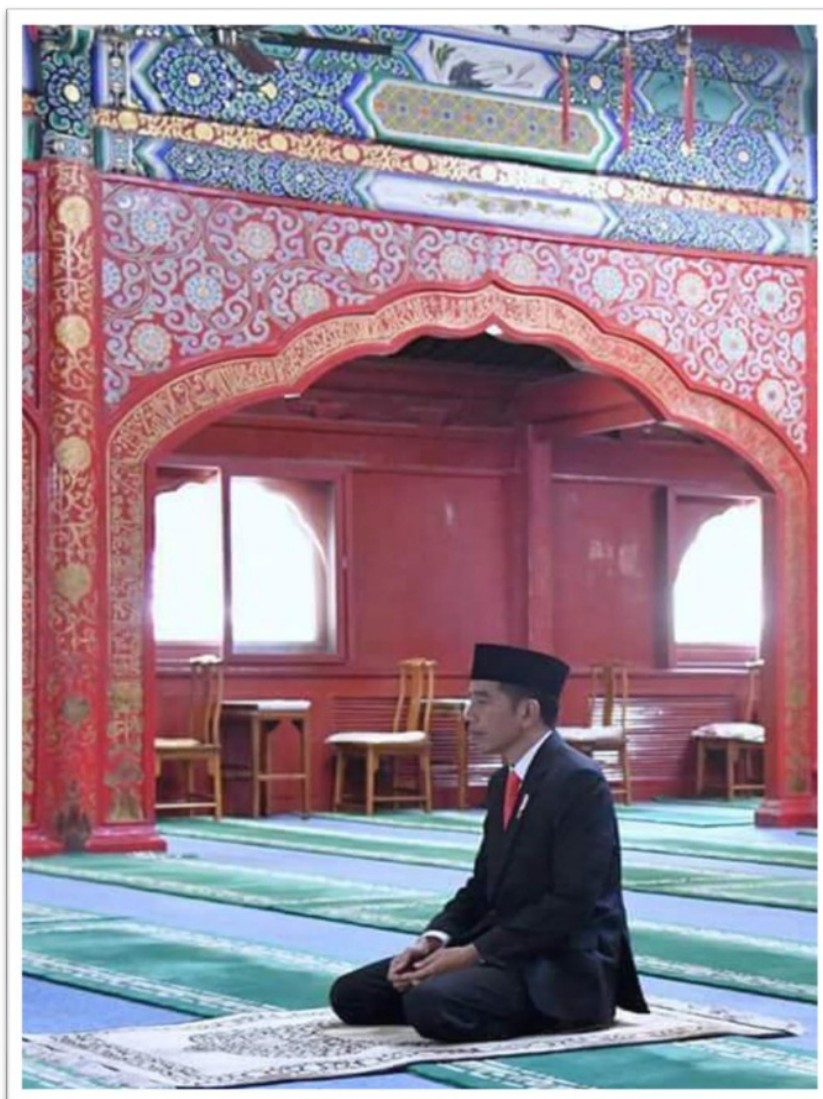
⁹⁴ Joko Widodo memberikan penjelasan: “Dulu saya pun pernah tinggal di rumah kontrakan. Kamarnya ada dua. Sembilan tahun lamanya mengontrak, baru bisa beli rumah.

Ketiga, murid harus memiliki sikap segera dan tidak melalaikan waktu berjalan tanpa ada aktivitas belajar (*ayyubâdira bi taḥshil al-‘ilmi syababahu wa awqâtu ‘umrihi*), karena waktu yang lewat tidak akan terulang kembali, sehingga santri harus memiliki komitmen yang kuat dalam mencari dan menggapai ilmu.⁹⁵ Di samping itu, santri juga harus memiliki komitmen untuk mengamalkan ilmunya untuk kemaslahatan umat dan sesamanya. Dalam hal ini, menurut pengakuan ibunya, Ibu Sujiatmi, Joko Widodo termasuk anak yang rajin dan tekun belajar, bahkan ia tidak perlu memaksanya untuk belajar, tetapi ia memiliki kesadaran yang tinggi dalam belajar. Dengan niat dan kemauannya sendiri, Joko Widodo rajin mempelajari buku-buku sekolah serta mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Joko Widodo adalah anak yang rajin belajar, rajin shalat dan mengaji.⁹⁶ Bahkan hingga kini, Joko Widodo tetap *istiqamah* beribadah dan ber-*taqarrub ila Allah*. Di samping itu, Joko Widodo merupakan sosok yang berkomitmen untuk mengamalkan ilmunya untuk kepentingan kemaslahatan umat dan sesamanya.

Alhamdulillah. Rumah kontrakan saya dulu itu kurang lebih sama dengan yang saya resmikan kemarin sore di Villa Kencana Cikarang, Jalan Raya Pulo Sirih, Sukakarya, Kabupaten Bekasi. Ini rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebanyak 8.749 unit rumah tipe 25 dengan luas tanah 60 meter persegi akan dibangun di Villa Kencana. Dari rencana itu, sebanyak 4.734 unit telah diselesaikan dan 3.600 unit di antaranya telah dilakukan akad jual beli. Harganya Rp112-141 juta. Rumah-rumah ini dapat dibeli dengan uang muka satu persen saja dan cicilan sebesar Rp700-900 ribu per bulan. Pemerintah juga memberikan bantuan uang muka dan administrasi sebesar Rp 4 juta. Saya memastikan bahwa pemerintah akan terus mengupayakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Tak hanya di Pulau Jawa saja, tapi juga di pulau-pulau lainnya di seluruh Indonesia. Sebagaimana Rusunami yang pembangunannya sudah dimulai di Tangerang Selatan beberapa waktu lalu, rumah-rumah di Villa Kencana ini bagian dari program sejuta rumah yang digagas pemerintah". <https://web.facebook.com/Jokowi/>, diakses 19 mei 2017.

⁹⁵ KH Muhammad Hasyim Asy'arie, "Adâb al-'Alim wa al-Muta'allim", *Irsyâd al-Sâri* ..., hlm. 25.

⁹⁶ Domu D Ambarita dkk, *Jokowi...*, hlm. 42.



(Dokumen Foto: Biro Pers Septres)⁹⁷

⁹⁷ Joko Widodo menjelaskan: “Inilah Masjid Niujie di Beijing, simbol kehadiran Islam sebagai agama yang ramah, toleran, dan damai. Saya berkunjung ke masjid ini siang tadi dan bertemu dengan sang imam, Ali Yang Gunjun serta Ketua Asosiasi Islam Tiongkok Yang Faming. Berdiri sejak lebih seribu tahun lalu di masa Dinasti Liao (916-1125), Masjid Niujie menjadi pusat komunitas muslim di Beijing yang jumlahnya mencapai 250.000 jiwa. Di lingkungan Masjid Niujie juga terdapat makam dua ulama yang berperan penting dalam dakwah Islam di Beijing, yaitu Syaikh Ali bin al-Qadir Imaduddin Bukhari dan Syaikh al-Burthoni al-Qazwayni. Saya berziarah di atas pusara kedua ulama yang wafat pada akhir abad ke-13 itu. Imam Masjid Niujien, Ali Yang Gunjun, menyampaikan, muslim di Tiongkok ada 23 juta umat dengan 34 ribu masjid yang tersebar di seantero negeri serta 56 ribu imam. Bahkan jumlah asosiasi Islam dari tingkat kabupaten ke atas ada 7.000. Seluruh umat muslim memiliki hak yang sama dengan penduduk Tiongkok lainnya. Begitulah. Saya meninggalkan Masjid Niujie dengan kesan yang begitu dalam, siang tadi. Di sana, saya meninggalkan kenang-kenangan berupa kaligrafi surat Al-Fatihah khas Mushaf Nusantara,



(Presiden Joko Widodo selepas menunaikan ibadah shalat zuhur)⁹⁸

serta kopiah dan sarung sebagai perkenalan tradisi dan kekhasan Islam Indonesia.” Tanggal 14 Mei 2017, <https://web.facebook.com/Jokowi/> diakses 19 Mei 2017

⁹⁸ Joko Widodo menjelaskan: “Sebuah musala kecil berdiri di pekarangan Rumah Makan Harangan Bagot, di distrik Koya Kaso, sekitar satu jam perjalanan dari Jayapura. Atapnya dari seng, berdinding kayu, dengan pintu ayun sederhana. Di sinilah kami berhenti untuk menunaikan sholat zuhur sesuai bersantap siang bersama rombongan kecil. Kami sedang dalam perjalanan menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skouw di Distrik Muara Tami, Jayapura yang hendak saya resmikan siang ini. Cuaca cerah, udara cukup panas, perjalanan menuju titik terluar Indonesia di Papua sungguh menyenangkan. Rumah-rumah tampak jarang di tanah yang subur. Indonesia sungguh negeri yang luas. Tanggal 9 Mei 2017, <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 26 Mei 2017.



(Dokumen Foto)⁹⁹

David J Schwartz dalam karyanya yang berjudul *Berpikir dan Menjadi Sukses* menyebutkan bahwa Jimmy berhenti Sekolah dan berhasil karena dia mengerahkan upaya yang sebaik-baiknya. Pada suatu hari, David bertanya kepada Jimmy, kenapa berhenti sekolah? Dia menjawabnya karena dia lebih suka bekerja dengan tangannya sendiri. Sementara usaha bisnis Jimmy semakin berkembang.¹⁰⁰ Apa yang hendak kita tekankan di sini bukan pada berhentinya sekolah, tetapi kepada “komitmen dan kemauan” yang memiliki peran penting dalam mendukung kesuksesan apa yang hendak dikerjakan. Dalam hal kinerja, komitmen kinerja Joko Widodo sangat jelas dan mengedepankan target yang hendak dicapai di dalam bekerja. Hal

⁹⁹ Tanggal 8 Mei 2017, <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 26 Mei 2017

¹⁰⁰ David J Schwartz, *Berpikir dan Menjadi Sukses...*, hlm. 196-197.

ini beliau tunjukkan dalam memimpin dalam penyelesaian masalah kebakaran hutan yang terjadi rutin bertahun-tahun.

Saya kemarin sudah *wanti-wanti* di Riau, hati-hati bekerja dengan saya. Bekerja itu ada targetnya. Apa gunanya dibikin organisasi yang namanya Manggala Agni? Harus jelas, gunanya harus jelas. Sebelum dibuat ada berapa titik api, setelah dibuat ini menjadi turun berapa titik api. Kalau *nggak* ada turunnya ya untuk apa? Organisasi ini ada semuanya. Bahaya *lho*. Namanya entah karena *land clearing*, membuat ladang atau kebun, entah karena kebakaran hutan. Hati-hati, ini tahunan dan rutin kita pelihara. Bukan kita selesaikan, tetapi kita pelihara terus acara-acara seperti ini.¹⁰¹

Dalam tradisi belajar, Joko Widodo merupakan pribadi yang rajin dan tekun belajar dengan kesadaran dirinya yang tulus dan ikhlas -sebagaimana juga menjadi tradisi kehidupan para santri di Pesantren- telah mengantarkan dirinya menjadi sukses dalam bidang usaha bisnis dan karir di dalam birokrasi dan politik nasional hingga menjadi Presiden RI. Kata kunci yang hendak disampaikan David di sini adalah bahwa apa pun pekerjaan yang hendak dikerjakan harus benar-benar berangkat dari keinginan, kehendak dan komitmen yang tulus dan ikhlas berdasarkan kemampuan yang dimiliki, sehingga hal itu akan mengantarkan pada kesuksesan kerja dan kinerja.

¹⁰¹ Joko Widodo, *Arahan Presiden Republik Indonesia Mengenai Antisipasi Pengendalian Kebakaran Hutan* di Kantor Daops Manggala Agni, Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Tanggal 20 Januari 2015, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8688&Itemid=, diakses 26 Juni 2016.



(Presiden Joko Widodo mendapatkan gelar adat *Kapiteng Lau Pulo*, Kalimantan Selatan, Dokumen Foto: Biro Pers Setpres)¹⁰²

Keempat, murid harus hidup sederhana dengan bekal hidup dan pakaiannya seperti apa adanya yang mudah dimiliki dan sabar dengan kehidupan yang sederhana untuk menggapai luasnya ilmu (*ayyaqna'a min al-qūti wa al-libās bima tayassara fa bi al-shabri 'ala adna al-'aysyi yanalu sa'ah al-'ilmī*). Oleh sebab itu, seorang santri harus fokus pikiran dan perilakunya dalam mencari ilmu serta berusaha mencari sumbernya ilmu hikmah. Imam al-Syafii berpendapat bahwa seseorang yang mencari ilmu tidak akan mencapai sukses jika ia hanya mengandalkan kemuliaan dirinya

¹⁰² Joko Widodo menjelaskan: “sebuah kehormatan dari lembaga adat Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, tersampir di pundak saya kini: gelar Kapiteng Lau Pulo. Disematkan pada Puncak Budaya Maritim Pesta Laut Mappanretasi di Pantai Pagatan, kemarin, gelar ini mengandung harapan untuk menjaga kedaulatan laut dan pulaunya. Pesta Adat Mappanretasi di Kabupaten Tanah Bumbu ini menjadi bukti bahwa jati diri kita, karakter kita, budaya kita adalah kodrat dari bangsa dan negara kita Indonesia, yaitu bangsa maritim. Kita telah lama memungungi lautan, padahal kekayaan kita ada di laut. Bahkan diperkirakan sumber daya alam laut Indonesia memiliki potensi kurang lebih Rp17 ribu triliun setiap tahun, kalau kita kelola dengan baik”. Hal ini disampaikan sekitar tanggal 8 Mei 2017, <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 26 Mei 2017

dan kemewahan hidup, tetapi hanya sukses dengan *tawâdlu'* dan hidup sederhana serta melayani ulama *waratsah al-anbiyâ'*¹⁰³, dalam artian mencari dan mendalami ilmu hikmah dari ulama tersebut.

Menurut Hasyim Asy'arie, ajaran tersebut telah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw, bahwa kesederhanaan hidup dan kepekaan sosial harus ditanamkan dalam diri murid sebagaimana ajaran Nabi dalam al-Qur'an, dimana Nabi Saw adalah pribadi yang sangat menyayangi anak-anak yatim, membela, menjaga dan menghormati hak-haknya, memperhatikan dan mengayomi hak-hak kaum du'afa', *wong cilik*, serta mendeskripsikan nikmat-nikmat Allah swt yang diterima agar dijadikan pelajaran oleh umat Islam.¹⁰⁴

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (10) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11)

Artinya: Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. (Q.S. Ad-Dhuha [93]: 9-11)

Hidup bersahaja juga dijalani Joko Widodo semasa kuliah -sebagai bagian dari cara hidup santri/murid dalam mencari ilmu- di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sebagai kampusnya *wong cilik*. Hampir semua mahasiswa adalah orang-orang sederhana. Kalau pun ada mahasiswa kaya, mereka pasti merasa tidak enak dan ikut-ikutan bergaya sederhana. Kebersahajaan menjadi ciri khas mahasiswa UGM pada waktu itu dan menjadi identitas warga UGM yang identik dengan gaya kuliah yang militan. Belajar keras, sekeras hidup.¹⁰⁵

Saya ingat, saat itu nyaris tak ada mahasiswa bermobil di kampus UGM. Kalau pun ada, itu segelintir sekali. Kebanyakan, mahasiswa pergi ke kampus dengan mengayuh sepeda atau berjalan kaki berkelompok. Mahasiswa-mahasiswa pejalan kaki itu muncul dari gang-gang kecil yang menyimpan banyak pondokan bersahaja. Kebanyakan mahasiswa pula, belum sarapan pagi. Anak-anak kos yang sederhana menganggap sarapan pagi sebagai sebuah kemewahan. Uang kami cekak sekali. Maka, kami mengenyangkan pagi dengan berjalan beriringan sambil tertawa-tawa.¹⁰⁶

¹⁰³ KH Muhammad Hasyim Asy'arie, "Adâb al-'Alim wa al-Muta'allim", *Irsyâd al-Sâri* ..., hlm. 25-26.

¹⁰⁴ KH Muhammad Hasyim Asy'arie, "Irsyad al-Mu'min ila sairah Sayyid al-Mursalin wa Man Tabi'ahu min al-Shahâbah wa al-Tabi'in", *Irsyâd al-Sâri* ..., hlm.6-7.

¹⁰⁵ Alberthiene Endah, *Jokowi...*, hlm. 43.

¹⁰⁶ Alberthiene Endah, *Jokowi...*, hlm. 43-44.

Sangat jarang mahasiswa yang mampu membeli buku-buku pelajaran dengan lengkap dan gres. Kebanyakan berburu buku di toko buku bekas... Makan cukup dua kali sehari dengan lauk tempe, sayur dan kerupuk. Dalam keadaan serba terbatas itu, kuliah berlangsung nikmat-nikmat saja. Ujian tak menjadikan kami serasa masuk ke dunia horor. Kesederhanaan justru membuat kami menemukan benih dari kesempatan belajar dan menyerap pendidikan sebanyak mungkin. Kampus menjadi surga kami. Walaupun teori ini belum terpahami dengan jernih di benak saya dulu, tapi akhirnya saya merasakan: betapa kemiskinan menjadi bagian dari pendidikan hidup. Sebaliknya, pendidikan juga mampu menjadi sumber cahaya bagi kami.¹⁰⁷

Gaya hidup Joko Widodo yang qanaah dan sederhana inilah yang masih membekas hingga kini. Perhatian dan kepekaan sosial Joko Widodo kemudian terlembaga dalam sistem birokrasi yang dibangunnya melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat lemah baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun keluarga sejak menjadi Walikota Surakarta hingga kini, Presiden RI.

Pribadi Joko Widodo itu memiliki kesamaan spirit dengan tradisi Muhammadiyah sebagaimana disampaikan oleh Haedar Nashir yang menyatakan bahwa jika kita menjadi pimpinan Muhammadiyah pada level manapun, maka kita harus mengamalkan karakter yang bersahaja, sederhana, gemar beramal, sedikit bicara dan berilmu. Tradisi ini terus berkembang di kalangan Muhammadiyah sebagai etos dalam menjalani kehidupan perjuangan untuk menegakkan kebaikan dan sekaligus menolak segala bentuk kemunkaran. *“Ini akhlak Muhammadiyah, harus gigih. Kegigihan sebagai karakter.”*¹⁰⁸

Semasa di Solo, Joko Widodo selaku Walikota mengeluarkan kebijakan Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat di Kota Surakarta (PKMS). Program ini berlaku mulai tahun 2008, yang mana pemegang kartu ini dapat berobat berlangganan, yakni bantuan pengobatan rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas, RSD Surakarta dan rumah sakit yang ditunjuk. Bantuan pendidikan dikemas dalam program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota

¹⁰⁷ Alberthiene Endah, *Jokowi...*, hlm. 44.

¹⁰⁸ “Islam Indonesia, Antara Cita dan Fakta”, *Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan*, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/11/15/islam-indonesia-antara-cita-dan-fakta/>, diakses 25 November 2017.

Surakarta (BPMKS) yang diperuntukkan bagi warga Kota Surakarta.¹⁰⁹ Konsep ini juga diterapkan ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Dalam bidang pendidikan, Presiden RI Joko Widodo tahun 2015 kemudian mengalokasikan anggaran untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk siswa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebesar Rp. 9,77 triliun dan Kementerian Agama RI sebesar Rp. 1,72 triliun, sehingga total anggaran yang disediakan pemerintah tahun 2015 sebesar Rp. 11.49 triliun. Namun demikian, realisasinya berada di bawah alokasi anggaran yang disediakan, lebih besar daripada nilai SPP yang sesungguhnya, yakni Rp 9,22 triliun bagi Kemendikbud dan 1,31 triliun bagi Kemenag, sehingga totalnya menyerap anggaran sebesar Rp. 10,55 triliun. Namun demikian, realisasi KIP lebih besar dari target semula yang hendak dicapai. Siswa penerima KIP tahun 2015 ditargetkan totalnya sejumlah 20.059.446 siswa dengan rincian Kemendikbud sejumlah 17.920.270 dan untuk Kemenag sejumlah 2.139.176. Adapun realisasinya mencapai total 20.158.931 dengan rincian 18.270.405 siswa untuk Kemendikbud, sedangkan untuk Kemenag berjumlah 1.888.526. Adapun Kartu Indonesia Sehat (KIS) hasilnya cukup optimal tahun 2015 dengan realisasi anggaran Rp. 1,67 triliun, masyarakat yang menerima KIS sesuai dengan BPJS Kesehatan sudah mencapai angka 87.006.370 orang.¹¹⁰

Tahun 2016 naik menjadi 12,08 triliun yang dialokasikan untuk Kemendikbud sebesar Rp 10,94 triliun dan Rp 1,14 triliun untuk Kemenag. Adapun target penerimaan KIP berjumlah 19.538.695 siswa yang terbagi untuk Kemendikbud berjumlah 17.927.308 siswa, sedangkan Kemenag berjumlah 1.611.387 siswa. Kondisi tahun 2016 ini menurun dibanding tahun 2015 karena adanya prediksi jumlah usia sekolah yang mengalami penurunan. Untuk tahun 2016, target ini ditingkatkan menjadi 92.400.000 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.12 triliun. Sementara itu, untuk pemberian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berjumlah total 16 juta kartu yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai bantuan sosial lain yang

¹⁰⁹ Domu D Ambarita dkk, *Jokowi...*, hlm. 12 dan 14

¹¹⁰ Tim PresdenRI.go.id-Kantor Staf Kepresidenan RI, *2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: Akselerasi Mewujudkan Indonesia Sentris*, (Jakarta: Tim PresdenRI.go.id-Kantor Staf Kepresidenan RI, 2016), hlm. 2-3.

3
disiapkan pemerintah. Melengkapi program tersebut, pemerintah sejak awal telah membagikan Kartu Asistensi Sosial bagi Penderita Disabilitas Berat (APSDB).¹¹¹

Program perlindungan sosial Presiden Joko Widodo ini menyempurnakan sekaligus memberikan aspek praktis bagi pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional –yang telah digagas sejak zaman Presiden Abdurrahman Wahid di tahun 2000 dan disahkan di masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri tepatnya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada tanggal 19 Oktober 2004.¹¹²

Dengan meminjam pemikiran Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada(UGM), Prof Dr San Afri Awang, kita dapat menyatakan bahwa program-program Presiden Joko Widodo tersebut adalah bagian usaha yang esensial dalam rangka menerapkan sistem ekonomi yang berwawasan kerakyatan, yakni sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 50
asas kekeluargaan, di mana produksi perusahaan dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan masyarakat (rakyat) dalam mengendalikan pergerakan roda perekonomian, sehingga dengan sistem tersebut, tata laksana ekonomi yang bersifat kerakyatan dapat memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat.¹¹³

Dengan meminjam pemikiran San Afri Awang, kita juga dapat menyatakan bahwa tujuan program pembangunan ekonomi Presiden Joko Widodo tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: (a), berusaha menyediakan sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama kalangan du'afa' baik fakir miskin maupun anak-anak terlantar; (b) berusaha mendistribusikan kekayaan dengan merata di masyarakat; (c) berusaha mendistribusikan kepemilikan modal material

111 Tim PresdenRI.go.id-Kantor Staf Kepresidenan RI, *2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK...*, hlm. 2-5.

112 Tim PresdenRI.go.id-Kantor Staf Kepresidenan RI, *2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK...*, hlm. 5.

113 San Afri Awang, *Konsep Ekonomi Kerakyatan dan Aplikasinya pada Sektor Kehutanan*, <http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sanafri.htm>, diakses 3 Mei 2017.

secara relatif merata di antara anggota masyarakat; (d) setiap anggota masyarakat dijamin kemandiriannya untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi sebagai wadah untuk mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang dimiliki ataupun kompetensi praktisnya.¹¹⁴

Dalam aspek ini, Joko Widodo telah bekerja untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bandara, pos perbatasan dan pelabuhan untuk mencapai akses ekonomi dan usaha bisnis serta pendidikan yang mudah bagi warga masyarakat terutama di daerah pinggiran, desa, daerah terluar dan daerah tertinggal. Secara program, arah kebijakan ini berorientasi pada kepentingan kerakyatan. Secara personal, jiwa dan perilaku Joko Widodo hingga kini masih tetap menunjukkan kesederhanaan dan kebersahajaannya dalam berbagai kegiatan dan selalu membaur dengan masyarakat untuk mengetahui secara langsung kebutuhan masyarakat dan kejadian-kejadian riil di masyarakat yang perlu penanganan.

Kelima, murid –jika murid/*thâlib al-‘ilm* sudah sampai tingkatan perguruan tinggi di Indonesia dikenal dengan mahasiswa- harus makan dan minum sesuai dengan kebutuhan tubuh (*ayyuqallila al-akla wa al-syurba*) karena tubuh yang kekenyangan dapat memberatkan diri dalam aktivitas ibadah dan memberatkan badan, sedangkan manfaatnya makan dan minum sesuai kebutuhan tubuh tersebut dapat memelihara tubuh dalam kondisi sehat dan fit. Sifat makan dan minum sesuai kebutuhan tubuh secara sederhana inilah yang diajarkan oleh para waliyullah, para ulama terpilih, dan para pemimpin Muslim. Demikian juga santri tidak boleh menyia-nyiakan waktu belajar, sehingga santri harus mampu membagi waktunya.¹¹⁵ Dalam hal ini, Nabi saw telah mengajarkan sifat mulia dimana ia hanya makan sesuai apa adanya ketika sudah lapar. Jika tidak ada, ia diam. Ia tidak menolak makanan yang sudah tersedia, tidak membebani

¹¹⁴ San Afri Awang, *Konsep Ekonomi Kerakyatan dan Aplikasinya pada Sektor Kehutanan*, <http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sanafri.htm>, diakses 3 Mei 2017.

¹¹⁵ KH Muhammad Hasyim Asy'arie, "Adâb al-‘Alim wa al-Muta'allim", *Irsyâd al-Sâri* ..., hlm. 25

untuk menyediakan makanan yang belum ada, ia hanya makan makanan yang baik dan halal, serta yang apa-apa yang bisa diperoleh.¹¹⁶

Dalam hal tradisi makan dan minum, Joko Widodo juga pernah menjalaninya terutama ketika ia sedang kuliah di UGM. Joko Widodo makan cukup dua kali sehari dengan lauk tempe, sayur dan kerupuk. Kesederhanaan ini justru mendidik Joko Widodo untuk menemukan benih dari kesempatan belajar dan menyerap pendidikan sebanyak mungkin. Kampus menjadi surganya. Dalam suasana sederhana dan terbatas, komitmen belajar Joko Widodo tetap tinggi dan istiqamah, bahkan ia merasakannya bahwa “betapa kemiskinan menjadi bagian dari pendidikan hidup. Sebaliknya, pendidikan juga mampu menjadi sumber cahaya bagi kami”.¹¹⁷

Ketika menjadi mahasiswa, Joko Widodo muda banyak belajar prihatin. Prinsip hidup prihatin menjadi bekal yang sangat berharga, bahwa tidak ada hidup yang gratis, termasuk menuntut ilmu. Dengan kemampuan ekonomi orang tua yang minus, Joko Widodo harus bekerja keras. Selain itu, ia tidak mau menyia-nyiakkan waktu belajarnya, sehingga ia harus cepat lulus.¹¹⁸

Keenam, murid harus memiliki sifat wara’ dan berhati-hati dalam segala tingkah lakunya (*ayyu’akhida nafsahu bi al-warâ’i wa al-ih̄tiyâth fî jamî’i sya’nihi*) serta mencari bekal yang halal untuk makan, minum, dan rumah tinggalnya. Demikian juga segala kebutuhan hidupnya untuk mencapai nur ilmu di hatinya serta memperoleh nur dan manfaatnya ilmu.¹¹⁹ Adapun salah satu bentuk bergunanya ilmu dan harta dari hasil usaha itu adalah untuk bekal ibadah dan membantu sesama, karena ilmu yang diperoleh harus diamalkan untuk membangun kemaslahatan diri dan orang lain atau umat.

Salah satu bentuk sikap wara’ dan kehati-hatian dalam birokrasi adalah bagaimana membangun tradisi birokrasi bersih dan jauh dari

¹¹⁶ KH Muhammad Hasyim Asy’arie, “Irsyâd al-Mu’min ila sairah Sayyid al-Mursalin wa Man Tabi’ahu min al-Shahâbah wa al-Tabi’in”, *Irsyâd al-Sâri ...*, hlm.9.

¹¹⁷ Alberthiene Endah, *Jokowi...*, hlm. 44.

¹¹⁸ Domu D Ambarita dkk, *Jokowi...*, hlm. 17.

¹¹⁹ KH Muhammad Hasyim Asy’arie, “Adâb al-‘Alim wa al-Muta’allim”, *Irsyâd al-Sâri ...*, hlm. 27.

kerumitan. Proses perizinan usaha yang umumnya rumit, berduit, dan membuat pusing pengusaha atau investor langsung direformasi oleh Joko Widodo sewaktu menjadi Walikota Surakarta. Apabila masa sebelumnya membutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk terbitnya satu surat izin usaha, di bawah kepemimpinan Joko Widodo diubah menjadi hanya butuh waktu 46 hari.¹²⁰

Salah satu sikap kehati-hatian dan kepekaan sosial Joko Widodo terhadap rakyatnya adalah sikapnya yang pemurah dan senang berbagi dengan sesamanya. Oleh sebab itu, bagi Joko Widodo, bukan gaji yang utama ketika menjabat sebagai Walikota Surakarta, tetapi bagaimana dia bisa mengubah kehidupan warganya, dengan *memberikan pelayanan yang lebih baik di semua bidang kehidupan*.¹²¹ Kata kuncinya *memberikan pelayanan yang lebih baik di semua bidang kehidupan* itulah yang menjadi tradisi kuat di dunia santri, bahwa seorang santri yang sejati adalah pribadi yang memiliki semangat dan *ruhul jihad* untuk selalu ikhlas mengabdikan harta dan ilmunya bagi umat atau masyarakat.

Ketujuh, murid harus tunduk dan patuh kepada guru atau kiainya serta berada dalam paradigma keilmuan kiainya. Di samping itu, etika santri terhadap kiainya adalah bagaimana selalu menghormati dan menghargainya.¹²² Dalam hal ini, sikap dan tindakan Joko Widodo dalam menghormati dan menghargai para kiai dan ulama sudah tampak sebagaimana waktu di Solo hingga kini. Salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap para ulama, Joko Widodo sering meminta masukan dan saran ulama dan kiai dalam menyikapi dan menjawab masalah-masalah krusial kebangsaan dan kenegaraan. Tidak hanya itu, tetapi segenap jajaran pembantu Presiden RI juga memiliki perhatian dan keakraban terhadap kegiatan-kegiatan umat Islam dan ormas Islam/tokoh ormas Islam/ulama/kiai.

Dalam hubungan dengan ulama, kiai dan pemuda, Presiden Joko Widodo memiliki perhatian yang tinggi, sehingga beliau selalu hadir untuk

¹²⁰ Domu D Ambarita dkk, *Jokowi...*, hlm. 126.

¹²¹ Domu D Ambarita dkk, *Jokowi...*, hlm. 19.

¹²² KH Muhammad Hasyim Asy'arie, "Adâb al-'Alim wa al-Muta'allim", *Irsyâd al-Sâri* ..., hlm. 29-30.

memenuhi undangan mereka untuk menyampaikan pesan-pesan atau pidato yang mengajak seluruh anak bangsa bersatu, menghindari perpecahan, menghindari saling hujat, dan sekaligus mengajak untuk bekerjasama membangun bangsa yang adil, makmur dan sejahterah. Hal itu seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo ketika membuka Kongres XIX Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Masjid Agung Darussalam Palu Sulawesi Tengah, Selasa, tanggal 16 Mei 2017. Joko Widodo mengatakan bahwa “*kita ini bersaudara. Baik saudara sesama muslim maupun saudara berbangsa dan bertanah air. Jadi, hentikan saling menghujat, saling menjelekan, dan saling menolak. Ini tidak produktif, betul-betul tidak produktif. Habis energi kita untuk hal yang seperti ini,*”¹²³



(Presiden Joko Widodo membuka Kongres XIX di Masjid Agung Darussalam Palu Sulawesi Tengah, Selasa tanggal 16 Mei 2017).¹²⁴

¹²³ Bustami (ed), *Jokowi di Kongres PMII: Hentikan Saling Hujat, Kita Semua Bersaudara*, <http://www.sayangi.com/2017/05/16/83745/news/jokowi-kongres-pmii-hentikan-saling-hujat-kita-bersaudara>, diakses 24 November 2017

¹²⁴ Bustami (ed), *Jokowi di Kongres PMII: Hentikan Saling Hujat, Kita Semua Bersaudara*, <http://www.sayangi.com/2017/05/16/83745/news/jokowi-kongres-pmii-hentikan-saling-hujat-kita-bersaudara>, diakses 24 November 2017

Dalam tradisi syariat/hukum Islam, ada kaidah” perubahan hukum sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi, *taghayyur al-ahkâm bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah*”. Prinsip ini dalam ilmu pengetahuan dikenal dengan inovasi. Demikian juga ajaran Islam mengajarkan inovasi dalam setiap menghadapi perkembangan situasi dan kondisi. Prinsip inilah yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada acara kongres PB PMII di Sulawesi Tengah, 16 Mei 2017.

Jokowi mengajak generasi muda untuk meniru sejumlah tokoh dunia yang berperan penting dalam inovasi teknologi mutakhir. Dia mencontohkan munculnya orang cerdas sekaliber Elon Musk yang mengeluarkan gagasan besar mengenai *Tesla* untuk memproduksi mobil fantasi masa depan. Elon Musk juga mendirikan *SpaceX* dalam rangka mengembangkan visi besarnya dalam pengelolaan luar angkasa. “Elon Musk juga menciptakan *Hyperloop* untuk memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan sangat cepat. Kita masih saling hujat, menjelekkan, demo, habis kita nanti,” ujar Jokowi. Selain itu, Presiden juga menunjukkan kekagumannya kepada Jack Ma, pebisnis kebangsaan China yang mendirikan Alibaba Group, perusahaan *e-commerce* terbesar di China. “Inovasi Jack Ma membuat orang tidak membayar lagi dengan *cash*, bahkan kartu kredit sudah mulai ditinggalkan. Sekarang orang bayar sudah pakai handphone yang terkoneksi dengan bank.”¹²⁵

Dalam kesempatan itu, Joko Widodo menyampaikan pesan pada kader-kader PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) agar mengarahkan imajenasinya ke hal-hal yang bersifat inovasi untuk kemajuan bangsa. Kader PMII jangan hanya bermimpi untuk menjadi politisi, tetapi juga mengarahkan imajenasi dan idealitasnya pada gagasan besar untuk membangun bangsa melalui pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bangsa, menjadi interpreneur, developer software, aplikasi, animasi dan lainnya.¹²⁶

¹²⁵ Bustami (ed), *Jokowi di Kongres PMII: Hentikan Saling Hujat, Kita Semua Bersaudara*, <http://www.sayangi.com/2017/05/16/83745/news/jokowi-kongres-pmii-hentikan-saling-hujat-kita-bersaudara>, diakses 24 November 2017

¹²⁶ Bustami (ed), *Jokowi di Kongres PMII: Hentikan Saling Hujat, Kita Semua Bersaudara*, <http://www.sayangi.com/2017/05/16/83745/news/jokowi-kongres-pmii-hentikan-saling-hujat-kita-bersaudara>, diakses 24 November 2017



(Presiden Joko Widodo memukul beduk saat membuka Kongres PMII XIX di Masjid Agung Darussalam Palu Sulawesi Tengah, Selasa, 16 Mei 2017)¹²⁷

Dalam bahasa Abdullahi Ahmed An-Na'im, umat Islam perlu memiliki sikap inovatif dalam memahami ajaran Islam (syariah) karena pemahaman syariah merupakan produk ijtihad yang lahir dalam ruang dan waktu yang khusus (*in a specific time and place*), maka perubahan sikap dan perilaku umat Islam (*changing the attitudes and practice of Muslims*) menjadi keniscayaan dalam menjawab isu-isu aktual, misalnya persamaan hak-hak kaum perempuan (*the equal human rights of women*) atau isu-isu aktual lainnya.¹²⁸

Dalam kegiatan keagamaan, jajaran pembantu Presiden Joko Widodo juga intensif menghadiri dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat atau organisasi sosial keagamaan yang mengajarkan nilai-nilai luhur, seperti Muhammadiyah. Salah satu nilai luhur dari Muhammadiyah, misalnya sikap kesahajaan dan kesederhanaan dari para tokoh dan pimpinan Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, AR Fachruddin, Buya Syafii Maarif, Din

¹²⁷ Bustami (ed), *Jokowi di Kongres PMII: Hentikan Saling Hujat, Kita Semua Bersaudara*, <http://www.sayangi.com/2017/05/16/83745/news/jokowi-kongres-pmii-hentikan-saling-hujat-kita-bersaudara>, diakses 24 November 2017.

¹²⁸ Abdullahi Ahmed An-Na'im, "Why should Muslims abandon Jihad? Human rights and the future of international law", *Third World Quarterly*, Vol. 27, No. 5, hlm. 792

Syamsuddin hingga Haedar Nashir. Sikap dan perilaku itu dapat menjadi inspirasi bagi semua kalangan umat dan masyarakat. Sifat dan sikap inilah yang sejak dari Surakarta dilakukan Joko Widodo hingga menjadi Presiden RI dan juga yang diikuti segenap jajaran pembantunya.¹²⁹ Kapolri Jenderal Pol. Drs. H. M. Tito Karnavian, MA., Ph.D, juga menampilkan kesederhanaan dan kedekatannya dengan masyarakat dan tokoh agama, bahkan di acara-acara yang level bawah pun beliau masih berkenan hadir.



(Kapolri Jenderal Pol. Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., bersama Dr. H. Haedar Nashir, M.Si., dan Prof. Dr. H. Din Syamsuddin menghadiri Syukuran Tahun ke-2 Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu serta peresmian

¹²⁹ “Kapolri: ‘Saya Merasa Tersentuh Hati, Seorang Profesor, Ketua Umum, Mau Jadi Ketua Ranting’”, *Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan*, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/11/21/kapolri-saya-merasa-tersentuh-hati-seorang-profesor-ketua-umum-mau-jadi-ketua-ranting/>, diakses 24 November 2017.

¹ Koperasi Syariah Muhammadiyah Business Center di Gedung Graha Adhya Wicaksana, Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu, 19 November 2017)¹³⁰

Dalam kesempatan itu, Haedar Nashir mengatakan, sosok Din Syamsuddin dapat menjadi contoh revolusi mental dalam konteks hidup kebangsaan. Para tokoh dan elit merupakan orang yang seharusnya senantiasa membumi, dan bersama rakyat. Walaupun jabatannya sudah pernah berada di puncak, tetapi tetap membumi atau merakyat. Menurutnya, *“Bahwa tokoh siapa pun itu harus selalu mengakar ke bumi dan rakyat memerlukan tokoh yang berada di dekatnya, bukan tokoh yang melambung tinggi ke langit, tetapi tidak berpijak ke bumi.”*¹³¹ Tradisi inilah yang sekarang sedang banyak dilakukan oleh para elit dan pejabat daerah untuk melakukan konsolidasi dan pembangunan mental spiritual umat atau masyarakat untuk memperkokoh jati diri bangsa Indonesia di tengah arus informasi dan teknologi yang pesat.

¹³⁰ Dalam sambutannya, Tito mengaku kaget mendengar mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2005-2015, Prof Din Syamsuddin dengan banyak posisi di tingkat internasional, justru mau menjabat sebagai Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu. *“Jadi saya melihat, begitu membaca bahwa Prof Din Syamsuddin menjadi Ketua Ranting Muhammadiyah di Pondok Labu, saya jujur kaget. Apa mungkin Ketua Umum yang sudah dua periode yang kira-kira salevel dengan Kapolri turun menjadi Kapospol di Pondok Labu,”* ungkap Tito yang beberapa hari sebelumnya juga menghadiri resepsi Milad Muhammadiyah 105 di Keraton Yogyakarta. *Kapolri Tito mengaku takjub, ketika seorang Din Syamsuddin yang sebelumnya menjabat pucuk pimpinan salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, mau ‘turun gunung’ menjadi ketua ranting.* *“Kapolri: ‘Saya Merasa Tersentuh Hati, Seorang Profesor, Ketua Umum, Mau Jadi Ketua Ranting’,”* Suara Muhammadiyah: *Meneguhkan dan Mencerahkan*, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/11/21/kapolri-saya-merasa-tersentuh-hati-seorang-profesor-ketua-umum-mau-jadi-ketua-ranting/>, diakses 24 November 2017.

¹³¹ *“Kapolri: ‘Saya Merasa Tersentuh Hati, Seorang Profesor, Ketua Umum, Mau Jadi Ketua Ranting’,”* Suara Muhammadiyah: *Meneguhkan dan Mencerahkan*, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/11/21/kapolri-saya-merasa-tersentuh-hati-seorang-profesor-ketua-umum-mau-jadi-ketua-ranting/>, diakses 24 November 2017.



(Dalam Acara Kunjungan Safari Kamtibmas di pengajian salawatan, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Irjen Pol. Drs. Condro Kirono, MM., M.Hum., menyerahkan buku pada KH. Muhammad Munif Zuhri, Pengasuh Pondok Pesantren Giri Kesumo Mranggen Demak dan Deputi IV Kator Staf Presiden RI, Drs. Eko Sulistiyo, di Demak Jawa Tengah)¹³²

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Irjen Pol. Drs. Condro Kirono, MM., M.Hum., bersama Pengasuh Pondok Pesantren Giri Kesumo Mranggen Demak dan Deputi IV Kator Staf Presiden RI di Demak Jawa Tengah melakukan kunjungan safari untuk kepentingan pembangunan ketertiban masyarakat dalam wujud kegiatan salawatan dan pengajian serta sosialisasi pemikiran dan kebijakan Joko Widodo yang dimuat dalam buku karya Moh Dahlan, “Membumikan Islam dalam Kerangka Kebijakan: Membaca Pemikiran dan Kebijakan Joko Widodo Berdasarkan Nalar Fiqih Ke-NU-an”, terbitan Kaukaba, Yogyakarta, tahun 2017. Dalam acara tersebut, Pengasuh Pesantren memimpin jalannya pembacaan salawatan dan pengajian. Setelah kegiatan pengajian tersebut, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi buku membumikan Islam yang diawali dengan sambutan Kapolda Jateng, Irjen Pol.

¹³² Dalam rangka kunjungan Safari Kamtibmas Polda Jawa Tengah, Ketua PWNu Jawa Tengah KH Abu Hapsin, Ph.D mengakui eksistensi pemikiran dan kebijakan Joko Widodo relevan dan sesuai dengan spirit, budaya dan etos kerja yang berjalan di Nahdlatul Ulama. Hasil Catatan Pribadi pada Acara Safari Kamtibmas Polda Jateng di Pondok Pesantren Giri Kesumo Demak Jateng, 2017.

Drs. Condro Kirono, MM., M.Hum, yang mengenalkan penulis Dr. Moh Dahlan bahwa ia telah berhasil mengeksplorasi pemikiran dan kebijakan Joko Widodo dalam sudut pandang ke-NU-an. Setelah itu, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan singkat isi buku “Membumikan Islam dalam Kerangka Kebijakan”, oleh penulis yang intinya menyebutkan bahwa pemikiran dan kebijakan Presiden Joko Widodo sangat relevan dengan paham Nahdlatul Ulama. Paparan penulis tersebut, Moh Dahlan, kemudian dikuatkan oleh Ketua PWNU Jawa Tengah KH. Abu Hapsin, Ph.D yang menegaskan bahwa pemikiran dan kebijakan Joko Widodo sangat relevan dengan ajaran Nahdlatul Ulama.

Di atas semua itu, Irjen Pol. Drs. Condro Kirono, MM., M.Hum, memiliki hubungan emosional dan kedekatan dengan para ulama dan kiai, sehingga tradisi ini patut dikembangkan dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan karena memang falsafah negara kita mengakui eksistensi agama. Kebijakan yang berpihak pada pembangunan mental spiritual atau keimanan umat/masyarakat dengan membangun hubungan erat antara umara’ dengan alim ulama merupakan bagian dari amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) 1945. Dengan demikian, hubungan ulama dan umara’ merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, tetapi harus ada hubungan yang progresif dan mutualistik dalam membangun masa depan umat dan bangsa baik lahir maupun batin.



(Kapolda Jateng sangat khusuk mengikuti acara pengajian salawatn bersama, KH. Muhammad Munif Zuhri, Pengasuh Pondok Pesantren Giri Kesumo, Mranggen Demak Jateng, 6 April 2017)¹³³

133

<https://www.google.co.id/search?q=safari+kamtibmas+kapolda+jateng+di+giri+kusumo+2017&sa=G&dcr=0&tbn=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiN14uwsNfXAhUH2o8KHS1KAaEQsAQILg&biw=1422&bih=684>, diakses 24 November 2017.



(Kapolda Jateng dan KH. Muhammad Munif Zuhri bersama Jamaah Pengajian Salawat di Giri Kesumo Mranggen Demak Jateng, 6 April 2017)

Program kunjungan kerja Kapolda Jateng untuk pengembangan dan pembangunan mental spiritual masyarakat tidak hanya dilakukan di Demak, tetapi juga dilakukan di berbagai daerah termasuk di Kebumen Jawa Tengah pada acara sarasehan nasional di Universitas Ma'arif NU Kebumen. Acara tersebut juga dihadiri oleh Kapolda Jateng yang juga mensosialisasikan buku "Membumikan Islam dalam Kerangka Kebijakan" pada acara tersebut serta pembagian buku itu pada peserta sarasehan nasional.

Selanjutnya, dalam upaya membangun tradisi keberagamaan yang moderat dan spiritualitas yang unggul, pimpinan NU dalam audensi dengan Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pelaksanaan ISOMIL oleh PBNU bertujuan untuk mengantisipasi dan melindungi bangsa Indonesia terutama umat Islam dari gempuran arus gerakan radikalisme. Program seminar ISOMIL adalah bagian dari usaha mengenalkan paham keislaman NU bagi umat di seluruh dunia dan sekaligus menyerap ide-ide untuk mencari solusi sebagai tindakan antisipatif dalam mencegah terjadinya penyebaran paham dan tindakan radikal dan teror. Sementara itu, Ahm Ershad Uddin mengemukakan dalam karyanya yang berjudul "The Fanatical

ISIS through the Lens of Islamic Law” bahwa tindakan terorisme atau radikalisme bertentangan secara mutlak dengan sistem hukum Islam.¹³⁴



⁴ (President Joko Widodo receives NU's Rais Aam Ma'ruf Amin and Executive Council of NU (31/3/2016), at Merdeka Palace).¹³⁵

⁴ According to him, the President once again emphasized that the Government believes that NU from its central leadership to its villages branches are anti-radicalism as well as terrorism and they always stand up for tolerant and moderate Islamic principles. “I thank the President for his compliment and I guarantee there is no NU's students who are provoked or sympathy to these terror and radical movements. This is the most important thing,” he said. Concerning the anti-radicalism attitude, K.H. Said Aqil also explained that today (31/3), at 08.00 a.m. Western Indonesian Time, the Commander of Indonesian National Defence Forces Gen. Gatot Nurmantyo sent-off Islam Nusantara Expedition in Cirebon. The aim of this expedition is to disseminate Islam Nusantara which means a polite, civilized, and friendly Islam. “To harmonize the perception of the clerics that it is the only Islam in the world that friendly, polite, as well as moderate. It is Islam in Indonesia and it is NU's Islam, with a jargon: to love and protect the motherland are part of faith. Your faith is not complete if you don't defend the motherland,” K.H. Said Aqil said. PBNU also expressed its support to the Government in handling the hostage in the Philippines. Regarding counter terrorism issue, the Chairman of PBNU said that there is no special request from the

²⁴ ¹³⁴ Ahm Ershad Uddin, “The Fanatical ISIS through the Lens of Islamic Law”, *International Journal of Islamic Thought* Vol. 12: (Dec.) 2017, hlm. 6.

¹³⁵ PBNU to Hold International Summit of Moderate Islamic Leaders, <http://setkab.go.id/en/pbnu-to-hold-international-summit-of-moderate-islamic-leaders/> diakses 15 Juli 2017.

4
President. However, NU still tries to reduce radicalism of Indonesian citizens who just returned from Syria and Iraq. "NU will protect this great country and its leader, based on the Constitution. It is our commitment," he concluded.¹³⁶

Seminar ISOMIL ini adalah kegiatan internasional yang pertama yang diselenggarakan oleh PBNU dalam rangka sosialisasi ajaran Islam yang toleran, moderat dan sekaligus untuk mengkanter perkembangan gerakan ideologi Islam radikal. Para ulama yang memiliki kedalaman ilmu akan menyampaikan pandangannya tentang Islam moderat/toleran dan juga tafsir jihad yang sesuai dengan substansinya. Kenapa penafsiran jihad perlu dilakukan karena ada kelompok gerakan radikal yang tidak memahami substansi jihad secara komprehensif, sehingga jihad hanya dipahami sebagai perang dan membunuh musuh.¹³⁷

Islam Nusantara, the tolerant concept of Islam with an Indonesian spirit, according to Baidlowi, was the interpretation of moderate Islam that would function as the medicine to eradicate radicalism and terrorism. NU first introduced the concept of Islam Nusantara in 2015 through a campaign in Jombang, Central Java, aimed at creating a unique and genuine identity for Indonesian moderate Muslims that is different from Muslim societies in the Middle East. Maksun Mahfoedz, NU's deputy chairman who will serve as the summit's chairman, said there were people who interpreted jihad as killing the infidels and based their argument on the fact that Prophet Muhammad used to go to war. "Jihad means we give all of our lives to our spiritual journey. That does not correlate with killing people," he told thejakartapost.com. Ideally, people should interpret the word jihad in accordance with prevailing conditions and in fact, relating jihad to war in this era is wrong since the situation today, socially and politically, is different from the era of Prophet Muhammad, Mahfoedz said.¹³⁸

Adanya komitmen dan semangat kerjasama yang erat antara pemerintah dan ulama itu, mendorong Presiden Joko Widodo untuk hadir dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan tokoh agama.

136 *PBNU to Hold International Summit of Moderate Islamic Leaders*, <http://setkab.go.id/en/pbnu-to-hold-international-summit-of-moderate-islamic-leaders/> diakses 15 Juli 2017.

137 *NU to gather global Islamic figures to end misinterpretation of jihad*, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/26/nu-gather-global-islamic-figures-end-misinterpretation-jihad.html>, diakses 15 Juli 2017

138 *NU to gather global Islamic figures to end misinterpretation of jihad*, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/26/nu-gather-global-islamic-figures-end-misinterpretation-jihad.html>, diakses 15 Juli 2017

Presiden Joko Widodo berkenan hadir untuk memberikan ucapan selamat atas pengukuhan Guru Besar, Profesor Dr (HC) KH Ma'ruf Amin di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 24 Mei 2017. Kehadiran Presiden Joko Widodo sebagai salah satu wujud sikap komitmen dan semangat kerjasama yang erat serta penghormatan dan penghargaan terhadap ulama dan kiai NU. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo tidak hanya menghormati dan menghargai eksistensi ulama sebagaimana KH Ma'ruf Amin, KH Said Aqil Siraj, Buya Syafii Ma'arif, dan ulama lainnya, tetapi juga beliau sering berdialog dalam rangka menyerap saran dan masukan dari para ulama/toko agama dalam rangka menyusun kebijakan pembangunan bangsa dan negara.



(Presiden RI., Ir. H. Joko Widodo, menghadiri dan menyampaikan ucapan selamat pada pengukuhan Guru Besar, Prof. Dr. (H.C.) KH. Ma'ruf Amin di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jatim, 24 Mei 2017)¹³⁹

Dalam rangka menjaga dan melestarikan keharmonisan yang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga level dunia, Presiden Joko Widodo dalam berbagai forum pertemuan baik nasional maupun internasional selalu menyampaikan perlunya sosialisasi paham toleransi dan moderasi beragama serta menangkal segala bentuk radikalisme dan terorisme lintas negara. Dengan demikian, setiap negara harus berkerjasama dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri.



139

https://www.google.co.id/search?q=jokowi+hadir+pengukuhan+ma%27ruf+amin&dcr=0&bm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Aviya3fLDqzI9M%253A%252CP_8CrtBPPxjTBM%252C_&u sg=__kQfMAZDhVzozilu77u6OxTv3B2w%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiyx_ugkd7XAhXIK48KH S1zBOQQ9QEIXTAH#imgrc=DYPKXGbv3lrQM, diakses 27 November 2017.

(KH Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa "Kita memang siap untuk membela negara dan bagi kami NKRI final dan kita tidak akan memberikan toleransi kepada siapa saja yang akan memecah belah bangsa ini.")¹⁴⁰

Sehubungan dengan adanya gerakan radikalisme dan terorisme, maka Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa melalui Pimpinan Sidang Komisi A Majelis Ulama Indonesia, KH Ma'ruf Amin, yang mengemukakan bahwa hukum melakukan tindakan teror adalah haram baik dilakukan perorangan, kelompok maupun negara.¹⁴¹ Dasar hukum pengharaman tindakan teror itu berdasarkan ayat al-Qur'an.

وَلَا تُقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا(29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا(30)

24

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Q.S. An-Nisa' [4]: 29-30).¹⁴²

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَخُوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزَاءٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ(33)

40

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar (Q.S. al-Ma'idah [5]: 33).

Dalam ayat yang lain juga ditegaskan bahwa umat manusia tidak boleh menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan (Q.S. al-Maidah [5]: 32). Demikian juga Hadis Nabi Saw menerangkan larangan tindakan teror. Bahkan barang

¹⁴⁰ "Turut hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin, Ketua Umum MUI yang juga Rais Am PB NU K.H. Dr. Ma'ruf Amindan Rais Am PBNU, Ketua Umum PB NU K.H Said Aqil Siroj, Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr. H. Haerdar Nashir, M.Si, dan sejumlah pengurus lainnya". <http://ksp.go.id/kerukunan-dalam-keanekaragaman-aset-berharga-bangsa-indonesia/>, diakses 14 September 2017.

11

¹⁴¹ KH Ma'ruf Amin dkk (Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975*, (Jakarta: Penerbit Erlangga dan Sekretariat MUI, 2011), hlm. 813

¹⁴² Terjemahan merujuk pada Terjemahan al-Qur'an Digital, Departemen Agama RI.

siapa yang membunuh satu orang dengan tanpa hak, maka ia seolah-olah membunuh seluruh umat manusia. Hadis Nabi SAW menyatakan: “*Barang siapa yang mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya, maka malaikat akan melaknatnya sehingga ia berhenti*” (HR Muslim). Dengan demikian, tindakan teror adalah haram hukumnya. Demikian juga bom bunuh diri haram hukumnya karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputusasaan dan mencelakakan diri sendiri.¹⁴³

Sehubungan dengan perlunya pembangunan ketertiban dan keamanan baik level nasional maupun level dunia, Presiden RI dalam pertemuan KTT ASEAN ke-30 di Manila menegaskan perlunya upaya bersama-sama antara negara secara cepat dalam rangka membendung dan memberantas gerakan radikalisme, terorisme dan kejahatan lainnya yang tidak hanya terjadi di suatu negara, tetapi juga di sejumlah negara di dunia.



(Presiden RI bersama Ibu Negara, Dokumentasi: Foto Biro Pers Setpres)¹⁴⁴

Inilah dunia yang kita hadapi saat ini: kita menyaksikan beberapa kejadian mengkhawatirkan dan berada dalam sebuah ketidakpastian.

¹⁴³ KH Ma'ruf Amin dkk (Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ...*, hlm. 813-815.

¹⁴⁴ Tanggal 30 April 2013, <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 2 Juni 2017.

Untuk itulah, di arena KTT ASEAN ke-30 di Manila, kemarin, saya mengajak komunitas ASEAN untuk hidup dan membawa perubahan. Saya memaparkan kondisi terkini yang terjadi di kawasan. Misalnya, mulai maraknya kegiatan lintas batas seperti perompakan, radikalisme dan terorisme, IUU Fishing, dan kejahatan narkoba. Saya meminta para pemimpin negara ASEAN bersama-sama menyelesaikan persoalan tersebut. Jangan sampai kita terlambat. Saya ulangi, jangan sampai kita terlambat.¹⁴⁵

Dalam rangka membendung gerakan radikalisme, Joko Widodo juga menyerap pemikiran para ulama, misalnya bagaimana upaya mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di kalangan umat dan sekaligus bagaimana upaya membangun masa depan bangsa. Harapannya, kebijakan yang dibangun bisa tepat sasaran dan sesuai target yang dikehendaki.

Saya menerima kunjungan tiga puluhan ulama dari Sulawesi, kemarin sore di istana. Kami bertukar pikiran semenjak sore hingga maghrib tiba, tentang soal kebangsaan, ekonomi, keagamaan hingga soal politik dan politik luar negeri. Tentu saya senang bisa berbicara secara langsung dan terbuka mengenai banyak hal dengan para ulama. Salah satunya, adalah soal penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang organisasi masyarakat. Saya meminta peran serta para ulama dalam ikhtiar menjaga kerukunan dan keamanan di Tanah Air. Peran para ulama sangat penting untuk memberikan penjelasan kepada umat mengenai maksud dan tujuan dari Perppu tersebut. Selain itu, kami juga berdiskusi mengenai masalah pendidikan. Pondok-pondok pesantren yang ada di Sulawesi, membutuhkan perhatian pemerintah. Insya Allah, jika tak ada aral melintang, saya akan ke sana untuk meninjau langsung pesantren-pesantren itu.¹⁴⁶

¹⁴⁵ <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 2 Juni 2017.

¹⁴⁶ <https://www.facebook.com/Jokowi/?>, diakses 23 Juli 2017



(Presiden RI menerima kunjungan para ulama dari Sulawesi, Dokumentasi Foto: Biro Pers Setpres)¹⁴⁷

Kita juga menyadari bahwa paham keagamaan Islam yang moderat dan toleran harus menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan. Dalam acara Haul ke-124 Syekh Nawawi Al-Bantani, Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kebinekaan melalui upaya penanaman paham keagamaan (Islam) yang moderat dan toleran.¹⁴⁸ Senada dengan pemikiran Joko Widodo, Peter Connolly juga menyebutkan bahwa peran agama dinilai penting karena dalam ilmu sosial, agama memiliki peran penting dalam membangun keteraturan hidup masyarakat dan moral, serta mengikatnya dalam ikatan-ikatan nilai-nilai dan tujuan hidup sosial bersama.¹⁴⁹

¹⁴⁷ <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 23 Juli 2017

¹⁴⁸ Joko Widodo, *Hadiri Haul ke-124 Syekh Nawawi Al-Bantani, Presiden Jokowi Ingatkan Jaga Persatuan dan Kebinekaan* (ed. Humas), <http://setkab.go.id/hadiri-haul-ke-124-syekh-nawawi-al-bantani-presiden-jokowi-ingatkan-jaga-persatuan-dan-kebinekaan/> diakses 23 Juli 2017.

¹⁴⁹ Peter Connolly (ed), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Khoiri, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), hlm. 275; Mohammad Tahlil Azim, "Religiosity and Conflict Handling Styles: A Study of a Muslim Community", *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 12: (Dec.) 2017, hlm. 17.



(Presiden Jokowi bersama KH Ma'ruf Amin pada Peringatan Haul Al-Maghfurlah Syaikh Nawawi Al-Bantani ke-124 di Ponpes An-Nawawi, di Tanara, Kab Serang, Banten, Jumat, 21/7/2017, Dokumentasi Foto: Humas/Rahmat)¹⁵⁰

Dalam acara Haul Syaikh Nawawi al-Bantani, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa keberagaman negara Indonesia dipahami dan disadari bersama sebagai hal yang besar. “Ini adalah anugerah Allah yang diberikan kepada bangsa Indonesia dan patut kita syukuri.” Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kita perlu menyampaikan pada masyarakat dunia di konferensi-konferensi internasional tentang pentingnya paham kebhinekaan dan moderasi. Karena itu, kita harus pelihara dan kembangkan kekuatan dan potensi yang dimiliki Indonesia, yang mana hal itu tidak dimiliki negara-negara lain. Kita memiliki hampir 220 juta penduduk yang beragama Islam dari 250 juta penduduk Indonesia. Demikian juga Indonesia memiliki berbagai macam bahasa daerah yang merupakan

¹⁵⁰ Joko Widodo, *Hadiri Haul ke-124 Syekh Nawawi Al-Bantani, Presiden Jokowi Ingatkan Jaga Persatuan dan Kebinekaan* (ed. Humas), <http://setkab.go.id/hadiri-haul-ke-124-syekh-nawawi-al-bantani-presiden-jokowi-ingatkan-jaga-persatuan-dan-kebinekaan/> diakses 23 Juli 2017

4
kekayaan budaya bangsa yang tidak dimiliki negara lainnya. Oleh sebab itu, kita harus bersama-sama menjaga kebersamaan dan persatuan. “Marilah kita jaga bersama-sama keragaman, kebinekaan ini. Karena memang kita dianugerahi oleh Allah menjadi beragam”. Kebinekaan Indonesia itu sudah hukum Allah, sudah kehendak Allah, sehingga kita tidak boleh saling mempertentangkan, karena hal itu dapat menimbulkan dampak negatif dan kerugian bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.¹⁵¹

Dengan meladani Syaikh Nawawi al-Bantani, kita perlu mengajak seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, untuk meneruskan perjuangan Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengembangkan dan mengkotektualisasi kitab-kitab karyanya baik dalam disiplin ilmu tafsir, ilmu kalam, tauhid, hadits, maupun lainnya. Kita juga perlu meneladaninya dalam mendidik murid-murid dimana beliau telah berhasil menjadikan ulama besar dan berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini.¹⁵²



(Presiden RI, Ketua MUI, dan Menteri Agama RI, Ulama, dan tamu

4
¹⁵¹ Joko Widodo, *Hadiri Haul ke-124 Syekh Nawawi Al-Bantani, Presiden Jokowi Ingatkan Jaga Persatuan dan Kebinekaan* (ed. Humas), <http://setkab.go.id/hadiri-haul-ke-124-syekh-nawawi-al-bantani-presiden-jokowi-ingatkan-jaga-persatuan-dan-kebinekaan/> diakses 23 Juli 2017.

¹⁵² <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 23 Juli 2017

undangan, Dokumentasi Foto: Biro Pers Setpres)¹⁵³

Sebagai tokoh yang bergerak dalam pendidikan dan dakwah yang mengajarkan moderasi dan melanjutkan perjuangan ulama-ulama terdahulu, KH Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Muhammadiyah telah meletakkan pondasi hidup beragama Islam dalam sistem organisasi yang modern, sehingga pendidikan dan pengajaran agama Islam dilakukan dengan semangat *tajdid* (pembaruan) dalam menjawab persoalan-persoalan aktual umat. Pada waktu itu, KH Ahmad Dahlan menyadari dan memahami masalah-masalah sosial dan ekonomi -termasuk masalah pendidikan- yang melanda bangsa akibat kebijakan kolonial di awal abad XX, sehingga ia mendorong gerakan *tajdid* Islam untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan menyitir pemikiran Haedar Nashir, David Efendi menyatakan:



¹⁵³ <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 23 Juni 2017.

¹ (Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Dr H Hamim Ilyas, M.Ag., pada acara Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada Sabtu, 26 Mei 2018)¹⁵⁴

Pembangunan kemandirian ekonomi dan ketahanan sosial melalui pendidikan, rumah sakit, lembaga sosial sebagai “anti dote” dari persoalan mendasar rakyat sekaligus menjadi model ‘teologi pembebasan’ yang khas Muhammadiyah dengan beragam gagasan ‘berkemajuan’ di dalamnya. Di usia Muhammadiyah yang melampaui usia 100 tahun, gagasan perkembangan ini kembali dirumuskan sebagai bagian dari kontribusi Muhammadiyah meluruskan ‘kiblat’ pembangunan bangsa. Karena itu Muhammadiyah mempunyai keinginan untuk melihat Indonesia sebagai bangsa yang besar dan bermartabat, banyaknya persoalan bangsa harus bisa diselesaikan secara arif dan bijak, serta merujuk pada kepribadian bangsa yang luhur.¹⁵⁵

Adapun cara bagaimana mengatasi persoalan bangsa harus dimulai dari akar persoalannya, yakni dari keyakinan keagamaannya. Oleh sebab itu, Joko Widodo menyampaikan bahwa bagi umat Islam Indonesia, harus mampu menampilkan suri tauladan Nabi saw yang mengajarkan keadilan dan toleransi hidup beragama. Tatanan peradaban yang adil dan toleran hanya mungkin terwujud kalau kita tidak hanya mengejar kesalehan pribadi, tetapi juga mengejar kesalehan sosial dengan memberdayakan kaum yang lemah dan miskin. Menurut Joko Widodo, tatanan peradaban umat itu perlu dibangun “*karena seorang Muslim pada dasarnya merupakan bagian dari komunitas umat yang ingin agar kehidupan berjalan harmonis, gotong rotong,*

¹⁵⁴ Agama Islam memiliki fungsi sebagaimana QS. Ali Imran ayat 103-104 yang bertujuan mewujudkan hidup baik. Hal itu berupa: *Pertama*, mempersatukan umat manusia. *Kedua*, fungsi agama adalah untuk menyelamatkan manusia dari tepi lubang neraka, menyelamatkan umat manusia dari jahiliyah, baik jahiliyah modern maupun jahiliyah diniyah. *Ketiga*, fungsi dakwah untuk mewujudkan kebaikan hidup, yakni *al-khair* adalah yang disenangi oleh semua orang. Semua fungsi itu sesuai dengan 7 pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yakni mewujudkan “masyarakat yang sejahtera, aman damai makmur dan bahagia hanya dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran persaudaraan dan gotong-royong bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah, yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu”. Ribas (Reporter), *Hamim Ilyas: Dakwah Islam untuk Tujuan Mewujudkan Hidup Baik*, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2018/05/26/hamim-ilyas-dakwah-islam-untuk-tujuan-mewujudkan-hidup-baik/>, diakses Juli 2018.

¹⁵⁵ David Efendi, *Menyemai Gagasan Desa Berkemajuan*, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/12/25/menyemai-gagasan-desa-berkemajuan/3/>, diakses 14 September 2017.

tidak ada gesekan sosial yang menyebabkan ambruknya sebuah jembatan kebangsaan."¹⁵⁶



(Presiden Joko Widodo pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Negara, Rabu 23 Desember 2015)¹⁵⁷

Melalui kegiatan peringatan Maulid Nabi, Joko Widodo mengajak kita semua untuk meneguhkan kecintaan pada Nabi Muhammad saw melalui pembangunan yang melayani rakyat, yakni pembangunan sosial dan ekonomi yang berkeadilan dan berkeadaban bagi bangsa Indonesia, karenanya kita harus menguatkan kembali spirit untuk membangun masyarakat dan bangsa yang berwawasan plural, beradab, dialogis dan saling mengerti. Pesan inilah yang menjadi spirit Islam *rahmatan lil alamin*.¹⁵⁸ Spirit pembangunan Nawacita Presiden Joko Widodo memiliki kesamaan dengan spirit gerakan Muhammadiyah yang sejak dari awal mula hingga kini memiliki komitmen untuk membangun umat atau bangsa sehingga cita-cita Muhammadiyah adalah cita-cita bangsa Indonesia.

¹⁵⁶ *Kita Bangun Islam Yang Tebarkan Perdamaian*, <http://ksp.go.id/kita-bangun-islam-yang-tebarkan-perdamaian/>, diakses 14 September 2017.

¹⁵⁷ *Kita Bangun Islam Yang Tebarkan Perdamaian*, <http://ksp.go.id/kita-bangun-islam-yang-tebarkan-perdamaian/>, diakses 14 September 2017.

¹⁵⁸ *Kita Bangun Islam Yang Tebarkan Perdamaian*, <http://ksp.go.id/kita-bangun-islam-yang-tebarkan-perdamaian/>, diakses 14 September 2017.

Muhammadiyah punya komitmen besar atas upaya penyelesaian persoalan bangsa karena Muhammadiyah menjadi bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Sehingga cita-cita Muhammadiyah adalah seiring sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita Indonesia adalah negara yang makmur, adil dan berdaulat, hal inilah yang menjadi tafsir kontekstual Muhammadiyah untuk menjadi Indonesia yang berkemajuan. Cita-cita “maju” inilah yang perlu dirumuskan secara sistematis ke dalam roadmap pembangunan masyarakat perdesaan yang akan diperankan oleh Muhammadiyah dengan memobilisasi segala kekuatan yang ada untuk mendukung negara/pemerintah mewujudkan desa yang maju, unggul, inovatif, mandiri, dan berdaya tahan (*sustainable*) yang kemudian jurusan Ilmu Pemerintahan UMY ‘branding’ sebagai desa berkemajuan. Spirit Muhammadiyah adalah berkhidmat untuk bangsa sehingga beragam gagasan penting, mendasar, dan strategis yang pernah disusun oleh Muhammadiyah yaitu buku “Indonesia Berkemajuan: Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna” (2014) dan buku. “Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa: Agenda Indonesia Ke Depan” (2009) adalah sumbangsih pemikiran untuk menegaskan keberpihakan Muhammadiyah atas upaya-upaya penyelesaian persoalan bangsa.¹⁵⁹

Salah satu program Muhammadiyah yang memiliki hubungan erat dengan program Nawa Cita Jokowi-JK adalah pembangunan bidang sosial, ekonomi dan pendidikan di antaranya, yakni “*Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik*” dan “*Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"*”; serta *peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera"*.¹⁶⁰

¹⁵⁹ David Efendi, *Menyemai Gagasan Desa Berkemajuan*, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/12/25/menyemai-gagasan-desa-berkemajuan/3/>, diakses 14 September 2017.

¹⁶⁰ *Nawa Cita*, 9 *Agenda Prioritas Jokowi-JK*, <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>, diakses 14 September 2017.



(Presiden Joko Widodo meninjau lokasi Program Pembangunan Sejuta Rumah)¹⁶¹

Selanjutnya, salah satu implementasi pembangunan kesejahteraan bangsa sebagai perwujudan dari sila kelima Pancasila, *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, dari pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah pemenuhan kebutuhan pokok bidang perumahan bagi rakyat. Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah membuat program perumahan murah bagi rakyat. Pionir program tersebut telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Ungaran, Jawa Tengah, pada 29 April 2015. Adapun program ini diselenggarakan di berbagai provinsi, seperti DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, dan Sulawesi Selatan. Program sejuta

¹⁶¹ *Rumah Subsidi Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, 26 July 2017, <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/rumah-subsidi-untuk-masyarakat-berpenghasilan-rendah.html> , diakses 14 September 2017.

rumah ini merupakan program pemerintah untuk memberikan penawaran uang muka yang sangat ringan dan cicilan bulanan yang terjangkau.¹⁶²

Sejak diluncurkan pada 2015 hingga kuartal I/2017, nilai kredit perumahan yang telah disalurkan Bank BTN dalam rangka mendukung Program Sejuta Rumah mencapai sekitar Rp144,37 triliun. Dukungan Bank BTN dalam Program Sejuta Rumah tersebut juga tersebar di seluruh Indonesia. Di Jawa misalnya, mulai April 2015 hingga kuartal I/2017, Bank BTN telah menyalurkan KPR dan kredit konstruksi untuk 851.204 unit rumah atau senilai Rp103,82 triliun. Di Sumatera, Bank BTN mengucurkan kredit perumahan senilai Rp19,42 triliun untuk 235.226 unit rumah. Bank dengan kode emiten BBTN ini pun tercatat mengucurkan kredit perumahan untuk 116.787 unit rumah senilai Rp 9,77 triliun di Kalimantan.¹⁶³

Dengan merujuk pada perspektif *maqâshid al-syari'ah* al-Najjâr, kita dapat menyatakan bahwa pembangunan rumah murah bagi rakyat adalah bagian dari implementasi *hifdz al-mujtama'* (kepentingan publik) yang di dalamnya termasuk rumah tangga sebagai entitas terkecil dari komunitas masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan rumah murah bagi rakyat adalah bagian dari pelaksanaan syari'at Islam, sehingga kepentingan publik yang di dalamnya ada *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan) tidak hanya bermakna adanya larangan perzinahan atau adanya perintah pernikahan, tetapi juga mencakup bagaimana menjaga kehormatan dan kenyamanan hidup dalam rumah tangga dengan tersedianya rumah murah yang terjangkau dan layak huni. Bahasan ini diurai lebih lanjut pada bagian berikutnya.

2. Maqâshid al-Syari'ah Pembangunan Joko Widodo

Cita-cita ideal dalam pembangunan hukum positif maupun fikih kontemporer dapat diwujudkan jika hakim/mujtahid mampu membaca dan memahami teks (nash) secara komprehensif. Adapun tahapan perspektif dalam membaca teks hukum Islam/fiqih, dimulai dari: *Pertama*, perspektif *mantuq an-nash* yang bertujuan untuk memahami “pengertian yang ditunjuk

¹⁶² *Rumah Subsidi Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, 26 July 2017, <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/rumah-subsidi-untuk-masyarakat-berpenghasilan-rendah.html> , diakses 14 September 2017.

¹⁶³ *Rumah Subsidi Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, 26 July 2017, <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/rumah-subsidi-untuk-masyarakat-berpenghasilan-rendah.html> , diakses 14 September 2017.

oleh suatu pernyataan hukum yang bersifat eksplisit”. *Kedua*, perspektif *mafhum an-nash* yang bertujuan memahami “pengertian yang ditunjuk oleh suatu pernyataan hukum yang bersifat implisit”. *Ketiga*, perspektif *ma’qul an-nash* yang bertujuan memahami “perluasan makna implisit dengan metode kausasi”. Perspektif *ruh an-nash* yang bertujuan memahami “substansi makna teks yang diperoleh melalui metode konformitas teleologis-filosofis atau metode *maqashid*.¹⁶⁴

Maqâshid al-syari’ah merupakan tujuan dari pembangunan hukum Islam/ fiqh yang sangat dinamis dan progresif. Pembangunan hukum fiqh di masa kini memerlukan landasan ijtihad yang progresif dan dinamis, sedangkan usaha melahirkan hukum fiqh yang dinamis dan progresif tidak akan tercapai tanpa adanya landasan ijtihad yang progresif atau dinamis juga. Adapun paradigma ijtihad progresif dalam hukum fiqh dapat dilakukan terutama melalui paradigma ijtihad kemaslahatan. Demikian juga al-Najjâr berpendapat bahwa *maqâshid al-syari’ah* adalah ilmu asasi yang sangat penting dalam kajian ilmu fiqh.¹⁶⁵

Para pembaru fiqh Islam memiliki perhatian yang serius untuk menggunakan paradigma *maqâshid al-syari’ah* sebagai landasan ijtihad dalam melakukan pembaruan hukum fiqh, bahkan paradigma *maqâshid al-syari’ah* menjadi salah satu perspektif ijtihad yang paling penting dan menjanjikan dalam melahirkan pembaruan hukum fiqh. Pembaruan hukum fiqh ini menjadi penting karena adanya persoalan perlunya melindungi dan menjaga eksistensi hak-hak asasi manusia secara komprehensif, sehingga realitas kepentingan hidup manusia itu harus dijawab dengan nilai-nilai hukum fiqh yang dinamis dan progresif melalui paradigma *maqâshid al-syari’ah* untuk menggali pembahaman baru terhadap al-Qur’an dan Sunnah. Pembaruan hukum fiqh dalam masalah perlindungan hak-hak dasar manusia itu dapat digambarkan, misalnya *hifdz al-dîn* (memelihara agama) yang kemudian berkembang menjadi *hurriyah al-‘aqidah* (kebebasan akidah) atau *hurriyah al-i’tiqad* (kebebasan berkeyakinan), *hifdz al-nafs* (memelihara

¹⁶⁴ Maulidi, “Paradigma Progresif dan Maqashid Syariah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif”, *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 2, Desember 2015, hlm. 257.

¹⁶⁵ ‘Abd al-Majid al-Najjâr, *Maqâshid al-Syari’ah ...*, hlm. 13.

jiwa) kemudian mengalami perkembangan menjadi *'ishmah al-anfus* (perlindungan jiwa), *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan) kemudian mengalami perkembangan menjadi *hifdz al-huqûq al-mar'a wa hifdz al-huqûq al-aulâd* (memelihara hak-hak wanita dan hak-hak anak), *hifdz al-'aql* mengalami perkembangan menjadi *al-safar fî thalab al-'ilm* (mencari ilmu) dan *al-tafkîr al-'ilmiyyah* (berpikir ilmiah), *hifdz al-'ird* (memelihara kehormatan) menjadi *hifdz al-karâmah al-insâniyah* (memelihara kehormatan manusia) dan *hifdz al-huqûq al-insân* (memelihara hak-hak manusia).¹⁶⁶

Dalam kerangka pemeliharaan hak-hak (asasi) manusia, Abdullahi Ahmed An-Na'im juga mengemukakan bahwa hak-hak manusia merupakan hal penting dalam menjaga dan melindungi kebutuhan dasar hidup manusia, sehingga sistem normatif hak asasi manusia yang mempengaruhi perilaku manusia dan institusi sosial dan politik yang mengatur kehidupannya seharusnya dibangun berdasarkan institusi-institusi dan nilai-nilai agama/budaya sebagaimana yang dialami secara nyata dalam kehidupan manusia yang hendak melaksanakannya. Dengan demikian, perlu ada rekonsiliasi antara norma-norma spesifik agama atau budaya dan norma-norma hak-hak asasi manusia universal (*culturally/religiously specific norms and universal human rights norms*) dalam membangun konsensus baik melalui diskursus internal atau tradisi (*the tradition or internal discourse*) maupun dialog lintas budaya (*cross-cultural dialogue*).¹⁶⁷

Tujuan perlindungan hak asasi manusia tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup umat, bangsa atau rakyat Indonesia secara adil dan merata. Salah penyangga terwujudnya kemaslahatan hidup umat atau bangsa itu adalah sistem ekonomi kerakyatan yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai sistem nilai bangsa Indonesia yang tujuannya adalah mewujudkan **keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia** dengan salah satu unsur intrinsiknya adalah Ekonomi Pancasila (baca: Mubyarto)

¹⁶⁶ Jasir 'Audah, *Maqâshid al-Syariah: Dalil li al-Mubtadiin*, (Beirut: Maktabah al-Tauzi' lil al-'Alam al-'Arabi, 2011), hlm. 55-63.

¹⁶⁷ Abdullahi A. An-Na'im, "Human Rights and the Imperative of CrossCultural Dialogue: An Islamic Perspective", Berma Klein Goldewijk (ed), *Religion, International Relations and Development Cooperation*, (The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, 2007), hlm. 310.

yang memiliki nilai-nilai dasar sebagai berikut:¹⁶⁸ *Pertama*, **Ketuhanan**, di mana “roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral”. Dalam agama Islam, hubungan dengan Allah swt (*hablum min Allah*) harus mewujudkan dalam hubungan dengan sesama umat manusia (*hablum min al-nās*). Salah satu wujudnya betapa hubungan ketuhanan sangat erat dengan keberlangsungan hidup manusia terutama masalah kebutuhan pokok manusia berupa bekal atau harta untuk hidup sebagaimana dijelaskan dalam hikmah masalah ibadah puasa dan kepekaan sosial.

Sebegitu jauh kita telah mencoba melihat hikmah ibadah puasa sebagai sarana pendidikan Ilahi untuk menanamkan tanggung jawab pribadi. Tetapi justru pengertian “tanggung jawab” itu sendiri mengisyaratkan adanya aspek sosial dalam perwujudan pada kehidupan nyata di dunia ini. Dan sesungguhnya tanggung jawab sosial adalah sisi lain dari mata uang logam yang sama, yang sisi pertamanya ialah tanggung jawab pribadi. Ini berarti bahwa dalam kenyataannya kedua jenis tanggung jawab itu tidak bisa dipisahkan, sehingga tiadanya salah satu dari keduanya akan mengakibatkan peniadaan yang lain. Oleh karena itu para ulama senantiasa menekankan bahwa salah satu hikmah ibadah puasa ialah penanaman rasa solidaritas sosial. Dengan mudah hal itu dibuktikan dalam kenyataan bahwa ibadah puasa selalu disertai dengan anjuran untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya, terutama perbuatan baik dalam bentuk tindakan menolong meringankan beban kaum fakir miskin, yaitu zakat, sedekah, infaq, dll.¹⁶⁹

Nilai-nilai agama Islam tersebut juga mengajarkan pentingnya etos kerja dalam memenuhi segala kebutuhan hidup dengan cara yang baik dan benar sebagaimana digariskan dalam al-Qur’an sebagai pedoman hidup bagi umat Islam untuk mewujudkan kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Dalam konteks ini, Joko Widodo menekankan perlunya mengamalkan nilai-nilai agama yang bersandar pada Tuhan Yang Maha Esa, bagi umat Islam hendaknya mengamalkan nilai-nilai Qur’ani dalam tata kehidupan

¹⁶⁸ San Afri Awang, *Konsep Ekonomi Kerakyatan dan Aplikasinya pada Sektor Kehutanan*, <http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sanafri.htm>, diakses 3 Mei 2017.

¹⁶⁹ Nurcholish Madjid, “Penghayatan Makna Ibadah Puasa: Sebagai Pendidikan Tentang Kesucian serta Tanggung Jawab Pribadi dan Kemasyarakatan” dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 418.

berbangsa dan bernegara yang menggariskan seluruh sisi kehidupan manusia baik secara implisit maupun eksplisit.

Seluruh sisi kehidupan manusia dituntun, dituntun oleh Al-Qur'an. Dengan demikian, seluruh revolusi kehidupan tersebut sesungguhnya mendorong kita untuk berjiwa tegak. Artinya, mempunyai harga diri, mau bekerja keras, sehingga kita bermartabat. Sebagai muslim, sebagai bangsa Indonesia, sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an, kita seharusnya berjiwa tegak. Dengan jiwa tegak itu, masyarakat ikhlas dan sabar menjalani hidup sehari-hari. Dan dengan jiwa tegak itu, pemerintah akan terus bekerja keras menjalankan program-program pembangunannya, sehingga seluruh rakyat bisa cukup sandang, cukup pangan, dan cukup papan. Supaya seluruh rakyat Indonesia bisa sehat dan berpendidikan. Supaya seluruh rakyat Indonesia mempunyai harga diri dan mempunyai martabat. Karena sesungguhnya negeri kita yang besar ini, yang berbhinneka, demokratis dan berpenduduk muslim terbesar di dunia mestinya bisa maju, sejajar dengan negara-negara maju lainnya.¹⁷⁰

¹⁷⁰ Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Acara Peringatan Nuzulul Qur'an Nasional*, di Istana Negara, Jakarta, Tanggal 3 Juli 2015, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9534&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016



(Dokumen Foto: Biro Pers Setpres)

*Kedua, **Kemanusiaan***, yaitu: “kemerataan sosial, yaitu ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial”. Oleh sebab itu, demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan

dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif yang menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat Indonesia perlu terus dibina dan dikembangkan.¹⁷¹ Dalam hal ini, Joko Widodo mengajak seluruh umat Islam dan bangsa Indonesia untuk menegakkan nilai-nilai persaudaraan yang diajarkan agama. Agama Islam telah mengajarkan nilai-nilai persaudaraan dalam membangun jaringan usaha dan bisnis. Karena tanpa adanya jaringan kerjasama dan hubungan yang saling menguntungkan, maka pemerataan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat akan sulit tercapai. Filosofi *ukhuwah* yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo memiliki nilai-nilai yang relevan dalam usaha membangun jaringan usaha dan bisnis sebagaimana sistem koperasi yang telah menjadi karakter budaya masyarakat Indonesia.

Sebagai bangsa yang besar, selain jiwa tegak dan kerja keras tersebut, kita juga perlu menegakkan prinsip persaudaraan, baik persaudaraan sesama manusia, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sebangsa dan se-Tanah Air, ukhuwah wathoniyah, persaudaraan sebagai pemeluk agama, ukhuwah diniyah, dan persaudaraan sesama kaum muslimin, ukhuwah Islamiyah. Dengan spirit ukhuwah tersebut, pemerintah dan seluruh masyarakat secara otomatis akan mempunyai kekuatan alamiah.¹⁷²

¹⁷¹ San Afri Awang, *Konsep Ekonomi Kerakyatan dan Aplikasinya pada Sektor Kehutanan*, <http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sanafri.htm>, diakses 3 Mei 2017.

¹⁷² Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Acara Peringatan Nuzulul Qur'an Nasional*, di Istana Negara, Jakarta, Tanggal 3 Juli 2015, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9534&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016



(Dokumentasi Foto: Biro Pers Setpres)¹⁷³

Dalam pemeliharaan nilai-nilai kemanusiaan ini, agama (Islam) mengajarkan perlunya jaringan perekonomian/bisnis yang saling menguntungkan dan tidak boleh ada kerugian, sehingga praktik riba dilarang karena di dalamnya, ada unsur kerugian bagi salah satu pihak baik secara eksplisit maupun implisit. Dalam konteks menjaga harkat dan martabat bangsa ini, Presiden Joko Widodo juga memberikan perhatian yang serius dengan menggalakkan pembangunan fasilitas infrastruktur untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa di berbagai bidang, seperti pembangunan jalan, bendungan/waduk, pelabuhan dan bandara, serta Kementerian/Lembaga, semisal pendidikan kewirausahaan bagi kaum muda yang diselenggarakan Kementerian Pemuda dan Olah Raga, riset-riset di

¹⁷³ Joko Widodo menyampaikan: “Semua orang Indonesia adalah saudara sebangsa. Jika dalam beberapa waktu terakhir ini ada gesekan antarkelompok dalam masyarakat, mulai saat ini saya meminta hal-hal tersebut untuk segera dihentikan! Jangan saling hujat karena kita adalah saudara. Jangan saling menjelekkan karena kita ini adalah saudara. Jangan saling fitnah karena kita ini adalah saudara. Jangan saling menolak karena kita ini adalah saudara. Saya telah memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan. Yang mengganggu NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. <https://www.facebook.com/Jokowi/> diakses 26 Mei 2017.

dunia kampus yang bekerjasama dengan dunia usaha atau bisnis baik di lingkungan Kemenristek-Dikti maupun Kementerian Agama RI. Demikian juga pemberdayaan ekonomi pedesaan juga menjadi perhatian serius dengan mendorong lahirnya Badan Usaha Milik Desa dan Koperasi untuk melahirkan kemandirian ekonomi rakyat. Demikian juga sosialisasi literasi keuangan untuk memberikan pengetahuan dan akses keuangan bagi masyarakat.

*Ketiga, **Kepentingan Nasional (Nasionalisme Ekonomi)***, di mana “nasionalisme ekonomi; bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri”.¹⁷⁴ Dalam rangka membangun ekonomi nasional yang merata dan berdaulat secara politik, agama Islam mengajarkan pentingnya menjaga kepentingan nasional sebagai dasar dalam menjaga kemaslahatan umat. Al-Qur’an mengajarkan perlunya menghindari aktivitas ekonomi yang bathil, misalnya monopoli.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

62

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. al-Baqarah [2]: 188).

Dalam aktivitas keumatan dan kebangsaan, pembangunan ekonomi yang adil menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dengan menekankan perlunya internalisasi nilai-nilai agama Islam. Dengan ikhtiar dan tawakkal kepada Allah SWT, pada acara Nuzulul Qur’an 1438 H, Presiden Joko Widodo mengajak semua elemen umat dan bangsa untuk mendukung dan mendorong penyerapan anggaran pembangunan nasional secara merata dan bisa dirasakan langsung masyarakat.

12

¹⁷⁴ San Afri Awang, *Konsep Ekonomi Kerakyatan dan Aplikasinya pada Sektor Kehutanan*, <http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sanafri.htm>, diakses 3 Mei 2017.



Bung Karno dan K.H.A. Wahab Hasbullah sedang berdo'a untuk kedjajaan Agama, Bangsa dan Negara

(Dokumen Foto)¹⁷⁵

Selain itu, dengan bersandar pada Allah SWT, dan doa di malam Peringatan Nuzulul Qur'an 1436 Hijriah sekarang ini, pemerintah mendorong penyerapan anggaran pembangunan nasional agar ekonomi masyarakat bergerak, khususnya usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro, usaha-usaha menengah, dan program bantuan nasional. Karena itu, dilandasi dengan niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah ingin mempercepat realisasi program-program pembangunan yang sudah ditetapkan.¹⁷⁶

¹⁷⁵ "Kemesraan Bung Karno & Mbah Wahab Hasbullah", <http://www.pcnupati.or.id/2017/04/kemesraan-bung-karno-mbah-wahab.html>, diakses 29 november 2017.

¹⁷⁶ Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Acara Peringatan Nuzulul Qur'an Nasional*, di Istana Negara, Jakarta, Tanggal 3 Juli 2015, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9534&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, al-Qur'an mengajarkan pentingnya membangun kedalaman spiritualitas dan kepekaan sosial dalam membangun sistem perekonomian, sehingga arahnya berpihak pada rakyat/masyarakat kecil dan kaum fakir-miskin sebagaimana ajaran zakat yang bertujuan membangun keadilan dalam bidang ekonomi.

Dari sudut pandangan itulah kita harus melihat kewajiban membayar zakat fitrah pada bulan Ramadhan, terutama menjelang akhir bulan suci itu. Seperti diketahui, fitrah merupakan konsep kesucian asal pribadi manusia, yang memandang bahwa setiap individu dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Karena itu zakat fitrah merupakan kewajiban pribadi berdasarkan kesucian asalnya, namun memiliki konsekuensi sosial yang sangat langsung dan jelas. Sebab, seperti halnya dengan setiap zakat atau "sedekah" (*shadaqah*, secara etimologis berarti "tindakan kebenaran") pertama-tama dan terutama diperuntukkan bagi golongan fakir-miskin serta mereka yang berada dalam kesulitan hidup seperti *al-riqab* (mereka yang terbelunggu, yakni, para budak; dalam istilah modern dapat berarti mereka yang terkungkung oleh "kemiskinan struktural") dan *al-gharimun* (mereka yang terbebani berat hutang), serta ibn al-sabil (orang yang terlantar dalam perjalanan), demi usaha ikut meringankan beban hidup mereka. Sasaran zakat yang lain pun masih berkaitan dengan kriteria bahwa zakat adalah untuk kepentingan umum atau sosial, seperti sasaran amil atau panitia zakat sendiri, kaum mu'allaf, dan sabil-Allah ("sabilillah", jalan Allah), kepentingan masyarakat dalam artian yang seluas-luasnya.¹⁷⁷

Kepentingan masyarakat umum di negara bangsa adalah menjaga kemandirian ekonomi dan kedaulatan politik bangsa, sehingga segala sumber daya ekonomi yang dimiliki negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat hingga lapisan yang terbawah. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi Indonesia harus mengubah orientasi, dari konsumtif menjadi produktif agar bisa mandiri, sehingga kita harus mengalihkan subsidi yang tinggi dengan menaikkan harga BBM untuk kepentingan pembangunan yang

¹⁷⁷ Nurcholish Madjid, "Penghayatan Makna Ibadah Puasa: Sebagai Pendidikan Tentang Kesucian serta Tanggung Jawab Pribadi dan Kemasyarakatan" dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam ...*, hlm. 418-419.

produktif seperti pembangunan infrastruktur dan juga kita harus menghemat.¹⁷⁸ Dalam hal ini, M Jusuf Kalla menyebutkan:

Mungkin hari ini kita berbicara para pengusaha pelayaran ada optimisme, minggu depan saya akan berbicara di hadapan pengusaha hotel dan restoran. Pasti mengeluh lagi karena hotel sepi akibat pemerintah melarang rapat di hotel. Jadi *no free lunch*. Untuk mengembangkan infrastruktur korbannya di konsumsi. Untuk efisiensi korbannya hotel. Tidak ada cara lain karena hal tersebut untuk menumbuhkan ekonomi yang produktif, bukan ekonomi konsumtif. Akan tetapi kalau ekonomi baik, timbul konsumen baru. Orang suka jalan-jalan, pesiar, atau pengusaha banyak datang ke daerah, sehingga hotel kembali tumbuh.¹⁷⁹

Keempat, Keadilan Sosial, yaitu: “keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggung jawab, menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹⁸⁰ Dalam manajemen birokrasi, program pembangunan nasional yang dijalankan berada dalam garis kontrol yang terprogram dan terencana melalui Program Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK, sehingga program ke depan dibangun sistem perencanaan terintegrasi dan sistematis antara berbagai Kementerian/Lembaga baik pada tataran konseptual maupun tataran praktis, sehingga program pembangunan itu dapat terpantau langsung dan masuk kategori bagian dari program Nawacita.¹⁸¹

Dengan meminjam paradigma *maqâshid al-syari’ah*, kita dapat menyatakan bahwa pembangunan perekonomian nasional merupakan hal penting yang menjadi perhatian berbagai kalangan. Syari’at Islam

¹⁷⁸ M Jusuf Kalla, “Disampaikan pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional Indonesia Shipowers Association (INSA) 2014, 10 Desember 2014”, dalam Husain Abdullah dan Burhanuddin Bella (eds.), *74 Kumpulan Pidato Pilihan M Jusuf Kalla 2014-2015, Satu Digit*, (Jakarta: Buku Republika, Cet II., 2016), hlm. 42.

¹⁷⁹ M Jusuf Kalla, “Disampaikan pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional Indonesia Shipowers Association (INSA) 2014, 10 Desember 2014”, dalam Husain Abdullah dan Burhanuddin Bella (eds.), *74 Kumpulan Pidato Pilihan M Jusuf Kalla 2014-2015...*, hlm. 42-43.

¹⁸⁰ San Afri Awang, *Konsep Ekonomi Kerakyatan dan Aplikasinya pada Sektor Kehutanan*, <http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sanafri.htm>, diakses 3 Mei 2017.

¹⁸¹ Bandingkan dengan pemikiran San Afri Awang, *Konsep Ekonomi Kerakyatan dan Aplikasinya pada Sektor Kehutanan*, <http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sanafri.htm>, diakses 3 Mei 2017.

mengajarkan perlunya menginfaqkan/membelanjakan harta benda dalam bentuk zakat, sedekah atau bisnis yang bisa memberdayakan warga masyarakat. Allah berfirman yang artinya: *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik* (Q.S. al-Baqarah [2]: 195). Oleh sebab itu, segala bentuk distribusi atau perputaran roda perekonomian merupakan bagian dari kegiatan infaq atau perbuatan *tabarruk* (sedekah). Di samping itu, syariat Islam juga menekankan perlunya menjamin pemerataan ekonomi, sehingga tidak boleh harta benda hanya berputar di kalangan elit pengusaha saja, tetapi juga harus berputar di kalangan kelas menengah ke bawah. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah swt yang artinya: *supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu* (Q.S. al-Hasyr [59]: 7).¹⁸²

Dalam ajaran Islam, keadilan sosial menjadi titik tekan dalam mewujudkan kemaslahatan hidup umat secara umum, bukan hanya kemaslahatan personal, sehingga Islam mengutuk setiap tindakan orang yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya saja dan kemudian mengabaikan nasib kaum du'afa', fakir miskin dan anak terlantar.

Ketika Kyai Ahmad Dahlan mulai menapak jalan menuju cita-cita reformasi Islam di Indonesia, beliau memperkenalkan dan mempropagandakan sebuah surat pendek al-Qur'an dari Juz 'Amma, yaitu surat al-Ma'un (QS 107). Surat itu sendiri sudah merupakan bagian dari hafalan baku para santri, khususnya para imam shalat, dan termasuk yang sering dibaca dalam shalat itu. Tetapi, sampai dengan tampilnya Kyai Dahlan dengan Muhammadiyah, kaum muslim Indonesia seperti tidak pernah tersentuh oleh makna dan semangat firman Allah itu, dan tidak pula menyadari betapa surat pendek itu dapat menjadi pangkal gerakan kemanusiaan yang besar dan mendalam seperti Muhammadiyah dengan amal-amal sosialnya. Seperti kita ketahui, surat al-Ma'un itu terjemahnya, kurang lebih adalah: Pernahkah engkau lihat (hai Muhammad), orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak berjuang untuk memberi makan orang miskin. Maka celakalah untuk orang-orang yang shalat, yaitu mereka yang akan shalat tetapi

¹⁸² 'Abd al-Majid al-Najjār, *Maqāshid al-Syari'ah ...*, hlm. 204.

lalai, yaitu mereka yang suka pamrih kepada sesama, dan yang enggan memberi pertolongan.¹⁸³

Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, Joko Widodo menekankan perlunya membangun kesadaran dalam pembangunan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan dengan mengatasi kemiskinan dan kesenjangan untuk menuju tata kehidupan yang adil, makmur dan sejahterah. Usaha menuju ke arah pembangunan yang adil, makmur dan sejahterah tersebut tidak mudah, sehingga kita semua harus bersama-sama untuk mendukung, mendorong dan mengembangkan segala potensi anak bangsa untuk memajukannya dalam segala aspeknya, terutama bidang ekonomi yang sedang kita jadikan salah satu prioritas utama.

Senada dengan Presiden Joko Widodo, M Jusuf Kalla juga berpendapat sama tentang salah satu prioritas utama pembangunan nasional, yakni reorientasi ekonomi dari konsumtif ke produktif agar tercapai keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan. Hal itu memiliki alasan logis yang cukup rasional-faktual, misalnya dalam masalah pangan, itu sangat rentan pada masalah sosial dan politik. Kalau kurang baju, kurang rumah, paling orang tinggal dengan mertua atau tinggal dengan teman. Namun, kalau rakyat kurang pangan, bisa demo ke DPR. Tidak ada demo kalau kurang baju, kurang rumah, dan kurang motor. Oleh sebab itu, kita harus berterima kasih kepada petani, tanpa petani kita akan sulit hidup. Tetapi petani tidak bisa produksi dengan baik jika tidak ada tenaga ahli pembina, tidak ada saluran irigasi, dan alat pertanian. Semuanya saling terkait antara Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Prumahan Rakyat. Karenanya, Wakil Presiden M Jusuf Kalla juga mengajak seluruh elemen bekerja bersama-sama untuk meningkatkan produksi pangan sebagai kebutuhan primer (baca: *dlarūrī*), bekerja bersama-sama menuju kemandirian, bersama-sama mendukung pertanian yang maju, sehingga petani sejahterah dan juga masyarakat.¹⁸⁴

¹⁸³ Nurcholish Madjid, "Masalah Simbol Dan Symbolisme Dalam Ekspresi Keagamaan" dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam ...*, hlm. 451.

¹⁸⁴ M Jusuf Kalla, "Disampaikan pada saat menghadiri Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2015 di Palembang, 17 Oktober 2015", dalam Husain Abdullah dan

Untuk mendukung program pembangunan ekonomi nasional, nilai-nilai agama, dalam hal ini juga agama Islam, pada dasarnya dapat menjadi landasan motivasi dalam meningkatkan etos kerja sebagaimana ajaran agama Islam telah menegaskan bahwa membangun hubungan baik dengan Allah swt harus juga terkait dengan amal kebajikannya dengan sesama umat manusia. Jika tidak, maka perilaku itu dianggap mendustakan ajaran agama Islam. Dalam hal ini, Joko Widodo menyampaikan:

Dalam kesempatan yang khidmat dan penuh makna ini, saya mengajak seluruh umat Islam dan segenap komponen bangsa di seluruh tanah air untuk menyadari dan mengimplementasikan konsep pembangunan Indonesia sebagai negara bertuhan, negara religius yang terbebas dari kemiskinan, dari kesenjangan sosial, menjadi sebuah negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Mari kita maknai nilai-nilai Isra Mi'raj sebagai bagian dari revolusi mental karakter bangsa, utamanya dalam memantapkan karakter bangsa kita sebagai bangsa yang memiliki potensi, yang memiliki talenta individual yang kuat daya intelektualnya dan pikirannya, serta memiliki jiwa mandiri dan *spirit* untuk berdikari. Negara yang kita cintai ini akan kuat. Radikalisme dan anarkisme tidak akan berpeluang untuk tumbuh subur, dan ketahanan nasional akan kokoh, jika kemiskinan dan pengangguran dapat kita tanggulangi bersama melalui pembangunan ekonomi, pembangunan pendidikan, serta pengelolaan zakat bagi umat Islam yang tersistem dan profesional.¹⁸⁵

Burhanuddin Bella (eds.), *74 Kumpulan Pidato Pilihan M Jusuf Kalla 2014-2015...*, hlm. 66-67.

¹⁸⁵ Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Saw Tahun 1436 Hijriah* di Istana Negara, Jakarta Tanggal 15 Mei 2015, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9365&Itemid=, diakses 26 Juni 2016

Ibadah yang berkualitas itu tampak dari perilakunya. Rendah hati dan tidak emosional

PRESIDEN JOKO WIDODO



(Sumber Data Foto)¹⁸⁶

Menangkal radikalisme dan anarkisme menjadi keniscayaan yang harus kita lakukan adalah dengan mengentaskan kemiskinan dan menanggulangi pengangguran melalui pembangunan ekonomi kerakyatan atau keumatan, pembangunan pendidikan, serta pengelolaan zakat bagi umat Islam yang tersistem dan profesional. Arah kebijakan Presiden Joko Widodo merupakan bagian dari pengamalan spirit dari al-Qur'an Surat al-Ma'un yang memberikan harapan bagi pembangunan kesejahteraan lahir maupun batin, sehingga kaum fakir miskin mendapatkan perhatian dari kalangan yang berkecukupan atau kebijakan afirmatif pemerintah,

¹⁸⁶ <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 26 Mei 2017

sedangkan kalangan yang berkecukupan atau kebijakan pemerintah merepresentasikan pengamalan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa atau sebagai ungkapan amaliyah dari keimanan yang sejati.

Fikih al-Ma'un adalah fikih harapan, pemahaman agama yang memberi pengharapan. Oleh karena memberi pengharapan, maka otomatis fikih itu juga menjadi pemahaman yang menggembirakan. Harapan dan kegembiraan itu tidak hanya dirasakan oleh yatim dan miskin dalam pengertian luas yang menjadi penyandang masalah sosial yang diuntungkan oleh fikih itu, tapi juga oleh mereka yang menghayati Islam sebagai agama rahmat yang memberikan kebaikan nyata kepada seluruh alam. Apabila yang pertama mendapatkan harapan dan kegembiraan dengan dimanusiakan, maka yang kedua mendapatkannya dengan terbukanya ladang amal untuk mengungkapkan keimanan yang sejati, keimanan kepada Allah yang Maha Rahman dan Rahim tanpa mengorbankan kemanusiaan seperti yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim sebagai panutan kaum beriman dan Nabi Muhammad Saw. sebagai imam dan teladan umat Islam. Dengan penafsiran dan penerapannya yang memberikan kebaikan yang nyata, maka Fikih al-Ma'un menjadi pemahaman yang sesuai dengan fungsi sosial-moral al-Quran yang ditegaskan dalam Q.S. Yunus [10]: 57, yakni sebagai *mau'idhah, syifâ', hudâ dan rahmah*.¹⁸⁷

Hubungan spiritualitas/iman dengan amal perbuatan diatur dalam firman Allah Surat al-Ma'un yang memberikan pedoman dalam membangun sikap kesejatian beragama Islam, yakni dengan sikap keberagamaan/keimanan Islam yang kokoh, maka juga harus memberikan implikasi terhadap amal perbuatan terhadap masyarakat yang lemah, yang dalam istilah al-Qur'an dikenal dengan anak yatim. Jika kita tidak memberikan perhatian yang proporsional, maka kepalsuan dapat terjadi dalam sikap keagamaan kita lantaran tidak memiliki komitmen keimanan untuk berusaha menegakkan keadilan sosial. Anak yatim dan orang miskin menjadi sebutan khusus karena mereka merupakan kelompok sosial yang paling memerlukan usaha bersama untuk memperbaiki nasib mereka. Dalam hal ini, anak yatim dan orang miskin merupakan representasi dari elemen masyarakat yang paling tidak beruntung karena berbagai sebab dan cara. Dengan kata lain, pengamalan agama Islam tidak cukup hanya dengan

¹⁸⁷ Hamim Ilyas, "Kebencanaan dalam Perspektif Islam: Kosepsi al-Qur'an dan Hadis tentang Kepedulian (Fikih Al-Ma'un)", http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfile/tarjih/download/Workshop%20Fikih%20Bencana_Makalah%20Narasumber_Hamim.pdf, diakses Juli 2018, hlm. 6.

formalitasnya saja, tetapi juga harus memahami dan mengamalkan hikmah dan manfaat dari pelaksanaan ibadah itu yang memberikan implikasi sosial yang riil.¹⁸⁸ Nurcholish Madjid menjelaskan:

Penilaian diri kita sebagai pendusta agama atau beragama secara palsu karena tidak memiliki komitmen sosial yang makin diperburuk oleh tingkah laku lahiriah kita sendiri yang nampak seperti menjalankan ibadah formal, namun tidak menghayati dan tidak mewujudkan-nyatakan hikmahnya. Dikatakan semakin diperburuk karena kepalsuan kita dalam beragama memperoleh bungkus kebajikan berupa amalan ibadah lahiriah, dan bungkus itu dengan sendirinya akan mempunyai dampak penipuan. Karena itulah Allah mengutuk orang yang menjalankan ibadah formal serupa itu namun ia lupa atau lalai akan ibadah mereka sendiri. Artinya, sementara kita mungkin rajin menjalankan ibadah-ibadah formal seperti shalat, namun ibadah itu tidak mempengaruhi tingkah laku kita yang lebih mendalam, yang tingkah laku itu bakal membentuk budi pekerti luhur. Sebab mungkin kita sendiri tidak merasa, kita menjalankan ibadah-ibadah hanyalah untuk memenuhi kemestian-kemestian sosial kultural semata, seperti kemestian yang ada pada pola pergaulan dalam suatu kelompok, misalnya, "kelompok orang-orang Islam." Artinya, kita melakukan ibadah karena menghayati bahwa shalat adalah perintah Allah lalu tidak menghayati apa makna shalat itu yang lebih mendalam dan luas. Jadi sesungguhnya kita menjalankan ibadah itu karena pamrih atau riya', sekurang-kurangnya mungkin sekali kita sekedar pamrih kepada sesama anggota kelompok Islam. Indikasinya ialah kesegaran untuk berkorban guna memberi pertolongan kepada orang yang perlu, biarpun sedikit.¹⁸⁹

Ajaran agama Islam menekankan prinsip kerjasama dalam kebaikan dan menolak kerjasama dalam hal keburukan. Prinsip ini dalam bidang ekonomi syariah memiliki peran vital karena kerjasama untuk mewujudkan kebaikan bersama menjadi inti dari adanya pesan al-Qur'an (al-Hasyr [59]:7) yang mengajarkan pemerataan dan keadilan dalam sinaran partisipasi aktif masyarakat untuk membangun ekonomi masyarakat, sehingga tidak boleh ada kesenjangan dan monopoli. Hal ini juga diajarkan dalam susbtansi ekonomi kerakyatan dalam UUD-NRI 1945 yang dikemukakan oleh San Afri Awang,

¹⁸⁸ Nurcholish Madjid, "Masalah Simbol Dan Symbolisme Dalam Ekspresi Keagamaan" dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam ...*, hlm. 451-452.

¹⁸⁹ Nurcholish Madjid, "Masalah Simbol Dan Symbolisme Dalam Ekspresi Keagamaan" dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam ...*, hlm. 452.

dengan rumusan secara garis besar sebagai berikut: (a) Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional; (b) Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional; (c) Kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional itu harus berlangsung di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Di samping itu, negara juga wajib menjalankan misi demokratisasi modal melalui berbagai upaya sebagai berikut: (a) demokratisasi modal material; (b) demokratisasi modal intelektual; dan (c) demokratisasi modal institusional.¹⁹⁰ Salah satu contohnya melalui dana desa, pemerintah harus terus menggalakkan kebijakan padat karya.

Ajaran agama Islam yang mengajarkan perlunya membangun peran persaudaraan (*ukhuwah*) memiliki relevansi dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang digariskan para pendiri bangsa Indonesia, dalam sistem koperasi, sehingga terwujud adanya sistem kepemilikan saham, partisipasi dan kontrol bersama dari anggota masyarakat. Dengan prinsip kopresi itu, kita juga dapat mengamalkan ajaran al-Qur'an (al-Hasyr [59]:7) yang mengajarkan adanya keseimbangan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sehingga dalam surat al-Qur'an yang lain (al-A'raf [7]: 31) juga dinyatakan bahwa kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam makan dan minum, yang berarti bahwa keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi/usaha merupakan bagian dari usaha menghindari tindakan yang berlebih-lebihan dalam mengelola bisnis dan sekaligus menghindari terjadinya kesenjangan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah tersebut memiliki relevansi dengan konsep ekonomi kerakyatan yang dikemukakan oleh San Afri Awang yang menyebutkan; (a) pentingnya peran pemerintah dalam roda perekonomian untuk menjamin kemakmuran masyarakat; (b) efisiensi ekonomi berdasar atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan; (c) mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar, dan kerjasama (kooperasi); (d) pemerataan penguasaan faktor produksi; (e) koperasi sebagai sokoguru

¹⁹⁰ San Afri Awang, *Konsep Ekonomi Kerakyatan dan Aplikasinya pada Sektor Kehutanan*, <http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sanafri.htm>, diakses 3 Mei 2017.

53

perekonomian; (f) pola hubungan produksi kemitraan, bukan buruh-majikan; dan (g) kepemilikan saham oleh pekerja.¹⁹¹

Dalam konteks ini, program pembangunan ekonomi dan peningkatan produktifitas selama tiga tahun Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden M Jusuf Kalla memberikan gambaran ikhtisar sebagaimana berikut: *Pertama*, Pusat pertumbuhan ekonomi baru yang diselenggarakan dengan pembangunan infrastruktur, energi, persiapan ASIAN Games 2018, dan Ekonomi kreatif dan pariwisata. Pembangunan infrasturktur ditujukan untuk mendukung ketersediaan energi dan menyiapkan kawasan industri, sehingga efisiensi dan daya saing produk-produk barang dan jasa meningkat dan juga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi produktif. Program pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dilakukan dengan mengembangkan kawasan untuk mendorong gerak ekonomi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, membangun Kawasan Ekonomi Khusus (12 wilayah), Kawasan Industri (KI 17 wilayah), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP 10 wilayah), dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN 26 wilayah). Selain itu, juga perhatian terhadap ekonomi umat, kawasan perbatasan dan 3 T (terluar, terdepan dan teringgal).¹⁹²

Kedua, pembangunan dalam rangka peningkatan ekonomi maritim yang diselenggarakan dengan melakukan pembangunan budidaya ikan, kesejahteraan nelayan, dan penegakkan hukum. Poros maritim Indonesia dibangun dengan pembangunan pelabuhan dan tol laut untuk menurunkan harga-harga barang di jalur yang dilalui. Nelayan diberikan perlindungan dengan jaminan asuransi nelayan. Sumber daya maritim dilindungi dan kedaulatan atas laut ditegakkan. Demikian juga potensi kelautan kita kembangkan dengan membangun industri pengolahan ikan, bioteknologi, pertambangan dan energi, wisata bahari, transportasi laut, jasa maritim sumber daya pulau-pulau kecil dan hutan mangrove.¹⁹³

¹⁹¹ San Afri Awang, *Konsep Ekonomi Kerakyatan dan Aplikasinya pada Sektor Kehutanan*, <http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sanafri.htm>, diakses 3 Mei 2017.

¹⁹² Laporan 3 Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Dokumen KSP RI, 2017, hlm. 9 dan 21.

¹⁹³ Laporan 3 Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla..., hlm. 9 dan 36.

Ketiga, pembangunan dalam rangka peningkatan investasi yang dilakukan dengan melakukan deregulasi dan upaya-upaya peningkatan investasi. Pemerintah terus membenahi fundamental ekonomi Indonesia termasuk 15 paket kebijakan ekonomi dengan cara mencabut, menggabung dan menyederhanakan regulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan adanya kerja keras dan cerdas itu, Indonesia akhirnya mendapat status “layak investasi” dari tiga lembaga internasional. Peningkatan investasi turut mendukung peningkatan jumlah serapan tenaga kerja. Oleh sebab itu, realisasi investasi pada Semester I 2017 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, terjadi kenaikan 12,9%.¹⁹⁴

Keempat, pembangunan dalam rangka peningkatan produktifitas yang diselenggarakan melalui pendidikan tinggi dengan mengatasi tantangan pendidikan tinggi nasional agar semakin banyak berprestasi pada level internasional, misalnya publikasi internasional meningkat dari 8.098 tahun 2015 menjadi 12.077 tahun 2017, jumlah HKI dari 1.877 tahun 2015 menjadi 4.018 tahun 2017; program pendidikan vokasi dan sertifikasi yang melibatkan ratusan perusahaan untuk membina SMK yang kini jumlahnya sudah sekitar 1,035. Jumlah murid lulus sekolah meningkat dan jumlah putus sekolah menurun; dan pendekatan hoslitik terhadap ketenagakerjaan Indonesia untuk meningkatkan produktifitas termasuk pendidikan vokasi bagi mereka serta menurunkan jumlah pengangguran.¹⁹⁵

Dalam hal yang senada, al-Najjâr berpendapat bahwa pemerataan ekonomi dengan menjadikan harta bisa beredar dengan baik dan benar dalam sistemnya merupakan bagian dari *hifdz al-mâl* dalam pengertian bahwa harta benda harus beredar di kalangan umat manusia, tidak boleh ada monopoli bisnis dan penimbunan harta untuk kepentingan keuntungan seseorang. Oleh sebab itu, Allah berfirman yang artinya: *Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih* (Q.S. At-Taubah [9]: 34). Menurut al-Najjâr, ayat ini memberikan

¹⁹⁴ Laporan 3 Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla..., hlm. 9, 16-17 dan 19.

¹⁹⁵ Laporan 3 Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla..., hlm.9 dan 30-34.

ancaman yang tegas terhadap tindakan monopoli bisnis dan penimbunan harta benda untuk kepentingan pribadi.¹⁹⁶

Dalam kategori *hifdz al-mâl*, kita harus mampu membangun sistem perekonomian yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat, tidak boleh ada kesenjangan. Adapun pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh faktor-faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa besaran belanja pemerintah yang tercermin dalam APBN. Adapun faktor eksternal dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dunia. Ada kabar baik bahwa mulai pulihnya ekonomi dunia, meski masih tipis. *International Monetary Fund* merilis, ekonomi dunia tumbuh sebesar 3,1% pada 2016 dan diperkirakan terus naik menjadi 3,5% pada 2017 dan 3,6% pada 2018. Kondisi ekonomi dunia juga menentukan pertumbuhan perekonomian Indonesia, karena sebagian pendapatan Indonesia masih ditopang oleh ekspor komoditas primer, seperti batubara, karet, dan minyak sawit.¹⁹⁷

¹⁹⁶ 'Abd al-Majid al-Najjâr, *Maqâshid al-Syari'ah* ..., hlm. 203.

¹⁹⁷ *Upaya Nyata Pemerintah Membuka Lapangan Kerja, 18 May 2017*, <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/upaya-nyata-pemerintah-membuka-lapangan-kerja.html>, diakses 15 September 2017.



(Presiden Joko Widodo sedang meninjau lokasi pasar, Dokumentasi Foto)¹⁹⁸

Berangkat dari kondisi perekonomian tersebut, pemerintahan Presiden Joko Widodo menyusun kebijakan strategis untuk membuka lapangan pekerjaan di antaranya sebagai berikut: *Pertama*, mendorong pembangunan infrastruktur, melalui penyediaan anggaran melalui APBN, BUMN, dan swasta. Dalam jangka pendek, program ini akan menjadi lokomotif dalam memberikan ruang untuk lapangan kerja. Anggaran infrastruktur terus ditingkatkan, tahun 2015 berjumlah Rp 290 triliun, tahun 2016 berjumlah Rp 313 triliun, dan tahun 2017 berjumlah Rp 387 triliun. Dengan demikian, dalam rentang waktu 2015-2017, anggaran infrastruktur di dalam APBN sudah mencapai Rp 990 triliun.¹⁹⁹

¹⁹⁸ *Upaya Nyata Pemerintah Membuka Lapangan Kerja, 18 May 2017*, <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/upaya-nyata-pemerintah-membuka-lapangan-kerja.html>, diakses 15 September 2017.

¹⁹⁹ *Upaya Nyata Pemerintah Membuka Lapangan Kerja, 18 May 2017*, <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/upaya-nyata-pemerintah-membuka-lapangan-kerja.html>, diakses 15 September 2017

Kedua, menumbuhkan investasi melalui perbaikan kebijakan dengan menyederhanakan sistem perizinan dan penyediaan sarana investasi dalam bentuk; penyederhanaan sistem perizinan investasi, layanan perizinan terpadu, percepatan penyelesaian masalah investasi, pengembangan infrastruktur pendukung kawasan strategis, dan peningkatan kemudahan berusaha, khususnya Paket Kebijakan Ekonomi XII. Hasil kebijakan tersebut adalah “realisasi investasi yang dicatat Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan, pada 2015 total investasi sebesar Rp 545 triliun, terbagi: Rp 179,5 triliun PMDN dan Rp 365,9 triliun PMA. Sementara untuk tahun 2016 meningkat menjadi Rp 612,8 triliun dengan rincian Rp 216,2 triliun PMDN dan Rp 396,6 triliun PMA”.²⁰⁰



(Dokumentasi Foto)²⁰¹

Ketiga, pemerintah mendorong penyelenggaran sistem pendidikan vokasional untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu.

²⁰⁰ Upaya Nyata Pemerintah Membuka Lapangan Kerja, 18 May 2017, <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/upaya-nyata-pemerintah-membuka-lapangan-kerja.html>, diakses 15 September 2017

²⁰¹ Upaya Nyata Pemerintah Membuka Lapangan Kerja, 18 May 2017, <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/upaya-nyata-pemerintah-membuka-lapangan-kerja.html>, diakses 15 September 2017.

Sasaran yang hendak dibidik pemerintah adalah menyiapkan lahirnya ⁵ 1,1 juta tenaga kerja untuk memenuhi permintaan industri. Langkah ini bersifat strategis, karena investor memerlukan tenaga terampil yang siap kerja untuk menjalankan kegiatan industrinya. Keempat, kebijakan pemerintah dalam alokasi Dana Desa terus ditingkatkan. Tahun 2017 dialokasikan Dana Desa sebesar Rp 60 ⁷⁷ triliun, tahun 2016 sejumlah Rp 46,98 triliun, tahun 2015 sebesar Rp 20,8 triliun. Bahkan Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan untuk alokasi anggaran tahun 2018 menjadi lebih besar lagi.²⁰²

Dalam konteks pembangunan desa, Muktamar Muhammadiyah ke-47 juga merumuskan *Indonesia Berkemajuan* sebagai “suatu pemikiran yang mendasar dan mengandung rekonstruksi yang bermakna dalam kehidupan kebangsaan bagi terwujudnya cita-cita negara dan bangsa yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat sejajar dengan bangsa dan negara lain yang telah mencapai keunggulan.” Arah kebijakan Muhammadiyah tersebut menjadi *guidance* dalam program-program kerjanya, di antaranya membangun gagasan desa berkemajuan, sehingga dalam hal ini, kita harus berbenah untuk membangun kekuatan sosial-politik, potensi sosial-ekonomi, dan karakter sosial-budaya sebagai pilar desa yang tangguh. Hal itu dapat dijabarkan berikut:²⁰³

Pertama, untuk membangun struktur sosial politik yang baik perlu gagasan pembangunan yang sistemik harus benar-benar dapat dioperasionalkan di lapangan (*applicable*) dan terukur dengan mengambil ide-ide positif pelaksanaan *good governance* yang dipekerjakan di level desa. Modal sosial di desa harus menjadi modal yang fungsional untuk menggerakkan roda kemajuan dan keunggulan desa. Termasuk, UU desa juga haruslah dilihat sebagai *politics of hope* yang membawa optimisme dan bukan sebaliknya. Ketakutan pengelolaan dana besar dari aspek menegerial dan SDM harus diatasi dengan sistem kerja kolaborasi antara desa, pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan—termasuk di dalamnya Muhammadiyah. Dengan spirit ‘golong gilik’ watak politik akan menjadi ramah dan produktif. Untuk memastikan agenda tersebut diperlukan

¹⁸ ²⁰² Upaya Nyata Pemerintah Membuka Lapangan Kerja, 18 May 2017, <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/upaya-nyata-pemerintah-membuka-lapangan-kerja.html>, diakses 15 September 2017.

²⁰³ David Efendi, Menyemai Gagasan Desa Berkemajuan, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/12/25/menyemai-gagasan-desa-berkemajuan/3/>, diakses 14 September 2017.

'kepemimpinan profetik dan Institusi yang progresif' yaitu peran agency dan sistem yang saling menopang, saling menguatkan. *Kedua*, pembangunan bidang sosial ekonomi merupakan pilar yang sangat penting untuk membawa desa menjadi desa maju yaitu desa yang mandiri atau memiliki ketahanan di bidang pangan, ekologi yang terkendali, dan adanya kegiatan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan sesuai potensi yang dimiliki: pertanian, perkebunan, perikanan, industri kreatif, UMKM, dan sebagainya. Potensi pariwisata atau ecowisata yang selain rekreatif juga bernuansa edukatif nampaknya dimiliki oleh banyak desa-desa di Indonesia. Dukungan pemerintah untuk memperkuat koperasi desa atau BUMDes harus menjadi pemicu untuk memulai upaya memperkuat ekonomi di desa. Keberadaan ranting Muhammadiyah atau organisasi yang mempunyai aktifitas ekonomi lainnya yang ada di desa-desa juga menjadi modal besar untuk mewujudkan desa berdaya, unggul, dan berdaya saing. Hal ini sangat mendesak karena praktik persaingan ekonomi pasar semakin kentara dampaknya sampai ke pelosok desa. Terakhir, untuk melaksanakan pembangunan sektor sosial-budaya, pertama-tama adalah bagaimana membuktikan bahwa agama harus dipercaya sebagai Sumber Nilai Kemajuan yang direpresentasikan dalam pengelolaan lembaga pendidikan yang mencerahkan untuk membangun keadaban publik dalam rangka mendorong pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran, efektif-efisien, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.²⁰⁴

Dalam arah kebijakan pembangunan ekonomi yang berbasis kepentingan rakyat dan masyarakat, Joko Widodo mengingatkan bahwa kita sebagai pemimpin mulai dari pusat hingga daerah harus tanggap terhadap perubahan yang sangat cepat sekali. Karena itu, ia meminta jangan sampai ada yang tidak sadar mengenai perubahan-perubahan yang sangat cepat ini. "Berbahaya sekali pemimpin-pemimpin kita dari pusat sampai ke daerah tidak menyadari ini," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2017. Menurutnya, dulu kita baru berbicara masalah *internet*, belum rampung belajar itu, sudah keluar *mobile internet*. *Mobile internet* belum rampung kita pelajari, keluar lagi *artificial intelligent*. "Perubahan-perubahan seperti ini yang akan terus mengubah *landscape* ekonomi, mengubah *landscape* politik global maupun nasional, maupun di daerah." Dalam hal *artificial intelligent*, kita harus

²⁰⁴ David Efendi, *Menyemai Gagasan Desa Berkemajuan*, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/12/25/menyemai-gagasan-desa-berkemajuan/3/>, diakses 14 September 2017.

belajar dan membaca tuntutan zaman yang mengharuskan kita untuk menggunakan fasilitas informasi dan teknologi canggih yang terus berkembang seperti media Google, Amazon, Alexa seperti apa. “Kita bicara saja dia sudah jawab. Tolong carikan restoran Padang, dia jawab silakan pergi ke alamat ini, di jalan ini. Tolong carikan barang saja, produk, carikan jaket ini, silakan datang ke mall ini. Bayangkan, perubahan-perubahan seperti ini cepat sekali, dan saling mengalahkan.” Kalau kita tidak sadari, kita akan ditinggalkan oleh zaman, ditinggalkan oleh kota lain atau negara lain. Oleh sebab itu, kita harus terus melakukan inovasi dan perbaikan kemampuan *soft skill* dan *hard skill*, kita tidak boleh hanya terkungkung oleh urusan rutinitas.²⁰⁵ Namun demikian, diferensiasi atau distingsi perkembangan kota/kabupaten harus dilakukan, sehingga masing-masing memiliki kelebihan dan keunggulan yang bisa menjadi daya tarik.

Untuk mewujudkan pikiran dan kebijakan inovatif, kita tetap harus berada dalam koridor *hifdz al-din* karena nilai-nilai keberagaman adalah landasan berpikir dan mengambil kebijakan. Adapun *hifdz al-din* itu berdasarkan kebebasan kehendak (*hurriyah al-irâdah*) yang bersumber dari kebebasan berpikir. Oleh sebab itu, iman juga berdasarkan kebebasan berpikir (*hurriyah al-fikr*) karena keyakinan yang terdapat di dalam diri seseorang tidak bisa lahir dari keterpaksaan, tetapi lahir dari hati yang tulus dan ikhlas untuk beragama. Dengan demikian, paradigma *hifdz al-din* dapat menjadi landasan dalam membangun paradigma berpikir dan kebijakan pemerintahan yang dinamis dan inovatif dengan berdasarkan prinsip kebebasan berpikir yang konstruktif. Itulah sebabnya, kerangka konseptual dan kebijakan pemerintahan itu tidak boleh terkungkung oleh rutinitas, kita harus terbebas dari kungkungan-kungkungan eksternal (*mutaharriran min al-quyûd al-khârijyah*) yang tidak berguna.²⁰⁶

Terkait dengan perkembangan kota, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan perlunya diferensiasi kota. Hal yang diakuinya sudah berulang kali disampaikannya. “Diferensiasi kota itu penting sekali,

⁴ ²⁰⁵ Joko Widodo, *Perubahan Sangat Cepat, Presiden Jokowi: Berbahaya Sekali Pemimpin Yang Tidak Menyadari*, (ed. Humas), <http://setkab.go.id/perubahan-sangat-cepat-presiden-jokowi-berbahaya-sekali-pemimpin-yang-tidak-menyadari/>, diakses 23 Juli 2017.

⁶ ²⁰⁶ ‘Abd al-Majîd al-Najjâr, *Maqâshid al-Syarî’ah* ..., hlm. 75.

setiap kota itu memang harus ada pembedanya. Bogor, misalnya, dengan Bali, dengan Denpasar, harus beda, dengan Kota Ambon harus beda lagi, dengan Balikpapan harus beda lagi,”...Menurut Presiden, kekuatan-kekuatan itu harusnya setiap kota yang harus merancang dan menyiapkan. Karena itu, Presiden mengingatkan kembali, jangan terjebak pada rutinitas-rutinitas. “Kalau sudah kejebak ke arah sana, strategi pembangunan 50-100 tahun ke depan tidak kita siapkan, kota ini mau jadi apa? ini harus dibicarakan betul,”....Kepala Negara memberikan contoh Sunnylands, satu kota di California yang hanya mengurus golf. Satu kota punya 37 padang golf, setiap hari ribuan pesawat pribadi itu ke sana, hanya untuk golf. “Saya ke sana kok ini isinya hanya *resort* dan golf, enggak ada yang lain, hotel dan golf, enggak ada yang lain,” papar Kepala Negara seraya menambahkan, dia *summit* di situ juga di dalam padang golf....Presiden Jokowi juga menunjuk contoh di North Carolina, di situ ada kota yang namanya High Point, itu hanya ngurusin satu saja, mebel, yang kebetulan saya tahu, mebel. Hanya di situ ngurusin itu saja, enggak ada yang lain,” terangnya. Setiap tahun, lanjut Presiden, pameran terbesar di dunia untuk urusan mebel di situ, tapi menginapnya enggak mungkin di kota itu karena sudah penuh, sehingga menginap di kota yang lain...Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga meminta kepada para bupati dan wali kota agar mulai merancang sebuah anggaran yang fokus, konsentrasi ke satu hal...“Jadi percaya saya, kalau fokus, kerja fokus. Tapi kalau dibiarkan anggaran itu di ecer-ecer, dinas ini misalnya naik, anggarannya naik Rp100 miliar, sudah bagi 5 persen, 5 persen. Dinas ini 5 persen, dinas itu persen. Ya sudah hilang enggak ada baunya. Karena anggaran tidak fokus,” terang Presiden...Sama seperti sekarang ini APBN, menurut Presiden, dirinya juga hanya ingin fokus kepada infrastruktur karena ini menjadi hal yang sangat mendasar, hal yang sangat dipentingkan bagi kompetisi, *competitiveness* sebuah negara.²⁰⁷

²⁰⁷ Joko Widodo, *Tutup Rakernas APEKSI, Presiden Jokowi Tekankan Perlunya Diferensiasi Kota*, (ed. Humas), <http://setkab.go.id/tutup-rakernas-apeksi-presiden-jokowi-tekankan-perlunya-diferensiasi-kota/>, diakses 23 Juli 2017



(Presiden Joko Widodo saat hadir pada penutupan Rakernas XII APEKSI Tahun 2017, di Savana Hotel & Convention, Kota Malang, Jatim, Kamis, 20 Juli 2017, Dokumentasi Foto: Humas/Jay)²⁰⁸

Pembangunan yang mampu menggali potensi daerah dan mampu membaca peluang potensi bisnis baik skala nasional maupun internasional itu sangat penting dikembangkan, sehingga pemerataan ekonomi bisa terwujud. Pemerataan sebaran anggaran dan penggalian potensi usaha dan pemasaran menjadi perhatian serius dari Pemerintahan Jokowi-JK. Hal itu tidak lain, kecuali untuk mewujudkan tatanan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga syariat/agama Islam yang dibawa Nabi saw bertujuan untuk menegakkan keadilan di kalangan umat manusia (*iqâmah al-‘adl baina al-nâs*). Dalam menjalankan tata kehidupan yang adil, kita harus memberikan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja yang dilakukan, memberikan perlindungan dan perlakuan hak-hak yang setara

²⁰⁸ Joko Widodo, *Perubahan Sangat Cepat, Presiden Jokowi: Berbahaya Sekali Pemimpin Yang Tidak Menyadari*, (ed. Humas), <http://setkab.go.id/perubahan-sangat-cepat-presiden-jokowi-berbahaya-sekali-pemimpin-yang-tidak-menyadari/>, diakses 23 Juli 2017.

baik personal maupun kolektif, serta memberikan perlakuan yang setara dalam kewajiban personal dan kolektif. Al-Qur'an menyebutkan:²⁰⁹

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

13 Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan (Q.S. al-Hadid [57]: 25)

Strategi untuk mewujudkan keadilan sosial yang menjadi cita-cita kita bersama tentu tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan rutinitas saja, tetapi harus ada usaha-usaha inovatif untuk meningkatkan daya saing bangsa ini. Inovasi-inovasi itu tentu saja memerlukan kekuasaan untuk menyusun dan menata kebijakan yang mengarah pada keadilan sosial. Oleh sebab itu, *nasb al-imâm* (mengangkat pemimpin) dalam baik level lokal maupun nasional untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan inovatif yang berkeadilan bagi masyarakat atau bangsa merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Sebab, setiap regulasi hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat/bangsa memerlukan otoritas kekuasaan yang memaksa untuk menerapkan regulasi hukum itu. Hal ini juga masuk kategori *hifdz al-dîn bi al-sulthân* (memelihara agama dengan kekuasaan).²¹⁰ Dengan demikian, inovasi kebijakan untuk menjamin keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia itu menjadi keniscayaan yang harus dilakukan oleh penguasa negara atau pemerintahan.

“Oleh sebab itu jangan senang yang namanya rutinitas, jangan senang yang namanya kejebak hal-hal yang linier, jangan senang yang namanya kejebak kita hal-hal yang monoton, karena dunia berubah sangat cepat sekali,” tutur Kepala Negara. Presiden Jokowi menekankan kembali, jangan sekali-kali kita terjebak pada rutinitas hal-hal yang monoton, hal-hal yang linier. Ia mengingatkan, orang lain sudah meloncat ke mana-mana, negara lain sudah meloncat ke mana-mana, kota yang lain sudah meloncat kemana-mana. Diakui Presiden, dulu kalau memenangkan persaingan, entah antar kota antar negara entah itu yang namanya produk, kita hanya ambil dua hal, lebih efisien, lebih produktif pasti menang. “Sekarang tidak. Dengan dua hal itu tidak cukup, ini hanya cukup untuk menyelamatkan diri, untuk *survive* tapi tidak untuk memenangkan, tidak untuk memenangkan,” jelas Presiden. Menurut Presiden Jokowi. Sekarang ini

²⁰⁹ ‘Abd al-Majîd al-Najjâr, *Maqâshid al-Syari’ah ...*, hlm. 173-174.

²¹⁰ ‘Abd al-Majîd al-Najjâr, *Maqâshid al-Syari’ah ...*, hlm. 72.

kita bisa memenangkan kompetisi, bisa memenangkan persaingan kalau kita, satu, ada inovasi-inovasi yang memperbaharui. Yang kedua, kreativitas. Presiden mengingatkan, masyarakat kita itu berada pada posisi ini, kreatifnya tinggi. Ia menyebutkan, industri kreatif kita ini tinggi nilainya, tapi kalau enggak pemerintah, negara, pemerintah kota tidak bisa mengangkat ini, ya kita terjebak pada rutinitas yang tidak kita sadari, negara yang lain sudah lari kencang kita masih di sini terus.²¹¹

Dalam konteks ini, segala kegiatan yang kita lakukan dalam membangun bangsa dan negara ini harus dinamis, inovatif, kreatif dan aktual, tidak bisa hanya sekadar mengandalkan rutinitas. Kita harus bekerja secara dinamis, kreatif dan inovatif untuk menjawab berbagai permasalahan rakyat, bangsa dan negara. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat itu kemudian mempengaruhi sistem dan tata cara berpolitik dan berbisnis, sehingga kita harus mampu mengikuti perkembangan zaman ini dan selalu mengedukasi rakyat agar segera bergegas untuk terus belajar dan bekerja untuk mengejar segala bentuk ketertinggalan dan meningkatkan daya saing.

Dalam tradisi Pesantren, inovasi yang berbasiskan pada realitas kepentingan masyarakat atau rakyat dikenal dengan kaidah “*al-muhāfadla ala al-qadīm al-shālīh wa al-akhd al-jadīd al-ashlāh*” yang bermakna bahwa memelihara tradisi lama yang baik atau relevan apa pun bentuknya, bisa berupa kepentingan sosial, ekonomi atau pendidikan perlu terus dilestarikan, tetapi kita juga tidak boleh ketinggalan zaman, kita tetap harus membaca perkembangan dan kebutuhan zaman yang berubah begitu cepat. Dengan demikian, kita tidak hanya mampu memelihara jati diri sebagai bangsa yang berkaraker, tetapi juga harus mampu berpikir dinamis dan inovatif dalam menjawab dinamika kebutuhan masyarakat atau rakyat.

Spirit hidup rakyat dan bangsa ini tentu saja bergerak, tidak ada kata berhenti, kita harus terus mengisi Kemerdekaan RI dengan kerja dan bakti untuk membangun bersama rakyat demi menuju peradaban bangsa yang adil, makmur dan sejahterah yang sudah menjadi garis para pejuang dan

²¹¹ Joko Widodo, *Perubahan Sangat Cepat, Presiden Jokowi: Berbahaya Sekali Pemimpin Yang Tidak Menyadari*, (ed. Humas), <http://setkab.go.id/perubahan-sangat-cepat-presiden-jokowi-berbahaya-sekali-pemimpin-yang-tidak-menyadari/>, diakses 23 Juli 2017.

pendiri negara ini. Sebagai penerima warisan yang baik, kita harus mampu merawat dan melestarikan serta mengisinya dengan pembangunan di segala segi untuk memajukan kehidupan rakyat dan bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam paradigma *maqâshid al-syari'ah*, pembangunan regulasi hukum hanya ditujukan untuk memenuhi keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan hidup manusia, sehingga tidak ada ketentuan hukum - termasuk syariat Islam- yang bertujuan mencederai kemaslahatan hidup manusia. Oleh sebab itu, standarisasi pemberlakuan regulasi hukum -dalam syariat Islam- sangat tergantung pada tingkat kekuatan manfaat (*quwwah al-manfa'ah*) atau tingkat kekuatan madlarat (*quwwah al-dlarâr*) yang muncul dalam tata kehidupan manusia, sehingga regulasi hukum itu sangat bergantung kepada keadaan hidup (*syu'un al-hayah*) manusia yang fitrah.²¹²

Prinsip hukum inilah yang menjadi pegangan Joko Widodo dalam mengambil kebijakan nasional, misalnya ketika menyelesaikan masalah kebakaran hutan di wilayah Sumatera yang menjadi targetnya bukan pada teorinya, tetapi bagaimana masalah kebakaran hutan yang rutin setiap tahun bisa berhenti. Aspek manfaat yang luas menjadi titik tekan dalam membuat kebijakan nasional sebagaimana telah dijelaskan di bagian depan. Dalam bahasa al-Najjâr, *maqâshid al-syari'ah* yang dicari dalam pembangunan regulasi hukum adalah untuk mewujudkan hukum yang memberikan pengaruh besar terhadap kemaslahatan hidup manusia dan menjauhkan dari madlarat.²¹³

Pembahasan *maqâshid al-syari'ah* tersebut merupakan bagian dari salah satu rekonstruksi ilmu ushul fiqh untuk menjawab masalah-masalah aktual. Namun demikian, faktanya ilmu ushul fiqh konservatif tidak banyak menyentuh realitas aktual umat, sehingga ilmu ini perlu dilakukan rekonstruksi. Royan Utsany menyatakan bahwa rekonstruksi Ushul Fiqh adalah tema yang menarik untuk dikaji karena usianya yang sudah 13 abad, terhitung sejak Imam Syafi'i menulis kitab *ar-Risalah*. Yusuf Qardawi juga menegaskan bahwa ilmu yang muncul dari rahim umat Islam sangat memungkinkan untuk direkonstruksi, seperti Fiqh dan ilmu Ushul Fiqh.

²¹² Abd al-Majid al-Najjâr, *Maqâshid al-Syari'ah* ..., hlm. 251.

²¹³ Abd al-Majid al-Najjâr, *Maqâshid al-Syari'ah* ..., hlm. 256.

Oleh sebab itu, Ali Jum'ah Muhammad dalam bukunya, *Aliyât al-Ijtihâd*, menyebutkan bahwa orang yang menguasai Ushul Fiqh dan Fiqh secara bersamaan harus juga mengetahui teori dan sistem pengajaran dan tidak lebih dari itu, sehingga Ushul Fiqh seharusnya menjadi *problem solver*-nya umat dalam menjawab masalah-masalah kontemporer. Di samping itu, Hasan Turabi juga mengkritisi ushul fiqh konservatif dan juga Syeikh Abdul Fadhil Abdu Salam. Syeikh Abdul Fadhil Abdu Salam menyebutkan bahwa ilmu ushul fiqh saat ini tidak produktif lagi karena beberapa faktor: (a) ada keterputusan rangkaian kitab *mutaakhirin* dengan kitab-kitab ulama salaf, (b) adanya sikap taklid buta dan fanatisme, (c) kurangnya perhatian terhadap ilmu ini karena adanya asumsi "tertutupnya pintu ijtihad", (d) kurangnya pembahasan korelasi antara Ushul Fiqh dengan Fiqh, (e) ilmu Ushul Fiqh banyak bergerak dalam level teoritis, (f) adanya banyak pengulangan materi dalam Ushul Fiqh, (g) adanya bahasan yang bertele-tele dalam permasalahan kalamiyah, dan (h) lemahnya perhatian terhadap *qaidah ushûliyah* sehingga sering terjadi kesalahan dalam menerapkan *qaidah ushûliyah* dengan *qaidah fiqhiyah*. Di samping itu, ilmu ushul fiqh tidak dihubungkan dengan ilmu-ilmu sosial kontemporer.²¹⁴

Dalam kerangka rekonstruksi ilmu ushul fiqh, kajian buku ini menggunakan paradigma ushul fiqh al-Najjâr untuk membahas pemikiran dan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam membangun bangsa dan negara di Indonesia, sehingga kegelisahan ilmuwan ushul fiqh kontemporer yang mempermasalahkan tidak adanya korelasi antara ilmu ushul fiqh/fiqh dengan realitas sosial empiris dapat diisi dengan kajian buku ini yang berusaha menerapkan kerangka konseptual *maqâshid al-syarî'ah* al-Najjâr dalam tataran empiris kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia.

Dengan meminjam konsepsi dasar ekonomi/keuangan syariah dalam Suminto (ed. II), *Sukuk Negara: Instrumen Keuangan Berbasis Syariah*, terbitan Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI, 2015, untuk membangun

²¹⁴ Royan Utsany, *Tajdid Ushul Fiqh Pasca Imam Syafi'i (2)*, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/03/11/tajdid-ushul-fiqh-pasca-imam-syafii-2/>, diakses 14 September 2017

bangsa dan negara, maka kita harus mampu mewujudkan kesejahteraan yang mencakup kebagiaan (spiritual) dan kemakmuran (material) baik pada tataran individu maupun masyarakat, sehingga nilai-nilai agama, termasuk al-Qur'an dan Sunnah, harus menjadi pondasi dalam pembangunan ekonomi yang produktif dan mengedepankan pemerataan dengan menjaga pilar ekonomi yang bertujuan menjaga lima prinsip tata kehidupan manusia, yakni melindungi keselamatan hidup beragama, proses regenerasi, serta perlindungan keselamatan jiwa, harta dan akal. Pilar utama sistem pembangunan ekonomi yang hendak dibangun Joko Widodo juga memiliki kesamaan prinsip dengan pilar utama prinsip ekonomi syariah sebagai berikut: *Pertama*, keadilan (*al-'adālah*) yang berusaha memposisikan sesuatu pada tempatnya, memberikan hal-hal sesuai dengan haknya, dan memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Oleh sebab itu, semua tindakan judi, kezaliman, gharar, dan haram, serta adanya ketidakefisienan dilarang, dan sebaliknya dicanangkan penyelenggaraan pembangunan ekonomi yang produktif. *Kedua*, keseimbangan (*tawāzun*) menerapkan kebijakan pembangunan antara sektor keuangan dan sektor riil, keseimbangan material dan spiritual, serta keseimbangan risiko dan keuntungan, sebagaimana pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk keseimbangan antara wilayah/daerah, sehingga tidak ada ketimpangan dalam berbagai sektor seperti dalam bidang infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi. *Ketiga*, kemashalatan (*al-mashlahah*) adalah segala daya upaya mendatangkan manfaat dan menolak kemudlaratan yang berdimensi integral antara dunia dan akhirat, sehingga kebijakan pembangunan nasional yang hendak membangun kemaslahatan masyarakat dan bangsa secara utuh baik material maupun spiritual merupakan keniscayaan yang harus dilakukan sebagai masalah yang hakiki.²¹⁵

²¹⁵ Suminto (ed. II), *Sukuk Negara: Instrumen Keuangan Berbasis Syariah*, (Jakarta: Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI, 2015), hlm. 5-7.

BAB III

MEMELIHARA NILAI-NILAI KEHIDUPAN MANUSIA **(*Hifdz al-Qîmah al-Hayâh al-Insâniyyah*)**

Dalam membahas nilai-nilai kehidupan manusia, agama menjadi bagian bahasan sebagai fitrah manusia. Namun demikian, bagaimana nilai-nilai agama mampu menjaga nilai-nilai hidup manusia? Fuqaha' konservatif sudah membahas masalah *hifdz al-dîn* sebagai bagian dari fitrah manusia, tetapi fuqaha' konservatif belum sampai pada pembahasan *hurriyah al-'aqidah* (kebebasan berkeyakinan) yang menjadi bagian esensial dari dinamika hidup beragama di masa kini. Oleh sebab itu, kajian ushul fiqh yang berdasarkan pada konsepsi *Hifdz al-Qîmah al-Hayâh al-Insâniyyah* dapat menjadi harapan baru dalam memperkuat wawasan syariat/fiqh Islam dalam mengokohkan tradisi hidup beragama yang rukun dan harmonis.

Dalam kajian ilmu sosial, Durkheim menjelaskan bahwa dalam sejarahnya, agama dapat memperkuat relasi hidup masyarakat secara rukun/harmonis dan bisa menjadi landasan untuk menyatukannya. Sejarah perjuangan ulama Nusantara menjadi salah satu bagian elemen bangsa yang telah berada di garda depan untuk memperjuangkan dan mempertahankan NKRI. Demikian juga Wakil Presiden M Jusuf Kalla juga mengakui peran agama yang dimainkan oleh para pemukanya dalam menjaga keutuhan hidup bermasyarakat dan berbangsa, sehingga kita sampai kini bisa berada dalam keadaan aman dan damai, dan menghindarkan masyarakat dari gerakan radikalisme.²¹⁶

Secara yuridis formal, kebebasan beragama dan hak menjalankan agama merupakan hal fitrah atau asasi yang dijamin dan dilindungi negara. Dalam UUD-NRI tahun 1945 Pasal 28A menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Kemudian dalam upaya menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat asasi, UUD-NRI tahun 1945 menegaskan pada pasal 28E ayat

²¹⁶ M Jusuf Kalla, “Disampaikan pada Acara Sholawat dan Istighotsah bagi Damai Nusantara dalam rangka Pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2015-2020 di Masjid Istiqlal, Jl Taman Wijaya Kusuma, Jakarta, 5 September 2015”, dalam Husain Abdullah dan Burhanuddin Bella (eds.), *74 Kumpulan Pidato Pilihan M Jusuf Kalla 2014-2015...*, hlm. 282-283.

(1) menyatakan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...”. Pasal 28E tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan dan pemberian kebebasan beragama bagi setiap warga negara sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya sebagai fitrah manusia. Sementara itu dari sisi kenegaraan, Pasal 29 ayat (2) UUD-NRI 1945 memberikan jaminan dan perlindungan atas setiap warganya dalam memeluk dan menjalankan agamanya sebagaimana dijelaskan, yakni “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Kenapa ada jaminan dan perlindungan dari negara, karena negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1), yakni “Negara berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”.²¹⁷

⁷⁵ Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila memberikan prinsip, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui keberadaan Tuhan, karena itu negara mengakui eksistensi agama sebagai fitrah yang asasi yang harus ada dalam diri setiap warganya. Oleh sebab itu, segenap warga Indonesia berkewajiban ⁴⁸ mengamalkan dan menjalankan agamanya dengan cara yang berkeadaban, yakni hormat menghormati satu sama lain. Dari sisi yuridis, hak beragama bagi setiap warga negara dijamin dan dilindungi oleh negara karena Negara Indonesia adalah suatu negara yang ber-Tuhan. ⁷⁵ Dengan demikian, segenap pemeluk agama mendapatkan tempat dan perlakuan yang sama dari negara. Dalam hal ini, negara mengakui eksistensi fitrah manusia yang harus mengakui keberadaan Tuhan. ⁵² Sila pertama Pancasila ini juga menjadi landasan etis dalam segala pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara.²¹⁸ Karena itu, hak dan kebebasan beragama merupakan bagian dari nilai dasar agama dan juga nilai fitrah manusia yang harus dipertahankan untuk melestarikan harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat dan berbangsa. Gambaran inilah yang menjadi

²¹⁷ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2013), hlm. 153, 156 dan 161.

²¹⁸ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2012), hlm. 45-46.

harapan segenap warga masyarakat. Karenanya, M Amin Abdullah menjelaskan:

Tatanan masyarakat *grassroots* Indonesia mirip-mirip yang dilukiskan oleh al-Qur'an, dalam surat Ali 'Imran, 159 sebagai berikut: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dalam urusan itu (urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lain). Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".²¹⁹

Gambaran umat Islam Indonesia tersebut juga menjadi bagian dari pengamalan ajaran al-Qur'an yang menekankan pentingnya sikap santun, rukun dan harmonis dengan senantiasa memberi maaf pada sesamanya dan bertawakkal, berpegang teguh pada ajaran Islam sebagai pedoman hidup. Dalam hidup berbangsa, sikap santun, rukun dan harmoni penting untuk dilestarikan. Demikian juga sejumlah ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah juga bekerja untuk menanamkan dan merawat paham moderat dan toleran dalam hidup berbangsa dan bernegara. Peran NU dan Muhammadiyah itu dalam sejarah perjuangan dan pembangunan NKRI tidak bisa dipungkiri keberadaannya yang hingga kini terus berkomitmen dalam menanamkan dan merawat paham moderat dan toleran.²²⁰

Dengan menyitir pemikiran Lukman Hakim Saifuddin, kita dapat menyatakan bahwa agama Islam yang diajarkan di Indonesia, terutama oleh NU dan Muhammadiyah, telah memberikan sumbangan penting dalam membangun tata kehidupan yang moderat, toleran dan ramah, serta menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat majemuk. Paham agama Islam itu telah memberikan sumbangan penting

²¹⁹ M Amin Abdullah, *Sumbangan Nurcholish Madjid atas Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia*, <http://nurcholishmadjid.net/?page=news&action=view&id=64>, diakses tanggal 19 September 2016.

²²⁰ M Jusuf Kalla, "Disampaikan pada Acara Sholawat dan Istighotsah bagi Damai Nusantara dalam rangka Pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2015-2020 di Masjid Istiqlal, Jl Taman Wijaya Kusuma, Jakarta, 5 September 2015", dalam Husain Abdullah dan Burhanuddin Bella (eds.), *74 Kumpulan Pidato Pilihan M Jusuf Kalla 2014-2015...*, hlm. 282-283.

dalam membangun interaksi sosial yang mempertemukan perbedaan-perbedaan di kalangan masyarakat kita yang majemuk.²²¹



(Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum MUI KH Ma'aruf Amin, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua PBNU KH Said Aqiel Siraj Gubernur NTB, TGB Zainul Majdi, dan Ulama NU asal Rembang Kyai Maimoen Zubair memukul gendang saat membuka Munas Alim Ulama NU dan Konferensi Besar NU di Islamic Center Nusa Tenggara Barat)²²²

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi terhadap peran Nahdlatul 'Ulama (NU) sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berhasil membawa semangat persatuan dalam kehidupan masyarakat di Tanah Air. NU telah mengisi Kemerdekaan RI dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung bagi keutuhan NKRI. Menurutnya, *"Kita ini dilihat oleh negara lain sebagai negara yang tidak punya kepentingan, netral, dingin, dan sejuk disebabkan karena organisasi terbesar di Indonesia adalah Nahdatul Ulama"*. Karena itu,

²²¹ Lukman Hakim Saifuddin, "Sambutan Menteri Agama RI" Pada *Seminar Pembukaan Halaqah fiqh kebhinekaan*, Maarif institute, Jakarta, 24 Februari 2015.

²²² <http://foto.metrotvnews.com/view/2017/11/23/792483/jokowi-buka-munas-alim-ulama-nu-di-lombok>, diakses 24 November 2017.

Indonesia perlu berbagi pengalaman di bidang perdamaian dan rekonsiliasi untuk menyebarkan paham *Islam rahmatan lil alamin*. Selain itu, Presiden RI juga mengharapkan adanya rekomendasi untuk membangun dan “mendampingi umat, memberikan dorongan kepada umat, dan untuk menyejahterakan umat”.²²³ Inilah cara yang perlu kita lakukan untuk merawat dan memelihara paham keagamaan yang moderat dan toleran di Indonesia.

Dalam kerangka pemeliharaan nilai-nilai keagamaan (*hifdz al-din*) kaitannya dengan masalah kebebasan beragama (*hurriyah al-'aqidah*), Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia telah mengambil peran penting dalam membangun pendidikan keagamaan dan kesejahteraan sosial dengan jalan yang strategis dan visioner. Ahmad Norma Permata memberikan gambaran garis besar sifat bawaan itu sebagai berikut: *Pertama*, Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi sosial, atau yang tepatnya organisasi kesejahteraan (*welfare organization*) yang menyediakan layanan sosial pada masyarakat yang memerlukan. Walaupun Muhammadiyah memiliki Amal Usaha yang banyak dan terus berkembang—sekitar 12.000 sekolah, 167 Universitas dan Akademi, sekitar 600 rumah sakit dan poliklinik, tetapi Muhammadiyah tetap istiqamah dalam pelayanan publik, tidak diubah menjadi lembaga pencari laba. *Kedua*, sejak lahir, Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan non-politis. Sifat non-politis ini disengaja oleh K.H. Ahmad Dahlan sebagai salah satu strategi utama agar organisasi dan gerakan Muhammadiyah bisa *survive*. Dengan memilih menjadi gerakan non-politis, Muhammadiyah bukan saja diijinkan berkembang, tapi bahkan mendapatkan subsidi dari pemerintah Belanda untuk mengembangkan amal usaha. Sifat non-politis Muhammadiyah hingga kini masih tetap, bahkan ketika Amien Rais, tokoh pujaan warga Muhammadiyah, mendirikan partai politik (PAN), Muhammadiyah tetap tidak bisa dimobilisasi untuk politik praktis.²²⁴

²²³ Presiden Apresiasi Peran NU Bawa Semangat Persatuan Bangsa, http://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_apresiasi_peran_nu_bawa_semangat_persatuan_bangsa, diakses 24 November 2017.

²²⁴ Ahmad Norma Permata, *Muhammadiyah Sebagai Pilar Civil Islam di Indonesia*, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/04/28/muhammadiyah-sebagai-pilar-civil-islam-di-indonesia/>, diakses 14 September 2017.



(Dokumentasi Foto)²²⁵

Sikap non-politis dan moderat dari gerakan dakwah Muhammadiyah menjadi modal dasar dalam membangun kebhinekaan yang dibangun dalam proses sejarah yang panjang dan didukung oleh komitmen kolektif para pendiri bangsa yang menemukan titik integrasi nasional dalam kebhinekaan, yakni kesatuan dan persatuan Indonesia. Oleh sebab itu, peran Muhammadiyah terus bergerak untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lingkungannya dalam peran keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan.²²⁶ Dengan demikian, peran ormas Islam itu sangat penting dalam menempatkan akidah (Islam) sebagai landasan amal perbuatan yang senantiasa akan membimbing umat Islam atau bangsa ini menuju fitrahnya dalam kehidupan yang santun, rukun dan harmonis.

²²⁵ <http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/04/28/muhammadiyah-sebagai-pilar-civil-islam-di-indonesia/>, diakses 14 September 2017.

²²⁶ Haedar Nashir, "Memahami Wawasan Kemajemukan Bangsa", dalam *Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan*, Edisi Nomor 17/101, 1-15 September 2016, hlm. 16; Haedar Nashir, "Muhammadiyah Menghadapi Masalah Keumatan dan Kebangsaan", dalam *Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan*, Edisi Nomor 03/102, 1-15 Februari 2017, hlm. 15. .

3. Nilai-nilai Agama Islam Sebagai Fitrah Manusia

Dalam hal menjaga fitrah manusia, Islam menekankan perlunya menjaga unsur-unsur fitrah manusia baik unsur jasad maupun unsur ruh. Oleh sebab itu, jihad yang seringkali dimaknai hanyalah perang melawan non-Muslim seharusnya dimaknai ulang karena jihad pada dasarnya bertujuan untuk melindungi keyakinan dan hak asasi manusia (*protect a person's faith and human rights*). *Islam does not teaches to use violence to make changes and reforms, as seen in the history of the Prophet. In fact, the Prophet ordered muslims to use the peaceful media without violence.* Jalan perdamaian menjadi media yang efektif dalam mengajarkan nilai-nilai keislaman dan menegakkan perlindungan fitrah manusia.²²⁷

Fitrah manusia itu terdiri dari dua unsur, yakni unsur jasad dan unsur ruh yang rasional. Dengan dua unsur ini, manusia memiliki kelebihan dari makhluk Allah swt yang lainnya, hewan dan malaikat. Nilai-nilai kemanusiaan sebagai kelebihan dari makhluk lainnya ini kemudian menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi, sehingga dengan ruh yang rasional, manusia bisa menjalankan ajaran-ajaran agama yang diajarkan oleh para Nabi atau Rasul. Oleh sebab itu, kehidupan manusia tidak terlepas dari unsur fisik dan unsur spiritual/ruh yang rasional. Dengan kata lain, menjaga nilai-nilai kehidupan manusia sama dengan menjaga eksistensi manusia dan eksistensi agama yang dianut manusia, karena manusia pada dasarnya merupakan makhluk rasional-religius.²²⁸ Dalam menjaga nilai-nilai kehidupan manusia, al-Najjâr menekankan pentingnya memelihara nilai-nilai fitriyah dari manusia dengan memelihara eksistensi raga (unsur materi) dan jiwa (unsur ruh yang rasional), unsur manusia dan unsur agama, sehingga dengan demikian, yang dipelihara dalam bagian ini adalah eksistensi fitrah manusia dan eksistensi agama (baca: *hifdz al-dîn*). Tujuan memelihara nilai-nilai kehidupan manusia adalah untuk meninggikan derajat manusia dan mencapai hakikat hidup manusia yang esensial.²²⁹

²²⁷ R. Rusli, "Progressive Salafism In Online Fatwa", *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 52, No. 1, 2014 M/1435 H, hlm. 216.

²²⁸ Syamsuri, "Membangun Maqasid Al-Shari'ah Melalui Al-Usul Al-Khamsah: Studi Kritis Terhadap Konsep Al-Ghazali dan Abd Al Majid Al-Najjar", *Kumpulan Makalah...*, hlm. 82.

²²⁹ 'Abd al-Majid al-Najjâr, *Maqāshid al-Syari'ah ...*, hlm. 28-61.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

13

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud (Q.S. al-Hijir [15]: 28-29).

Dengan merujuk pada pemikiran al-Najjâr, kita dapat menyatakan bahwa beragama adalah pilihan dasar yang berpijak pada kebebasan kehendak (*hurriyah al-irâdah*). Adapun kebebasan kehendak adalah dasar bagi kebebasan berpikir, sehingga dengan demikian, iman menjadi landasan bagi kebebasan berpikir (*hurriyah al-fikr*). Dengan demikian, agama Islam baik dalam bidang akidah maupun syariatnya tidak bertentangan dengan paradigma berpikir yang benar, dimana berpikir bebas merupakan salah satu jalan asasi dalam beragama.²³⁰ Oleh sebab itu, *hurriyah al-'aqidah* (kebebasan berkeyakinan) dijamin oleh agama Islam sebagai realitas fitrah manusia, karena faktanya seluruh manusia tidak mungkin hanya beragama Islam, tetapi juga ada yang beragama lain. Prinsip agama inilah yang seharusnya menjadi landasan kita dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Betapa kita ini memang betul-betul sangat berbeda-beda, sangat majemuk, dan sangat beragam. Suku, ras, agama berbeda-beda. Inilah Indonesia. Dan alhamdulillah, ini berkat tausiyah yang sering disampaikan oleh para kiai sepuh, para kiai. Bimbingan yang selalu diberikan kepada kita semuanya dari para kiai, dari para ulama, mengingatkan kita betapa kita ini memang berbeda-beda. Dan salah satu cara meneladani Rasulullah adalah dengan menaati dan mengikuti ulama dan dawuh para kiai, para kiai sepuh, karena ulama dan para kiai adalah pewaris Rasulullah. Dan menjadi kewajiban kita untuk selalu menjunjung tinggi dan mengikuti apa yang menjadi dawuh para ulama dan para kiai. Seperti dalam praktik kebangsaan, para kiai selalu menuntun kita untuk cinta tanah air. *Hubbul wathon minal iman*, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Cinta tanah air juga menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, Islam yang mengajarkan kedamaian, Islam yang menjadikan rahmat bagi semesta alam, khususnya rahmat bagi bangsa dan negara kita Indonesia.²³¹

²³⁰ 'Abd al-Majid al-Najjâr, *Maqâshid al-Syari'ah ...*, hlm. 75.

²³¹ Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw 1437 H dan Silaturahmi Bersama Kiai Sepuh*, Gedung GP Ansor, Jakarta 11 Desember 2016,

Dalam realitas plural itu, syariat/fiqih Islam menata dan membangun relasi antar manusia dengan ikatan persaudaraan sesama umat beriman (baca: *ukhuwwah imāniyyah*) dan persaudaraan sesama umat manusia (baca: *ukhuwwah insāniyyah*). Konsepsi inilah yang menjadi salah satu pilar dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Esensi nilai-nilai kemanusiaan menjadi standar hukum fiqih dalam menempatkan harkat dan martabat manusia. Kemuliaan eksistensi diri manusia muncul dari adanya kesadaran beriman dan beragama. Dalam hal ini, al-Qur'an menegaskan eksistensi kemuliaan manusia sebagai berikut:²³²

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَيْتِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

13

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (Q.S. al-Isra' [17]: 70)

Ayat tersebut memberikan isyarat bahwa pembangunan regulasi hukum syara'/fiqih semata-mata hanyalah untuk menjaga kehormatan esensi manusia yang melampaui batas perbedaan suku, bangsa dan umat, sehingga permusuhan antar sesama umat manusia diharamkan. Demikian juga diharamkan mencederai atau merendahkan eksistensi kehormatan manusia. Hukum-hukum itu berlaku umum yang kemudian mempengaruhi pemikiran para fuqaha' dalam meyakini syariat Islam, yakni *bi anna hifdz al-karāmah al-insāniyyah muqshidun qath'iyyun min maqāshid al-syarī'ah al-Islāmiyyah* (bahwasanya memelihara kehormatan manusia menjadi tujuan yang pasti dari tujuan-tujuan hukum syariat Islam).²³³

Senada dengan prinsip pembangunan hukum Islam tersebut, Imam al-Syatibi sebagai salah satu tokoh pemikir hukum Islam terkemuka menyatakan bahwa *mashālih al-'ibād* (kemaslahatan manusia) menjadi dasar dalam membangun ketentuan hukum/ agama Islam, sehingga tidak boleh

²³² http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=13113&Itemid=26, diakses 3 Juni 2017.

²³² 'Abd al-Majid al-Najjār, *Maqāshid al-Syarī'ah* ..., hlm. 98 dan 173.

²³³ 'Abd al-Majid al-Najjār, *Maqāshid al-Syarī'ah* ..., hlm. 100.

ada ketentuan hukum Islam yang menyusahkan, apalagi mendatangkan kemadlaratan, bagi manusia. Ketentuan hukum Islam itu harus menjamin terwujudnya perlindungan kemaslahatan hidup manusia. Dasar normatif pembangunan hukum Islam tersebut sesuai dengan firman Allah berikut:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: Dia sama sekali tidak menjadikan bagimu dalam agama adalah suatu kesulitan (Q.S. al-Hajj [22]: 78).

Ayat al-Qur'an tersebut memberikan penjelasan bahwa ketentuan (hukum) agama Islam tidak mengajarkan adanya kesulitan, tetapi justru bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan standar syariat Islam. Dalam ayat yang lain, Allah swt berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki datangnya kemudahan bagi kamu, dan tidak menghendaki datangnya kesukaran bagimu (Q.S. al-Baqarah [2]: 185).

Ayat tersebut menjadi indikasi bahwa pesan-pesan agama/fiqih Islam selalu relevan untuk diterapkan dalam setiap keadaan dan zaman karena sesuai dengan fitrah manusia yang menghendaki adanya kemudahan dan menghindari adanya kesulitan. Karenanya, ketentuan agama Islam itu dapat menjadi salah satu sumber pokok dalam pembangunan hukum nasional, karena pesan-pesannya yang relevan dengan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, tidak ada kontradiksi antara ketentuan agama Islam dengan hukum nasional. Bahkan tujuan pembangunan hukum dalam agama Islam yang hendak mewujudkan kemaslahatan hidup manusia diatur dalam falsafah negara kita, yakni Pancasila pada Sila Kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Karena itu, UUD-NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan (baca: *al-mashlahah al-*

'*āmmah*) bagi seluruh rakyat Indonesia,²³⁴ yang dalam Pembukaan UUD-NRI 1945 dinyatakan dengan “masyarakat yang adil dan makmur”.²³⁵

Berhubungan dengan pelebagaan nilai-nilai agama Islam dalam negara, al-Najjār berpendapat bahwa memelihara agama dengan kekuasaan (*hifdz al-dīn bi al-sulthān*) dalam hubungannya dengan masyarakat dan warga menjadi salah satu bagian yang diperlukan untuk menegakkan hukum di masyarakat.²³⁶ Namun demikian, tidak ada kewajiban mendirikan *khilāfah Islāmiyyah*, karena agama Islam tidak mengatur kewajiban mendirikan kekuasaan (negara) tertentu, sedangkan yang diwajibkan adalah menegakkan keadilan dan kebaikan demi tercapainya kesejahteraan umum. Sementara itu, NKRI bertujuan menegakkan kesejahteraan umum (*al-mashlahah al-'āmmah*) bagi segenap warganya, sehingga dengan demikian, kita sebagai umat Islam Indonesia berkewajiban menjaga dan mempertahankan NKRI sebagai harga mati. Sebab, NKRI telah sepenuhnya memberikan layanan, dukungan dan pengembangan terhadap kehidupan beragama. Dalam kerangka mempertahankan NKRI tersebut, Lukman Hakim Saifuddin menyatakan perlunya sosialisasi empat pilar atau empat konsensus dasar bernegara untuk membangun wawasan kebangsaan yang lebih kokoh dalam sinaran nilai-nilai keberagamaan.

Sosialisasi Empat Pilar atau Empat Konsensus Dasar Bernegara sudah dilaksanakan semenjak beberapa tahun, di antaranya oleh MPR-RI untuk menyebarluaskan norma-norma baru yang terkandung dalam Perubahan UUD 1945. Sosialisasi mencakup materi-materi landasan ideologi, konstitusi, komitmen kebangsaan serta semangat kesatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia yang terangkum dalam empat pilar kehidupan bangsa. Yakni, **Pancasila** sebagai landasan ideologi, etika moral serta alat pemersatu bangsa; **UUD Tahun 1945** sebagai landasan konstitusional; **NKRI** sebagai konsensus yang harus dipertahankan; dan **Bhinneka Tunggal Ika** sebagai kekayaan bangsa dan modal untuk bersatu. Empat pilar tersebut merupakan rukun negara, penyangga tegaknya negara dan berfungsi sebagai landasan

²³⁴ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 168-169.

²³⁵ Abdurrahman Wahid, *Islamku...*, hlm. 211-212; lihat Moh Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, (Yogyakarta: Kaukaba Press, 2013).

²³⁶ 'Abd al-Majīd al-Najjār, *Maqāshid al-Syari'ah ...*, hlm. 72-73.

dalam membangun bangsa yang adil dan sejahtera sesuai cita-cita para pendiri sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.²³⁷



(Dokumen Foto: Biro Pers Septres)²³⁸

Jauh sebelum menjadi Presiden, sebagai pimpinan daerah, Walikota Surakarta, Joko Widodo sangat konsisten dalam menempatkan eksistensi agama sebagai bagian esensial atau fitrah dari manusia. Agama Islam baginya sebagai ajaran yang menjadi landasan dalam membangun keikhlasan dan ketulusan, yang akan memberikan dampak positif dalam perilaku hidup. Isi sambutan pada waktu itu sebagai Walikota Surakarta memiliki kesamaan spirit dengan pemikiran al-Najjâr dalam memposisikan agama dan manusia sebagai bagian esensial yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu, Joko Widodo memberi penekanan pada pembangunan hidup

²³⁷ Lukman Hakim Saifuddin, *Sambutan Menteri Agama RI Pada Sosialisasi Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten Serang, 3 Mei 2017.

²³⁸ Pada 11 Januari 2017, Joko Widodo mengemukakan: “Alhamdulillah kabar gembira bagi seluruh umat muslim Indonesia. Mulai tahun 2017 ini kuota kita menjadi 221.000 jamaah. Ini sudah termasuk tambahan 10.000 kuota yang kita upayakan tahun lalu ke pemerintah Arab Saudi. Dengan penambahan kuota ini kita harus meningkatkan kualitas pelayanan jamaah haji. Persiapan haji 2017 sudah dapat dilakukan sejak dini”. <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 2 Juni 2017.

yang seimbang antara duniawi dan ukhrawi, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai agama pada Acara Pemberangkatan Calon Haji tahun 1432 H atau 11 Oktober 2009.

“Selama berhaji, calon haji ⁷³ dilarang bertengkar, berperang, menumpahkan darah, dan tak boleh merusak tanaman yang terdapat di tanah Haramain itu. Sebuah pendidikan karakter dan perilaku yang positif yang akan berdampak terhadap kehidupan seorang Muslim yang harus selalu menjaga keserasian dan harmoni dengan lingkungan sekitarnya. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW "Hai semua manusia, Allah telah mewajibkan atasmu untuk haji, maka berhajilah kalian. Siapa yang berhaji karena Allah, lalu tidak berkata atau berbuat keji dan fasik, ia akan keluar dari semua dosa-dosanya bagaikan pada saat ia dilahirkan oleh ibunya. Dan, melakukan ibadah umrah hingga umrah tahun depan menjadi penebus dosa yang terjadi di antara kedua umrah itu. Sungguh, haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga." (HR Bukhari dan Muslim)".²³⁹



(KH Hasan Abdul Wafi sedang bersama dengan Gus Dur)²⁴⁰

²³⁹ Joko Widodo, *Sambutan Walikota Surakarta pada Pemberangkatan Calon Haji TH.1432 H 11 Oktober 2009*; lihat Moh Dahlan, *Membumikan Islam dalam Kerangka Kebijakan: Membaca Pemikiran dan Kebijakan Joko Widodo dalam Nalar Fiqih Ke-NU-an*, (Yogyakarta: Kaukaba Press, 2016).

²⁴⁰ <https://dinamikadawahislamiyah.blogspot.com/2016/02/jika-cinta-nu-bacalah-shalawat.html>, diakses Juli 2018

Sambutan Walikota Surakarta tersebut memiliki kesamaan spirit dengan pemikiran dan pandangan para ulama dan kiai Pesantren. Dalam hal ini, kita dapat menampilkan salah satunya KH Hasan Abdul Wafi, Pengawas Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo Jawa Timur (wafat tahun 2000), yang selalu berpesan pada para santrinya dalam berbagai acara pengajian yang intinya, bahwa lakukanlah ibadah dengan hati yang ikhlas agar dapat memberi bekas dan pengaruh yang baik dalam kehidupan keseharian, ajarkanlah ilmu dengan hati yang tulus dan ikhlas agar ilmu yang disampaikan memiliki nilai manfaat dan barakah yang besar bagi muridnya.

2. Al-Qur'an Sebagai Petunjuk dan Rahmat bagi Seluruh Alam Semesta

Dalam bahasa Mohammad Natsir, *the function of the President is important as a symbol of unity of the concrete state*. Dengan demikian, pernyataan dan perilaku pimpinan negara harus jujur, real, dan objektif, sehingga prinsip kejujuran, tanggung jawab dan perlindungan hak asasi manusia menjadi tugas penting yang tidak bisa diabaikan dalam memajukan kehidupan bangsa dan menjaga keutuhan negara. Oleh sebab itu, pimpinan negara harus terbuka dan mampu menerima saran dan kritik-konstruktif darimana pun.²⁴¹ Fungsi inilah yang sedang diemban oleh Presiden Joko Widodo dalam memajukan hidup berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI melalui pemahaman spirit budaya bangsa dan semangat keberagamaan.

Pada acara Peringatan Nuzul Qur'an tahun 2015 di Istana Negara, Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan bahwa agama Islam sebagai pedoman hidup akan terus menyala di hati kita apabila amal ibadah kita dilakukan dengan hati yang ikhlas dan tulus. Dengan selalu mengingat dan memperingati Nuzul al-Qur'an, *"secara otomatis api Islam di dalam hati kita menyala. Kita menjadi lebih bersemangat bertadarus. Kita lebih bersemangat sholat tahajud. Kita lebih bersemangat beri'tikaf di masjid dan melakukan amal-amal ibadah yang lainnya. Semua itu semata-mata karena kita*

²⁴¹ Ris'an Rusli, "The State Concept: The Political Thinking of Mohammad Natsir", *International Journal of Islamic Thought* ISSN 2232-1314 Vol. 13: (June) 2018, hlm. 111.

mengharapkan ridho dan hidayah dari Allah SWT. Semua itu karena kita ⁷² *mengharapkan selalu berjalan di jalan yang lurus dan dalam petunjuk, lindungan, dan bimbingan Allah*".²⁴²

Pada acara yang sama, yakni Peringatan Nuzulul Qur'an di Istana Negara, 1 Februari 1964, Presiden RI Pertama, Ir Soekarno, dalam amanatnya menyampaikan bahwa *Apa sebabnya Tunisia bangun, apa sebabnya Maroko bangun kembali, apa sebabnya Aljazair bangun kembali, apa sebabnya Pakistan berdiri, apa sebabnya Malaka, Saudara-saudara, bangkit kembali, apa sebabnya Indonesia bangkit kembali, apa sebabnya? Tak lain tak bukan, oleh karena umatnya mulai mengerti kembali kepada api Islam*.²⁴³ Api Islam sebagai simbol spirit ajaran universal itu sangat mendukung bagi kemajuan peradaban manusia yang adil, makmur dan sejahterah.

¹³ Dalam tataran kemanusiaan universal, al-Qur'an sebagai kitab suci agama Islam menjadi pedoman yang dapat memberikan perlindungan bagi umat manusia dari kemadlaratan hidup, yang membedakan antara yang *haq* (benar) dan yang *bathil* (salah), sehingga umat Islam yang mengamalkannya akan mampu berbuat dalam kebenaran dan menyelematkan dari segala bentuk kemadlaratan. Joko Widodo menyatakan: "*Al-Qur'an adalah petunjuk dan rahmat bagi semua umat manusia. Hal itu sesuai dengan isi Surat Al-Baqarah ayat 185 yang menyatakan bahwa Al Qur'an yang diturunkan pada Bulan Suci Ramadhan adalah petunjuk, adalah pembeda antara yang haq dan yang bathil*".²⁴⁴ Oleh sebab itu, sebagai petunjuk universal, umat Islam yang menjalankan ajaran agama Islam dengan benar dan baik akan mampu menyelematkan diri dan umat manusia dari perbuatan batil.

²⁴² Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Acara Peringatan Nuzulul Qur'an Nasional* di Istana Negara, Jakarta, Tanggal 3 Juli 2015, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9534&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016

²⁴³ Soekarno, "Api Islam, Motor Terbesar Umat Manusia", Amanat pada Peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara Jakarta, 1 Februari 1964, dalam R Soemarjoto (peny), *Bung Karno...*, hlm. 289

²⁴⁴ Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Acara Peringatan Nuzulul Qur'an Nasional* di Istana Negara, Jakarta, Tanggal 3 Juli 2015, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9534&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016

Sebagai petunjuk yang terang-benderang mengenai yang haq dan yang bathil, Al-Qur'an mendatangkan revolusi yang mendasar pada perikehidupan manusia. Al-Qur'an mendatangkan revolusi batin mengenai nilai-nilai kemanusiaan, mengenai nilai-nilai toleransi, mengenai nilai-nilai keadilan. Al-Qur'an mendatangkan revolusi sosial karena mengatur hubungan antar manusia secara terhormat dan bermartabat. Al-Qur'an mendatangkan revolusi ekonomi karena mengharamkan penghisapan, eksploitasi yang berlebihan terhadap alam dan lingkungan hidup, serta menggariskan secara tegas kejujuran kita dalam berbisnis.²⁴⁵

Nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual itu menjadi perhatian serius pemerintah, sehingga Presiden Joko Widodo selalu menekankan perlunya mengamalkan nilai-nilai ajaran al-Qur'an untuk melakukan revolusi batin dan revolusi sosial agar menjadi wadah bagi tegaknya eksistensi nilai-nilai keadilan dan keharmonisan hidup manusia di muka bumi, bukan hanya antar sesama umat Islam saja, tetapi juga antar umat beragama.

Pendeknya, seluruh sisi kehidupan manusia dituntun, dituntun oleh Al-Qur'an. Dengan demikian, seluruh revolusi kehidupan tersebut sesungguhnya mendorong kita untuk berjiwa tegak. Artinya, mempunyai harga diri, mau bekerja keras, sehingga kita bermartabat. Sebagai muslim, sebagai bangsa Indonesia, sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an, kita seharusnya berjiwa tegak. Dengan jiwa tegak itu, masyarakat ikhlas dan sabar menjalani hidup sehari-hari.²⁴⁶

Dalam sambutan ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan bahwa nilai-nilai luhur agama harus senantiasa ditegakkan dalam segala keadaan, sehingga kita bisa menjadi umat dan bangsa yang berjiwa tegak, yakni mempunyai harga diri, mau bekerja keras, ikhlas dan sabar menjalani hidup sehari-hari yang penuh tantangan. Apalagi kedamaian, kerukunan dan kerjasama yang baik dan kondusif dari bangsa Indonesia yang majemuk selama ini telah menjadi salah satu bentuk penilaian dan pengakuan dunia

²⁴⁵ Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Acara Peringatan Nuzulul Qur'an Nasional* di Istana Negara, Jakarta, Tanggal 3 Juli 2015, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9534&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016

²⁴⁶ Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Acara Peringatan Nuzulul Qur'an Nasional* di Istana Negara, Jakarta, Tanggal 3 Juli 2015, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9534&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016

bahwa Indonesia adalah bangsa yang mayoritas muslim yang beradab dan rukun. Oleh sebab itu, kondisi itu harus kita lestarikan dan pertahankan.

Dalam hal ini, Joko Widodo mengemukakan:

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia selama ini sudah menunjukkan bahwa Islam dan kehidupan berbangsa, berkebangsaan adalah selaras dan harmonis. Dan ini yang dilihat oleh negara lain. Saya pernah satu meja berbicara dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. Beliau sangat kagum terhadap kemajemukan kita. Dan beliau melihat sendiri. Gedung pertemuan, mushala penuh saat pas jam sholat, jam 12, jam 3. Dia selalu melihat betapa mushala, masjid Indonesia ini selalu makmur. Beliau yang menyampaikan. Dan beliau yang paling terkesan adalah memang kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang sangat majemuk. Sangat kagum sekali. Sekjen OKI juga sama—beliau dari Arab Saudi—juga menyampaikan hal yang sama, kagum dengan kehidupan berbangsa dan bernegara kita.²⁴⁷

Dalam bahasa KH Ali Yafie, kita sebagai bangsa memiliki kewajiban *fardu 'ain* untuk memenuhi kepentingan hidup personal, sehingga kepentingan hidup yang paling esensial harus dipenuhi dan tidak boleh ditinggalkan. Karenanya, syariat Islam mengenal *mashlahah 'ainiyah* (kepentingan per-orang) dari setiap manusia, yang sifatnya umum, yakni kepentingan setiap manusia dalam hidupnya, misalnya setiap orang berkewajiban mencari barang halal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,²⁴⁸ dan juga berkewajiban mentaati regulasi hukum positif di negara ini. Karena tata kehidupan manusia dan bangsa dinamis, maka fiqh juga mengajarkan perlunya inovasi dan kreatifitas dalam menjalani kehidupan ini sebagaimana praktik ijtihad. Prinsip ini juga perlu diterapkan

²⁴⁷ Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw 1437 H dan Silaturahmi Bersama Kiai Sepuh*, Gedung Gp Ansor, Jakarta 11 Desember 2016, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=13113&Itemid=26, diakses 3 Juni 2017.

²⁴⁸ “Hal ini bersangkutan dengan fardhu 'ain yang dijelaskan dalam tuntunan Rasulullah saw (*thalab al-halal faridhatun 'ala kulli muslim*) yaitu kewajiban bekerja mencari rizki memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Seterusnya yang menyangkut mashlahah akal pikiran, bersangkutan dengan fardhu 'ain yang dijelaskan dalam hadits lain yang berbunyi (*thalb al-'ilmi faridhatun 'ala kulli muslim*). Begitu seterusnya menyangkut tiap mashlahah yang sifatnya dharuriyyah, jelas memperlihatkan keterkaitannya dengan kewajiban perorangan sebagai imbalan adanya pengakuan atas mashlahah dharuriyyah yang menimbulkan hak-hak mutlak perorangan bagi setiap manusia”. KH Ali Yafie, “Konsep-Konsep Istihsan, Istishlah Dan Mashlahat Al-Ammah”, dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam ...*, hlm. 367.

dalam dunia bisnis, disamping memperhatikan adanya keseimbangan, tetapi juga harus ada inovasi dan kreatifitas baik dalam produksi maupun pemasarannya.



(Presiden RI bersama Ibu Negara)²⁴⁹

Masa depan Indonesia akan ada di industri kerajinan dan industri kreatif. Kita punya berbagai bentuk kerajinan tangan dengan kualitas internasional, film, musik, aplikasi digital dan lain-lain. Saya punya pengalaman sebagai pengrajin dan pengusaha. Tantangan pengusaha industri kreatif yang utama adalah promosi dan pemasaran. Banyak calon pembeli tak tahu produk-produk kreatif yang dicarinya berada di Indonesia. Nah, itulah tujuan *International Handicraft Trade Fair* (Inacraft) yang saya buka kemarin di Jakarta Convention Center. Inacraft adalah tempat yang paling baik untuk berpromosi. Penjual dan

²⁴⁹ <https://www.facebook.com/Jokowi/> diakses 2 Juni 2017

produsen bisa berhubungan langsung dengan pembeli dari pasar internasional.²⁵⁰

Keselarasan hidup itu menjadi tujuan lahirnya syariat/fiqih Islam, karena hal itu menjadi salah satu infrastruktur dalam mewujudkan kemaslahatan manusia (*mashlahah al-insân*). Salah satu upaya membangun keselarasan hidup bagi bangsa ini adalah dengan membangun iklim bisnis yang kondusif, M Jusuf Kalla menyebutkan bahwa kegiatan bisnis untuk mewujudkan kemaslahatan dalam bidang kebutuhan material memerlukan adanya regulasi yang efisien, sehingga regulasi yang tidak efisien perlu dideregulasi, dan juga diperlukan layanan yang lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah untuk bisa bersaing dalam upaya menciptakan kemaslahatan di bidang pengelolaan ekonomi/harta benda. Iklim bisnis akan kondusif jika *lebih murah, lebih baik dan lebih cepat*.²⁵¹

Dalam hal ini, al-Najjâr mengemukakan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* merupakan elemen penting dalam pembangunan hukum fiqih untuk menjawab dan memberikan pandangan hukum serta menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi umat, bahkan ilmuwan Muslim kontemporer mengakui eksistensi *maqâshid al-syarî'ah* sebagai perspektif yang dinamis dan progresif. Dengan perspektif itu, syariat Islam dapat dipahami bahwa munculnya regulasi hukum tidak lain kecuali untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia baik yang berhubungan dengan hukum yang universal maupun hukum yang rinci. Allah swt berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. al-Anbiya' [21]:107)

²⁵⁰ <https://www.facebook.com/Jokowi/> diakses 2 Juni 2017

²⁵¹ M Jusuf Kalla, "Disampaikan saat menghadiri Rapat Terbatas Bersama Presiden RI, Para Menteri, dan Para Gubernur Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 15 Oktober 2015", dalam Husain Abdullah dan Burhanuddin Bella (eds.), *74 Kumpulan Pidato Pilihan M Jusuf Kalla 2014-2015...*, hlm. 98-99.



(Dokumentasi Foto: Biro Pers Setpres)²⁵²

Dalam menjaga keselarasan hidup bangsa, kita juga harus mendukung dan memperjuangkan tegaknya tatanan hidup yang aman, adil dan

²⁵² Pada 26 April 2017, Joko Widodo mengemukakan: “Memperingati Isra Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW bersama para kiai dan santri sungguh membahagiakan saya. Seperti kemarin, ketika saya hadir di Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah Cipulus, Purwakarta. Insha Allah, kita tunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang cinta damai, agama yang rahmatan lil alamin”. <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 2 Juni 2017.

sejahterah, tidak boleh ada gerakan pengacau dan pemecah belah bangsa. Segala bentuk hasutan dan tindakan pemecah belah umat dan bangsa harus dilawan. Dalam hal ini, Nabi Muhammad saw bersabda: *“Suatu saat nanti akan terjadi bencana dan kekacauan, maka siapa saja yang hendak memecah-belah persatuan umat ini penggallah dengan pedangmu, siapa pun orangnya”*.²⁵³

Dalam menjaga persatuan umat atau bangsa, Nabi Muhammad saw juga memberikan perhatian akan pentingnya hal tersebut, sehingga seseorang yang keluar dari jamaah dan hidup dalam fanatisme kesukuan, maka matinya akan masuk golongan seperti mati jahiliyah. Oleh sebab itu, persatuan umat dan bangsa menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga dan ditaati, karena tanpa persatuan umat dan bangsa akan sulit mencapai kejayaan dan kemaslahatan hidup, bahkan kedadlaratan yang akan datang.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda: *“Barangsiapa keluar dari ketaatan dan tidak mau bergabung dengan Jama’ah kemudian ia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Dan barangsiapa mati dibawah bendera kefanatikan, dia marah karena fanatik kesukuan, mengajak untuk fanatik kesukuan atau menolong kesukuannya kemudian dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Barangsiapa keluar dari umatku, kemudian menyerang orang-orang yang baik maupun yang keji tanpa mempedulikan orang mukmin, dan tidak pernah mengindahkan janji yang telah dibuatnya, maka dia tidak termasuk dari golonganku dan saya tidak termasuk golongannya”*.²⁵⁴

²⁵³ Imam al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, terj. Rohimi dan Zenal Mutaqin, (Bandung: Penerbit Jabal, 2013), hlm. 492.

²⁵⁴ Imam al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim...*, hlm. 492.



(Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional dan Mukttamar Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) "Islah Tarbiyah - Perti" Tahun 2016, di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2016)²⁵⁵

Pesan persatuan dan kebersamaan yang diajarkan Nabi Muhammad saw itu juga diamalkan oleh Abdurrahman Wahid selama hidupnya dengan selalu merajut silaturrahim lintas batas suku, agama, ras, etnis, dan bahasa, juga membangun kesederhanaan hidup, kesukarelaan dalam melayani masyarakat, dan kerelaan berkorban untuk kemajuan bangsa dan negara dengan tulus ikhlas bagi semua golongan, sehingga semuanya dipandang dan diperlakukan secara adil sebagai bangsa yang bersatu.²⁵⁶

Sikap hidup dan laku perjuangan Gus Dur itu sejalan dengan misi utama kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang menuntun manusia menuju akhlak mulia dan menebar rahmat bagi seluruh alam. Selama hidupnya, Gus Dur selalu mengingatkan kita bahwa Negara Republik Indonesia adalah milik kita bersama, milik kita bersama, bukan milik golongan, bukan milik golongan, dan bukan milik perseorangan.

³⁵ ²⁵⁵ Menurut Presiden Joko Widodo, "sebagai bangsa kita perlu bersatu karena dengan bersatu kita akan memenangi persaingan antar negara. Hanya dengan bersatu kita akan menjadi kekuatan yang maha dahsyat." <http://ksp.go.id/islah-persatuan-tarbiyah-islamiyah-perti-contoh-persatuan-di-tengah-keberagaman/>, diakses 14 September 2017.

²⁵⁶ Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Haul Ke-7 Wafatnya Kh Abdurrahman Wahid*, Ciganjur, Jakarta, 23 Desember 2016, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=13106&Itemid=26, diakses 3 Juni 2017.

7
Karena itu, harus dikelola dengan konstitusi, dengan aturan konstitusi, bukan dengan yang lainnya. Saya percaya Gus Dur pasti gemas, geregetan kalau melihat ada kelompok, sekelompok, atau orang-orang yang meremehkan konstitusi, yang mengabaikan kemajemukan kita, yang memaksakan kehendak dengan aksi-aksi kekerasan, radikalisme, terorisme. Dan akhir-akhir ini yang kita lihat terutama yang ada di media sosial maupun yang ada di dunia nyata, kita sudah lupa, atau lalai, atau tidak mengerti, tidak bisa membedakan mana yang kritik mana yang menghina, mana yang kritik mana yang menjelek-jelekan, mana yang kritik mana yang menghasut, mana yang kritik mana yang menghujat. Lupa semuanya kita, mana yang kritik mana yang ujaran kebencian, mana yang kritik mana yang makar. Tidak bisa membedakan kita sekarang ini. Benar ndak? Benar ndak? Benar. Kalau ini kita terus-teruskan, energi besar kita habis untuk hal-hal yang tidak perlu. Bisa lupa kita strategi besar negara kita, lupa kita bagaimana menyejahterakan rakyat kita, lupa kita membangun strategi besar ekonomi negara, lupa kita membangun strategi besar industri ke depan untuk membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya bagi rakyat, lupa semuanya karena kita ribut, ribut, dan ribut.²⁵⁷



(Presiden Joko Widodo menghadiri haul Gus Dur ke-7 di Jakarta, Jumat (23/12/2016)²⁵⁸

257 Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Haul Ke-7 Wafatnya KH Abdurrahman Wahid*, Ciganjur, Jakarta, 23 Desember 2016, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=13106&Itemid=26, diakses 3 Juni 2017.

258
<https://nasional.kompas.com/read/2016/12/24/05535191/cerita.jokowi.soal.pemberian.peci.dari.gus.dur>, diakses Juli 2018.

Dalam hal ini, kita memperhatikan bahwa apa yang disampaikan Joko Widodo berhubungan dengan kondisi aktual umat, yakni bagaimana kita membangun umat dan bangsa yang rukun, aman, harmonis, gotong royong, dan juga bagaimana kita menjauhi segala bentuk tindakan yang mengganggu suasana rukun-harmonis. Kondisi harmonis dan serasi dalam kehidupan beragama menjadi modal dasar dalam membangun pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia dan juga sekaligus menjadi landasan moral dalam menggerakkan arah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia.²⁵⁹

Dalam kaitannya untuk melestarikan budaya harmonis dan rukun yang ditanamkan oleh ulama-ulama Nusantara termasuk KH Hasyim Asy'arie, sarana dan prasarana ibadah perlu disiapkan untuk menegakkan syiar-syiar agama Islam, misalnya kini sudah diselesaikan pembangunan berupa Masjid, oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki J Purnama alias Ahok, yang kemudian diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.



²⁵⁹ San Afri Awang, *Konsep Ekonomi Kerakyatan dan Aplikasinya pada Sektor Kehutanan*, <http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sanafri.htm>, diakses 3 Mei 2017.

(Dokumentasi Foto: Biro Pers Setpres, 15 April 2017)

10

Jakarta akhirnya punya masjid raya sendiri: Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari. Ini mimpi lama saya. Semasih menjadi Gubernur Jakarta tahun 2013, saya membentuk tim yang dipimpin Adhi Moersid, arsitek kenamaan yang pernah menerima Aga Khan Award untuk Masjid Said Naum, Tanah Abang yang dirancangnya. Pada 26 September 2014 saya sendiri yang meletakkan batu pertama pembangunan masjid ini. Dibangun di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI seluas 2,4 hektare, Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari bernuansa arsitektur Betawi. Setiap tiang yang ada di masjid ini memiliki ornamen Gigi Balang. Di atasnya menjulang lima menara yang melambangkan Rukun Islam. Mengapa mengambil nama K.H. Hasyim Asy'ari? Hadratus Syeikh K.H. Hasyim Asy'ari adalah pendiri salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). Ini bentuk apresiasi pemerintah atas jasa-jasa almarhum menyebarkan nilai-nilai Islam dan keindonesiaan yang sesuai dengan prinsip Islam yang rahmatan lil alamin. Saya berharap masjid yang bisa menampung 12.500 jamaah ini menjadi simbol keislaman yang ramah, moderat, dan menjadi pilar keberagaman.²⁶⁰

Penamaan Masjid tersebut adalah salah satu bentuk apresiasi pemerintah atas jasa-jasa almarhum KH M Hasyim Asy'arie yang telah menyebarkan nilai-nilai Islam dan keindonesiaan yang sesuai dengan prinsip Islam yang *rahmatan lil alamin*. Oleh sebab itu, kita generasi pewaris beliau wajib menjaganya dengan selalu melakukan ijtihad sebagai bagian dari usaha *hifdz al-din (hifdz al-din bi al-ijtihad)*, dalam artian mengajarkan Islam yang aktual dan relevan dengan perkembangan kehidupan umat dan bangsa. Tidak ada jalan lain, kecuali ijtihad untuk mengembangkan pemahaman fiqh yang aktual dan responsif. Dengan demikian, ijtihad keislaman dan kondisi ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dalam membangun kemaslahatan umat manusia (*mashlahah al-insân*) dan bangsa yang majemuk.²⁶¹ Dalam konteks bangsa yang majemuk, prinsip kebhinekaan perlu dikembangkan dalam paham keagamaan Islam.

Fiqh kebhinekaan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan tentang perilaku sosial manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok yang ditetapkan oleh ulama atau ahli yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan umat. Apa saja isu-isu yang diangkat, nilai-nilai atau

²⁶⁰ <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 2 Juni 2017

²⁶¹ 'Abd al-Majid al-Najjâr, *Maqâshid al-Syarî'ah* ..., hlm. 68-69.

3 norma-norma kebhinekaan yang relevan untuk dieksplorasi, perspektif apa yang diadopsi, serta apa langkah-langkah yang perlu dilakukan, untuk merumuskan fiqh kebhinnekaan, merupakan tema-tema penting yang perlu dibahas. Dengan mendasarkan pada “masalahat umat” sebagaimana diisyaratkan dalam kaidah “*Tasharrufu al-imâm manuthûn bi al-maslahah*” yang menjadi *backup* istinbat, maka fiqh kebhinekaan akan menjadi benteng ketahanan paham kebangsaan kita, yang disadari bahwa paham kebangsaan Indonesia adalah konsep yang dinamis yang terus-menerus menyempurnakan diri dengan berbagai tantangannya, sesuai kaidah “*Taghayyur al-ahkâm bi taghayyur al-amkinah wa al-azminah*” (hukum dapat berubah dengan perubahan zaman dan tempat).²⁶²



(Menteri Agama RI ketika menjadi narasumber pada Seminar Halaqah Fiqih Kebhinekaan yang diselenggarakan Ma'arif Institut di Jakarta)²⁶³

Dalam kehidupan keagamaan yang plural, peran ijtihad dalam kajian fiqh kebhinekaan itu akan memberikan solusi untuk menjaga dan melestarikan kehidupan yang damai dan rukun. Salah satu hasil ijtihad ulama terkemuka seperti KH A Wahid Hasyim adalah bagaimana bangsa yang majemuk ini memiliki ideologi yang bisa diterima oleh semua golongan atau

²⁶² Lukman Hakim Saifuddin, “Sambutan Menteri Agama RI” Pada *Seminar Pembukaan Halaqah Fiqh Kebhinekaan*, Maarif Institute, Jakarta, 24 Februari 2015.

²⁶³ <https://www2.kemenag.go.id/foto/74344/menag-lukman-hakim-saifuddin-ketika-menjadi-narasumber>, diakses 13 Agustus 2018.

ras/etnis apa pun, sehingga lahirlah Pancasila yang -disusun oleh para pendiri bangsa yang salah satunya KH A Wahid Hasyim dari kalangan ulama NU- telah menjadi pemersatu bangsa Indonesia dalam wadah NKRI.



(Dokumentasi: Foto Biro Pers Setpres)²⁶⁴

16

Kodrat bangsa Indonesia adalah keberagaman. Takdir Tuhan untuk kita adalah keberagaman. Jika saat ini ada pandangan dan tindakan yang mengancam kebinekaan kita, mari belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui radikalisme, konflik sosial, terorisme, dan perang saudara. Dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa terhindar dari masalah tersebut. Kita bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negeri. Hari ini, 1 Juni 2017, untuk pertama kalinya upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dilaksanakan secara nasional. Saya telah mengeluarkan Keputusan Presiden tentang itu. Saya mengajak peran aktif para ulama, ustadz, pendeta, pastor, biksu, pedanda, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan Polri serta seluruh elemen masyarakat untuk menjaga Pancasila. Ceramah keberagaman, materi pendidikan, fokus pemberitaan, dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila.²⁶⁵

²⁶⁴ <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 2 Juni 2017

²⁶⁵ <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 2 Juni 2017

BAB IV
MEMELIHARA ESENSI MANUSIA
(*Hifdz al-Zât al-Insâniyyah*)

Dalam pembahasan ini, para fuqaha' konservatif sudah banyak membicarakan masalah perlindungan esensi manusia, tetapi faktanya umat masih banyak terkungkung dengan ancaman pengkafiran dan kooptasi arus utama pemikiran madzhab. Oleh sebab itu, walaupun sudah dibahas masalah perlindungan hak-hak dasar manusia, baik hak beragama (baca: *hifdz al-dîn*), hak hidup (baca: *hifdz al-nafs*) maupun hak mencari ilmu (baca: *hifdz al-'aql*), tetapi masih terkooptasi oleh pemahaman keislaman yang konservatif-eksklusif, sehingga pemikiran keislaman yang progresif di dunia Islam terkadang berujung penjara sebagaimana dialami oleh pemikir-pemikir muslim terkemuka di zaman dahulu, bahkan sebagian negara di masa kini. Namun demikian, *alhamdulillah*, kondisi tersebut tidak terjadi di Indonesia sebagaimana gambaran M Amin Abdullah.

Dalam poin ini, masyarakat Muslim Indonesia mempunyai keunggulan kualitatif dibanding dengan bangsa-bangsa lain yang berpenduduk mayoritas Muslim di dunia. Bangsa-bangsa lain tidak atau belum mampu melakukan dialog positif-konstruktif antara keimanan agama dan kenegaraan berbangsa seperti yang dilakukan dan dialami oleh bangsa Indonesia. Bangsa-bangsa lain di dunia masih mengedepankan yang satu diatas lain, bahkan tidak jarang yang membenturkannya. Bangsa Indonesia, dapat mendialogkan dan menggunakan pilihan otonom-rasionalnya dalam menentukan calon pemimpin bangsanya, tanpa terpengaruh oleh black campaign yang mendahului dan menyertainya sebelum masuk ke bilik suara. Tingkat kualitas peradaban dan kemartabatan suatu bangsa dan negara sangat ditentukan bagaimana corak hubungan antara "keimanan dalam agama" dan "kebhinnekaan kehidupan sosial dalam bangsa-negara". Perjumpaan dan dialog antara keduanya yang tidak dapat mencapai titik kulminasi konvergensi, bukan kebenaran dan kesejahteraan bersama yang akan diperoleh tetapi malah sebaliknya, defisit kebenaran dan kesejahteraan yang akan diperoleh. Kedua, pluralitas,

demokrasi, inklusivitas sebagai bagian tidak terpisahkan dari teori masalah.²⁶⁶

Walaupun kita sebagai bangsa yang majemuk, tetapi tetap rukun dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Hal itu senantiasa harus dilestarikan dan dikembangkan menuju tata kehidupan yang lebih baik lagi, bahkan esensi kemanusiaan dalam pergulatan pemilihan anggota legislatif, pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan Presiden/Wakil Presiden di Indonesia tetap terjaga dan tidak ada konflik fisik walaupun pilihan berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa yang majemuk mampu menjalani perbedaan pilihan hidup dalam satu wadah NKRI dan mampu menghargai esensi kemanusiaan dengan memberikan kebebasan pada saudara sebangsanya untuk berbeda dalam pilihan, tetapi tetap rukun dan harmonis.

Dalam konteks pemeliharaan akal, NU dan Muhammadiyah juga mengambil bagian peran penting dalam melakukan pendidikan dan pengajaran bagi umat melalui Amal Usaha Muhammadiyah, dan pondok pesantren serta Lembaga Pendidikan Maarif bagi NU. Di samping itu, untuk memelihara jiwa/fisik agar senantiasa sehat, juga berdiri Rumah Sakit NU dan juga Rumah Sakit Muhammadiyah untuk melayani umat.²⁶⁷ Di bidang olah raga, ada pencak silat pagar nusa dan tapak suci. Program-program tersebut mendapat dukungan prioritas dalam pemerintahan Joko Widodo dengan kebijakan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan untuk kepentingan kesehatan diberikan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Program tersebut merupakan pelaksanaan dari amanah UUD-NRI tahun 1945 yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) "*Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan*", dan ayat (3) "*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam*

²⁶⁶ M Amin Abdullah, *Sumbangan Nurcholish Madjid atas Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia*, <http://nurcholishmadjid.net/?page=news&action=view&id=64>, diakses tanggal 19 September 2016.

²⁶⁷ Lihat, *Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan*, Edisi Nomor 17/101, 1-15 September 2016 dan Edisi Nomor 03/102, 1-15 Februari 2017, dan *Risalah: Mencerahkan dan Menyejukkan*, Edisi 69/X, Februari 2017.

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam Undang-Undang”, dan Pasal 34 ayat (3) “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.²⁶⁸

Sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kesadaran dan sikap bangsa Indonesia yang didasarkan pada akal budi dan hati nurani, sehingga kebangsaan yang kita kembangkan bukan kebangsaan yang *chauvinisme* (mengagungkan kesukuan atau kedaerahan), tetapi kebangsaan yang menuju pada kekeluargaan bangsa-bangsa. Nilai-nilai kemanusiaan yang berbasis pada kearifan lokal yang dipadukan dengan visi global yang menggunakan segala daya untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sedangkan ke dalam, kita berusaha menegakkan hak-hak asasi manusia seperti pemenuhan segala kebutuhan pokok warga masyarakat. Sila kedua ini tentu saja dijiwai oleh sila pertama yang berarti bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang menjadi anggota masyarakat atau bangsa dan juga sekaligus hamba Tuhan. Oleh sebab itu, pemeliharaan esensi manusia tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia.²⁶⁹ UUD-NRI tahun 1945 memberikan amanah untuk menjaga hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A ayat (1) “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, dan Pasal 28C ayat (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.²⁷⁰

Dalam kaitan dengan pendidikan, M Jusuf Kalla berpendapat bahwa suatu negara akan dinilai sebagai negara yang maju jika memiliki nilai tambah, nilai tambah itu memiliki hubungan erat dengan adanya teknologi, sedangkan teknologi itu memiliki hubungan erat dengan kemajuan riset dan pendidikan. Dengan kata lain, pengembangan akal pikiran manusia melalui

²⁶⁸ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2013), hlm. 163-164 dan 166.

²⁶⁹ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2012), hlm. 52-53.

²⁷⁰ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2013), hlm. 153-154.

pendidikan dan riset memiliki peranan penting dalam memajukan peradaban manusia dalam segala seginya. Dengan ilmu pengetahuan, maka kehidupan duniawi akan semakin dinamis, teknologi semakin dinamis, dan peradaban manusia semakin dinamis.²⁷¹ Oleh sebab itu, peradaban manusia yang maju hanya bisa terwujud jika perkembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari sistem pendidikan mampu memadukan antara nilai-nilai agama Islam dengan nilai-nilai ilmu-ilmu umum, sehingga Islam tidak pernah secara eksplisit memisahkan pengetahuan akademik praktis dari pengetahuan agama (*Islam has never explicitly separated practical academic knowledge from religious knowledge*).²⁷² Dalam hal ini, perhatian terhadap akal dan jiwa sebagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan menentukan peradaban manusia, sedangkan ilmu pengetahuan ditentukan oleh peradaban pendidikan yang dibangun, sehingga semakin maju pendidikan yang berwawasan agama di suatu negara, maka akal dan jiwa warganya juga akan semakin berkembang dinamis dan progresif.

1. Akal dan Jiwa sebagai Esensi Manusia

Dalam mewujudkan *Hifdz al-Zât al-Insâniyyah* (memelihara esensi manusia), maka kita harus mampu memelihara hal-hal pokok yang terdapat dalam bagian ini. Menurut al-Najjar, esensi manusia meliputi jasad dan ruh secara totalitas yang memiliki unsur seperti emosi, akal, dan lainnya. Dalam bagian ini, memelihara esensi manusia pada dasarnya sama dengan menjaga dan melindungi manusia dengan semua unturnya. Perlindungan terhadap esensi manusia mencakup perlindungan terhadap akal sebagai unsur yang memiliki nilai terpenting dari ruh manusia, memelihara akal pikiran (*hifdz al-'aql*) dan perlindungan terhadap seluruh bagian manusia yang menyokong kekuatan jasad dan ruh manusia, yakni memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*).

²⁷¹ www.wapresri.go.id/wapres-jk-hanya-ilmu-yang-dapat-memajukan-negeri/, diakses 24 Desember 2017; M Jusuf Kalla, disampaikan pada Peresmian Monumen DR H Abdullah Ahmad dan Pustaka Perjuangan Bangsa di Kampus Perjuangan Adabiah Jl Jati Adabiah No 1 Padang, Sumatera Barat, 23 Agustus 2015 dalam Husain Abdullah dan Burhanuddin Bella (eds.), *74 Kumpulan Pidato Pilihan M Jusuf Kalla 2014-2015, Satu Digit*, (Jakarta: Buku Republika, Cet II., 2016), hlm. 302.

²⁷² Azam Othman dkk, "Islamic integrated education system model in the Malay archipelago: Implications for educational leadership", *Intellectual Discourse*, 25:1 (2017), IIUM Press ISSN 0128-4878 (Print); ISSN 2289-5639 (Online), hlm. 204.

Dalam bagian ini dibahas tiga aspek: *Pertama*, *hifdz al-fithrah al-insāniyyah* (memelihara fitrah manusia) menjadi salah satu *Maqāshid al-Syari'ah* yang terpenting yang terkandung dalam maksud penciptaan manusia, yakni tatanan yang dibuat Allah dalam menciptakan manusia baik unsur jasad (*hifdz al-nafs*) maupun unsur akal (*hifdz al-'aql*). Unsur akal akan berfungsi untuk meneliti dan mendalami realitas alam secara benar, sedangkan unsur jasad bekerja untuk kepentingan fisik seperti berjalan dan bekerja empiris lainnya. Dalam tataran aplikasinya, Nabi Muhammad saw menggariskan bahwa Allah swt, diri pribadi, keluarga dan tamu masing-masing memiliki hak dan hendaknya menunaikan hak kepada yang berhak, sehingga dengan demikian, ada keseimbangan antara hak hamba dengan hak Allah swt, dan hak pribadi dengan hak orang lain. Demikian juga unsur jasad berhubungan erat dengan ruh, unsur akal berhubungan erat dengan kehendak dan kemauan sebagai hal fitrah. Untuk membangun keseimbangan yang fitriyah ini, Allah swt melarang umat manusia untuk berlebih-lebihan dan melampaui kodrat fitrahnya, misalnya ibadah saja tanpa ada usaha kerja atau puasa terus-menerus dengan meninggalkan tugas-tugas sosial kemanusiaannya.²⁷³

فَأَوْمُوا وَجْهَكُمْ لِلدِّينِ خَيْرًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَوِيمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (Q.S. Ar-Ruum [30]:30)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (Q.S. al-Ma'idah [5]: 87).

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

Artinya: atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti

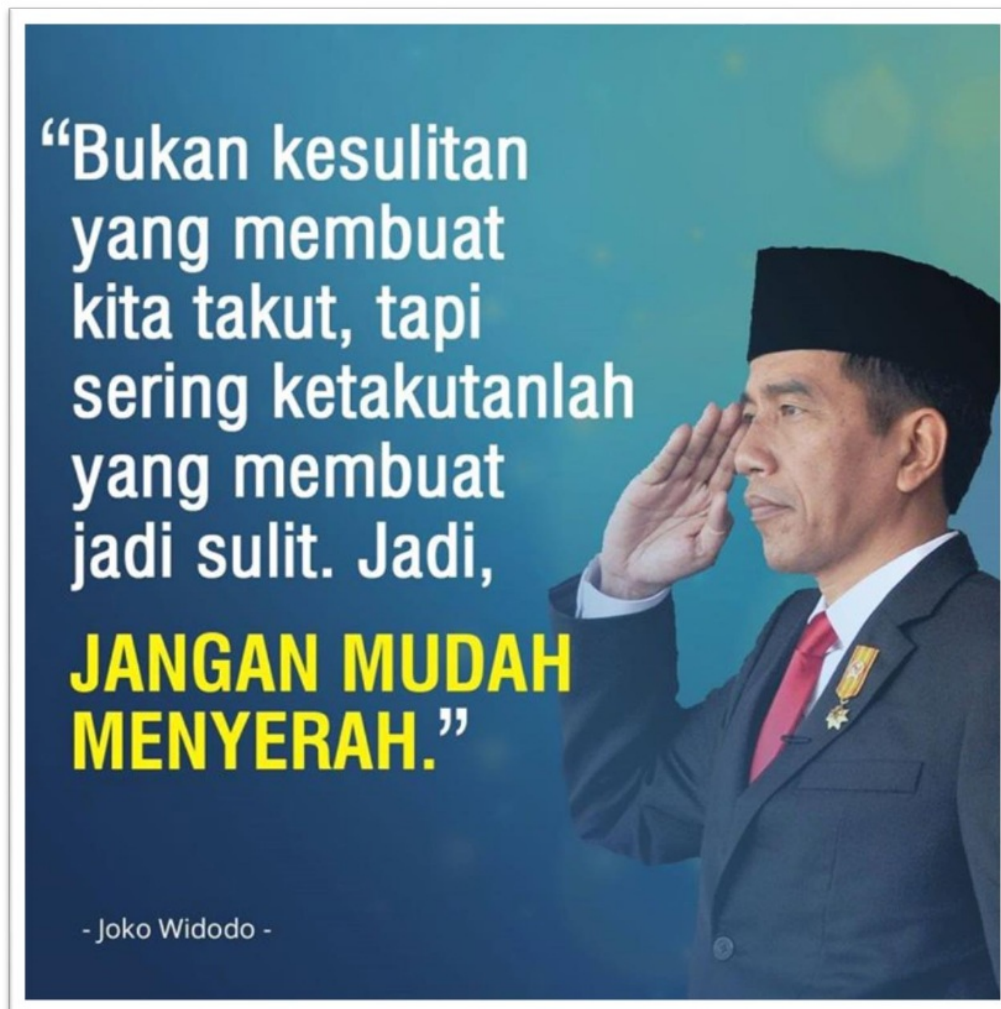
²⁷³ 'Abd al-Majid al-Najjār, *Maqāshid al-Syari'ah* ..., hlm. 86-96

binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu). (Q.S. al-Furqan [25]: 44).

Salah satu cara bagaimana kita menjaga akal pikiran dengan baik dan benar adalah menjaga akal pikiran untuk selalu banyak berpikir, bukan menambah pikiran. Dengan kata lain, kita harus berpikir cerdas, strategis dan tuntas untuk mencapai cita-cita dan menghadapi tantangan hidup serta jangan pernah kita mudah putus asa atau janganlah kita mudah menyerah.²⁷⁴ Demikian juga Abdullahi Ahmed An-Na'im menegaskan bahwa sikap dan perilaku beragama Islam harus selalu dikembangkan sesuai dinamika perkembangan zaman, misalnya tuntutan perlindungan hak asasi manusia di bidang pendidikan atau hak hidup.²⁷⁵

²⁷⁴ Berita tanggal 21 Februari 2017, <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 6 Juli 2017.

²⁷⁵ Abdullahi Ahmed An-Na'im, "Why should Muslims abandon Jihad? Human rights and the future of international law", *Third World Quarterly*, Vol. 27, No. 5, tahun 2006, hlm. 792.



(Dokumentasi)²⁷⁶

Dalam tataran aplikatif di Perguruan Tinggi, “memelihara akal pikiran” bisa dilakukan melalui pendidikan keilmuan, profesi dan vokasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa untuk mencapai kemashalatan hidup. Dalam hal ini, Joko Widodo memberikan arah pemikiran yang visioner dengan menekankan perlunya inovasi dan memperhatikan kebutuhan riil masyarakat, misalnya “*Mengapa di universitas kita tidak ada jurusan logistik, jurusan retail atau jurusan khusus mengenai toko online? Bukankah jurusan-*

²⁷⁶ Berita tanggal 21 Februari 2017, <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 6 Juli 2017.

*jurusan itu sangat dibutuhkan sekarang ini?” Inilah yang menjadi pertanyaan mendasar Presiden Joko Widodo yang dikemukakan dalam acara *Konferensi Forum Rektor Indonesia Tahun 2017* di Jakarta. Ia mengajak akademisi dan praktisi pendidikan untuk berani mengubah hal-hal yang berkaitan dengan jurusan/prodi untuk menjawab realitas perubahan zaman yang begitu cepat. Hal ini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan hidup, memenangkan persaingan dan mencapai kemajuan peradaban bangsa Indonesia, “*kuncinya terletak pada kekuatan sumber daya manusia. Karena itu kita harus berani melakukan lompatan-lompatan dalam dunia pendidikan untuk melahirkan sumber daya manusia yang memiliki etos kerja, kreativitas, dan inovasi yang tinggi*”. Kondisi ini menjadi pekerjaan kita bersama yang harus kita selesaikan agar kita tidak tertinggal lebih jauh. Perguruan Tinggi memiliki tugas untuk melihat ke depan dan bersinergi dengan pemerintah dalam menjawab tantangan masa depan. “*Indonesia butuh visi untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam 50 hingga 100 tahun ke depan*”.²⁷⁷*



²⁷⁷ Berita tanggal 2 Februari 2017, <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 6 Juli 2017.

(Presiden RI, Ir H Joko Widodo, Menristek-Dikti, Muhammad Natsir, dan Mahasiswa Perguruan Tinggi, Dokumentasi Foto: Biro Pers Setpres)²⁷⁸

Senada dengan Joko Widodo, M Jusuf Kalla juga mengutarakan pentingnya pengembangan sumber daya manusia untuk kepentingan melakukan inovasi dalam mengejar dinamika ilmu dan teknologi. *“Pada masa datang pendidikan sangat dinamis. Kenapa dinamis? Karena ilmu sangat dinamis. Bagaimana dinamisnya ilmu dapat dilihat dari perkembangan teknologi, setiap 1,5 tahun berkembang 100 persen. Setiap 18 bulan handphone kita makin kecil, makin kuat, makin murah karena ilmunya berkembang. Kedokteran berkembang setiap 3 tahun. Jadi dokter yang tidak belajar lagi, 3 tahun ilmunya tinggal setengah. Karena itu harus sekolah dan berkembang terus. Jangan dipikir 50 tahun lalu sekolah saya begini dan akan tetap begini. Karena itulah dibutuhkan suatu penelitian, research, melihat kebutuhannya yang akan datang.”*²⁷⁹

Dalam konteks ini, pemeliharaan akal pikiran yang dilakukan dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia dan berbagai inovasi untuk memajukan tata kehidupan manusia/teknologi merupakan suatu keharusan sebagaimana sifat dan karakter dasar manusia, yakni jika manusia bekerja dengan baik dan benar serta bertaqwa kepada Allah swt, maka manusia itu akan memperoleh kemuliaan derajat di dunia dan akhirat. Kemuliaan derajat itu terwujud sesuai dengan asal mula penciptaannya yang telah diciptakan sebagai makhluk yang sebaik-baiknya bentuk sebagaimana penjelasan ayat berikut:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

13 Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (Q.S. At-Tiin [95]: 4)

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa Allah swt telah menciptakan sebaik-baiknya bentuk bagi manusia baik dari sisi kekuatan

²⁷⁸ Berita tanggal 2 Februari 2017, <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 6 Juli 2017.

²⁷⁹ M Jusuf Kalla, disampaikan pada Peresmian Monumen DR H Abdullah Ahmad dan Pustaka Perjuangan Bangsa di Kampus Perjuangan Adabiah Jl Jati Adabiah No 1 Padang, Sumatera Barat, 23 Agustus 2015 dalam Husain Abdullah dan Burhanuddin Bella (eds.), *74 Kumpulan Pidato Pilihan M Jusuf Kalla 2014-2015...*, hlm. 302

maupun sisi fitrahnya, seperti kemampuan berpikir, kemampuan berkehendak, dan kemampuan berbuat. Hal itu tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Oleh sebab itu, manusia diberikan kekuatan atau kemampuan dalam memilih dan berbuat untuk kebaikan ataupun keburukan sebagaimana gambaran ayat berikut:²⁸⁰

فَأَلَمْنَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا . قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

Artinya: maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya (Q.S. Asy-Syams [91]: 8-10).

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa setiap umat manusia diberikan kebebasan untuk berpikir dan berbuat, tetapi pilihan itu juga diikuti dengan pujian jika perbuatannya baik, dan diberikan celaan jika perbuatannya tidak baik alias buruk.²⁸¹ Oleh sebab itu, dengan mengutip ilmuwan agama Islam dari negara asing, Soekarno menyebutkan bahwa “agama Islam adalah agama amal. Bukan sekadar agama untuk mengetahui jalan yang benar, tetapi agama amal, *the gospel of action*”.²⁸² Dengan kata lain, kebebasan berpikir dan berkehendak untuk mengetahui dan berbuat untuk kebaikan serta membangun peradaban ilmu-teknologi adalah pilihan yang mulia yang seharusnya menurut Joko Widodo digunakan untuk melakukan inovasi-inovasi dalam mencapai prestasi kinerja yang baik dan produktif dalam memajukan peradaban hidup bangsa dan negara.

Kedua, *hifdz al-karāmah al-insāniyyah* (memelihara kemuliaan manusia) adalah untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai kehormatan dan kemuliaan manusia sebagaimana telah Allah tegaskan dalam firman-Nya.²⁸³ Dalam upaya menjaga kemuliaan hak-hak kemanusiaan, riset-riset empiris yang dibutuhkan masyarakat dan bangsa sangat relevan untuk memelihara akal pikiran manusia untuk mengangkat hak-hak dan derajat manusia, misalnya kegiatan riset ilmiah yang dilakukan PP Pemuda Muhammadiyah untuk kepentingan melepaskan diri dari hegemoni praktik ekonomi dan juga

²⁸⁰ ‘Abd al-Majīd al-Najjār, *Maqāshid al-Syari’ah* ..., hlm. 92.

²⁸¹ ‘Abd al-Majīd al-Najjār, *Maqāshid al-Syari’ah* ..., hlm. 92.

²⁸² Soekarno, “Islam, Agama Amal”, Amanat pada Peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara, Jakarta, 15 Maret 1960, dalam R Soemarjoto (peny), *Bung Karno...*, hlm. 204.

²⁸³ ‘Abd al-Majīd al-Najjār, *Maqāshid al-Syari’ah* ..., hlm. 98.

komitmen PB-HMI terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan keanekaragaman suku, budaya dan agamanya, disamping membahas masalah kesenjangan ekonomi, sosial dan diskriminasi hukum. Kondisi ini menjadi komitmen kita bersama untuk menyelesaikannya demi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan dan harkat martabat bangsa.²⁸⁴



(Presiden RI didampingi Mensesneg RI menerima kedatangan tamu PB HMI dan PP Pemuda Muhammadiyah)²⁸⁵

Memberdayakan kalangan pedagang kecil juga menjadi bagian pokok dalam rangka memelihara nilai-nilai kehormatan atau martabat manusia, sehingga kebijakan yang berorientasi pada masyarakat kecil menjadi hal penting yang harus selalu menjadi perhatian pimpinan pemerintahan mulai dari pusat hingga paling bawah. Memberikan perhatian terhadap para pedagang menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan keadilan

²⁸⁴ Berita 20 Februari 2017, <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 6 Juli 2017.

²⁸⁵ Dokumentasi Foto Biro Pers Setpres, Berita 20 Februari 2017, <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 6 Juli 2017.

yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hingga kini, Joko Widodo masih tetap konsisten dalam memberikan perhatian dan dukungan terhadap para pedagang kecil, misalnya ia masih menyempatkan diri untuk berkunjung dan meresmikan pasar rakyat di Boyolali, bahkan ia merasa bahagia karena telah “*meresmikan Pasar Sambu, di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ini. Sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang tidak kalah dengan pusat perbelanjaan modern. Bukan lagi pasar yang kumuh, becek dan tanpa ruang parkir. Pasar Sambu adalah satu dari 5.000 pasar tradisional di Indonesia yang sedang dan akan direvitalisasi dalam lima tahun. Saya tidak mau pasar rakyat kalah dengan pasar modern*”.²⁸⁶



(Presiden Joko Widodo meninjau Pasar Sambu, di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah)²⁸⁷

Ketiga, hifdz ghâiyyah al-hayâh (memelihara tujuan hidup manusia) yang memiliki orientasi bahwa manusia diciptakan oleh Allah swt tidak lain

²⁸⁶ Berita 30 Januari 2017, <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 6 Juli 2017

²⁸⁷ Dokumentasi Foto Biro Pers Setpres, Berita 30 Januari 2017, <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 6 Juli 2017.

kecuali untuk menjalankan segala perintah Allah swt dan menjauhi segala larangan Allah swt. Hidup manusia berhubungan dengan tujuan yang perlu diyakini dan juga usaha untuk mewujudkan tujuan penciptaan manusia itu sendiri, sehingga jika hal itu tidak tercapai, maka manusia akan turun ke dalam derajat hewan. Allah swt berfirman:²⁸⁸

أَلَيْسَ الْإِنْسَانُ أَلَّا يَتَذَكَّرُ

Artinya: Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)? (Q.S. al-Qiyamah [75]: 36)

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

Artinya: Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? (Q.S. al-Mukminun [23]:115)

Dalam konteks ini, al-Najjâr memberikan penjelasan bahwa manusia diciptakan tidak ada yang sia-sia, tetapi ada maksud yang mulia, yakni menjalankan perintah yang menjadi kewajiban peribadinya dan mewujudkannya dalam kehidupan empiris. Kewajiban manusia itu di antaranya menjadi pemimpin (*khilāfah*) di muka bumi yang bermakna bahwa setiap manusia harus mampu menerima segala perintah Allah swt dan menjauhi segala larangan Allah swt, sehingga makna *khilāfah* di sini bukan bentuk negara, tetapi fungsi kepemimpinan untuk menjalankan perintah Allah swt dan menjauhi larangan-Nya. Oleh sebab itu, makna *khilāfah fī al-ard* adalah kesiapan manusia untuk menerapkan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Adapun makna *khilāfah fī al-ard* di sini menurut al-Najjâr adalah berhubungan dengan fungsi ibadah, bukan fungsi *siyāsah* (politik) sebagaimana digambarkan dalam surat al-Baqarah ayat 30 dan surat Adz-Dzariyat ayat 56:²⁸⁹

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi (Q.S. al-Baqarah [2]: 30)

²⁸⁸ 'Abd al-Majid al-Najjâr, *Maqâshid al-Syari'ah* ..., hlm. 30 dan 101; Syamsuri, "Membangun Maqasid Al-Shari'ah Melalui Al-Usul Al-Khamsah: Studi Kritis Terhadap Konsep Al-Ghazali dan Abd Al Majid Al-Najjar", *Kumpulan Makalah* ..., hlm. 83-84.

²⁸⁹ 'Abd al-Majid al-Najjâr, *Maqâshid al-Syari'ah* ..., hlm. 102.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (Q.S. Adz-Dzariyat [51]: 56)

2. Pendidikan sebagai Pemelihara Akal dan Jiwa.

Fungsi *khilāfah fī al-ard* dapat digambarkan, yakni *Pertama*, untuk menjaga eksistensi nilai-nilai kemanusiaan sebagai personal dan masyarakat, juga diharapkan terbangun hubungan yang saling mengasihi, menyayangi, dan gotong royong. *Kedua*, memakmurkan bumi dengan segala hukum-hukumnya serta mengembangkan segala hal untuk kebaikan hidup tanpa berlebih-lebihan, tidak boleh merusak dan bermain-main dalam pengelolaan bumi.²⁹⁰

Dalam tataran kenegaraan Indonesia, Pancasila menjadi bagian esensial dari sistem perlindungan nilai-nilai kemanusiaan, karena dengannya, pluralitas hidup bangsa bisa terwadahi dan terpelihara secara baik dan benar hingga kini. Oleh sebab itu, ideologi Pancasila harus terlaksana dan terlembaga dalam kebijakan politik kenegaraan dan kebangsaan. Menurut Joko Widodo, “Pancasila harus menjadi ideologi yang bekerja dan terlembagakan dalam sistem serta kebijakan, baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial-budaya. Saya yakin hanya dengan itu kita memiliki pondasi kokoh dalam menghadapi setiap permasalahan bangsa.”²⁹¹

²⁹⁰ Abd al-Majid al-Najjār, *Maqāshid al-Syari’ah ...*, hlm. 102-103.

²⁹¹ Dalam konteks ini, Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKPPIP) agar Pancasila tidak hanya menjadi slogan, tetapi bisa diamalkan, dikonkretkan, diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan di dalam kehidupan sehari-hari. *Mengukuhkan Kembali Ideologi Pancasila*, 31 May 2017 <http://presidenri.go.id/artikel-terpilih/mengukuhkan-kembali-ideologi-pancasila.html>, diakses 15 September 2017.



(Pidato Presiden Joko Widodo 1 Juni 2016)²⁹²

17

Sebenarnya, sejak awal Bung Karno membangun fondasi kebangsaan dengan sikap anti diskriminasi yang jelas dan tegas. Dasar pemikiran Bung Karno antara lain: “Peri-kemanusiaan, cinta kasih kepada sesama manusia tak peduli ia berkulit hitam atau berkulit putih atau berkulit merah atau berkulit kuning yang meresap sedalam-dalamnya di dalam kita punya jiwa dan didasari oleh rasa Ketuhanan yang Maha Esa.” Lalu dalam salah satu pidato Bung Karno pada 17 Juni 1954 dengan jelas Bung Karno mengatakan bahwa: “Kebangsaan yang kita kemukakan bukan sekadar kebangsaan negatif, tetapi juga kebangsaan positif. Kebangsaan yang ingin mengemukakan segala rasa-rasa mulia dan luhur yang ada di dalam kalbu bangsa kita.” Pidato ini seharusnya menjadi landasan sikap yang diwariskan dari generasi ke generasi sehingga ketika muncul ancaman yang dihadapi

17

²⁹² Kegiatan tersebut dapat digambarkan berikut: *Presiden Joko Widodo dalam pidatonya tanggal 1 Juni 2016 mengatakan rasa syukurnya karena Indonesia memiliki Pancasila. Presiden membandingkan kondisi di sejumlah negara yang disebutkan tengah gelisah. Di tengah kegelisahan negara-negara dalam menghadapi tantangan-tantangan baru, Presiden mengatakan: “Kita beruntung mempunyai Indonesia yang berbhineka tunggal ika, Indonesia yang beragam, tapi bisa menjaga toleransi dan kebhinekaan”. Mengukuhkan Kembali Ideologi Pancasila, 31 May 2017, <http://presidenri.go.id/artikel-terpilih/mengukuhkan-kembali-ideologi-pancasila.html>, diakses 15 September 2017.*

pemerintah dan bangsa Indonesia terutama terhadap kebhinekaan, toleransi dan pluralisme, kita bisa mengatasinya dengan cepat.²⁹³

Secara preventif, norma fiqih mengajarkan pemeliharaan akal pikiran atau ideologi yang dilakukan dengan menekankan perlunya menghindari perbuatan mabuk-mabukan dan segala bentuk informasi negatif seperti ponografi serta paham-paham yang radikal, keras dan ekstrim. Adapun dari sisi positif, norma fiqih atau agama Islam mengajarkan perlunya menyampaikan ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum yang bermanfaat bagi keberlangsungan eksistensi hidup manusia. Norma fiqih ini pada dasarnya menjadi program prioritas pemerintahan Joko Widodo melalui program pendidikan dengan adanya program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sudah dilakukan sejak menjadi Walikota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta yang mana hal ini berhubungan erat dengan terlaksananya *hifdz al-'aql*. Pada perguruan tinggi, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyiapkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk mendukung dan mengembangkan riset-riset ilmiah untuk melakukan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan untuk memajukan bangsa Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan *hifdz al-'aql*, perguruan tinggi harus memberikan perhatian yang khusus terhadap pengembangan riset yang kompetitif untuk menjawab keperluan masyarakat dan kebutuhan pasar yang dinamis. Perguruan tinggi harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan masyarakat/bangsa dan pasar. Menurut Joko Widodo, “kalau kebutuhan pasar, kebutuhan masyarakatnya di pangan, ya mestinya *heavy*-nya agak ke sana. Energi, *heavy*-nya juga ke sana”. Oleh sebab itu, kita harus mampu melakukan riset-riset yang dapat memperkuat inovasi dan *competitiveness*. Dalam kuliah umum di UNS, ia menyatakan:²⁹⁴

Dan perguruan tinggi juga perlu mengembangkan tema-tema riset yang strategis. Tidak hanya kita riset untuk kita sendiri, tapi betul-betul

²⁹³ Mengukuhkan Kembali Ideologi Pancasila, 31 May 2017, <http://presidenri.go.id/artikel-terpilih/mengukuhkan-kembali-ideologi-pancasila.html>, diakses 15 September 2017.

²⁹⁴ Joko Widodo, *Kuliah Umum Presiden Republik Indonesia Dies Natalis ke-47 dan Lustrum ke-8* Universitas Negeri Sebelas Maret Solo, Jawa Tengah 11 Maret 2016, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11489&Itemid=26 diakses 4 Juni 2016.

tematis. Dan arahnya, *goal*-nya ke mana, itu harus kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat, dan bisa dipakai oleh pasar, baik industri, baik manufaktur, dan juga sisi pertanian, sisi nelayan. Dan proyek-proyek nasional yang berbasis riset—saya tahu UNS juga sudah melakukan di bidang mobil listrik maupun sepeda motor listrik—saya kira harus terus dikembangkan..... Dan saya memberikan penghargaan, memberikan apresiasi kepada UNS yang telah diterima kehadirannya sebagai kampus yang peduli pada rakyat, kepada *wong cilik*, khususnya yang fokus pada pemberdayaan UMKM, yang saya lihat dari dulu konsistensi UNS dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah yang mengakar dalam masyarakat. Dan saya kira ini bisa diangkat dalam forum-forum nasional maupun global.²⁹⁵

Dalam kuliah umum tersebut, perguruan tinggi diharuskan untuk memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat dan pasar sehingga inovasi dan daya saing harus menjadi perhatian yang serius, sebagaimana UNS telah memberikan perhatian pada dinamika kebutuhan masyarakat dengan dibukanya pusat studi UMKM yang fokus dalam bidang usaha pemberdayaan masyarakat.²⁹⁶

²⁹⁵ Joko Widodo, *Kuliah Umum Presiden Republik Indonesia Dies Natalis ke-47 dan Lustrum ke-8 Universitas Negeri Sebelas Maret Solo*, Jawa Tengah 11 Maret 2016, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11489&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

²⁹⁶ Joko Widodo, *Kuliah Umum Presiden Republik Indonesia Dies Natalis ke-47 dan Lustrum ke-8 Universitas Negeri Sebelas Maret Solo*, Jawa Tengah 11 Maret 2016, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11489&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.



(Perdana Menteri Inggris, David Cameron, menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo setibanya di Number 10 Downing Street, London, Inggris, 19 April 2016).²⁹⁷

Pendidikan yang memperhatikan aspek kebutuhan masyarakat terutama bidang ekonomi itu sangat dibutuhkan, disamping pendidikan keagamaan yang berusaha menangkal paham terorisme dan ekstrimisme sehingga umat bisa terhindar dari perlakuan yang sesat dan salah. Sebab, norma agama dalam hal ini Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan dan ekstrimisme, bahkan sebaliknya, norma agama Islam memberikan pendidikan yang mengandung nilai-nilai toleransi dan moderasi dalam hidup manusia. Inilah pendidikan keagamaan Islam yang diajarkan di sekolah Indonesia, pendidikan yang memberikan ruang toleransi, moderasi dan keharmonisan hidup bagi manusia. Sistem pendidikan keagamaan Islam inilah yang kemudian diakui dunia dan diharapkan Indonesia memainkan peran terdepan dalam menyebarkan nilai-nilai agama yang toleran, moderat

²⁹⁷ Dalam lawatan tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, dan Kepala BKPM, Franky Sibarani. REUTERS/Stefan Wermuth. *Jokowi Pidato Soal Poros Maritim di IMO London*, <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/20/078764128/jokowi-pidato-soal-poros-maritim-di-imo-london>, diakses 6 Juni 2016.

dan harmonis. Oleh sebab itu, dunia -seperti Kerajaan Inggris- mendukung program pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mendirikan Universitas Islam Internasional Indonesia sebagai salah satu wadah pendidikan Islam yang moderat, toleran dan progresif serta pemberantasan terhadap gerakan terorisme.²⁹⁸



(Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris, David Cameron dalam lawatannya ke 10 Downing Street, London, Inggris, 19 April 2016. AP Photo/Kirsty Wigglesworth).²⁹⁹

⁵⁴ Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris, David Cameron, menyampaikan bahwa Islam Indonesia bersifat demokratis dan toleran. Menurut Joko Widodo, "sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai peran untuk menunjukan kepada dunia bahwa dalam Islam, demokrasi dan toleransi dapat beriringan." Sementara itu, dalam pertemuan itu, pendidikan agama di sekolah Indonesia mendapat apresiasi dari PM Inggris yang mana hal itu bisa dijadikan model di dunia dan Indonesia harus memainkan peran terdepan dalam mengajarkan pemahaman keagamaan yang toleran dan damai.

²⁹⁸ Inggris Dukung Jokowi Bentuk Universitas Islam Internasional, <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/19/117763997/inggris-dukung-jokowi-bentuk-universitas-islam-internasional>, diakses 6 Juni 2016.

²⁹⁹ Ketika Jokowi dan Cameron Bicara Islam Indonesia di London, <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/20/078764133/ketika-jokowi-dan-cameron-bicara-islam-indonesia-di-london>, diakses 6 Juni 2016.

Menurut PM Inggris, ia sangat terkesan dengan apa yang ia lihat dalam pendekatan Indonesia terhadap ekstremisme dan terorisme, tetapi juga meneguhkan Islam sebagai agama yang damai melalui berbagai programnya termasuk program pendidikan.³⁰⁰ Pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai dasar Islam adalah penting sebagai usaha untuk memelihara akal (*hifdz al-'aql*), sehingga dengan adanya pemahaman agama Islam yang dasar yang mengajarkan sikap moderasi dan toleransi itu, maka akan lahir sistem kehidupan yang mampu melindungi dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan yang suci, seperti sikap ramah, santun, rukun, dan hormat pada sesama yang telah menjadi tradisi masyarakat kita.



(Presiden Joko Widodo disambut oleh sejumlah warga negara Indonesia saat tiba di Berlin, Jerman, 14 April 2016. setneg.go.id)

Sementara itu, program prioritas Joko Widodo yang berhubungan langsung dengan usaha memelihara eksistensi jiwa sebagai unsur jasadi/materi atau yang menyokong tegaknya usaha mewujudkan *hifdz al-nafs* adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang juga sudah dilakukan sejak menjadi Walikota Surakarta walaupun dengan istilah yang berbeda.

³⁰⁰ Ketika Jokowi dan Cameron Bicara Islam Indonesia di London, <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/20/078764133/ketika-jokowi-dan-cameron-bicara-islam-indonesia-di-london>, diakses 6 Juni 2016.

Kesehatan jasmani memiliki peran penting dalam mendukung dan menjaga kesehatan rohani atau akal pikiran, sehingga ada benarnya pernyataan yang menyebutkan bahwa *al-'aql al-sâlim fi al-jims al-sâlim* yang artinya akal pikiran yang sehat berada dalam badan yang sehat.

Dalam menjalankan program-program prioritas tersebut, pemerintahan Joko Widodo-M Jusuf Kalla terus bekerja dalam mewujudkan program-program fundamental yang menjadi kebutuhan mendasar bangsa Indonesia terutama menyediakan fasilitas untuk memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan dapat diakses segenap lapisan masyarakat serta layanan kesehatan yang layak, terjangkau bagi seluruh elemen masyarakat serta infrastruktur dasar lainnya yang dibutuhkan.

Dan dengan jiwa tegak itu, pemerintah akan terus bekerja keras menjalankan program-program pembangunannya, sehingga seluruh rakyat bisa cukup sandang, cukup pangan, dan cukup papan. Supaya seluruh rakyat Indonesia bisa sehat dan berpendidikan. Supaya seluruh rakyat Indonesia mempunyai harga diri dan mempunyai martabat. Karena sesungguhnya negeri kita yang besar ini, yang berbhinneka, demokratis dan berpenduduk muslim terbesar di dunia mestinya bisa maju, sejajar dengan negara-negara maju lainnya.³⁰¹

Tujuan program prioritas itu adalah untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia, sehingga bisa berdaya saing dan mampu mengembangkan diri dalam menghadapi berbagai tantangan nasional dan internasional yang sangat dinamis dan kompetitif.

³⁰¹ Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Acara Peringatan Nuzulul Qur'an Nasional di Istana Negara, Jakarta, Tanggal 3 Juli 2015*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9534&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016

BAB V
MEMELIHARA KEPENTINGAN PUBLIK
(*Hifdz al-Mujtama'*)

Dalam kajian keislaman, konsepsi pemeliharaan kepentingan publik yang dikenal dengan *mashlahah al-'ammah* tidak banyak memberikan sumbangan terhadap perlindungan eksistensi manusia sebagai bagian dari entitas sosial, bahkan umat Islam semakin individualitis yang ditandai dengan sikap eksklusif dari sebagian golongan Islam, bahkan sesama golongan Islam yang berada di luar golongannya sering dianggap kafir. Kondisi ini terjadi dalam sejarah perjalanan Islam. Oleh sebab itu, lahirnya konsepsi *hifdz al-mujtama'* dari al-Najjâr memberikan pengembangan wawasan syariat Islam yang lebih inklusif dalam membangun kepentingan publik, sehingga bisa memberikan suasana yang lebih kondusif dan harmonis dalam tata kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia. Salah satu kajian penting yang bisa dijadikan landasan teoritik adalah telaah kritis M Amin Abdullah dalam membaca fakta historis pemahaman dan praktik beragama di sebagian kawasan Timur Tengah yang tidak peka terhadap kepentingan hidup manusia dan tidak mendalam dalam menggali pesan-pesan universal dari syariat Islam, sehingga realitas hidup umat tersebut menjadi eksklusif, primordial, dan penuh dengan konflik serta benturan fisik. Dengan kata lain, pemahaman keislamannya melangit, tidak membumi.

Dalam ideologi dan praktik sosial-politik-keislaman yang dideklarasikan oleh para pendiri Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS), yang mengangkat isu dan mendeklarasikan secara sepihak apa yang mereka sebut sebagai al-khilafah al-Islamiyyah, sebagai antitesis atau antidote dari sistem pemerintahan republik yang demokrasi dan berkonstitusi yang dianggap gagal di Iraq dan Suria, sangat jelas corak doktrin al-walla' wa al-barra' (loyalty dan disavowal) tersebut. Bahkan doktrin loyalty and disavowal ini tidak hanya terbatas pada pemilihan kepemimpinan, tetapi juga melebar ke wilayah sejarah dan budaya. Penghancuran tempat-tempat ibadah milik pemeluk agama lain, penghancuran situs-situs budaya dan agama, seperti candi , patung-patung dan benda-benda bersejarah yang lain, yang dianggap sebagai simbol syirk, yang dianggap bertentangan dengan pemahaman subjektif aqidah dan syari'ah Islam yang mereka pahami . Puncaknya adalah menggumpalnya dan hidup suburnya sektarianisme, parochialisme, primordialisme atau mazhabiyah, hizbiyyah dan ta'ifiyyah di lingkungan umat beragama Islam yang melemahkan sendi-

sendi kehidupan sosial-kemasyarakatan dan sosial-politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁰²

Kajian keislaman tersebut memberikan gambaran bahwa adanya fanatisme beragama dapat memberikan pengaruh atas pemikiran dan kepentingan politik bagi ideologi keagamaan. Oleh sebab itu, pemahaman keagamaan Islam di kawasan itu sering dijadikan ideologi pembenar dalam melakukan tindak kekerasan dan kejahatan kemanusiaan. Secara faktual, kondisi itu telah melemahkan bangunan kehidupan sosial dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akibat adanya konflik tersebut.

Inilah kekurangan dan kelemahan pemikiran Islam di Timur Tengah khususnya dan negara-negara Muslim pada umumnya, yang ditengarai oleh Ibrahim M. Abu Rabi' sebagai pemikiran Islam yang tidak mengenal dan kering dari sentuhan social sciences dan masukan berharga dari pemikiran kritis-filosofis-akademis yang biasa dikaji dalam humanities kontemporer. Saya kutip pandangan Ibrahim M. Abu Rabi': "The core of the field revolves around Shari'ah and Fiqh studies that have been, very often, emptied of any critical or political content, or relevance to the present situation. A clear-cut distinction has been made between the "theological" and the "political" or the "theological" and the "social," with the former being understood as rites, symbols, and historical text only. Furthermore, the perspective of social sciences or critical philosophy is regrettably absent. The field of modern Shari'ah studies in the Muslim world has remained closed off to the most advanced human contributions in critical philosophy and social science".³⁰³

Konsepsi *hifdz al-mujtama'* al-Najjâr itu menjadi bagian dari usaha melakukan kontekstualisasi syariat Islam yang disandingkan dengan perkembangan ilmu-ilmu sosial-humaniora kontemporer, sehingga realitas kepentingan publik dapat dilindungi secara komprehensif, tidak parsial, tidak eksklusif dan tidak a-historis. Problem kesenjangan pendapatan dan kekayaan serta persoalan hak asasi manusia dapat diatasi.³⁰⁴

³⁰² M Amin Abdullah, *Sumbangan Nurholish Madjid atas Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia*, <http://nurcholishmadjid.net/?page=news&action=view&id=64>, diakses tanggal 19 September 2016.

³⁰³ M Amin Abdullah, *Sumbangan Nurholish Madjid atas Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia*, <http://nurcholishmadjid.net/?page=news&action=view&id=64>, diakses tanggal 19 September 2016.

³⁰⁴ Mustafa Omar Mohammed, Kazi Md. Tarique, dan Rafikul Islam, "Measuring the performance of Islamic banks using maqâsid-based model", *Intellectual Discourse*, Vol 23, 2015, hlm. 409.

Dalam tata cara yuridis formal, ajaran syariat Islam sesuai dengan spirit UUD-NRI tahun 1945 yang memberikan amanah untuk menjaga hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*” dan ayat (2) “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Dan pasal 28C ayat (2) “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”.³⁰⁵ Dalam Sila Kedua Pancasila terkandung amanah yang salah satunya adalah untuk pemeliharaan dan pengayoman terhadap jiwa dan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabatnya. Sila kedua juga mengatur kesamaan kedudukan setiap warga negara dan kebebasan setiap warga negara yang berhubungan dengan Tuhan, sesama warga dan menyatakan pendapat sesuai dengan hak dasarnya.³⁰⁶

1. Rumah Tangga Sebagai Pondasi Keluarga Harapan

*Kekuatan keluarga adalah kekuatan bangsa itu sendiri.*³⁰⁷

Bagian ini merupakan bagian penting dalam memelihara kepentingan publik (*hifdz al-mujtama'*). Sebagai makhluk Allah swt yang mengemban tugas mulia sebagai *khalifahtullah fil ardi*, umat manusia memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan kepentingan publik. Tugas dan tanggung jawab keagamaan Islam tersebut tidak hanya ditujukan kepada person tetapi juga ditujukan pada komunitas atau kelompok yang memerlukan orang banyak. Adapun salah satu usaha menjaga dan melestarikan eksistensi masyarakat diwajibkan dengan menjalankan syariat Islam berupa pernikahan untuk kepentingan keberlangsungan keturunan manusia untuk kepentingan misi kepemimpinan yang adil. Dengan syariat

³⁰⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..., hlm. 154.

³⁰⁶ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar ...*, hlm. 54.

³⁰⁷ Sambutan Wakil Presiden M Jusuf Kalla dalam acara Aisyiyah di Jakarta. M Jusuf Kalla, “Kemajuan Bangsa Tergantung Kemajuan Keluarga”, disampaikan saat menghadiri Mukhtamar Aisyiyah ke-47 Tahun 2015, Satu Abad Aisyiyah di Balai Prajurit Jenderal M Jusuf di Makassar, 7 Agustus 2015, dalam Husain Abdullah dan Burhanuddin Bella (eds.), *74 Kumpulan Pidato Pilihan M Jusuf Kalla 2014-2015...*, hlm. 277.

pernikahan itu diharapkan adanya hubungan yang halal dan manusiawi dalam interaksi rumah tangga, sehingga dengan adanya rumah tangga yang sakinah *mawaddah wa ramah* diharapkan lahir entitas sosial atau masyarakat yang sehat dan kondusif. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan *hifdz al-mujtama'*, kita harus mampu membangun tata hubungan antara personal yang baik terutama dalam rumah tangga yang diharapkan dari entitas masyarakat terkecil itu akan lahir masyarakat luas yang sehat dan harmonis.³⁰⁸

Signifikansi *hifdz mujtama'* menjadi nyata karena agama Islam tidak menganggap usaha penyucian diri yang bersifat personal saja tetapi juga kolektif, bahkan ibadah ruhani seperti shalat juga diajarkan adanya shalat berjama'ah sebagai perkara yang dituntut. Dengan demikian, urusan kolektif kemasyarakatan menjadi pondasi dalam menjalankan tatanan kepemimpinan yang teratur dan adil, sehingga urusan kolektif kemasyarakatan menjadi kebutuhan primer (*maqâshid al-dlarûri*) yang harus dijaga untuk membangun kehidupan manusia yang damai (*salimah*), hubungan yang harmonis, menegakkan tradisi gotong royong, dan kehidupan yang damai. Semua itu akan berjalan dengan lancar jika dibangun berdasarkan asas kebebasan dan musyawarah.³⁰⁹

Dalam kehidupan masyarakat, *hifdz al-nasl* menjadi bagian penting karena dengan adanya *hifdz al-nasl* itu akan terwujud tata kehidupan masyarakat yang selamat dan sehat yang terdiri dari person-person yang saling memerlukan. Oleh sebab itu, kelahiran generasi muda menjadi tali penyambung keberlangsungan hidup masyarakat yang disyariatkan oleh agama Islam, bahkan Nabi Muhammad saw membanggakan banyaknya umat di hari kiamat. Sementara itu, tata kehidupan masyarakat juga menjadi perhatian tersendiri yang harus dibangun dan dijaga untuk membangun masa depan peradaban rumah tangga, peradaban masyarakat dan peradaban negara yang baik, adil dan sejahterah.³¹⁰

³⁰⁸ 'Abd al-Majîd al-Najjâr, *Maqâshid al-Syari'ah* ..., hlm. 31; Syamsuri, "Membangun Maqasid Al-Shari'ah Melalui Al-Usul Al-Khamsah: Studi Kritis Terhadap Konsep Al-Ghazali dan Abd Al Majid Al-Najjar", *Kumpulan Makalah* ..., hlm. 84-85.

³⁰⁹ 'Abd al-Majîd al-Najjâr, *Maqâshid al-Syari'ah*..., hlm. 143-144.

³¹⁰ 'Abd al-Majîd al-Najjâr, *Maqâshid al-Syari'ah* ..., hlm. 145, 150, dan 157-180.

Dalam konteks *hifdz al-nasl*, Joko Widodo tidak hanya memahami ajaran agama Islam, tetapi juga sekaligus menjalankannya dengan sempurna dalam menyelenggarakan akad nikah dan *walimatul ursy* putrinya dengan menghadirkan berbagai elemen tokoh termasuk tokoh-tokoh agama. Dalam acara tersebut, hadir Haedar Nashir yang juga membacakan doa untuk kedua mempelai yang isinya berikut: “*Jadikan keduanya rumah tangga yang membawa kebajikan untuk kedua orangtuanya, masyarakat, bangsa dan keduanya. Berilah keduanya keturunan, anak yang shalih-shalihah dan melahirkan generasi yang membawa negerinya menuju Indonesia berkemajuan.*” Kalimat tersebut adalah penghujung doa Haedar Nashir yang mengiringi prosesi akad nikah putri semata wayang Presiden Joko Widodo Kahiyang Ayu yang berlangsung khidmat pada pagi hari tanggal 8 Oktober 2017 di Graha Sabha Buana, Solo. Turut hadir dalam pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobby, sejumlah tokoh penting di antaranya Wakil Presiden RI, Drs H M Jusuf Kalla, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga Rais Aam PBNU, Prof Dr KH Ma’ruf Amin, Ketua Umum PBNU, Prof Dr KH Said Aqil Siraj, dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr H Ahmad Syafii Maarif, MA.³¹¹

³¹¹ “Haedar Nashir dan Syafi’i Ma’arif Kawal Prosesi Akad Nikah Putri Presiden Jokowi”, *Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan*, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/11/08/haedar-nashir-dan-syafii-maarif-kawal-prosesi-akad-nikah-putri-presiden-jokowi/>, diakses 25 Nov 2017.



(Prosesi Ijab Kabul Putri Presiden Jokowi di Graha Sabha Buana, Solo).³¹²



(Ketua Umum PP Muhammadiyah sedang berdoa di acara pernikahan Putri Presiden Jokowi)³¹³

³¹² “Haedar Nashir dan Syafi’i Ma’arif Kawal Prosesi Akad Nikah Putri Presiden Jokowi”, *Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan*, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/11/08/haedar-nashir-dan-syafii-maarif-kawal-prosesi-akad-nikah-putri-presiden-jokowi/>, diakses 25 Nov 2017.

³¹³ “Haedar Nashir dan Syafi’i Ma’arif Kawal Prosesi Akad Nikah Putri Presiden Jokowi”, *Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan*, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/11/08/haedar-nashir-dan-syafii-maarif-kawal-prosesi-akad-nikah-putri-presiden-jokowi/>, diakses 25 Nov 2017.

Setelah dilangsungkan prosesi ijab kabul, Haedar Nashir menyampaikan pesan keagamaan Islam dari doa yang dilantunkannya, dimana ia mengharapkan kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah *mawaddah wa rahmah*, sehingga nantinya rumah tangga ini mampu menjadi contoh bagi anak-anak muda, yakni rumah tangga yang rukun, damai dan bersahabat dengan siapa pun. Menurut Haedar, “*Ini semangat dari doa saya, bahwa bangsa kita ke depan agar anak-anak bangsa yang sudah ataupun belum berumah tangga bisa hidup rukun, damai, dan bersahabat dengan siapa pun. Namun tidak kalah pentingnya untuk menjadi warga bangsa yang mampu memberi sumbangsih yang baik untuk bangsanya. Itulah yang kami sebut sebagai membawa Indonesia berkemajuan.*”³¹⁴

Memelihara eksistensi masyarakat (*hifdz al-kiyân al-ijtimâ'i*) merupakan realitas yang sangat penting karena manusia tidak mungkin bisa memenuhi hajat hidupnya tanpa adanya hubungan pergaulan yang baik dan erat di dalam kehidupan masyarakat, sedangkan keberadaan masyarakat sebagai wadahnya tidak akan mungkin bisa memenuhi hajat hidup setiap anggotanya tanpa adanya perlindungan dari segala gangguan dan ancaman. Oleh sebab itu, eksistensi masyarakat merupakan jaringan yang erat yang mengikat hubungan-hubungan yang dibuat yang bermacam-macam yang terdiri dari hubungan antar person, hubungan person dengan komunitas masyarakat, hubungan person dengan negara, dan hubungan person dengan kehidupan rumah tangganya. Adapun hubungan ini bisa berbentuk hubungan spiritual etik dan juga bisa berbentuk hubungan legal formal. Keberadaan hal tersebut itulah yang dikenal di sini dengan sebutan “*al-kiyân al-ijtimâ'i*” (eksistensi masyarakat).³¹⁵

Dengan kata lain, agama Islam hadir untuk membangun peradaban masyarakat yang baik. Haedar Nashir melihat kondisi akhir-akhir ini yang mencemaskan karena umat dihadapkan dengan “*situasi merebaknya informasi dan media sosial, sebagian kalangan mudah terbawa arus baru*

³¹⁴ “Haedar Nashir dan Syafi'i Ma'arif Kawal Prosesi Akad Nikah Putri Presiden Jokowi”, *Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan*, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/11/08/haedar-nashir-dan-syafii-maarif-kawal-prosesi-akad-nikah-putri-presiden-jokowi/>, diakses 25 Nov 2017.

³¹⁵ ‘Abd al-Majid al-Najjâr, *Maqâshid al-Syarî'ah ...*, hlm. 157-158.

8
yang tidak sejalan dengan karakter Islam Indonesia, terutama anak-anak muda. Tak jarang, sikap seperti itu membawa pada kondisi serba hitam dan putih. Menghasilkan ekstrem kiri dan ekstrem kanan". Karena itu, kehadiran Muhammadiyah sejak awal tetap mengawal umat dan bangsa menuju kemoderatan, kebaikan, kecerdasan dan keunggulan.³¹⁶

Dalam kegiatan yang mengusung tema "Islam Indonesia; Antara Cita dan Fakta", Haedar memberikan petuah tentang esensi Islam sebagai agama yang membawa kemajuan dan membangun peradaban. Islam, menurut Haedar, harus dilihat secara utuh dalam kapasitasnya sebagai sumber ajaran Islam dan sekaligus sebagai suatu agama yang membentuk sejarah. Islam merupakan agama universal yang nilai-nilainya bisa berlaku di setiap ruang dan waktu. Islam memiliki dimensi akidah, ibadah, dan muamalah. Ketiganya memiliki porsi yang seimbang. Oleh karena itu, menjadi seorang muslim pada prinsipnya merupakan menjadi manusia yang teguh dengan agamanya, dan pada saat yang sama juga menjadi manusia yang berakhlak mulia, bermanfaat bagi sesama, dan berkualitas dalam menjalani kehidupannya. "Tidak benar beraqidah itu anti kemanusiaan, anti kesemestaan," ungkap Haedar. Sebagai agama yang mendudukkan dunia dan akhirat secara proporsional, Islam menjadikan akhlak sebagai hal yang penting. "Akhlak itu ada dimensi pribadi, keluarga, tetangga, dan kemanusiaan universal," katanya. Bahkan, diutusnya nabi Muhammad salah satunya bertujuan untuk meluruskan kembali dimensi akhlak dan keadaban. Sebelum Islam datang, kondisi bangsa Arab pada abad ke-6 berada dalam kondisi tuna moral dan tidak beradab. Beragam perilaku tidak patut, mereka rutinkan. Tanpa terbatas oleh nilai baik-buruk, benar-salah, dan patut-tidak patut, "Kehilangan keadaban sebagai umat manusia," kata Haedar membahasakan parahnya kerusakan ketika itu. Di tengah situasi itu, Islam sebagai 'din al-hadlarah' datang. Nabi Muhammad secara perlahan mulai membangun tatanan baru, menjadikan kota Madinah sebagai 'tamaddun' yang mencerahkan. "Dari sini Islam menyebar ke seluruh dunia dan mencerahkan peradaban," ulasnya. Sejak saat itu, selama enam abad, Islam berjaya dan menguasai dunia.³¹⁷

³¹⁶ "Islam Indonesia, Antara Cita dan Fakta", *Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan*, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/11/15/islam-indonesia-antara-cita-dan-fakta/>, diakses 25 November 2017.

³¹⁷ "Islam Indonesia, Antara Cita dan Fakta", *Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan*, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/11/15/islam-indonesia-antara-cita-dan-fakta/>, diakses 25 November 2017.



(Kajian AMM DIY menyongsong Milad Muhammadiyah ke-105, bertempat di Aula Gedung PWM DIY, pada Rabu, 15 November 2017)³¹⁸

Salah satu pelopor pembawa gagasan kemajuan Islam di Indonesia pada abad ke-20 adalah KH Ahmad Dahlan yang kemudian mendirikan Muhammadiyah. Sebelumnya, Islam Indonesia sudah hidup dan berkembang dengan masif dengan karakter yang moderat, toleran dan ramah, tetapi belum memberikan kontribusi luas untuk kemajuan umat karena belum terorganisir dengan baik. Menurut Haedar Nashir, “Muhammadiyah ikut di sini, memberi corak baru, Islam yang maju, selain juga moderat. Ide-ide kemajuan lahir dari Muhammadiyah”. Kehadiran Muhammadiyah diawali dari bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial untuk membangun kemajuan umat dan bangsa Indonesia. Sebab, bangsa ini selain baik, harus juga cerdas dan maju. Menurut Haedar Nashir, “Baik saja tidak cukup. Harus cerdas, maju dan unggul.”³¹⁹

³¹⁸ “Islam Indonesia, Antara Cita dan Fakta”, *Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan*, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/11/15/islam-indonesia-antara-cita-dan-fakta/>, diakses 25 November 2017.

³¹⁹ “Islam Indonesia, Antara Cita dan Fakta”, *Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan*, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/11/15/islam-indonesia-antara-cita-dan-fakta/>, diakses 25 November 2017.

Sebagai '*khairu ummah*', kata Haedar, umat Islam harus menjadikan keseharian dan nilai-nilai luhur Islam menjadi keseharian. Hal ini sesuai dengan akhlak nabi dan para sahabat. Yang diikuti dari Nabi, kata Haedar, bukan hanya cara makan, cara pakaian, tapi nilai-nilai Islam yang diajarkan sebagai *rahmatan lil alamin*. Berpakaian ala Arab, menurut Haedar, belum tentu berpakaian ala Islam. Antara Arab sebagai tempat turunnya Islam tidak sama dengan Islam sebagai sebuah ajaran. Haedar mencontohkan sikap kalangan tertentu yang bimbang dengan trend berpakaian. "Prinsip berpakaian itu menutup aurat, itu yang harus diikuti," katanya. Haedar menjelaskan pada zaman dahulu, kondisi kawasan Arab adalah tidak aman dan tidak ramah perempuan, sehingga pantas saja jika cara menutup aurat para perempuan terkesan berlebihan untuk konteks Indonesia. Haedar juga sempat mengingatkan tentang pentingnya menjaga rumah Indonesia. Menurutnya, bangunan kebangsaan Indonesia sebagai rumah bersama mulai menunjukkan gejala retak. Oleh karena itu, Muhammadiyah perlu untuk mengambil peran menjaga agar hal itu tidak terjadi. "Kita hidup dalam keragaman. Kita berbangsa dan bernegara dalam keragaman. Mayoritas harus mengayomi yang minoritas. Demikian juga yang minoritas. Kalau ada gangguan, jangan cepat panas," kata Haedar. "Organisasi kita tetap berdiri pada prinsip-prinsipnya," ujarnya. Dikarenakan Muhammadiyah merupakan organisasi yang sudah mapan dan memiliki karakteristik tersendiri, maka tidak perlu cepat *gumunan* dan terbawa arus. "Jangan menjadi umat yang besar tetapi seperti buih," tegas Haedar. Sebagai umat yang besar dari sisi kuantitas, harusnya umat Islam bisa menunjukkan kekuatan dalam hal kualitas. "Ini sangat penting."³²⁰

2. Prinsip-Prinsip Agama dalam Hidup Bermasyarakat

Dalam memelihara kepentingan eksistensi masyarakat dapat dijabarkan dalam dua ruang lingkup, yakni ***Pertama, memelihara prinsip hidup bermasyarakat*** yang bertujuan untuk membangun peradaban hidup masyarakat yang berlandaskan pada prinsip; (a) *memelihara esensi peradaban agama*, umat manusia semuanya diharuskan berpikir dan berbuat untuk mewujudkan kebaikan hidup, mencegah kemungkaran dan kedzaliman; (b) *memelihara esensi peradaban rumah tangga* dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia (*an ta'isya al-usrah al-hayâh al-sa'idah*); (c) *memelihara esensi peradaban negara* yang mana jika keluarga merupakan merupakan landasan hidup terkecil dalam memelihara masyarakat, maka negara merupakan landasan terbesar dalam mewujudkan

³²⁰ "Islam Indonesia, Antara Cita dan Fakta", *Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan*, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/11/15/islam-indonesia-antara-cita-dan-fakta/>, diakses 25 November 2017.

kepentingan hidup masyarakat, sehingga Nabi Muhammad saw sangat tegas dalam keharusan mendirikan sebuah negara. Eksistensi negara bertujuan untuk menjaga kepentingan persatuan masyarakat, kerjasama masyarakat, memenuhi kebutuhan hidupnya, dan melindungi masyarakat dari bahaya kekacauan, fitnah, dan keterlantaran. Oleh sebab itu, masyarakat adalah sumber kekuasaan, sedangkan musyawarah merupakan instrumen hidup bernegara. **Kedua, memelihara hubungan-hubungan kemasyarakatan** yang berarti bahwa relasi-relasi sosial harus dibangun dengan baik sebagaimana berikut: (a) *menjaga ikatan persaudaraan* yang diatur oleh agama Islam, sehingga ada aturan dalam membangun hubungan yang baik antara person dengan masyarakat. Syariat Islam menjadikan ikatan persaudaraan sebagai ikatan pertama dalam membangun kehidupan masyarakat sebagaimana diajarkan Nabi saw dalam membangun ikatan persaudaraan antara kaum muhajirin dan anshar. Oleh sebab itu, Nabi saw menyegerakan pembangunan pondasi hidup masyarakat yang baru dengan ikatan persaudaraan (*'aqd al-ukhuwwah*) sebagai landasan dalam menegakkan tata kehidupan manusia dan masyarakat. Dengan demikian, ikatan persaudaraan yang diajarkan Nabi saw merupakan perintah ibadah yang harus dilaksanakan, tidak hanya bagi sesama umat Islam, tetapi juga dengan sesama umat manusia; (b) *menegakkan keadilan* yang menjadi aturan dalam membangun tata kehidupan masyarakat sebagai tujuan utama, sehingga setiap anggota masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, mendapatkan hak-hak yang setara, dan mendapatkan kesetaraan kewajiban, sehingga hal tersebut menjadi pondasi dalam mewujudkan eksistensi hidup bermasyarakat, bahkan salah satu tujuan kenabian Nabi saw yang terpenting adalah untuk mewujudkan keadilan, Q.S. al-Hadid: 25, Q.S. al-Nahl: 90, Q.S. an-Nisa': 3, Q.S. al-An'am: 152, Q.S. An-Nisa': 58, Q.S. al-Ma'idah: 8, Q.S. al-Mumtahanah: 8; (c) *menjaga tanggung jawab relasi sosial* yang bertujuan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat baik yang bersifat material maupun non-material (martabat kemanusiaan). Salah satu ajaran esensi agama Islam adalah memenuhi kebutuhan orang-orang fakir-miskin sebagai bagian dari prinsip hidup gotong royong (*al-takâful al-ijtimâ'i*) yang diajarkan dalam al-Qur'an (al-

Ma'un: 1-3 dan al-balad: 11/16). Nabi saw juga menegaskan bahwa bukanlah mukmin sejati jika ia dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Prinsip hidup gotong royong dalam memenuhi kebutuhan primer masyarakat itu adalah sebagai pondasi adanya keimanan yang sejati yang kemudian hal itu menjadi bukti kesungguhan adanya ikatan dalam tata kehidupan masyarakat.³²¹

Dalam hubungannya dengan memelihara eksistensi publik/masyarakat, berbagai pemikir fiqh kontemporer menekankan perlunya menggali pesan-pesan dasar Islam. Salah satu pemikir fiqh kontemporer adalah Fat'hi 'Utsman (pemimpin redaksi majalah Islam internasional Arabia terbit di London) yang berpendapat bahwa suatu hukum atau ketentuan agama Islam, termasuk yang ada dalam al-Qur'an dapat dilaksanakan hanya setelah ditegakkannya keadilan sosial dan tatanan kemasyarakatan yang menjamin anggotanya untuk tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan. Pandangan ini pada dasarnya adalah bagian dari prinsip *hifdz al-mujtama'* sebagaimana dikutip Nurcholish Madjid dari karyanya Fat'hi Utsman yang berjudul, *al-din li al-waqi'* (Agama untuk Realita):³²²

Keadilan Sosial sebelum hukuman. Allah menerangkan dalam Kitab-Nya berbagai hukuman kejahatan (*had*) seperti, misalnya, hukum bunuh (*qishâsh*) untuk kejahatan pembunuhan, potong tangan untuk pencurian, dan lain-lainnya. Wajar bahwa Islam menempuh jalan penetapan hukum-hukum setelah ditempuhnya jalan pengarahannya melalui aqidah dan pendidikan tingkah laku melalui prinsip *tabadul*. Tapi penetapan hukum Islam tidak pernah disebut kecuali mesti timbul dalam pikiran orang, gambaran yang mengerikan tentang tangan-tangan buntung dan jasad-jasad berserakan. Sedangkan yang sebenarnya ialah bahwa rahmat Allah untuk sekalian alam tidaklah menetapkan hukuman, kecuali sesudah ditempuh jalan proteksi, sama dengan yang dikatakan Francis Aveling dalam bukunya ilmu Jiwa Klasik dan Modern, "Kalau tujuan kita ialah kebaikan masyarakat, maka tujuan hukuman haruslah proteksi. Dan cara apapun yang dapat merealisasikan tujuan ini harus dipandang sebagai wajar dari sudut pandangan sosial. Jadi jika kita dapat mencegah sebab-sebab dan situasi yang mendorong kejahatan, baik yang berasal dari lingkungan atau pun dari pribadi

³²¹ Abd al-Majid al-Najjar, *Maqashid al-Syari'ah ...*, hlm. 158-180.

³²² Nurcholisdh Madjid, "Pandangan Kontemporer tentang Fiqh: Telaah Problematika hukum Islam di Zaman Modern", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam ...*, hlm. 389.

sendiri, maka itulah cara yang ideal yang kita wajib menggunakannya.”³²³

⁴² Pandangan Fat’hi Utsman tersebut memiliki kesamaan prinsip dengan konsep *Maqāshid al-Syari’ah* al-Najjār yang diawali dengan memberikan perhatian pada pendidikan atau akal pikiran manusia yang ditata dan dididik, baru kemudian dilanjutkan dengan pembangunan tatanan sosial/kepentingan publik. Pendidikan akidah dan akhlak diajarkan lebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan hukuman yang bertujuan menciptakan tatanan publik yang aman dan damai.

Presiden RI Pertama, Ir Soekarno, memberikan gambaran bahwa untuk membangun peradaban dunia yang besar, kita harus belajar dari manusia-manusia yang berjiwa besar dan berbudi luhur. Kita harus belajar dari manusia-manusia besar, tetapi Nabi Muhammad saw lebih besar dari manusia besar, lebih besar dari pemimpin besar, oleh karena beliau mendapat wahyu dari Allah swt. “Oleh karena itu, demikian saya katakan lima tahun yang lalu, pantaslah Muhammad menjadi contoh bagi kita karena beliau mendapat pimpinan dari Tuhan, karena mendapat wahyu, luput dari kesalahan”.³²⁴

Pembangunan peradaban manusia yang adil dan makmur sebagai bagian dari usaha mewujudkan *hifdz al-mujtama’* menjadi penting karena tanpa adanya pandangan dunia dan wawasan yang luas dari tokoh panutan dunia, yang bernama Muhammad saw, kita sebagai umat Islam akan mengalami kesulitan untuk berkembang dan maju, sehingga kita sepantasnyalah harus menjadikan Nabi Muhammad saw sebagai contoh ideal dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Pantas manusia yang demikian ini menjadi contoh bagi kita dan pada malam ini, kita mengambil contohnya di dalam usaha kita membangun. Bukan saja membangun suatu negara kesatuan Indonesia yang berwilayah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke, tetapi juga membangun masyarakat yang adil dan makmur, tata

³²³ Nurcholisdh Madjid, “Pandangan Kontemporer tentang Fiqh: Telaah Problematika hukum Islam di Zaman Modern”, dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam ...*, hlm. 389.

³²⁴ Soekarno, “Nabi dan Pembangunan”, Amanat pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw, di Istana Negara, Jakarta, 15 September 1959, R Soemarjoto (peny), *Bung Karno...*, hlm. 191-192.

tentrem karta raharja, di dalam wajah negara Republik Indonesia....untuk pembangunan kita harus menjalankan persiapan diri di tiga lapangan. Persiapan di lapangan material, persiapan di lapangan kecakapan, persiapan di lapangan batiniah.³²⁵

Sesuai dengan pemikiran Soekarno, pembangunan kepentingan publik dalam ranah keadilan sosial di Indonesia sebagai bagian dari usaha mewujudkan *hifdz al-mujtama'* hanya akan bisa diwujudkan secara optimal jika terpenuhi tiga syarat, yakni *Pertama*, persiapan di lapangan material yang berarti kalau kita hendak membangun, harus memiliki modal materi atau *material investment*, kita membangun gedung, harus ada bahan baku materialnya, kita membangun pabrik-pabrik juga demikian. *Kedua*, persiapan di lapangan kecakapan atau *human skill* dengan cara mengirim anak-anak atau pemuda-pemuda kita ke sekolah dan universitas untuk mewujudkan *human skill*. *Ketiga*, kita bekerja keras di lapangan bukan hanya butuh *human skill*, tetapi juga persiapan batin. Kita harus memiliki mental dan jiwa yang besar dalam membangun dengan menghilangkan segala penyakit korupsi dan penyakit lainnya yang menghalangi cita-cita besar kita dalam mewujudkan pembangunan masyarakat/bangsa atau kepentingan publik yang adil dan makmur.³²⁶

Dalam Kitab al-Hikam karya Ibnu Athoillah disebutkan bahwa "*husn al-a'mâl natâij husn al-ahwâl wa husn al-ahwâl min al-tahaqquq fi maqâm al-inzâl*" yang artinya: "amal yang baik hasil dari kondisi spiritual yang baik. Sementara kondisi spiritual yang baik bersumber dari kemampuan menerima berbagai kedudukan yang Dia berikan".³²⁷ Dengan demikian, kondisi batin/spiritual yang baik sangat menentukan kebaikan perilaku dan tindakan empiris seseorang, sehingga pribadi yang baik, ikhlas, tulus, sabar dan istiqamah juga melahirkan perubahan dan semangat yang mulia dalam membangun kecakapan/kemampuan intelektual, serta kemampuan

³²⁵ Soekarno, "Nabi dan Pembangunan", Amanat pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw, di Istana Negara, Jakarta, 15 September 1959, R Soerमारjoto (peny), *Bung Karno...*, hlm. 191-192.

³²⁶ Soekarno, "Nabi dan Pembangunan", Amanat pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw, di Istana Negara, Jakarta, 15 September 1959, R Soerमारjono (peny), *Bung Karno...*, hlm. 192-193.

³²⁷ Syekh Ibnu Athaillah, *Kitab al-Hikam*, terj. Fauzi Faisal Bahreisy, (Jakarta: Zaman, 2011), hlm. 65.

intelektual/*human skill* yang dapat memberikan bekal teknis-praktis dalam membangun sarana fisik secara baik dan profesional.

Dalam bahasa Nurcholish Madjid, pembangun pribadi seseorang harus dilakukan secara bertahap, mulai dari ber-Islam sehingga orang yang berada dalam maqam ini dikenal dengan muslim, tahapan berikutnya meningkat menjadi ber-Iman sehingga orang yang berada dalam maqam ini dikenal dengan mu'min, dan tahapan ini meningkat lagi menjadi ber-Ihsan sehingga orang yang berada dalam maqam ini dikenal dengan mushin.

Orang yang menerima warisan Kitab Suci (yakni, mempercayai dengan berpegang pada ajaran-ajarannya) namun masih juga berbuat zalim adalah orang yang baru ber-Islam, menjadi seorang Muslim, suatu tingkat permulaan pelibatan dari dalam kebenaran. Ia bisa berkembang menjadi seorang yang beriman, menjadi seorang mu'min, untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat menengah (*muqtashid*), yaitu orang yang telah terbebas dari perbuatan zalim, namun perbuatan kebajikannya sedang-sedang saja. Dalam tingkatnya yang lebih tinggi, pelibatan diri dalam kebenaran itu membuat ia tidak saja terbebas dari perbuatan jahat atau dzalim dan berbuat baik, bahkan ia "bergegas" dan menjadi "pelomba" atau "pemuka" (*sābiq*) dalam berbagai kebaikan, dan itulah orang yang telah ber-ihsan, mencapai tingkat seorang muhsin. Orang yang telah mencapai tingkat *muqtashid* dengan imannya dan tingkat *sābiq* dengan ihsannya, kata Ibn Taimiyah, akan masuk surga tanpa terlebih dulu mengalami azab. Sedangkan orang yang pelibatangannya dalam kebenaran baru mencapai tingkat ber-Islam sehingga masih sempat berbuat dzalim, ia akan masuk surga setelah terlebih dulu merasakan azab akibat dosa-dosanya itu. Jika ia tidak bertobat tidak diampuni Allah.³²⁸

Dalam membangun peradaban masyarakat atau bangsa, Joko Widodo juga memulainya dengan selalu mengembalikan dan menggantungkan diri pada Allah swt dengan mensyukuri segala apa yang telah diberikan pada kita sekalian dan juga sekaligus berarti selalu "*mengikuti keteladanan Rasulullah, baik dalam berpikir, baik dalam berbicara, baik dalam bertindak, baik dalam bekerja, jujur, amanah, selalu menyampaikan kebenaran, cerdas*". Keteladanan Nabi saw itu terdapat dalam bersikap dan mengajarkan nilai-nilai agama Islam yang santun, toleran, dan anti-kekerasan.³²⁹

³²⁸ Nurcholisdh Madjid, "Islam, Iman dan Ihsan Sebagai Trilogi Ajaran Ilahi", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam ...*, hlm. 465.

³²⁹ Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw 1437 H* Istana Negara, Jakarta 23 Desember 2015,

Dengan menangkap spirit pemikiran M Amin Abdullah, salah satu bentuk meneladani ajaran Nabi Muhammad saw adalah dengan membangun keluarga sakinah melalui jalan syariat pernikahan yang sah dan benar. Sebab, pembangunan keluarga sakinah itu akan menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan tata kehidupan masyarakat luas. Bahkan ketenteraman sosial antara berbagai kelompok juga harus menjadi perhatian untuk dijaga dan dipelihara sebagai bagian dari implementasi asas *hifdz al-mujtama'*.³³⁰

Dalam membangun keluarga sakinah harus dilakukan melalui jalan syariat pernikahan yang diajarkan Islam. Secara historis, dalam membangun rumah tangga, Nabi Muhammad saw mengajarkan bahwa pernikahan dilakukan dengan prasyarat memiliki kemampuan baik kemampuan rasional-skill maupun kemampuan fisik. Dengan singkat, dapat dikatakan bahwa setiap orang yang hendak menikah baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki kemampuan rasional-skill dan kemampuan fisik sehingga bisa melahirkan generasi yang berkualitas dan produktif. Oleh sebab itu, kebanggaan Nabi Muhammad saw dengan umatnya itu pada dasarnya bukan hanya diukur dengan kuantitasnya, tetapi juga kualitasnya, sehingga mengatur kelahiran keturunan menjadi penting sesuai dengan kemampuan dari kedua orang tua dalam mendidik dan membesarkan keturunannya.

Kita tahu, dunia sekarang berubah semakin ekstrem, semakin kompleks, dan tantangan ke depan pasti semakin berat. Semua itu hanya bisa dihadapi apabila kualitas hidup setiap warga dunia adalah prima. Hanya ibu yang sehat, anak yang sehat, keluarga yang sehat dan sejahtera yang dapat melahirkan generasi yang berkualitas, generasi yang berkarakter, generasi yang berbudi luhur, yang cinta sesama manusia. Oleh sebab itu, Keluarga Berencana, ibu yang sehat, keluarga yang sehat dan sejahtera menjadi sangat penting. Keluarga Berencana menjadi investasi strategis untuk memastikan generasi masa depan, untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan, untuk mencapai keamanan global, serta kemakmuran dunia. Saya tahu, kemajuan yang dicapai dalam keluarga berencana di dunia saat ini adalah berkat kerja keras, berkat ketekunan, dan berkat kepemimpinan orang-orang tulus seperti Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang ada di ruangan

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=10678&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

³³⁰ M Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 224-225.

ini. Indonesia merasa terhormat menjadi tuan rumah *International Conference on Family Planning* sekarang ini, dan merasa bangga atas kehadiran Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Pemerintah Indonesia juga tengah bekerja keras untuk merevitalisasi Program Keluarga Berencana. Kami menyadari bahwa tantangan dan tanggung jawab yang dihadapi oleh keluarga-keluarga Indonesia ke depan akan semakin besar.³³¹

Dalam konteks Keluarga Berencana, agama Islam mengaturnya dalam kerangka *hifdz al-mujtama'* yang dalam istilah ulama salaf dikenal dengan *hifdz al-nasl*. Adapun *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan) itu menjadi penting karena yang dimaksud dengan memelihara keturunan di sini bukan hanya merawat anak keturunan apa adanya, tetapi juga bagaimana mendidik dan membesarkan anak itu dengan baik, benar dan berkualitas, sehingga lahir generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas sesuai dengan tuntutan nilai-nilai agama Islam. Oleh sebab itu, program Keluarga Berencana dari pemerintah yang bertujuan mengatur kelahiran anak agar lahir generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas menjadi wajib diselenggarakan dan wajib diikuti umat Islam.

Dalam isu kependudukan, laju pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2014-2015 1,32%. Artinya, per tahun, penduduk Indonesia tumbuh sekitar 3 juta jiwa. Rata-rata tingkat kelahiran per perempuan 2010-2015 sebanyak 2,4 anak, atau per perempuan memiliki 2-3 anak. Selain itu, Indonesia diprediksi akan mendapat bonus demografi di tahun 2020-2030, di mana penduduk dengan umur produktif sangat besar, sementara usia muda semakin kecil, dan usia lanjut belum banyak. Untuk menghadapi tantangan-tantangan itu, Pemerintah Indonesia selalu mendorong program aksi yang bersifat lokal dengan melibatkan partisipasi warga. Kami menggunakan pendekatan Kampung Keluarga Berencana di seluruh Indonesia, yang diharapkan dapat mengurangi secara signifikan angka putus kesertaan Program KB (Program Keluarga Berencana). Selain itu, juga dapat meningkatkan pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang. Kalau alat kontrasepsi jangka pendek seperti pil dan suntik, akseptor kerap lupa sehingga angka putus Keluarga Berencana menjadi meningkat. Program kesehatan yang dijalankan pemerintah juga mencakup biaya Keluarga Berencana yang terjangkau atau bahkan gratis untuk pasangan KB..... Sebagai langkah awal, perlu dipastikan

56 ³³¹ Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pembukaan International Conference On Family Planning*, Nusa Dua, Bali 25 Januari 2016, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11057&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

mengenai akses pelayanan dan alat-alat untuk Keluarga Berencana sehingga para ibu semakin bijak dan berdaya untuk menentukan kapan mereka akan mempunyai anak; juga kelahiran yang aman sehingga ibu dan bayi mempunyai kesempatan terbaik untuk hidup sehat.³³²

Program Keluarga Berencana adalah salah satu program yang penting dalam mewujudkan kemaslahatan publik (*al-mashlahah al-'ammah*), sehingga dengan lahirnya generasi muda yang sehat, cerdas dan berkualitas mampu melahirkan peradaban yang baik, adil dan makmur. Secara utuh, kita harus “segera mengambil langkah-langkah nyata yang diperlukan untuk mewujudkan ibu sehat, anak sehat, keluarga sehat dan sejahtera. Hanya dengan cara itu, kita akan bisa mewujudkan planet bumi menjadi tempat hidup yang lebih baik”.³³³

Dengan adanya generasi muda yang sehat, cerdas dan berkualitas, maka juga akan lahir generasi muda yang unggul dan kompetitif. Oleh sebab itu, secara global, tidak berlebihan apa yang dikatakan Joko Widodo, bahwa apabila kita “*meneladani Rasulullah, Indonesia akan menjadi sebuah bangsa yang bermartabat, bangsa yang beradab, bangsa yang makmur, dan bangsa yang sejahtera*”. Tugas kita saat ini adalah bagaimana menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai fundamental agama Islam yang menghendaki pembangunan tata peradaban yang damai, harmonis, rukun, adil dan toleran, tata peradaban yang tidak hanya mengejar kesalehan pribadi, tapi juga mengejar kesalehan sosial, tata peradaban yang mengutamakan kepentingan kaum yang lemah dan miskin. Dengan mengikuti ajaran keteladanan Nabi saw, kita akan mampu mewujudkan Islam yang *rahmatan lil alamin*, Islam yang memberi rahmat bagi semesta alam.³³⁴

³³² Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pembukaan International Conference On Family Planning*, Nusa Dua, Bali 25 Januari 2016, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11057&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

³³³ Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pembukaan International Conference On Family Planning*, Nusa Dua, Bali 25 Januari 2016, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11057&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

³³⁴ Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw 1437 H Istana Negara*, Jakarta 23 Desember 2015, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=10678&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

Kita perlu membangun tatanan peradaban Islam yang peduli, tatanan peradaban Islam yang menebarkan perdamaian, tatanan peradaban Islam yang menebarkan keadilan dan toleransi. Tatanan peradaban Islam seperti itu hanya mungkin terwujud kalau kita tidak hanya mengejar kesalehan pribadi, tapi juga mengejar kesalehan sosial, mengutamakan yang lemah dan yang miskin, karena seorang muslim pada dasarnya merupakan bagian dari komunitas umat yang ingin agar kehidupan berjalan harmonis, bersama-sama, bergotong royong, tidak ada gesekan sosial yang menyebabkan ambruknya sebuah jembatan kebangsaan. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita mempunyai tanggung jawab yang tidak ringan karena harus mampu menunjukkan sebagai umat yang terbaik, umat yang senantiasa membangun solidaritas sosial di antara sesama manusia, umat yang tidak gampang dilanda kebencian, tidak gampang dilanda kedengkian, umat yang berkehendak merangkul, dan bukan memukul eksistensi kelompok lain.³³⁵

Dalam paradigma teologi humanis Hasan Hanafi, pemahaman nilai-nilai ajaran Islam dari Nabi Saw yang luhur harus terus bisa dibumikan dan direalisasikan dalam kehidupan empiris. Dalam bahasa Joko Widodo, “melalui peringatan maulid Nabi ini, mari kita teguhkan kecintaan kita kepada Rasulullah melalui pembangunan yang melayani rakyat”. Oleh sebab itu, *hifdz al-mujtama'* di sini tidak hanya dipahami sebagai usaha melestarikan anak keturunan melalui adanya syariat pernikahan yang akan menjaga keberlangsungan hidup manusia, tetapi lebih dari itu, manusia sebagai komunitas masyarakat harus diperhatikan eksistensi dan dinamikanya, sehingga melalui *hifdz al-mujtama'*, kita harus mampu menguatkan “kembali spirit membangun masyarakat yang berkeadaban, mengedepankan dialog sebagai cara mengatasi perbedaan, saling mengerti dan mewujudkan solusi. Mari kita tegakkan prinsip-prinsip berkeadilan sehingga semua pihak terhindar dari kerugian”.³³⁶

³³⁵ Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw 1437 H Istana Negara, Jakarta 23 Desember 2015*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=10678&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

³³⁶ Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw 1437 H Istana Negara, Jakarta 23 Desember 2015*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=10678&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.



(Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Balai Kartini, Jakarta, Rabu, 9 November 2016)³³⁷

Dalam tataran empiris, memelihara kepentingan publik dapat dilakukan dengan sejumlah program melalui pembangunan Indonesia Sentris yang berkelanjutan, pembangunan destinasi pariwisata baru, pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus luar Jawa, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), pembangunan di beranda terdepan,³³⁸ dan peningkatan investasi luar Jawa.³³⁹ Pembangunan sumber daya manusia untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur merupakan keharusan dan harus dimulai terutama dari daerah perbatasan dan luar pulau Jawa.

³³⁷ Menurut Presiden Joko Widodo, "Pembangunan infrastruktur sekarang tidak Jawa-sentris tetapi Indonesia-sentris". <http://ksp.go.id/pembangunan-indonesia-sentris-untuk-wujudkan-persatuan-indonesia/>, diakses 14 September 2017.

³³⁸ Kawasan perbatasan tidak hanya berfungsi konvensional, mengawasi arus keluar-masuk orang dan barang. Lebih dari itu, ia telah menjadi daya tarik ekonomi, yakni sebagai lokasi pariwisata. Laporan 3 Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla..., hlm. 89

³³⁹ Laporan 3 Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla..., hlm. 86-90.

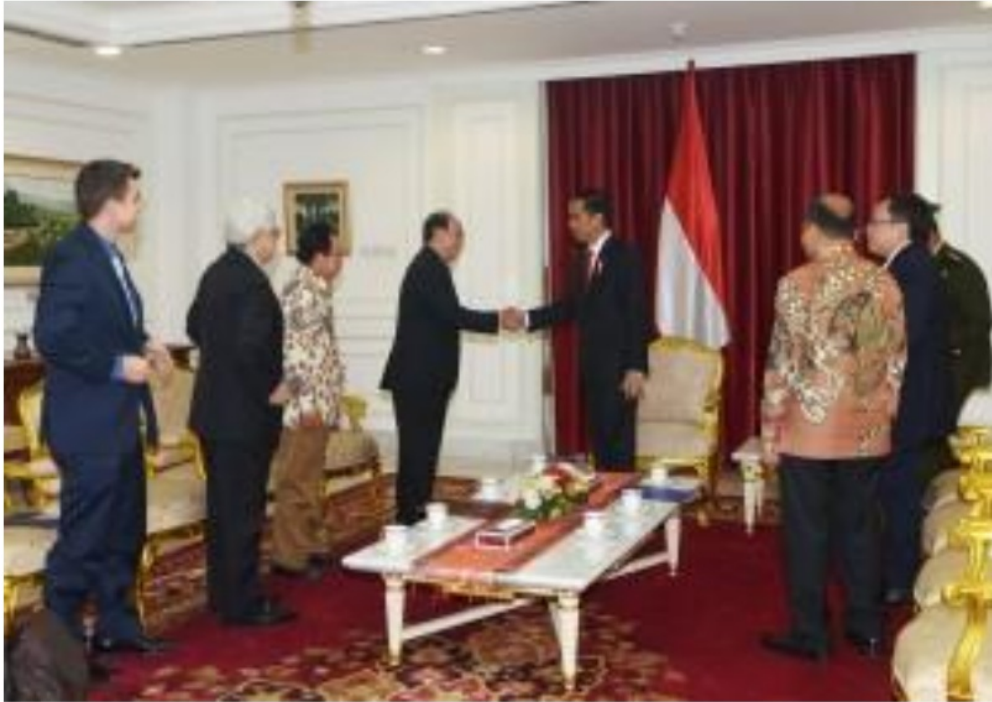


(Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Balai Kartini, Jakarta, Rabu, 9 November 2016)³⁴⁰

“Kebijakan publik itu apa, artinya mendesain provinsinya untuk menjadi apa, mendesain kabupaten dan kotanya untuk menjadi apa. Desainnya dulu jelas. Perencanaan dulu jelas, visi ke depan juga jelas. Dan kebijakan publiknya mendukung untuk mencapai itu (percepatan pembangunan). Kelemahan kita (tandas Jokowi, pen) selama ini, perbatasan itu diserahkan kepada 27 kementerian. Anggarannya 16 triliun tersebar. Ini tidak fokus. Ke depan kita fokus saja, mungkin dua atau tiga kementerian fokus urusi itu (perbatasan), baik fisiknya maupun masyarakatnya. 16 triliun itu bukan uang sedikit”.³⁴¹

³⁴⁰ <http://ksp.go.id/hadiri-munas-ldii-presiden-jokowi-ingatkan-persaingan-global-yang-semakin-sengit/>, diakses 14 September 2017

³⁴¹ <http://m.tribunnews.com/regional/2014/12/17/jokowi-janji-garap-perbatasan-mulai-tahun-depan>, diakses 24 Mei 2015



(Presiden Jokowi menerima delegasi *World Islamic Economic Forum* yang dipimpin Ketuaanya Tan Musa, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/4/2016)³⁴²

Delegasi Yayasan *World Islamic Economic Forum* (WIEF) yang dipimpin oleh ketuaanya Tun Musa mengunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta. Dalam pertemuan itu, disampaikan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah *World Islamic Economic Forum* pada tahun 2016 dan juga pengangkatan Presiden Joko Widodo sebagai Anggota Kehormatan Forum Ekonomi Islam Dunia. Pertemuan itu memiliki makna yang penting karena acara tahunan tersebut pada umumnya dihadiri kurang lebih tiga ribu pebisnis dari seluruh dunia. Menurut Tun Musa, fokus programnya bertujuan membangun *middle* atau *upper middle business people* yang memiliki titik tekan pada pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah, sehingga pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat bisa berjalan dengan adil dan makmur. Dengan adanya sistem ekonomi

³⁴² Presiden Jokowi Jadi Anggota Kehormatan Forum Ekonomi Islam Dunia, <http://setkab.go.id/presiden-jokowi-jadi-anggota-kehormatan-forum-ekonomi-islam-dunia/>, diakses 6 Juni 2016.

masyarakat yang kokoh dan merata itu, maka kepentingan publik menjadi terpenuhi.³⁴³ Program pemerataan ekonomi khususnya bagi masyarakat juga merupakan bagian esensial dari prinsip fiqih/agama Islam yang mengajarkan pembangunan kemaslahatan hidup publik (*al-mashlahah al-'ammah*) yang juga dikenal secara spesifik dalam term ulama fiqih salaf dengan sebutan *hifdz al-māl* (memelihara harta).



(Presiden Joko Widodo secara resmi membuka gelaran *World Islamic Economic Forum* (WIEF) pada Selasa, 2 Agustus 2016)³⁴⁴

Dalam kerangka *hifdz al-māl* tersebut, kita hidup di era inovasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Terhadap segala inovasi yang ada, kita harus mampu mendorong pembangunan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin. Oleh sebab itu, inovasi yang kita laksanakan disamping mampu mendukung kemajuan dan pertumbuhan ekonomi, juga diharapkan mampu membangun keseimbangan dalam pemerataan ekonomi. “Inovasi dapat membuat sejumlah orang menjadi sangat kaya. Tetapi hanya diri kita lah sebagai pemimpin yang dapat memastikan bahwa manfaat dari inovasi tersebut terbagi juga secara adil kepada masyarakat kurang mampu”. Di samping persoalan ekonomi, juga tata kehidupan masyarakat, kita tidak hanya menjalankan toleransi terhadap adanya perbedaan, tetapi juga secara

³⁴³ Presiden Jokowi Jadi Anggota Kehormatan Forum Ekonomi Islam Dunia, <http://setkab.go.id/presiden-jokowi-jadi-anggota-kehormatan-forum-ekonomi-islam-dunia/>, diakses 6 Juni 2016.

³⁴⁴ Pembukaan World Islamic Economic Forum (WIEF) ke-12, <http://www.presidentri.go.id/berita-aktual/pembukaan-world-islamic-economic-forum-wief-ke-12.html>.

tulus menghargai perbedaan demi terwujudnya kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat (baca: *hifdz al-mujtama'*).³⁴⁵

Sebelum menjadi Presiden RI, ketika menjabat Walikota Surakarta, Joko Widodo juga telah berhasil membangun tatanan peradaban masyarakat/kepentingan publik yang berjalan dengan damai dan manusiawi, yakni sistem relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan cara damai dan dengan kesadaran masing-masing pedagang. Kebijakan Joko Widodo itu merupakan wujud dari pemeliharaan eksistensi kepentingan publik yang hakiki (*hifdz al-mujtama'*) terutama dalam kepentingan bisnis.



(Kisah Sukses Joko Widodo di Solo)³⁴⁶

Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan yang pesat. Dengan menerapkan branding “Solo: The Spirit of Java”, Joko Widodo mampu mendongkrak prestasi Kota Solo. Joko Widodo mampu melakukan relokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka, dimana mereka pindah

³⁴⁵ *Pembukaan World Islamic Economic Forum (WIEF) ke-12*, <http://www.presidentri.go.id/berita-aktual/pembukaan-world-islamic-economic-forum-wief-ke-12.html>.

³⁴⁶ *Ini Kisah Sukses Jokowi di Solo*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/06/10/ini-kisah-sukses-jokowi-di-solo>, diakses 4 Juni 2016

berdasarkan kesadaran diri dari masing-masing pedagang setelah melalui proses dialog dan komunikasi rutin-terbuka. Program relokasi PKL itu berawal ketika Joko Widodo, baru dilantik menjadi Walikota Solo, hal itu dilakukan dengan cara membentuk tim kecil untuk mensurvei keinginan warga Kota Solo dan dari hasil survei itu ditemukan bahwa kebanyakan orang Solo ingin pedagang kaki lima yang memenuhi jalan dan taman di pusat kota dipindahkan. Oleh sebab itu, melalui pendekatan yang baik dan humanis, Joko Widodo kemudian berhasil menata ulang pasar di antaranya Pasar Klitikan Notoharjo, Pasar Nusukan, Pasar Kembalang, Pasar Sidodadi, Pasar Gading, pusat jajanan malam Langen Bogan, serta pasar malam Ngarsapura. Pemindahan PKL itu pada dasarnya merupakan salah satu wujud dari penerapan konsep *hifdz al-mujtama'* dimana peradaban pedagang sebagai pemilik kepentingan publik untuk berdagang kemudian diubah dari cara berdagang yang tidak teratur dan semraut, menjadi tertata dan teratur serta aman-nyaman dalam menjalankan usaha bisnisnya, sehingga masyarakat sebagai pemilik kepentingan publik juga dapat menikmati keindahan tata kota yang dicapai oleh pemerintahan kota pada waktu itu.³⁴⁷

Sementara itu, untuk memelihara masyarakat/peradaban manusia (*hifdz al-mujtama'*), kita juga harus selalu waspada dan mengajak umat Islam pada khususnya dan seluruh elemen masyarakat dan bangsa pada umumnya untuk bersama-sama melindungi umat dari paham dan gerakan radikalisme dan terorisme. Kita juga berkewajiban untuk memberikan pendidikan dan pelatihan pada saudara-saudara kita, umat beragama, yang memilih jalan yang salah dalam berdakwah agar kembali kepada ajaran dasar agama yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan.³⁴⁸ Di samping itu, kita juga harus menegakkan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak asasi manusia ataupun pelanggaran hak kebendaan dalam segala bentuknya. Pemenuhan kepentingan publik (*al-mashlahah al-*

³⁴⁷ Ini Kisah Sukses Jokowi di Solo, <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/06/10/ini-kisah-sukses-jokowi-di-solo>, diakses 4 Juni 2016

³⁴⁸ Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw* 1437 H Istana Negara, Jakarta 23 Desember 2015, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=10678&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

'*ammah*) juga diakui oleh KH Hasyim Asy'arie sebagai salah satu pilar kehidupan yang sangat penting yang harus dipenuhi sebagaimana Nabi Muhammad saw juga mendakwakan agama Islam untuk menempu jalan yang benar dalam meraih kesuksesan hidup dunia dan akhirat (*tharīq al-najah li man arāda al-sa'adah fī al-dunya wa al-akhirah*).³⁴⁹

Di samping *mashlahah* tersebut di atas, hukum Islam juga mengenal *mashlahah 'ammah* yang menjadi kepentingan bersama masyarakat atau kepentingan umum (*algemeen belang*). Ini menyangkut hak publik dan berkaitan dengan *fardhu kifāyah*. Imam Rafi'i menjelaskan, *fardhu kifāyah* itu adalah urusan umum yang menyangkut kepentingan-kepentingan (*mashālih*) tegaknya urusan agama dan dunia dalam kehidupan kita, di antaranya adalah mencegah kemelaratan orang banyak (kaum Muslim), menciptakan lapangan kerja untuk mewujudkan mata pencaharian bagi anggota-anggota masyarakat, menegakkan kontrol sosial melalui *amar ma'rūf nahi mungkar*, mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui pendidikan, bimbingan keagamaan (fatwa) dan penyebaran buku-buku.³⁵⁰

Beberapa program Presiden Joko Widodo dalam menjalankan pemerintahannya di antaranya adalah reformasi ekonomi Indonesia yang bertumpu pada dua prinsip dasar, yakni keterbukaan dan kompetisi. Joko Widodo memberikan contoh, bagaimana kompetisi bisa mengubah wajah bisnis di Indonesia, maskapai penerbangan dahulu hanya ada 3, dimana 2 di antaranya milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), harga tiket mahal dengan layanan buruk, tetapi dengan adanya perubahan regulasi industri penerbangan, maka harga tiket turun drastis, layanan membaik dan pilihan rute juga menjadi lebih banyak, bahkan Garuda yang sudah hampir bangkrut, mampu melakukan reformasi internal untuk meningkatkan layanan dan efisiensi, sehingga Garuda saat ini masuk kategori satu dari tujuh maskapai di dunia bintang lima yang diakui oleh Skytrax. Demikian juga tekanan kompetisi bagi Pertamina yang kemudian menjadi lebih baik pelayanannya ketika ada kompetitor. Kedua kondisi ini merupakan contoh bahwa bangsa Indonesia pada dasarnya bisa bersaing dan memiliki

³⁴⁹ KH Hasyim Asy'arie, "Irsyād al-Mu'min ila sairah Sayyid al-Mursalīn wa Man Tabi'ahu min al-Shahabah wa al-Tabi'in", *Irsyād al-Sārī ...*, hlm. 5.

³⁵⁰ KH Ali Yafie, "Konsep-Konsep Istihsan, Istishlah Dan Mashlahat Al-Ammah", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam ...*, hlm. 367.

kemampuan. Indonesia juga mampu mempertahankan pertumbuhan di angka 5% per-tahun. Pertumbuhan tersebut bisa dicapai karena adanya reformasi kebijakan di awal masa pemerintahan ini.³⁵¹

Pada tahun ketiga, fokus pemerintahan Joko Widodo-M Jusuf Kalla berusaha melakukan pemerataan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga targetnya seluruh rakyat bisa merasakan manfaat dari pembangunan. Adapun fokus pemerataan yang dikerjakan, yakni pembangunan ekonomi dan peningkatan produktifitas, pengentasan kemiskinan dan kebijakan afirmatif, menekan ketimpangan antar wilayah, dan stabilitas politik dan keamanan, keadilan hukum, dan pemajuan kebudayaan.³⁵² Fokus pemerataan pembangunan tersebut merupakan bagian dari perspektif *maqāṣid al-Syari'ah* yang dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan termasuk bidang ekonomi dan keuangan (*economics and finance*), bahkan Islamic Banking (IB) can use *maqāṣid al-syari'ah in promoting the welfare of the ummah*.³⁵³ Lebih lanjut program pembangunan sektor usaha yang berdampak pada pemenuhan kepentingan publik yang sedang dilakukan di antaranya:

Pertama, revitalisasi tatanan ekonomi desa. Presiden Joko Widodo melakukan berbagai skema untuk membenahi dan memajukan ekonomi desa. Salah satu poin penting di sini adalah revitalisasi pasar tradisional dengan melakukan pendampingan manajemen pasar agar bisa bersaing dengan pasar modern. Sasaran pendampingan antara lain adalah pemerintahan desa dengan mendorong pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Eksistensi BUMDes akan sangat mendukung perbaikan tatanan ekonomi di pedesaan karena hal itu menjadi salah satu pilar kesejahteraan bangsa berdasarkan komitmen bersama masyarakat desa untuk saling kerjasama.

³⁵¹ Tim PresdenRI.go.id-Kantor Staf Kepresidenan RI, *2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK...*, hlm. 204-205.

³⁵² Laporan 3 Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla..., hlm. 7.

³⁵³ Luqman Zakariyah, "Harmonising legality with morality in Islamic banking and finance: A quest for Maqāṣid al-Shari'ah paradigm", *Intellectual Discourse*, Vol. 23, 2015, hlm. 368.

Pengelolaan potensi ekonomi desa harus dikelola dengan baik dan dapat dikembangkan melalui keberadaan BUMDes.³⁵⁴

Pembangunan dari desa adalah salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Pemerintah terus berusaha untuk memastikan bahwa desa sebagai entitas terkecil mampu menjadi penopang utama pelayanan warga dan sekaligus mampu menggerakkan roda perekonomian bangsa. Di samping itu, pendekatan adat atau budaya (*urf*) juga dilakukan untuk memperkuat sistem sosial di dalam kehidupan masyarakat lokal. Demikian juga untuk membebaskan masyarakat dari budaya riba, diberikan dan diperluas program kredit untuk rakyat. Oleh sebab itu, alokasi anggaran untuk dana desa terus meningkat, tahun 2015, Rp 20,76 triliun, tahun 2016, Rp. 46,98 triliun, dan tahun 2017, Rp. 60,00 triliun, sedangkan alokasi anggaran yang ditransfer ke daerah juga terus meningkat mulai dari tahun 2014 Rp. 592,55 triliun, tahun 2015 Rp 664,05 triliun, tahun 2016 Rp. 729,27 triliun, dan tahun 2017 Rp. 704,92.³⁵⁵

Kedua, wadah pemasaran hasil usaha. Kita harus mampu memberikan wadah pemasaran pada para pelaku usaha agar bisa mengenalkan dan memasarkan hasil-hasil usaha dan kreatifitasnya pada para pembeli baik level nasional maupun internasional.

Sepekan bekerja, saatnya sedikit bersantai: datang ke pameran Indonesia International Furniture Expo 2017 di Kemayoran, Jakarta.... Setelah membuka pameran, saya berkeliling arena. Lihat mebel ini! Meja menyatu dengan bangku yang unik. Bahannya dari rotan dan sedikit kayu, modelnya kompak dan modern, hasil desain dan kerja terampil pengrajin kita. Aneka produk lain dari berbagai bahan yang sepenuhnya dari Indonesia di pameran ini juga menarik. Desain-desain produk mebel dan furnitur rotan, kayu, bambu, besi, logam, semuanya sudah berubah. Perbaikan produksi, produktivitas, dan ekspor, inilah yang akan terus kita dorong. Perubahan global cepat sekali. Kalau enggak bisa mengikuti, ya ditinggal.³⁵⁶

³⁵⁴ Tim PresdenRI.go.id-Kantor Staf Kepresidenan RI, *2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK...*, hlm. 378-379.

³⁵⁵ Laporan 3 Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla..., hlm. 52.

³⁵⁶ <https://www.facebook.com/Jokowi/?fref=ts>, diakses 18 Maret 2017

Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang terus mendorong perbaikan produksi, produktivitas, dan ekspor merupakan kebijakan yang inovatif dan progresif untuk mengejar perubahan global yang begitu cepat.³⁵⁷ David J Schwartz dalam karyanya yang berjudul *Berpikir dan Menjadi Sukses* menyatakan bahwa “kita hidup dalam zaman ketika pekerjaan menjadi semakin terspesialisasi dan semakin rumit. Jumlah spesialisasi pekerjaan meningkat dua kali lipat selama 15 tahun terakhir dan mungkin berlipat tiga dalam 15 tahun berikutnya”. Dengan demikian, walaupun ilmuwan sarjana telah banyak lahir dari perguruan tinggi, tetapi faktanya, tingkat produktivitas masih rendah. Hal itu terjadi karena tiadanya orang yang terlatih, ahli dan mampu bekerja dengan totalitas. Oleh sebab itu, gaya kepemimpinan orang yang berpikir positif sebagaimana dipraktikkan Joko Widodo dibutuhkan untuk mendorong kemajuan dalam berbagai seginya di Indonesia, yakni “orang yang positif akan terus membuat kemajuan; orang yang negatif paling-paling hanya akan mempertahankan kemampuannya”.³⁵⁸

Dalam berbagai kesempatan, Joko Widodo berusaha memberikan perhatian khusus atas berbagai usaha dan karya masyarakat dengan meninjau berbagai hasil karya masyarakat dan kondisi pasar di masyarakat, sehingga dengan adanya perhatian itu, dapat mengilhami dan mendorong para pejabat di bawahnya untuk terus bekerja dengan lebih baik dan membumi sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Menurut teori David J Schwartz, “unjuk kerja yang luar biasa harus dihargai karena hal itu mendorong setiap orang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Setiap orang memerlukan tepukan punggung”. Dengan kata lain, setiap prestasi kerja seseorang memerlukan penghargaan dan dorongan untuk terus melanjutkan, sehingga prestasi itu tidak berhenti, tetapi terus berlanjut dengan bekerja lebih baik.³⁵⁹ Perhatian itu adalah untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa.

³⁵⁷ <https://www.facebook.com/Jokowi/?fref=ts>, diakses 18 Maret 2017.

³⁵⁸ David J Schwartz, *Berpikir dan Menjadi Sukses...*, hlm. 266-267.

³⁵⁹ David J Schwartz, *Berpikir dan Menjadi Sukses...*, hlm. 268.



(Presiden memimpin rapat terbatas mengenai lanjutan pembahasan reformasi hukum di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2017)³⁶⁰

Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK berusaha keras untuk mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial dengan senantiasa memperhatikan komitmen pemerintah dalam penegakan hukum. Hal ini dilakukan karena masih banyak kelompok masyarakat yang belum mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum yang memadai. Menurut Joko Widodo, “Saya ingin menekankan bahwa tahun 2017 ini kita berkomitmen untuk fokus mengatasi kesenjangan sosial, termasuk ketimpangan akses untuk memperoleh keadilan. Masih banyak kelompok masyarakat kita, masyarakat marjinal, yang belum memperoleh perlindungan dan bantuan hukum yang memadai untuk memperjuangkan keadilan.”³⁶¹

Presiden mengingatkan hal yang telah disampaikan berkali-kali, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara peraturan, bukan negara undang-undang. Untuk itu Presiden mengamanatkan agar segala aturan yang dikeluarkan pemerintah sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi dan kepentingan nasional. “Saya juga minta dalam pembentukan regulasi baru tidak boleh lagi dilihat

³⁶⁰ *Perlindungan Hukum Bagi Semua Warga Negara*, 17 January 2017, <http://presidenri.go.id/berita-aktual/perlindungan-hukum-bagi-semua-warga-negara.html> 14 september 2017.

³⁶¹ *Perlindungan Hukum Bagi Semua Warga Negara*, 17 January 2017, <http://presidenri.go.id/berita-aktual/perlindungan-hukum-bagi-semua-warga-negara.html> 14 september 2017.

sebagai proyek tahunan. Tetapi diperhatikan betul agar aturan itu memiliki landasan yang kuat. Baik secara konstitusional, sosiologis, maupun bersifat visioner,” imbuhnya.³⁶²

Arahan Presiden RI tersebut memberikan penegasan bahwa penyelenggaraan program Pemerintahan tidak boleh hanya berbasis pada rutinitas, tetapi harus berbasis pada kinerja yang berdampak riil sehingga bisa dicapai hasilnya. Demikian juga pembangunan hukum harus memiliki dasar yang kuat baik dari sisi filosofi, religi, sosial dan budaya.

³⁶² *Perlindungan Hukum Bagi Semua Warga Negara*, 17 January 2017, <http://presidenri.go.id/berita-aktual/perlindungan-hukum-bagi-semua-warga-negara.html> 14 september 2017.

BAB VI
MEMELIHARA EKSISTENSI LINGKUNGAN FISIK
(*Hifdz al-Muhith al-Mâddî*)

Dalam bahasan *hifdz al-muhith al-mâddî*, para ulama salaf pada dasarnya sudah berusaha untuk melakukan kontekstualisasi yang secara substansi mirip dengan bahasan ini walaupun masih belum detail. Kondisi itu membuktikan bahwa kajian keislaman tidak bisa tidak, harus melibatkan konteks, yaitu konteks budaya, sosial, lingkungan, bahkan juga perkembangan sains dan teknologi. Kajian keislaman dimanapun seharusnya selalu terjalin kuat dengan kondisi aktualnya, dipahami, tumbuh, menyebar dan berkembang.³⁶³ Dalam hal ini, M Amin Abdullah menyatakan:

Pemikiran Islam tidak dapat lepas dan keluar jauh dari konteks ruang dan waktu (*space and time; al-zamkany*) dan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan (*nadzariyyatu al-ma'rifah*) dimana ia dipahami, dikaji, tumbuh dan berkembang. Ketika pemikiran Islam tumbuh dan berkembang di wilayah Timur Tengah akan sangat berbeda corak rancang bangun epistemologi, wajah dan tampilan sosio-kulturalnya ketika ia tumbuh dan berkembang di wilayah Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara. Begitu pula ketika ia sekarang mulai bersemi dan nantinya akan tumbuh dan berkembang di wilayah Barat seperti Eropa, Amerika, Australia dan begitu seterusnya yang pada saatnya akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari *intellectual discourse* umat Islam dimanapun berada.. Belum lagi jika kita bicara bagaimana proses dan tumbuh perkembangannya di wilayah Afrika yang begitu luas sejak dari Afrika Utara, Tengah sampai Afrika Selatan.³⁶⁴

Nasr Hamid Abu Zayd mengemukakan bahwa kajian keislaman seharusnya mampu membaca dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁶⁵ Bahkan adanya berbagai dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dikaji dengan berbagai kajian baru dalam bidang keislaman termasuk kajian syariat Islam

³⁶³ M Amin Abdullah, *Sumbangan Nurholish Madjid atas Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia*, <http://nurholishmadjid.net/?page=news&action=view&id=64>, diakses tanggal 19 September 2016.

³⁶⁴ M Amin Abdullah, *Sumbangan Nurholish Madjid atas Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia*, <http://nurholishmadjid.net/?page=news&action=view&id=64>, diakses tanggal 19 September 2016.

³⁶⁵ Nur Zainatul Nadra Zainol, Latifah Abd Majid dan Muhd Najib Abdul Kadir, "Nasr Hamid Abu Zayd as a Modern Muslim Thinker", *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 5: (June) 2014, hlm. 65.

sebagaimana hubungan kajian syariat Islam dengan lingkungan fisik atau alam semesta yang juga mengatur sunnatullah.

Ciri utama agama Islam, ialah ajarannya yang cukup praktis dan realistis menghadapi kenyataan sosial dengan langkah-langkah pemecahan yang praktis pula. Maka dengan adanya perjuangan antara kebenaran dengan kebatilan, yang menandai kehidupan sosial, maka keharusan memenuhi segala persyaratan-persyaratan itu adalah suatu hal yang mutlak. Sebab-sebab keberhasilan dan kemenangan dalam suatu perjuangan dapat dipelajari dari sejarah dan harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya juga segala penyebab terjadinya suatu kegagalan atau kehancuran harus disadari dan dihindari. Hukum sejarah sejalan dengan hukum alam. Keduanya mempunyai titik temu dalam hukum sebab-akibat. Pesan dan petunjuk yang diberikan al-Qur'an pada manusia, demikian pula sunnah Rasulullah yang memberikan penjelasan praktis pada pesan al-Qur'an itu, membimbing kita supaya menyadari keterkaitan segala sesuatu dengan penyebabnya, sebagai syarat bagi terjadinya.³⁶⁶

Dalam konteks memelihara lingkungan fisik (*hifdz al-muhith al-mâddi*) tersebut adalah termasuk memelihara wilayah NKRI dari segala ancaman perpecahan. Sila Ketiga *Persatuan Indonesia* menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kebangsaan yang memiliki kehendak untuk bersatu, memiliki persatuan perangai karena persatuan nasib, dan bangsa Indonesia terikat pada tanah airnya. Persatuan itu mencakup persatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Karena itu, persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Wujud persatuan Indonesia adalah tetap dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Komitmen persatuan itu diatur oleh UUD-NRI tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) “*Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Reublik*”, dan ayat (3) “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.³⁶⁷

1. Lingkungan Hidup Sebagai Kebutuhan Dasar Manusia

Memelihara eksistensi lingkungan fisik (*hifdz al-muhith al-mâddi*) merupakan tugas dan tanggung jawab esensial dari setiap manusia karena

³⁶⁶ KH Ali Yafie, “Konsep-Konsep Hukum”, dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam ...*, hlm. 91

³⁶⁷ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar ...*, hlm. 62-65.

tanpa adanya lingkungan fisik yang baik, maka manusia akan terancam binasa dan musnah, betapa banyak bencana alam seperti banjir, gempa bumi, angin puting beliung dan lainnya yang telah membinasakan manusia. Oleh sebab itu, untuk mendukung tugas-tugas dan tanggung jawab yang dibebankan pada manusia dalam memakmurkan bumi, kita harus mampu merawat dan menjaga eksistensi lingkungan fisik agar bisa memberi rasa aman dan nyaman. Pemeliharaan lingkungan fisik bukan sesuatu yang mudah, tetapi dibutuhkan upaya serius untuk menyeimbangkan ekosistem sehingga terhindar dari kerusakan.³⁶⁸ Allah berfirman:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

70

Artinya: Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir. (Q.S. al-Jatsiyah [45]: 13)

Dalam ayat tersebut, Allah swt menegaskan bahwa setiap apa-apa yang ada di langit dan bumi dari segi wujud material yang diciptakan mengharuskan manusia untuk berusaha mengelolanya dengan baik dan benar, sehingga dengan demikian, Allah swt memberikan perintah pada segenap umat manusia untuk mengelola alam beserta isinya. Lingkungan fisik sebagai ciptaan Allah swt berfungsi memenuhi segala kebutuhan manusia, tetapi jika manusia mengelolanya dengan baik, maka akan melahirkan kemakmuran hidup. Jika mengelolanya secara tidak benar, maka akan melahirkan kerusakan di alam semesta. Oleh sebab itu, syariat Islam datang untuk mengatur hukum-hukum yang bertujuan untuk menjaga eksistensi lingkungan fisik yang menjadi tempat tinggal manusia agar bisa hidup dan dapat menunaikan amanah kepemimpinannya untuk memakmurkannya.³⁶⁹ Allah swt berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

³⁶⁸ 'Abd al-Majid al-Najjār, *Maqāshid al-Syari'ah* ..., hlm. 32; Syamsuri, "Membangun Maqasid Al-Shari'ah Melalui Al-Usul Al-Khamsah: Studi Kritis Terhadap Konsep Al-Ghazali dan Abd Al Majid Al-Najjar", *Kumpulan Makalah* ..., hlm. 83-84.

³⁶⁹ 'Abd al-Majid al-Najjār, *Maqāshid al-Syari'ah* ..., hlm. 183-184.

Artinya: dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman (Q.S. al-A'raf [7]: 85)

Ayat tersebut menjadi dalil bahwa bumi diciptakan untuk kepentingan kemakmuran hidup manusia dan sekaligus larangan untuk melakukan kerusakan. Adapun yang termasuk dari realitas lingkungan fisik yang menjadi tempat tinggal dan bekal hidup manusia terdiri dari dua unsur dasar: **Pertama, memelihara harta benda** yang meliputi beberapa hal; (a) *memelihara harta benda dengan cara bekerja dan mengembangkannya*. Awal mula adanya cara memelihara harta benda adalah dengan *kasb* (kerja) sebagai landasannya, jika tidak ada usaha kerja untuk mewujudkannya, maka tidak akan ada pemeliharannya. Agama Islam mendorong usaha kerja untuk mengelola harta benda dan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Mencari fadlil Allah adalah dengan kerja nyata untuk menghasilkan harta benda sebagaimana firman Allah swt: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S. al-Jumu’ah [62]:10); (b) *memelihara harta dari kerusakan* yang berarti bahwa memelihara harta benda dari segala bentuk kerusakan, termasuk juga tidak menggunakannya kecuali untuk kemaslahatan hidup manusia. Oleh sebab itu, Allah swt melarang berlebih-lebihan dan menggunakan harta untuk hal-hal yang tidak berguna: “dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (Q.S. al-An’am [6]: 141), “dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”, “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” (Q.S. al-Isra’ [17]:25-26), dan “makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (Q.S. al-A’raf [7]:31); (c) *memelihara harta benda dengan melindungi hak kepemilikannya* yang berarti kepemilikan bisa personal maupun kolektif, kepemilikan itu bersifat fisik maupun non-fisik. Kehendak untuk memiliki harta benda menjadi fitrah manusia. Syariat Islam mengatur tata cara memiliki harta benda, sehingga melarang umat manusia untuk mendapatkan

harta benda dengan cara batil, larangan mencuri harta benda, dan untuk menjaganya dengan membukukan harta kekayaan. Al-Qur'an menegaskan: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil...". (Q.S. al-Baqarah [2]: 188), "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan" (Q.S. al-Ma'idah [5]: 38), dan "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (Q.S. al-Baqarah [2]: 282); (d) *memelihara harta dengan menjaga nilai harganya* yang berarti bahwa harta benda memiliki nilai sebagai harta benda jika ada nilainya, sehingga jika tidak ada nilainya, hilang juga sifat kehartabendaannya. Berdasarkan pemikiran ini, tidak dianggap sebagai harta benda jika tidak ada sifat kehartabendaannya, yang menunjukkan bahwa jika dalam suatu keadaan, harta itu memiliki nilai, maka dianggap sebagai harta benda. Jika tidak, maka tidak dianggap juga. Al-Qur'an juga menjelaskan: "dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya" (Q.S. al-A'raf [7]: 85); dan (e) *memelihara harta dengan mengedarkan secara adil dan merata* yang berarti bahwa agama mengancam orang-orang yang menahan hak-hak orang lain yang semestinya dibagikan pada orang lain, sedangkan harta tersebut seharusnya dibagikan pada masyarakat dengan infaq dan sedekah. Al-Qur'an menjelaskan: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih" (Q.S. At-Taubah [9]: 34). Jika masyarakat hendak berkembang dan sejahterah, maka pemerataan harta benda harus dilakukan untuk memenuhi kepentingan publik yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, makna memelihara harta adalah adanya usaha pemerataan harta dan membagikannya di kalangan masyarakat, bukan menumpuk harta dan mencegah pembagiannya. Infaq merupakan bagian dari usaha pemeliharaan harta benda untuk kemashalatan masyarakat, sedangkan kebinasaan akan muncul dari tidak adanya infaq yang akan menyebabkan perkembangan peradaban masyarakat menjadi terhenti karena tidak adanya distribusi

biaya. Al-Qur'an memerintahkan pemerataan dan infaq: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan". (Q.S. al-Baqarah [2]: 195). Oleh sebab itu, syariat (agama) Islam melarang penumpukan harta kekayaan dan peredaran harta kekayaan hanya di kalangan segelintir orang dan sekaligus memerintahkan pemerataan di kalangan masyarakat. Al-Qur'an menjelaskan: "supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu". (Q.S. al-Hasyr [59]:7).³⁷⁰

Kedua, memelihara lingkungan fisik yang menjadi tempat tinggal dimana manusia hidup di dalamnya dan mencapai segala cita-citanya dalam mengarungi kehidupan di dunia sebagaimana hubungan kehidupan manusia dengan bumi dan apa-apa yang ada di bumi seperti hewan, tumbuhan dan mineral serta apa-apa yang meliputi ruang cuaca, di langit ada bintang, bulan dan matahari yang berhubungan dan mempengaruhi kehidupan manusia di bumi. Dengan demikian, lingkungan itu mencakup segala yang disebutkan dalam al-Qur'an yang tampak di alam semesta yang diciptakan untuk kepentingan hidup manusia. Al-Qur'an menjelaskan: "Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya" (Q.S.al-Jaatsiyah [45]:13). Lingkungan ini diciptakan Allah swt disiapkan untuk kepentingan umat manusia yang sesuai dengan kebutuhan manusia dalam mencapai cita-cita kemanusiaannya sebagai makhluk. Al-Qur'an menjelaskan: "Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi" (Q.S. Luqman [31]:20). Ketundukan alam semesta bergerak untuk kepentingan hidup manusia yang berjalan dalam hukum alam dan hubungan alamiah yang seimbang. Al-Qur'an menjelaskan: "Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya) dan telah menundukkan bagimu malam dan siang" (Q.S. Ibrahim [14]: 33), dan "Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran, Dan Kami telah

³⁷⁰ 'Abd al-Majid al-Najjār, *Maqāshid al-Syari'ah ...*, hlm. 185-204.

menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya”. (Q.S. al-Hijr [15]:19-20). Semua ajaran syariat Islam mengharuskan untuk memelihara lingkungan, bekerja sesuai hukum alam, tidak berlebih-lebihan, tidak berbuat dzalim, dan larangan merusak lingkungan atau alam semesta yang telah diatur dalam al-Qur’an dan Sunnah sebagaimana firman Allah swt: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya”, (Q.S. al-A’raf [7]: 56), “Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan”, (Q.S. al-Baqarah [2]:60), “dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”, (Q.S. al-Qashshash [28]: 77). Larangan berbuat kerusakan bukan hanya berhubungan dengan kerusakan akhlak, masyarakat dan agama, sebagaimana pelanggaran terhadap ajaran agama, tetapi juga larangan berbuat kerusakan terhadap lingkungan alam semesta. Kerusakan yang bersifat asasi di dalam lingkungan terjadi karena adanya sifat kekufuran penduduknya sehingga hukum alam tidak berjalan sebagaimana mestinya. Al-Qur’an menjelaskan: “Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa”, (Q.S. al-Anbiyaa’ [21]: 22).³⁷¹

Salah satu usaha untuk membangun pertumbuhan ekonomi nasional yang sangat dibutuhkan baik dalam skala nasional maupun regional adalah membangun infrastruktur yang diperlukan, misalnya selama dua tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Propinsi Maluku berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional karena adanya infrastruktur yang mampu mendukungnya, konektivitas yang menghubungkan antara wilayah kepulauan dalam Propinsi atau antara Propinsi lain di Indonesia sangat diperlukan. Kondisi itulah yang menjadi landasan “kenapa kita mulai membangun jalan, jembatan, pelabuhan hingga bandara”.³⁷²

³⁷¹ ‘Abd al-Majid al-Najjār, *Maqāshid al-Syari’ah* ..., hlm. 207-210.

³⁷² Berita tanggal 21 Februari 2017, <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 6 Juli 2017



(Foto Dokumentasi: Kementerian PUPR)³⁷³

Dengan meminjam pemikiran ‘Abd al-Majid al-Najjâr, kita dapat menyatakan bahwa pembangunan pemerintahan Jokowi-JK tersebut merupakan bagian dari pelestarian dan pemeliharaan terhadap lingkungan dalam beberapa bentuk, yakni: memelihara lingkungan dari kerusakan, memelihara lingkungan dari pencemaran, memelihara lingkungan dari kepunahan atau berlebih-lebihan, dan memelihara lingkungan dengan memakmurkannya.³⁷⁴ Al-Qur’an memberikan pemahaman terhadap lingkungan fisik dengan term *bi’ah* dengan beberapa derivasi maknanya. Adapun *al-bi’ah* yang memiliki konotasi lingkungan di antaranya adalah firman Allah Swt:

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبْوِتْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

67

Artinya: Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti Kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar, kalau mereka mengetahui (Q.S. An-Nahl [16]: 41)

³⁷³ Berita tanggal 21 Februari 2017, <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 6 Juli 2017 ⁶

³⁷⁴ ‘Abd al-Majid al-Najjâr, *Maqâshid al-Syari’ah* ..., hlm. 211-230.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang hijrah karena Allah swt dari kondisi jahiliyah/lingkungan dhalim, maka Allah swt akan menggantinya dengan lingkungan yang baik di dunia (لَنبَوِّنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً) dan juga akan memperoleh masa depan yang lebih baik lagi (وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ). Komitmen membangun lingkungan yang baik adalah keharusan syar'i karena hal itu memberikan wadah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, sedangkan kemaslahatan hidup manusia merupakan esensi dari syariat Islam/agama Islam. Oleh sebab itu, agama Islam memasukan kategori *fardlu kifayah* dalam menjaga dan melestarikan lingkungan fisik dimana manusia hidup dan berkarya.³⁷⁵

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا يُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرٍ الْعَامِلِينَ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, sesungguhnya akan Kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam syurga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal (Q.S. al-Ankabut [29]: 58).

Ayat ini memberikan gambaran bahwa umat manusia harus beriman dan beramal shaleh agar memperoleh suasana atau lingkungan yang baik dan berkah. Jika kita menafsirkan secara kontekstual, maka ayat tersebut pada dasarnya menekankan perlunya menjaga keimaman dan melakukan amal shaleh untuk memperoleh jaminan ditempatkan dalam lingkungan yang baik di masa depan. Dengan demikian, penggunaan kata *al-bi'ah* sebagai term yang paralel dengan ekologi modern memiliki relevansi yang tepat, yakni lingkungan merupakan segala sesuatu di luar organisme, sedangkan segala sesuatu di luar organisme adalah identik dengan ruang kehidupan. Oleh sebab itu, al-Qur'an pada dasarnya memberikan pelajaran kepada kita semua, bahwa ruang kehidupan manusia memiliki peranan penting untuk kehidupan dan keberlangsungan hidup manusia yang nyaman dan damai, sehingga dengan demikian, agama Islam menetapkan kewajiban untuk memelihara realitas lingkungan baik di lingkungan planet bumi ataupun luar angkasa. Konsepsi lingkungan fisik yang tidak hanya di alam

³⁷⁵ Lihat, Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan...*, hlm. 49-50

planet bumi, tetapi juga di luar angkasa yang ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah:³⁷⁶

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُتَدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan ruang atmosfir sebagai pelindung bagimu, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui (Q.S. al-Baqarah [2]: 22).³⁷⁷

Perlindungan lingkungan fisik di planet bumi merupakan keniscayaan untuk menjamin nyaman hidup manusia, sedangkan lingkungan fisik di bumi ini ternyata tidak akan bisa bertahan hidup tanpa adanya perlindungan lapisan atmosfir yang menjadi lapisan pelindung bagi seluruh spesies baik biotik maupun abiotik yang berada di lapisan bumi. Oleh sebab itu, kata kunci dari ayat tersebut adalah *“ruang atmosfir sebagai pelindung bagimu”*. Perubahan dan kerusakan lapisan atmosfir akan dapat berdampak juga pada kerusakan seluruh spesies yang ada di muka bumi.³⁷⁸

Dalam hubungan dengan pemeliharaan eksistensi lingkungan fisik, kita harus mampu mewariskan pada generasi bangsa berupa ilmu pengetahuan dan kelestarian alam. Ilmu pengetahuan diperlukan untuk mengelola alam semesta, sehingga bisa mendukung dan memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia. Adapun lingkungan fisik menjadi wadah bagi kenyamanan dan keberlangsungan hidup manusia dalam berkarya. Lingkungan fisik termasuk yang hidup di dalam lingkungan fisik harus dipelihara dan dilestarikan demi kenyamanan dan keberlangsungan hidup manusia. Dalam kaitan ini, kita harus mampu merealisasikannya, *“apalagi Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Kita dipandang sebagai negara yang megabiodiversity. Kita juga dikenal sebagai negara paru-paru*

³⁷⁶ Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan...*, hlm. 49-50.

³⁷⁷ Secara keseluruhan, Terjemahan al-Qur'an ini merujuk pada Terjemahan Digital Departemen Agama RI, tetapi pada bagian ini juga mengacu pada terjemahan Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan...*, hlm. 50.

³⁷⁸ Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan...*, hlm. 50.

dunia. Harapan dunia dan masa depan alam tergantung pada kelestarian alam Indonesia".³⁷⁹

Signifikansi pemeliharaan lingkungan fisik terasa menjadi amat penting karena adanya dampak negatif dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian hal itu juga mempengaruhi segala perilaku umat manusia. Manusia seringkali mengalami kegalauan dengan adanya kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berdampak pada lingkungan fisik yang menjadi tempat tinggalnya. Dalam konteks ini, M Amin Abdullah menyebutkan bahwa peran agama Islam sangat dibutuhkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dan gagasan yang solutif terhadap dinamika lingkungan fisik akibat dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁸⁰

Demi kemajuan iptek, orang kadang lupa akan perlunya melestarikan lingkungan hidup. Tanpa harus menunggu keganasan kemajuan iptek, al-Qur'an juga telah memberi petunjuk bagaimana umat manusia berlaku santun terhadap alam semesta. Ayat al-Qur'an yang menyatakan: *dlahara al-fasadu fi al-barri wa al-bahri bima kasabat aydi al-nas li yudziqahum ba'da al-ladzi 'amilu La'allahum yarji'un* (Q.S. al-Rum, 41). Ayat ini akan selalu memberi inspirasi kepada manusia, tetapi belum dalam bentuk operasionalnya. Bentuk operasionalnya tetap diperlukan ilmu pengetahuan tersendiri.³⁸¹

Tafsir M Amin Abdullah terhadap ayat al-Qur'an tersebut memberikan pemahaman bahwa kebijakan pembangunan pemerintahan Jokowi-JK tersebut yang memperhatikan serius terhadap pemeliharaan lingkungan hidup menjadi bagian dari implementasi ajaran syari'at Islam yang juga menekankan perlunya memelihara lingkungan hidup yang mana salah satunya dengan menjaga keanekaragaman hayati dan kelestarian hutan. Walaupun ilmu pengetahuan dan teknologinya maju berkembang, kita tetap harus memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk

379 Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pencanangan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar Kepulauan Seribu*, Jakarta, 14 April 2016, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11385&Itemid=26 4 juni 2016³³

380 M Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 223.

381 M Amin Abdullah, *Studi Agama...*, hlm. 224.

menjamin kemaslahatan hidup manusia dan segala makhluk hidup yang ada di muka bumi sebagai substansi ajaran (hukum) Islam.³⁸²

2. Pembangunan Alam Semesta sebagai Keniscayaan *Syar'i*

Dalam pandangan Islam, lingkungan fisik dalam hal ini sumber daya alam merupakan milik Allah SWT yang diamanatkan pengelolaan, pemanfaatan dan pelestariannya pada manusia. Dalam pandangan kenegaraan Indonesia, semua kekayaan alam fisik seperti air, api, padang rumput, hutan, dan barang tambang harus dikelola oleh negara yang hasilnya harus dikembalikan sebesar-besarnya pada rakyat dalam bentuk pelayanan publik seperti layanan pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, sadang, pangan dan papan. Etika pengelolaan sumber daya alam diatur dalam agama Islam dengan baik, tidak boleh melakukan pengrusakan. Dasar pengelolaan sumber daya alam dalam ayat al-Qur'an dinyatakan yang artinya: *"Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan"* (Q.S. Luqman [31]: 20). Karena itu, Ibnu Khaldun berpandangan bahwa manusia harus mampu memanfaatkan kekayaan alam semesta untuk membangun kemaslahatan manusia dengan tetap menjaga kelestariannya. Demikian juga Abu Yusuf memberikan keterangan bahwa Kepala Negara tidak boleh membiarkan tanah tak bertuan tanpa pengelolaan dan Kepala Negara dapat menyerahkan hak pengelolaan tanah itu pada warga masyarakat.³⁸³ Ini menandakan bahwa pengelolaan alam semesta atau sumber daya alam dalam hal ini lingkungan fisik perlu dilakukan dengan baik dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

³⁸² Abdullahi Ahmed An-Na'im, "The Compatibility Dialectic: Mediating the Legitimate Coexistence of Islamic Law and State Law", *The Modern Law Review*, Volume 73 No 1 January 2010.

³⁸³ KH Ma'ruf Amin dkk (Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ...*, hlm. 853-855.

Menjaga kelestarian alam bukanlah sebatas tanam-menanam pohon, tetapi juga menjaga kelestarian alam harus dilihat keseluruhan ekosistemnya. Menurut Joko Widodo, kita harus mampu memperhatikan dan memelihara seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang terikat dalam lingkaran kehidupan, misalnya dengan cara mencanangkan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar, juga menjadi jawaban Indonesia atas permintaan dunia untuk menjaga paru-paru dunia.³⁸⁴

Saat ini, tercatat 93 jenis burung yang merupakan bagian dari 236 jenis satwa yang dilindungi di Indonesia. Dan pencanangan gerakan hari ini kita tandai dengan pelepasan 200 ekor penyu sisik, 4 ekor penyu sisik dewasa, 4 ekor elang bondol, 200 ekor burung tekukur, serujuk, dan kutilang. Semua burung yang akan dilepaskan telah melalui prosedur pelestarian, termasuk cek kesehatan oleh tim dokter hewan. Ini sering ditanyakan kepada saya karena saya kan sering melepas-lepas burung di Bogor, di Kebon Raya. “Itu sudah melalui karantina belum? Itu sudah dicek oleh dokter hewan atau belum?” Saya sampaikan, “Sudah.” Meskipun belinya sekarang, melepasnya besok, tapi yang saya lepas bukan yang dibeli sekarang gitu lo, melainkan yang sudah dibeli sebulan atau dua bulan yang lalu, Saya belajar itu tiga semester, kalau enggak keliru, masalah burung-memburung. Jadi jangan lagi ada yang sangsi gitu lo. Kalau masih ada yang sangsi, bagaimana sih? Karena kesenangan saja. Hari ini juga akan dilakukan penanaman atau transplantasi karang dan lamun sebanyak 1.000 spesimen oleh masyarakat, dan restorasi hutan bakau (*mangrove*) dengan penanaman 5.000 bibit *mangrove*...Kunci keberhasilan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar ada di komitmen, ada di komitmen, dan ada di kerja keras kita, dan ada di keberlanjutan dari gerakan itu. Percuma kita mencanangkan, kita luncurkan, tapi seperti kembang api: melihat sebentar, lalu hilang dan padam. Jangan seperti itu.³⁸⁵

Program tersebut harus dilaksanakan dengan riil, sehingga kita tidak perlu lagi ada gerakan yang seremonial, gerakan nasional model kembang api: meriah, setelah itu hilang. Gerakan nasional harus jadi solusi

³⁸⁴ Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pencanangan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar Kepulauan Seribu*, Jakarta, 14 April 2016, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11385&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

³⁸⁵ Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pencanangan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar Kepulauan Seribu*, Jakarta, 14 April 2016, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11385&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

berkelanjutan, ²⁷ terukur hasilnya, dan tidak boleh hanya melaporkan, apalagi hanya melaporkan *output* kegiatan. Oleh sebab itu, program pelestarian lingkungan yang menjadi titik tekan Presiden Joko Widodo bukanlah pada seberapa banyak sudah dilaksanakan misalnya 1000 seminar atau 200 sosialisasi yang dihadiri oleh sekian ribu orang, tetapi yang hendak dilihat Presiden Joko Widodo adalah bagaimana *impact*-nya, ²⁷ dampaknya dari Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar: berapa jenis tumbuhan yang bertambah, berapa satwa liar yang diselamatkan, berapa kadar polusi yang berkurang. Konkret, nyata, jelas. Salah satu usaha melestarikan lingkungan fisik dari lingkungan hidup kita adalah misalnya adanya moratorium lahan gambut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan kita sekarang menyiapkan lagi moratorium kelapa sawit dan wilayah pertambangan, sehingga “konkret, nyata, jelas, dan tertulis regulasinya. Hasil-hasil yang benar, hasil-hasil yang ada manfaatnya itu yang saya ingin lihat, yang rakyat ingin lihat”.³⁸⁶

Dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan, Presiden Joko Widodo juga memperhatikan keseimbangan dalam masalah harmonisasi peraturan perizinan agar mampu meningkatkan iklim usaha, dan iklim kemudahan berinvestasi. Menurutnya, tahun 2016, kita masih pada peringkat 109 dari 189 negara yang disurvei dalam rangka kemudahan berusaha, *ease of doing business*. Oleh sebab itu, kita harus mampu menyediakan regulasi yang harmonis secara totalitas untuk memberikan kemudahan dan suasana yang kondusif bagi perkembangan bisnis dan investasi. “*Harmonisasi perizinan bukan berarti meniadakan fungsi pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi memastikan bahwa fungsi itu dijalankan lebih baik, lebih efisien, lebih efektif sehingga tidak terjadi kendala dalam berusaha dan berinvestasi*”.³⁸⁷

³⁸⁶ Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Penganangan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar Kepulauan Seribu*, Jakarta, 14 April 2016, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11385&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

³⁸⁷ Joko Widodo, *Pengantar Presiden Republik Indonesia Rapat Terbatas Tentang Harmonisasi Peraturan Perizinan Terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan, dan Izin Gangguan*, Kantor Presiden, Jakarta 15 Maret 2016, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11235&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016

Untuk itu, saya kira perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah pembenahan menyeluruh dari seluruh aspek perizinan, baik yang berkaitan dengan pendirian bangunan, izin lingkungan, izin gangguan, dan mungkin juga—seperti yang saya sampaikan dulu—masalah SIUP dan TDP bisakah itu digabung jadi satu kertas. Dan semangat harmonisasi ini kita ingin agar semuanya menjadi mudah, semuanya menjadi jelas, dan semuanya terintegrasi dengan baik. Dan saya minta diharmonisasi antara izin lingkungan dengan izin HO (izin gangguan) yang dikeluarkan oleh pemerintah-pemerintah daerah. Saya juga minta agar dilakukan harmonisasi peraturan perizinan, terutama izin lingkungan di kawasan industri. Ini juga penting sekali.³⁸⁸

Dalam ajaran syariat Islam, problem lingkungan fisik atau lingkungan kerja dari manusia harus menjamin adanya kenyamanan dan keamanan karena walaupun kegiatan investasi dan bisnis bisa berjalan cepat dan dinamis jika tidak diimbangi dengan pertimbangan kenyamanan dan kelestarian lingkungan yang baik akan berdampak mafsadat, cepat atau lambat, bagi keberlangsungan hidup makhluk baik manusia maupun makhluk hidup lainnya.

Dalam rangka membangun lingkungan fisik, Joko Widodo memiliki komitmen yang tegas dan kebijakan yang konkrit dengan melakukan langkah-langkah nyata di lapangan, baik dalam bentuk pengaturan tata ruang maupun membenahi tata kelola pemanfaatan Sumber Daya Alam, terutama yang berdampak negatif pada kualitas lingkungan hidup, baik sektor pertambangan, sektor kehutanan maupun sektor kelautan. Kondisi ini banyak diperhatikan di lapangan, langkah yang tegas dalam pengawasan, dan penegakkan hukum terhadap tindak kejahatan pada lingkungan hidup, serta pemantauan kualitas lingkungan dan pengendalian pencemaran air, udara, lahan atau lainnya.³⁸⁹

³⁸⁸ Joko Widodo, *Pengantar Presiden Republik Indonesia Rapat Terbatas Tentang Harmonisasi Peraturan Perizinan Terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan, dan Izin Gangguan*, Kantor Presiden, Jakarta 15 Maret 2016, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11235&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016

³⁸⁹ Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Halaman Belakang Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Tanggal 5 Juni 2015*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9387&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

Peningkatan kesadaran masyarakat juga perlu untuk berperilaku ramah lingkungan. Saya kira tadi, yang telah dimulai oleh sekolah-sekolah baik di SD, ...di SMA-SMK saya kira sangat penting sekali untuk memberikan pendidikan, mendidik anak-anak kita untuk berperilaku ramah lingkungan. Juga tetap melanjutkan upaya-upaya penanganan perubahan iklim yang memerlukan aksi yang berskala global, ini penting sekali. Dan, semua langkah itu memerlukan inisiatif, memerlukan kolaborasi, memerlukan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan organisasi-organisasi masyarakat. Sinergi di antara kita merupakan kunci dan sekaligus modal sosial yang sangat penting dalam mewujudkan mimpi pembangunan yang berkelanjutan. Mari bersama-sama menjaga bumi agar tetap menjadi tempat yang nyaman untuk dihuni oleh kita semua. Bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan kita semuanya, namun tidak cukup untuk memenuhi keinginan segelintir manusia yang serakah.³⁹⁰

Dalam mewujudkan *hifdz al-muhith al-mâddi*, kita harus bersama-sama melestarikan dengan memelihara dan menanam kembali tanaman untuk mencegah banjir dan tanah longsor, memelihara hewan-hewan, memelihara kebersihan air tawar maupun air laut dari pencemaran, dan menjaga hutan dari penebangan liar dan perusakan lingkungan beserta pohon-pohon di sekitar pantai. Memelihara eksistensi lingkungan hidup tersebut sangat menentukan bagi keselamatan hidup manusia dari bencana banjir, tanah longsor, pemanasan global dan polusi udara. Oleh sebab itu, kita tidak hanya wajib melaksanakan ritual ibadah mahdla seperti shalat, puasa, zakat dan haji, tetapi juga berkewajiban melaksanakan ibadah sosial yang memiliki cakupan luas seperti memelihara lingkungan hidup dari polusi dan pencemaran. Kewajiban ini masuk kategori kewajiban kolektif (*fard al-kifâyah*) dalam mewujudkan *hifdz al-muhith al-mâddi*.

Apa yang menjadi kata kunci dari kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut adalah bagaimana kegiatan ini dilakukan dengan perencanaan yang baik, proses yang baik, dan hasil yang baik, dengan senantiasa dipantau atau dievaluasi terus menerus untuk mencapai kesempurnaan hasilnya. Hal ini

³⁹⁰ Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia* di Halaman Belakang Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Tanggal 2 5 Juni 2015, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9387&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

kita dapat mencermati dan mengambil pelajaran dari sejarah hidup Joko Widodo yang hingga saat ini memiliki titik tekan dan perhatian pada bagaimana setiap proses kegiatan berjalan dengan baik yang diimbangi dengan adanya hasil nyata dan jelas, yakni tidak lepas dari peristiwa ketika Joko Widodo masih hidup terbatas di Surakarta, tetapi tidak membatasi semangat hidup untuk maju.³⁹¹

Adapun program-program Presiden Joko Widodo saat ini yang berhubungan dengan menjaga eksistensi lingkungan fisik, yang juga berhubungan langsung dengan usaha mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di antaranya adalah program pembangunan infrastruktur. “Pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini adalah yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Sampai tahun 2019, ditargetkan penambahan daya 35 Gigawatt listrik, 163 pelabuhan, 621 mil jalan tol baru, 2.024 mil kereta api, sistem irigasi untuk 1 juta hektar lahan pertanian dan 49 bendungan.”³⁹²

Pembangunan infrastruktur yang mendukung kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup umat manusia sudah menjadi ajaran Nabi Muhammad saw. Dalam konteks ini, kita dapat menggunakan *qiyas aulawi* dimana, orang-orang yang menyingkirkan gangguan di jalan saja akan mendapatkan pahala surga, apalagi membangun jalan tol atau fasilitas umum yang memberikan kemudahan transportasi bagi umat, tentu lebih besar lagi pahalanya di surga. Hadis Nabi Muhammad saw menggambarkan hal tersebut berikut:

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah saw bersabda: “Ada seseorang menjumpai cabang pohon yang merintang jalan, lalu ia berkata: ‘Demi Allah, akan aku singkirkan cabang pohon ini agar

³⁹¹ Sewaktu di Surakarta, dalam bisnis meubel, Joko Widodo membuat perangkat kursi tamu, kursi dan meja makan, serta lemari-lemari sederhana. Ia full bekerja di bagian produksi sebagaimana karyawan yang ia angkat. Ia juga yang memasarkan dengan memacu sepeda motor ke penjuru Solo, ia datangi rumah-rumah yang sedang dibangun, dengan menanyakan kepada penghuninya, apakah mereka memerlukan meubel. Sekali dua kali ditolak, tetapi akhirnya mulai berdatangan *order* dari para pembeli di sekitar Solo pada awalnya. Alberthiene Endah, *Jokowi...*, hlm. 52-54.

³⁹² Tim PresidenRI.go.id-Kantor Staf Kepresidenan RI, *2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK...*, hlm. 205.

tidak mengganggu kaum Muslimin yang lewat”. Allah memasukkan orang itu ke surga karena perbuatannya (HR Muslim).³⁹³

Diriwayatkan oleh Abu Barzah r.a, bahwa ia berkata kepada Rasulullah Saw: “Ya Nabiyullah, ajarkanlah kepadaku apa yang bisa aku ambil manfaatnya!” Beliau menjawab: “Singkirkan gangguan itu dari jalan...”. (HR Muslim).³⁹⁴

Adapun penjabaran program pembangun pemerintahan Joko Widodo tersebut dapat digambarkan sebagaimana berikut: **Pertama, Pembangunan infrastruktur pos lintas batas negara.** Pembangunan pos lintas batas negara memiliki peran penting dalam menentukan batas-batas kekuasaan teritorial suatu negara, sehingga wilayah itu bisa dilindungi dari segala bentuk ancaman yang tentu saja keamanan wilayah sangat menentukan kondusifitas hidup bagi warga penduduknya. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo berusaha mewujudkan salah satu Nawacita atau sembilan agenda prioritas pemerintah, yakni “membangun Indonesia dari pinggiran”. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara itu sebagai tergambar dalam dokumen foto itu dilakukan untuk menjaga wilayah batas negara dan juga menjaga marwah negara Indonesia sebagai negara besar yang memiliki komitmen dengan batas-batas teritorialnya.

Dua tahun lalu, sebagai Presiden Indonesia saya sangat malu melihat kondisi Pos Lintas Batas Negara kita. PLBN yang menjadi teras negara Indonesia, tampak kumuh dan sangat tidak layak. Saat itu saya juga marah betul. Tidak ada kata renovasi, robohkan! Dan saya minta maksimal dua tahun gedung-gedung PLBN itu harus selesai, dengan kualitas minimal dua kali lebih baik dari negara tetangga. Kini, tiga PLBN di Provinsi Kalimantan Barat-PLBN Entikong, Nanga Badau dan Aruk Sajingan Besar- sudah selesai dibangun. Desember 2016 lalu PLBN Entikong sudah saya resmikan, kemarin saya ke PLBN Nanga Badau dan hari ini ke PLBN Aruk Sajingan Besar. Semuanya sudah kita bangun total. Pos lintas batas kita, sekarang sudah membanggakan dan tidak kalah dengan negara tetangga.³⁹⁵

³⁹³ Imam al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim...*, hlm. 686.

³⁹⁴ Imam al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim...*, hlm. 686.

³⁹⁵ <https://www.facebook.com/Jokowi/?fref=ts>, diakses 18 Maret 2017



Kedua, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Tengah yang mencapai 9,98 persen, hampir dua kali lipat di atas rata-rata nasional harus terus diperbaiki, sehingga pertumbuhan itu bisa menurunkan angka kemiskinan yang masih berada dalam kisaran 14,09 persen di Propinsi Sulawesi Tengah.³⁹⁶

Mengapa bisa terjadi? Di depan peserta rapat terbatas di Jakarta, pekan lalu, saya mendorong percepatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Provinsi ini punya sektor-sektor unggulan yang layak jadi bisnis inti. Di sana ada potensi pertambangan nikel, perkebunan dengan komoditas berupa kakao, kopi, kelapa dan cengkeh, kehutanan dengan produk rotan, kayu ebony dan meranti.

³⁹⁶ <https://www.facebook.com/Jokowi/?fref=ts>, diakses 18 Maret 2017

Selain itu, juga ada potensi di sektor perikanan serta wisata bahari. Saya minta ada langkah-langkah percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan pariwisata seperti revitalisasi Bandara Mutiara, Jalan Tol Palu-Parigi, pengembangan Pelabuhan Palu dan peningkatan kapasitas Pelabuhan Parigi. Perlu juga dipersiapkan sebuah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai antisipasi pertumbuhan sektor pertambangan dan industri pengolahan. Di Kawasan Ekonomi Khusus Morowali bahkan sudah beroperasi pabrik smelter dan pabrik stainless steel. Selanjutnya, kita perlu siapkan pengembangan KEK Palu.³⁹⁷



Salah satu bentuk keberhasilan program pembangunan nasional tersebut pada dasarnya tidak lepas dari arah kebijakan pemerintahan Joko

³⁹⁷ <https://www.facebook.com/Jokowi/?fref=ts> diakses 18 Maret 2017

Widodo-M Jusuf Kalla dalam membangun transformasi fundamental ekonomi dalam tiga hal: *Pertama*, kebijakan politik anggaran dari konsumtif kepada ekonomi berbasis produksi dengan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk pembangunan infrastruktur dan subsidi yang lebih tepat sasaran bagi warga masyarakat. Program pembangunan ekonomi yang produktif ditujukan untuk pembiayaan berikut:³⁹⁸

Subsidi BBM lebih dari Rp 200 triliun kemudian dialihkan untuk; (1) Belanja Pusat (Kementerian/Lembaga) sebesar Rp. 113,8 triliun; (2) Belanja Daerah Tertinggal/Desa sebesar Rp. 21 triliun; (3) Perhubungan sebesar Rp 21 triliun untuk pembangunan tol laut dan jaringan kereta api baru di luar Jawa; (4) Pertanian sebesar Rp 16,9 triliun untuk swasembada pangan; (5) Kelautan sebesar Rp 3,8 triliun untuk kapal patroli *illegal fishing*; (6) Sosial sebesar Rp 9,3 triliun untuk Kartu Keluarga Sejahterah; (7) Kesehatan sebesar Rp 2,7 triliun untuk Kartu Indonesia Sehat; (8) Pendidikan sebesar Rp 7,1 triliun untuk Kartu Indonesia Pintar yang menjangkau 19,2 juta siswa; (9) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 33,3 triliun untuk 25 waduk baru dan irigasi untuk satu juta hektar, dan untuk program lain-lain sebesar Rp. 19,8 triliun.³⁹⁹

Paradigma pembangunan nasional yang berbasis pada kebijakan ekonomi yang produktif memiliki korelasi yang erat dengan paradigma ekonomi syariah yang berbasis pada sektor riil dan berdampak langsung bagi kemaslahatan hidup warga masyarakat. Oleh sebab itu, kitab-kitab kuning yang diajarkan di sejumlah pesantren pada umumnya mengajarkan masalah ini pada bagian bab jual-beli. Dalam pembahasan bab jual-beli, yang dianggap haram adalah apabila menjual-belikan barang yang tidak ada atau tidak tampak, misalnya menjual buah-buahan yang belum ada di pohonnya. Larangan itu pada dasarnya memiliki kesamaan spirit dengan program pembangunan Joko Widodo yang berbasis pada sektor riil, yang dalam kitab kuning dikenal dengan “jual-beli barang yang ada dan jelas”, atau “jual-beli barang yang belum ada tetapi sudah dijelaskan kriteria dan waktu pemenuhan barangnya”. Dua jenis jual-beli ini adalah boleh hukumnya.

Dalam ekonomi Islam, mekanisme ekonomi adalah mekanisme melalui aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai

³⁹⁸ Eko Sulistiyo, *Jokowi & Trisakti...*, hlm. 34.

³⁹⁹ Eko Sulistiyo, *Jokowi & Trisakti...*, hlm. 36-37.

28

kegiatan pengembangan harta (*tanmiyatul mal*) dalam akad-akad muamalah dan sebab-sebab kepemilikan (*asbab at-tamalluk*) (An-Nabhani, 1990). Mekanisme ini, misalnya ketentuan syariah yang: (1) membolehkan manusia bekerja di sektor pertanian, industri, dan perdagangan; (2) memberikan kesempatan berlangsungnya pengembangan harta (*tanmiah mal*) melalui kegiatan investasi, seperti dengan *syirkah inan*, *mudharabah*, dan sebagainya; dan (3) memberikan kepada rakyat hak pemanfaatan barang-barang (SDA) milik umum (*al-milkiyah al-'ammah*) yang dikelola negara seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.⁴⁰⁰

3

Kedua, pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2015, pembangunan infrastruktur mencapai Rp 290 triliun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan yang memiliki anggaran pembangunan infrastruktur paling menonjol. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengerjakan pembangunan waduk baru sejumlah 49, membangun 1 juta jaringan irigasi baru, dan merehabilitasi 2,2 juta jaringan irigasi. Pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 KM, pembangunan jalan tol 1000 KM, dan pembaruan jalan arteri sepanjang 3.072 KM. Selain itu, pemerintahan Joko Widodo-M Jusuf Kalla juga menyelenggarakan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di perkotaan sebanyak 15,4 juta sambungan rumah (145.162 liter/detik), SPAM yang dibangun di wilayah pedesaan sebanyak 10,7 juta sambungan rumah (34.715 liter/detik). Pemerintahan Joko Widodo-M Jusuf Kalla juga membangun fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat berupa pembangunan sistem air limbah komunal di 5200 kawasan dan pembangunan fasilitas untuk air limbah dengan sistem terpusat di 200 kawasan, dan pembangunan air limbah sistem setempat dengan instalasi pengolahan lumpur tinja di 222 kabupaten/kota. Tidak hanya itu, kebutuhan pokok akan rumah juga dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo-M Jusuf Kalla dengan membangun Rusunawa sebanyak 61.575 unit, rumah khusus sebanyak 21.285 unit dan penanganan kawasan kumuh di 37.407 hektar. Untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang memadai bagi warga masyarakat, pada tahun 2016 pemerintah menaikkan anggaran menjadi

⁴⁰⁰ *Paradigma Ekonomi Islam*, <http://steihamfara.ac.id/paradigma-ekonomi-islam/>, diakses 29 November 2017.

sebesar Rp. 317,1 triliun, dan pada tahun 2017, pemerintahan Joko Widodo-M Jusuf Kalla terus menaikannya menjadi 346,6 triliun untuk pembangunan infrastruktur.⁴⁰¹

Sementara melalui Kemenhub, telah dibangun dan dikembangkan Terminal Penumpang Tipe A sebanyak 16 Terminal dan Pelabuhan Penyeberangan di 44 Pelabuhan. Pembangunan BRT dan pengadaan Bus sebanyak 10.050 bus, pembangunan kapal penyeberangan sebanyak 12 unit. Pengembangan pelabuhan non-komersial sebanyak 150 pelabuhan, pengerukan alur pelayaran/kolam pelabuhan di 13 lokasi, pengadaan kapal perintis sebanyak 100 kapal, penyelesaian dan pembangunan kapal patroli sebanyak 77 kapal, penyelesaian dan pembangunan kapal negara kenavigasian sebanyak 10 kapal, penyelenggaraan rute angkutan laut tetap dan teratur (tol laut) sebanyak 3 rute, dan pelayanan lintas angkutan laut perintis sebanyak 36 lintas. Juga dibangun 17 bandara baru dan 132 bandara di daerah rawan bencana, terisolir dan daerah perbatasan, serta telah dan sedang dibangun/dikembangkan terminal penumpang di 27 bandara. Pembangunan jalur kereta api di pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi serta persiapan jalur KA di Kalimantan dan Papua dengan panjang total 186,99 kilometer. Ditambah dengan penyelenggaraan Lintasan Kereta Api Perintis sebanyak 4 lintasan.⁴⁰²

³ *Ketiga*, memperkenalkan pembangunan berwawasan “Indonesia-Sentris” untuk mendorong pembangunan yang lebih merata di luar pulau Jawa. Pendekatan pembangunan ini dijalankan untuk mengatasi adanya kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Dengan pendekatan Indonesia-Sentris, Presiden Joko Widodo memulai revolusi dengan membenahi warisan praktik Pembangunan Orde Baru yang selama ini hanya menempatkan “daerah” sekadar bingkai kekuasaan sentralistik. Program pembangunan pemerintahan ini hendak memulai pembangunan mulai dari pinggiran, pulau terluar, daerah perbatasan, dan kawasan Timur terutama Papua, yang masih belum merasakan keadilan dan kesejahteraan yang sebenarnya. Untuk menjaga pulau-pulau terluar, pada bulan Maret 2017, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar. Melalui visi Indonesia-Sentris, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa persatuan Indonesia bukanlah persatuan yang masih abstrak, tetapi betul-betul harus dapat

⁴⁰¹ Eko Sulistiyo, *Jokowi & Trisakti...*, hlm. 36-37.

⁴⁰² Eko Sulistiyo, *Jokowi & Trisakti...*, hlm. 37-38.

dirasakan secara nyata oleh setiap warga masyarakat dengan melalui program pembangunan mulai dari pinggiran, daerah, perbatasan, dan pulau terluar dengan menyediakan fasilitas infrastruktur yang memadai untuk mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan daya saing, produktifitas kerja, serta pemerataan pembangunan bagi warga masyarakat.⁴⁰³

Kebijakan ini merupakan salah satu jawaban terhadap upaya menjembatani kesenjangan antar wilayah dan antara pusat dan daerah sehingga lahirlah aturan-aturan otonomi daerah. Namun demikian, tetap saja daerah merasakan ketidakadilan pemerataan pembangunan. Pulau Jawa mengalami pembangunan pesat, di sisi lain daerah Sabang dan Merauke masih saja berkutat dengan berbagai upaya pengantasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur.⁴⁰⁴

Ketiga, pembangunan Infrastruktur Pendidikan. Salah satu wujud komitmen Presiden Joko Widodo dalam membangun infrastruktur dalam menunjang dan mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan adalah anggaran pembangunan sarana-prasarana perkuliahan di perguruan tinggi yang cukup signifikan jumlahnya untuk mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. Pendidikan menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan daya saing bangsa di mata dunia, tidak hanya di Perguruan Tinggi Umum, tetapi juga di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) juga mendapatkan perhatian yang serius dari sisi anggaran pembangunan infrastruktur dalam bentuk sarana-prasarana perkuliahan.

⁴⁰³ Eko Sulistiyo, *Jokowi & Trisakti...*, hlm. 38-42.

⁴⁰⁴ Aturan pemerintahan daerah yang pertama kali adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 yang diterbitkan setelah Kemerdekaan RI, setelah itu lalu lahir Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957, dan ketika terjadi reformasi di Indonesia, aturan dipecah menjadi dua. Dua bagian besar itu, tentang pemerintahan dan perimbangan keuangan pusat-daerah, menjadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999. Pada masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Susie Berindra, "Jeritan dari Sabang dan Merauke", dalam Chris Verdiansyah (ed), *Membongkar Budaya...*, hlm. 208.



(Persiapan dan Optimalisasi Pelaksanaan SBSN oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan Moderator Kasubdit Sarpras dan Kemahasiswaan Diktis)⁴⁰⁵

Pada Tahun Anggaran 2018, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Ditjen Pendidikan Islam membangun sarana pendidikan seperti pembangunan gedung kuliah, laboratorium, dan perpustakaan di 34 PTKIN. Pada tahun 2017, Kementerian Agama Republik Indonesia telah membangun sarana dan prasarana pendidikan di 32 PTKIN yang peruntukannya seperti ruang kelas pembelajaran, perpustakaan, laboratorium, dan *student center* pada UIN, IAIN dan STAIN yang dibiayai dengan dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Demikian juga pembangunan sarana-prasarana PTKIN juga sudah dimulai sejak tahun 2015 yang dibangun di 23 unit gedung perkuliahan di 7 PTKIN. Tujuh PTKIN tersebut adalah IAIN Padang Sidempuan, IAIN Padang,

⁴⁰⁵ <https://kemenag.go.id/berita/read/506008>, diakses 29 November 2017

IAIN Raden Intan Lampung, IAIN Maulana Hasanudin Banten, IAIN Salatiga, IAIN Tulung Agung, dan IAIN Palu.⁴⁰⁶

Bappenas RI –terutama melalui Drs Amich Alhumami, M.A., Ph.D, Direktur Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Kebudayaan Bappenas RI- telah memberikan perhatian yang serius dan pengawasan yang intensif dalam pembangunan sarpras Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang bersumber dari SBSN sehingga produknya bisa membanggakan bagi warga civitas akademika PTKIN di seluruh Indonesia. Dengan adanya kemajuan PTKIN ini, maka ajaran Islam moderat yang sering disampaikan Presiden Joko Widodo dengan “Islam *rahmatil lil alamin*” akan semakin kokoh dan tegak di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu, semakin besar daya tampung dan semakin meningkat kualitas PTKIN yang ada di NKRI, maka akan semakin kokoh NKRI. Sebab, substansi semua agama adalah sama, yakni prinsip moderasi dan humanisme.

Tidak hanya sekedar menyelenggarakan pembangunan yang bersumber dari SBSN, tetapi Kementerian Agama RI juga mendapatkan penghargaan sebagai Kementerian/Lembaga pemrakarsa proyek infrastruktur yang diberikan kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani disaksikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta Jumat tanggal 24 Desember 2016.⁴⁰⁷

⁴⁰⁶ *Kemenag Akan Salurkan 1,3 Trilyun Dana SBSN di 34 PTKIN*, <http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detil&id=9148#.Wh5aAEqWY2w>, diakses 29 November 2017; *Kemenag akan Bangun 30 Unit Gedung Perkuliahan PTKIN*, <https://kemenag.go.id/berita/read/504899/kemenag-akan-bangun-30-unit-gedung-perkuliahan-ptkin>, diakses 29 November 2017.

⁴⁰⁷ *Kemenag Terima Penghargaan Sebagai Pemrakarsa Proyek SBSN*, <https://kemenag.go.id/berita/read/438706/kemenag-terima-penghargaan-sebagai-pemrakarsa-proyek-sbsn>, diakses 29 November 2017.



(Pengarahan Subdit Sarpras dan Kemahasiswaan Diktis Kemenag RI di PTKIN Luar Jawa)

Dengan adanya percepatan pembangunan sarana prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang representatif, Pemerintahan Joko Widodo-M Jusuf Kalla melalui Kementerian Agama RI dapat melakukan penambahan akses dan peningkatan daya saing dalam bidang pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dimana Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan konsisten terus melakukan monitoring dan evaluasi ke berbagai perguruan tinggi terutama di luar Jawa untuk memastikan bahwa kebutuhan riil PTKIN benar-benar bisa diakomodir dan tepat sasaran dalam pembangunan sarprasnya sehingga terwujud *outcome* yang nyata dan terukur, yakni adanya penambahan jumlah mahasiswa dengan sarpras yang representatif di PTKIN.

BAB VII

PENUTUP

1. Kesimpulan

Program pembangunan nasional yang dijalankan Presiden Joko Widodo saat ini setidaknya telah memberikan jawaban terhadap kegelisahan buku terbitan Kompas tahun 2007 yang berjudul *Membongkar Budaya: Visi Indonesia 2030 dan Tantangan Menuju Raksasa Dunia*, terutama tulisan Susie Berindra dan Simon Saragih, yang pada intinya bahwa program pembangunan nasional Presiden Joko Widodo telah menggerakkan perubahan dari sistem birokrasi yang melayani kekuasaan menjadi birokrasi yang melayani rakyat, dari kebijakan ekonomi konsumtif menjadi ekonomi produktif, dari paham keagamaan radikal menjadi paham keagamaan moderat, dan dari pembangunan yang berpusat di pulau Jawa menjadi berpusat dari luar pulau Jawa, pinggiran, desa, daerah terluar, dan daerah tertinggal.

Jika dianalisis dari sudut pandang *maqāshid al-syarī'ah*, pembangunan Indonesia yang diselenggarakan Presiden Joko Widodo pada saat ini dapat ditegaskan sangat sesuai dengan paradigma ushul fiqh al-Najjār dalam karyanya yang berjudul *Maqāshid al-Syarī'ah bi Ab'ād Jadīdah*, yang dapat kita klasifikasikan sebagai berikut: *Pertama*, Memelihara Nilai-Nilai Kehidupan Manusia (*Hifdz al-Qīmah al-Hayāh al-Insāniyyah*). Pada bagian ini, kebebasan berkehendak (*hurriyah al-irādah*) dan kebebasan berpikir (*hurriyah al-fikr*) untuk menjaga eksistensi fitrah manusia terutama dalam hal beragama (*hifdz al-dīn*) menjadi perhatian penting Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa mengakui dan menerima eksistensi keberagaman dalam beragama sebagaimana diajarkan oleh para kiai sepuh dan ulama dalam meneladani ajaran Nabi Muhammad saw merupakan keniscayaan yang harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini juga selaras dengan pemikiran Ir Soekarno yang menyatakan bahwa al-Qur'an mendatangkan revolusi batin manusia yang berarti bahwa manusia harus memiliki akidah yang benar dan kokoh, sedangkan revolusi ekonomi berarti bahwa sistem ekonomi harus mampu memberikan pemerataan dalam segala aspeknya baik fisik maupun non fisik.

Demikian juga revolusi sosial dan revolusi moral. Oleh sebab itu, program pemberantasan paham radikal juga menjadi bagian dari upaya menjaga eksistensi agama agar tidak terjadi benturan antar umat beragama. NU dan Muhammadiyah juga bekerja untuk pembangunan tata kehidupan umat yang Islami, moderat, adil dan sejahterah, misalnya melalui berbagai kegiatan dakwah kultural dan pengajian keagamaan.

Kedua, Memelihara Esensi Manusia (*Hifdz al-Zât al-Insâniyyah*). Melalui pemikiran al-Najjâr, kita dapat menyatakan bahwa esensi manusia meliputi jasad dan ruh secara totalitas yang memiliki unsur seperti emosi, akal, dan lainnya. Perlindungan terhadap esensi manusia mencakup perlindungan terhadap akal sebagai unsur yang memiliki nilai terpenting dari ruh manusia, memelihara akal pikiran (*hifdz al-'aql*) dan perlindungan terhadap seluruh bagian manusia yang menyokong kekuatan jasad dan ruh manusia, yakni memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*). Dalam pembahasan ini, Ir. Soekarno, Presiden RI Pertama, mengulas sejarah pergulatan Islam membela kaum lemah, bahwa para pemimpin zaman dahulu seperti Sayyidina Umar memikul sendiri karung gandum dibawa ke rumah fakir miskin atau warganya. Inilah yang menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintahan di masa kini dalam menjawab masalah pendidikan dan kesehatan kemudian dikeluarkan kebijakan Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat. Program-program ini adalah bagian dari usaha memelihara *hifdz al-'aql* (memelihara akal), *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa fisik) dan *hifdz al-nasl* (memelihara keluarga) sebagai kebutuhan dasar. Dalam hal ini, NU dan Muhammadiyah juga bekerja untuk pembangunan tata kehidupan umat yang Islami, moderat, adil dan sejahterah, misalnya melalui amal usaha pendidikan dan rumah sakit.

Ketiga, Memelihara Kepentingan Publik (*Hifdz al-Mujtama'*) menjadi bagian esensial dari usaha menjalankan amanah manusia sebagai *khalifatullah fi al-ard*. Islam tidak hanya memberikan tugas dan tanggung jawab personal (*fard al-'ain*), tetapi juga bersifat kolektif (*fard al-kifâyah*). Salah satu usaha memelihara kepentingan publik adalah *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan) yang berarti bahwa setiap manusia diwajibkan melangsungkan pernikahan sebagai fitrahnya untuk keberlangsungan

keturunan umat manusia di muka bumi. Sebagai anggota dari komunitas, setiap person yang lahir akan menjadi tiang penyangga keberadaan masyarakat sebagai kumpulan dari setiap person. Oleh sebab itu, syariat Islam mengajarkan pembangunan rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah untuk membangun masyarakat yang sejahtera, harmonis-religius (*hifdz al-mujtama'*), dan pada akhirnya bangsa yang sejahtera, harmonis-religius. Dalam bagian pembangunan keluarga sejahtera, ada program Kartu Indonesia Sejahterah. Demikianlah kebijakan Joko Widodo yang selalu berusaha memastikan bahwa setiap masyarakat religius termasuk umat Islam harus mampu menjadi bagian dari komunitas umat yang berusaha terus untuk membangun kehidupan berjalan sejahterah, harmonis dan gotong rotong.

Keempat, Memelihara Eksistensi Lingkungan Fisik (*hifdz al-muhith al-mâddî*) adalah tugas dan tanggung jawab setiap manusia. Untuk menjaga eksistensi manusia, kita wajib merawat dan menjaga eksistensi lingkungan fisik untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan bagi manusia (Q.S. al-Jatsiyah [45]: 13). Oleh sebab itu, syariat Islam datang untuk mengatur hukum-hukum bagi manusia dalam mengelola dan melestarikan eksistensi lingkungan fisik yang menjadi tempat tinggalnya. Program pembangun infrastruktur yang sedang digalakkan oleh pemerintahan Joko Widodo ini merupakan program yang prestisius karena hal itu dapat memberikan kemudahan dan pemerataan dalam bidang ekonomi dan juga daya saing bangsa. Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari amanah syariat Islam yang menegaskan bahwa *li al-wasâil hukm al-maqâshid* yang berarti bahwa infrastruktur sebagai sarana penunjang pokok untuk membangun kesejahteraan seperti pembangunan jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan dan perbatasan menjadi bagian dari kewajiban *syar'i* karena hal itu akan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat dan bangsa serta memperkokoh NKRI.

Arah kebijakan program Nawacita Presiden Joko Widodo tersebut dapat kita simpulkan berdasarkan pada tiga prinsip utama, yakni membangun berdasarkan aspirasi masyarakat/rakyat melalui kegiatan membaur dengan rakyat/*blusukan* atau silaturahmi dalam istilah syariat

Islam, menekankan perlunya ketaqwaan kepada Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa dengan istiqamah menjalankan paham moderasi dan toleransi, dan menekankan perlunya cinta kepada kebaikan dengan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam berbagai sektor kehidupan rakyat, baik sistem ekonomi, birokrasi, politik, agama, hukum, budaya maupun keamanan. Tiga prinsip utama tersebut pada dasarnya sesuai dengan pemikiran Hamka yang mengkategorikan sifat pribadi seseorang tersebut sebagai pribadi yang memiliki *kekayaan batin sejati*.

2. Saran-saran

Sebagai bagian dari pengembangan dari karya-karya tulis sebelumnya, wawasan keilmuan ushul fiqh/fiqih Islam yang dijabarkan di sini merupakan bagian dari eksplorasi kajian *maqâshid al-syari'ah* yang **ditujukan untuk** memotret pemikiran **dan** kebijakan Presiden Joko Widodo dalam membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahterah baik lahir maupun batin. Oleh sebab itu, saran dari para pembaca yang budiman sangat diharapkan untuk kesempurnaan buku ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Daftar Pustaka Buku

- 'Audah, Jasir, *Maqâshid al-Syari'ah: Dalil li al-Mubtadiin*, Beirut: Maktabah al-Tauzi' lil al-'Alam al-'Arabi, 2011.
- Abdillah, Mujiyono, *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Abdullah, M Amin, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Abdullah, M Amin, *Sumbangan Nurcholish Madjid atas Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia*, <http://nurcholishmadjid.net/?page=news&action=view&id=64>, diakses tanggal 19 September 2016.
- Abdullahi Ahmed An-Na'im, "Mahmoud Muhammed Taha and The Crisis In Islamic Law Reform: Implications for Interreligious Relations", *Jurnal of Ecumenical Studies*, 25: 1, Winter 1988.
- Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Rights and International Law*, Syracuse: Syracuse University Press, 1990.
- al-Najjâr, 'Abd al-Majid, *Maqâshid al-Syari'ah bi Ab'âd Jadidah*, Beirut : Dâr al-Gharb al-Islâmi, 2008.
- al-Syafi'i, Sirâj al-Dîn Abi Khafs 'Umar bin 'Alî bin Ahmad al-Anshârî, *al-Taudlîh li Syarkh al-Jami'i al-Shahîh*, Jili 21, Beirut: Dâr al-Nûr, 2008.
- al-Syâthibi, Abû Ishâq, *Al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syari'ah* Jilid I, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1997.
- Ambarita, Domu D, dkk, *Jokowi: Spirit Bantaran Kali Anyar*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Amin, KH Ma'ruf, dkk (Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975*, Jakarta: Penerbit Erlangga dan Sekretariat MUI, 2011.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim, *Tafsir al-Azhar*, Juz 30, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t.th.
- An-Na'im, Abdullahi A., "Human Rights and the Imperative of CrossCultural Dialogue: An Islamic Perspective", Berma Klein Goldewijk (ed), *Religion, International Relations and Development Cooperation*, The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, 2007.
- Asy'arie, KH Muhammad Hasyim, "Adab al-'Alim wa al-Muta'allim", *Irsyad al-Syari fi Jam'i Mushannifah al-Syaikh Hasyim Asy'ari*, Jombang: Maktabah al-Masruriyah, t.th.
- Asy'arie, KH Muhammad Hasyim, "Irsyad al-Mu'min ila sairah Sayyid al-Mursalîn wa Man Tabi'ahu min al-Shahâbah wa al-Tabi'in", *Irsyâd al-Sârî fi Jam'i Mushannifât al-Syaikh Hâsyim Asy'ari*, Jombang: Maktabah al-Masruriyah, t.th.
- Athallah, Syekh Ibnu, *Kitab al-Hikam*, terj. Fauzi Faisal Bahreisy, Jakarta: Zaman, 2011.
- Berindra, Susie, "Jeritan dari Sabang dan Merauke", dalam Chris Verdiansyah (ed), *Membongkar Budaya: Visi Indonesia 2030 dan Tantangan Menuju Raksasa Dunia*, Jakarta: Kompas, 2007.

- Connolly, Peter, (ed), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Khoiri, Yogyakarta: IRCiSoD, 2016.
- 51 Dahlan, Moh, *Membumikan Islam dalam Kerangka Kebijakan: Membaca Pemikiran dan Kebijakan Joko Widodo dalam Nalar Fiqih Ke-NU-an*, Yogyakarta: Kaukaba Press, 2016.
- Dahlan, Moh, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, Yogyakarta: Kaukaba Press, 2013.
- Dhofier, Zamakhsari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Endah, Alberthiene, *Jokowi: Memimpin Kota, Menyentuh Jakarta*, Cetakan 41 Ketiga, Solo: Tiga Serangkai, 2014.
- Hajriyanto Y Thohari: *Para Pendiri Bangsa adalah Aktivis Mahasiswa*, <http://www.umm.ac.id/id/berita/hajriyanto-y-thohari-para-pendiri-bangsa-adalah-aktivis-mahasiswa.html>, diakses 29 November 2017.
- Hanafi, Hasan, *Min al-'Akidah ila al-Tasurah*, Jilid I, Maktabah Madbûlah, t.th.
- 9 Ilyas, Yunahar, "Ihsan dan Akhlak Mulia", dalam *Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan*, Edisi Nomor 4/102, 16-28 Februari, 2017, hlm.18.
- Imam al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, terj. Rohimi dan Zenal Mutaqin, Bandung: Penerbit Jabal, 2013.
- Kalla, M Jusuf, "Disampaikan pada Acara Sholawat dan Istighotsah bagi Damai Nusantara dalam rangka Pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2015-2020 di Masjid Istiqlal, Jl Taman Wijaya Kusuma, Jakarta, 5 September 2015", dalam Husain Abdullah dan Burhanuddin Bella (eds.), *74 Kumpulan Pidato Pilihan M Jusuf Kalla 2014-2015, Satu Digit*, Jakarta: Buku Republik, Cet II., 2016.
- Kalla, M Jusuf, "Disampaikan pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional Indonesia Shipowers Association (INSA) 2014, 10 Desember 2014", dalam Husain Abdullah dan Burhanuddin Bella (eds.), *74 Kumpulan Pidato Pilihan M Jusuf Kalla 2014-2015, Satu Digit*, Jakarta: Buku Republik, Cet II., 2016.
- Kalla, M Jusuf, "Disampaikan pada Peresmian Monumen DR H Abdullah Ahmad dan Pustaka Perjuangan Bangsa" di Kampus Perjuangan Adabiah Jl Jati Adabiah No 1 Padang, Sumatera Barat, 23 Agustus 2015 dalam Husain Abdullah dan Burhanuddin Bella (eds.), *74 Kumpulan Pidato Pilihan M Jusuf Kalla 2014-2015, Satu Digit*, Jakarta: Buku Republik, Cet II., 2016.
- Kalla, M Jusuf, "Disampaikan pada saat menghadiri Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2015 di Palembang, 17 Oktober 2015", dalam Husain Abdullah dan Burhanuddin Bella (eds.), *74 Kumpulan Pidato Pilihan M Jusuf Kalla 2014-2015, Satu Digit*, Jakarta: Buku Republik, Cet II., 2016.
- Kalla, M Jusuf, "Disampaikan saat menghadiri Rapat Terbatas Bersama Presiden RI, Para Menteri, dan Para Gubernur Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 15 Oktober 2015", dalam Husain Abdullah dan Burhanuddin Bella (eds.), *74 Kumpulan Pidato Pilihan M Jusuf Kalla 2014-2015, Satu Digit*, Jakarta: Buku Republik, Cet II., 2016.

- Kalla, M Jusuf, "Kemajuan Bangsa Tergantung Kemajuan Keluarga", disampaikan saat menghadiri Mukhtamar Aisyiyah ke-47 Tahun 2015, Satu Abad Aisyiyah di Balai Prajurit Jenderal M Jusuf di Makassar, 7 Agustus 2015, dalam Husain Abdullah dan Burhanuddin Bella (eds.), *74 Kumpulan Pidato Pilihan M Jusuf Kalla 2014-2015, Satu Digit*, Jakarta: Buku Republika, Cet II., 2016.
- Kemenag Akan Salurkan 1,3 Trilyun Dana SBSN di 34 PTKIN, <http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detil&id=9148#.Wh5aAEqWY2w>, diakses 29 November 2017; *Kemenag akan Bangun 30 Unit Gedung Perkuliahan PTKIN*, <https://kemenag.go.id/berita/read/504899/kemenag-akan-bangun-30-unit-gedung-perkuliahan-ptkin>, diakses 29 November 2017.
- Kemenag Terima Penghargaan Sebagai Pemrakarsa Proyek SBSN, <https://kemenag.go.id/berita/read/438706/kemenag-terima-penghargaan-sebagai-pemrakarsa-proyek-sbsn>, diakses 29 November 2017.
- ⁴⁷ *Ketika Jokowi dan Cameron Bicara Islam Indonesia di London*, <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/20/078764133/ketika-jokowi-dan-cameron-bicara-islam-indonesia-di-london>, diakses 6 Juni 2016.
- Kita Bangun Islam Yang Tebarkan Perdamaian*, <http://ksp.go.id/kita-bangun-islam-yang-tebarkan-perdamaian/>, diakses 14 September 2017.
- ⁹ Lulu Supriadi, "Konsep Masalah Mursalah Najm al-Din al-Tufi", *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 8, No. 1, Januari 2012.
- Laporan 3 Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Dokumen KSP RI, 2017. Laporan Utama, "NU Masih Teratas", dalam *Risalah: Mencerahkan dan Menyejukkan*, Edisi 69/X, Februari 2017.
- Madjid, Nurcholish, "Islam, Iman dan Ihsan Sebagai Trilogi Ajaran Ilahi", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Madjid, Nurcholish, "Masalah Simbol Dan Symbolisme Dalam Ekspresi Keagamaan" dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Madjid, Nurcholish, "Pandangan Kontemporer tentang Fiqh: Telaah Problematika hukum Islam di Zaman Modern", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Madjid, Nurcholish, "Penghayatan Makna Ibadah Puasa: Sebagai Pendidikan Tentang Kesucian serta Tanggung Jawab Pribadi dan Kemasyarakatan" dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Mengukuhkan Kembali Ideologi Pancasila*, 31 May 2017, <http://presidenri.go.id/artikel-terpilih/mengukuhkan-kembali-ideologi-pancasila.html>, diakses 15 September 2017.
- Muhakamurrohman, Ahmad, "Pesantren: Santri, Kiai, dan Tradisi", dalam *Ibda': Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 12, No. 2, Juli - Desember 2014.

- Nashir, Haedar, "Memahami Wawasan Kemajemukan Bangsa", dalam *Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan*, Edisi Nomor 17/101, 1-15 September 2016.
- Nashir, Haedar, "Muhammadiyah Menghadapi Masalah Keumatan dan Kebangsaan", dalam *Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan*, Edisi Nomor 03/102, 1-15 Februari 2017. .
- Nashir, Haedar, "Penguatan Peran Keumatan dan Kebangsaan", dalam *Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan*, Edisi Nomor 4/102, 16-28 Februari, 2017.
- Nugroho, "Islam dan Human Rights dalam Bingkai Toleransi Beragama", dalam *Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* Vol. 15, No. 2, Desember 2015.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2012.
- Risalah: Mencerahkan dan Menyejukkan*, Edisi 69/X, Februari 2017.
- Saifuddin, Lukman Hakim, "Sambutan Menteri Agama RI" Pada *Seminar Pembukaan Halaqah fiqh kebhinekaan*, Maarif institute, Jakarta, 24 Februari 2015.
- Saifuddin, Lukman Hakim, *Sambutan Menteri Agama RI Pada Sosialisasi Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten Serang, 3 Mei 2017.
- Saragih, Simon, *Tindakan-Tindakan Kita Masih Tetap Artifisia*, dalam Chris Verdiansyah (ed), *Membongkar Budaya: Visi Indonesia 2030 dan Tantangan Menuju Raksasa Dunia*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Schwartz, David J, *Berpikir dan Menjadi Sukses: Penuntun Pribadi Anda Menuju Kemandirian Keuangan dan Kehidupan yang Damai*, terj. Anton Adiwiyoto, Jakarta: Binarupa Aksara, 1996.
- Shihab, M Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2014.
- Soekarno, "Agama Mengatur Hubungan Manusia dengan Tuhan", Amanat pada Kongres Muhammadiyah Bandung, 24 Juli 1965, dalam R Soemarjoto (peny), *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin*, Jakarta: Putra Sang Fajar, 2015.
- Soekarno, "Al-Quran Membentuk Manusia Baru", Amanat pada Peringatan Nuzulul Quran, Jakarta, 6 Maret 1961, dalam R Soemarjoto (peny), *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin*, Jakarta: Putra Sang Fajar, 2015.
- Soekarno, "Islam, Agama Amal", Amanat pada Peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara, Jakarta, 15 Maret 1960, dalam R Soemarjoto (peny), *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin*, Jakarta: Putra Sang Fajar, 2015.
- Soekarno, "Islam, Agama yang Toleran", Amanat pada Hari Raya Idul Fitri di Masjid Baiturrahim, Istana Merdeka, Jakarta, 23 Januari 1966, dalam R Soemarjoto (peny), *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin*, Jakarta: Putra Sang Fajar, 2015.
- Soekarno, "Isra dan Mikraj adalah Mukjizat kepada Nabi Besar Muhammad", Amanat pada Peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad Saw, Jakarta,

- 16 Januari 1961, dalam R Soemarjoto (peny), *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin*, Jakarta: Putra Sang Fajar, 2015.
- Soerkarno, "Api Islam, Motor Terbesar Umat Manusia", Amanat pada Peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara Jakarta, 1 Februari 1964, dalam R Soemarjoto (peny), *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin*, Jakarta: Putra Sang Fajar, 2015.
- Soerkarno, "Nabi dan Pembangunan", Amanat pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw, di Istana Negara, Jakarta, 15 September 1959, R Soemarjoto (peny), *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin*, Jakarta: Putra Sang Fajar, 2015.
- Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan*, Edisi Nomor 17/101, 1-15 September 2016 dan Edisi Nomor 03/102, 1-15 Februari 2017
- Sulistiyo, Eko, *Jokoway: Cara Memahami Kepemimpinan Jokowi*, Jakarta: Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 2017.
- Sulistiyo, Eko, *Jokowi & Trisakti: Amanat Konstitusi untuk Menyejahterakan Rakyat*, Jakarta: Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 2017.
- Suminto (ed. II), *Sukuk Negara: Instrumen Keuangan Berbasis Syariah*, Jakarta: Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI, 2015.
- Syamsuri, "Membangun Maqasid Al-Shari'ah Melalui Al-Usul Al-Khamsah: Studi Kritis Terhadap Konsep Al-Ghazali dan Abd Al Majid Al-Najjar", *Kumpulan Makalah Mata Kuliah Reading Arabic Texts Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 2016*.
- Tim PresidenRI.go.id-Kantor Staf Kepresidenan RI, *2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: Akselerasi Mewujudkan Indonesia Sentris*, Jakarta: Tim PresidenRI.go.id-Kantor Staf Kepresidenan RI, 2016.
- ⁷⁵ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2013.
- ⁶⁹ Wahid, Abdurrahman, "Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Wahid, Abdurrahman, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Widodo, Joko, *Sambutan Walikota Surakarta pada Pemberangkatan Calon Haji TH.1432 H 11 Oktober 2009*. ³³
- Yafie, KH Ali, "Konsep-Konsep Hukum", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Yafie, KH Ali, "Konsep-Konsep Istihsan, Istishlah Dan Mashlahat Al-Ammah", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Zakiah, Loubna, & Faturochman, "Kepercayaan Santri Pada Kiai", *Buletin Psikologi*, ISSN : 0854 – 7108, Tahun XII, No. 1, Juni 2004.

2. Daftar Pustaka Jurnal, Majalah, Penelitian, Laporan, Elektronik, Observasi, dan Online.

- 1 “Haedar Nashir dan Syafi’i Ma’arif Kawal Prosesi Akad Nikah Putri Presiden Jokowi”, *Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan*, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/11/08/haedar-nashir-dan-syafii-maarif-kawal-prosesi-akad-nikah-putri-presiden-jokowi/>, diakses 25 Nov 2017.
- 8 “Islam Indonesia, Antara Cita dan Fakta”, *Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan*, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/11/15/islam-indonesia-antara-cita-dan-fakta/>, diakses 25 November 2017.
- 1 “Kapolri: ‘Saya Merasa Tersentuh Hati, Seorang Profesor, Ketua Umum, Mau Jadi Ketua Ranting’”, *Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan*, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/11/21/ka-polri-saya-merasa-tersentuh-hati-seorang-profesor-ketua-umum-mau-jadi-ketua-ranting/>, diakses 24 November 2017.
- “Kemesraan Bung Karno & Mbah Wahab Hasbullah”, <http://www.pcnupati.or.id/2017/04/kemesraan-bung-karno-mbah-wahab.html>, diakses 29 november 2017.
- An-Na’im, Abdullahi Ahmed, “The Compatibility Dialectic: Mediating the Legitimate Coexistence of Islamic Law and State Law”, *The Modern Law Review*, Volume 73 No 1 January 2010
- An-Na’im, Abdullahi Ahmed, “Why should Muslims abandon Jihad? Human rights and the future of international law”, *Third World Quarterly*, Vol. 27, No. 5, tahun 2006.
- 12 Awang, San Afri, *Konsep Ekonomi Kerakyatan dan Aplikasinya pada Sektor Kehutanan*, <http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sanafri.htm>, diakses 3 Mei 2017.
- Azim, Mohammad Tahlil, “Religiosity and Conflict Handling Styles: A Study of a Muslim Community”, *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 12: (Dec.) 2017.
- Berita 20 Februari 2017, <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 6 Juli 2017.
- Berita 30 Januari 2017, <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 6 Juli 2017
- Berita tanggal 2 Februari 2017, <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 6 Juli 2017.
- Berita tanggal 21 Februari 2017, <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 6 Juli 2017
- Berita Tanggal 8 Mei 2017, <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 26 Mei 2017
- Bustami (ed), *Jokowi di Kongres PMII: Hentikan Saling Hujat, Kita Semua Bersaudara*, <http://www.sayangi.com/2017/05/16/83745/news/jokowi-kongres-pmii-hentikan-saling-hujat-kita-bersaudara>, diakses 24 November 2017
- Dokumentasi Foto Biro Pers Setpres, Berita 20 Februari 2017, <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 6 Juli 2017.
- Dokumentasi Foto Biro Pers Setpres, Berita 30 Januari 2017, <https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 6 Juli 2017.

Efendi, David, *Menyemai Gagasan Desa Berkemajuan*, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/12/25/menyemai-gagasan-desa-berkemajuan/3/>, diakses 14 September 2017.

Effendi, Sofian, "Kebijakan Publik: Konsep Konsep", *Diklat Tehnik dan Manajemen Kebijakan Publik*, Jakarta, 18 November -3 Desember 1998, <http://sofian.staff.ugm.ac.id/kuliah/AKP-Konsep.pdf>, diakses 2 Juli 2018.

Hasil Catatan Pribadi pada Acara Safari Katimbas Polda Jateng di Pondok Pesantren Giri Kesumo Demak Jateng, 2017.

Hasil Catatan Pribadi selama di Pesantren Nurul Huda Panarukan Situbondo dan Pesantren Nurul Jadid di Probolinggo.

<http://foto.metrotvnews.com/view/2017/11/23/792483/jokowi-buka-munas-alim-ulama-nu-di-lombok>, diakses 24 November 2017.

<http://m.tribunnews.com/regional/2014/12/17/jokowi-janji-garap-perbatasan-mulai-tahun-depan>, diakses 24 Mei 2015

<http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/04/28/muhammadiyah-sebagai-pilar-civil-islam-di-indonesia/>, diakses 14 September 2017.

<https://kemenag.go.id/berita/read/506008>, diakses 29 November 2017

<https://web.facebook.com/Jokowi/>, diakses 19 mei 2017.

<https://www.facebook.com/Jokowi/> diakses 2 Juni 2017

<https://www.facebook.com/Jokowi/> diakses 26 Mei 2017.

<https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 2 Juni 2017

<https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 2 Juni 2017.

<https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 23 Juni 2017

<https://www.facebook.com/Jokowi/>, diakses 26 Mei 2017

<https://www.facebook.com/Jokowi/>?, diakses 23 Juli 2017

<https://www.facebook.com/Jokowi/?fref=ts>, diakses 18 Maret 2017

https://www.google.co.id/search?q=jokowi+hadir+pengukuhan+ma%27ruf+amin&dcr=0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Aviya3fLDqzI9M%253A%252CP_8CrtBPPxjTBM%252C_&usg=__kQfMAZDHVzozilu77u6OxTv3B2w%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiyx_ugkd7XAhXIK48KHS1zBOQQ9QEIXTAH#imgrc=DYPKXGbv3IrQM, diakses 27 November 2017.

<https://www.google.co.id/search?q=safari+kamtibmas+kapolda+jateng+di+giri+kusumo+2017&sa=G&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiN14uwsNfXAhUH2o8KHS1KAaEQsAQILg&biw=1422&bih=684>, diakses 24 November 2017.

<http://ksp.go.id/kerukunan-dalam-keanekaragaman-aset-berharga-bangsa-indonesia/>, diakses 14 September 2017

<http://ksp.go.id/islah-persatuan-tarbiyah-islamiah-perti-contoh-persatuan-di-tengah-keberagaman/>, diakses 14 September 2017.

<http://ksp.go.id/pembangunan-indonesia-sentris-untuk-wujudkan-persatuan-indonesia/>, diakses 14 September 2017

<http://ksp.go.id/hadiri-munas-ldii-presiden-jokowi-ingatkan-persaingan-global-yang-semakin-sengit/>, diakses 14 September 2017

<http://ksp.go.id/cinta-tanah-air-bagian-dari-iman/>, diakses 14 September 2017.

Inggris Dukung Jokowi Bentuk Universitas Islam Internasional, <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/19/117763997/inggris-dukung-jokowi-bentuk-universitas-islam-internasional>, diakses 6 Juni 2016.

- Ini Kisah Sukses Jokowi di Solo,
<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/06/10/ini-kisah-sukses-jokowi-di-solo>, diakses 4 Juni 2016
- ²⁵ Jokowi Pidato Soal Poros Maritim di IMO ²⁵ London,
<https://m.tempo.co/read/news/2016/04/20/078764128/jokowi-pidato-soal-poros-maritim-di-imo-london>, diakses 6 Juni 2016.
- Maulidi, "Paradigma Progresif dan Maqashid Syariah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 2, Desember 2015.
- Nashir, Haedar, Islam di Dunia Nyata,
<http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/08/24/islam-di-dunia-nyata/>, diakses 24 November 2017.
- Nawa Cita", 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK,
<http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.a.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>, diakses 14 September 2017.
- ³⁶ NU to gather global Islamic figures to end misinterpretation of jihad,
<http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/26/nu-gather-global-islamic-figures-end-misinterpretation-jihad.html>, diakses 15 Juli 2017
- Othman, Azam, dkk, "Islamic integrated education system model in the Malay archipelago: Implications for educational leadership", *Intellectual Discourse*, 25:1 (2017), IIUM Press ISSN 0128-4878 (Print); ISSN 2289-5639 (Online)
- Paradigma Ekonomi Islam, <http://steihamfara.ac.id/paradigma-ekonomi-islam/>, diakses 29 November 2017
- ⁴ PBNU to Hold International Summit of Moderate Islamic Leaders,
<http://setkab.go.id/en/pbnu-to-hold-international-summit-of-moderate-islamic-leaders/> diakses 15 Juli 2017.
- ³⁴ Perlindungan Hukum Bagi Semua Warga Negara, 17 January 2017,
<http://presidenri.go.id/berita-aktual/perlindungan-hukum-bagi-semua-warga-negara.html> 14 september 2017.
- Permata, Ahmad Norma, *Muhammadiyah Sebagai Pilar Civil Islam di Indonesia*,
<http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/04/28/muhammadiyah-sebagai-pilar-civil-islam-di-indonesia/>, diakses 14 September 2017.
- Presiden Apresiasi Peran NU Bawa Semangat Persatuan Bangsa,
http://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_apresiasi_peran_nu_bawa_semangat_persatuan_bangsa, diakses 24 November 2017.
- Presiden Jokowi Jadi Anggota Kehormatan Forum Ekonomi Islam Dunia,
<http://setkab.go.id/presiden-jokowi-jadi-anggota-kehormatan-forum-ekonomi-islam-dunia/>, diakses 6 Juni 2016.
- Ribas (Reporter), *Hamim Ilyas: Dakwah Islam untuk Tujuan Mewujudkan Hidup Baik*,
<http://www.suaramuhammadiyah.id/2018/05/26/hamim-ilyas-dakwah-islam-untuk-tujuan-mewujudkan-hidup-baik/>, diakses Juli 2018.

- ⁵ Rumah Subsidi Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, 26 July 2017, <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/rumah-subsidi-untuk-masyarakat-berpenghasilan-rendah.html> , diakses 14 September 2017.
- Rusli, R., "Progressive Salafism In Online Fatwa", *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 52, No. 1, 2014 M/1435 H.
- Rusli, Ris'an, "The State Concept: The Political Thinking of Mohammad Natsir", *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 13: (June) Tahun 2018.
- Terjemahan al-Qur'an Digital, Departemen Agama RI.
- Uddin, Ahm Ershad, "The Fanatical ISIS through the Lens of Islamic Law", *International Journal of Islamic Thought* Vol. 12: (Dec.) 2017.
- ⁵ Upaya Nyata Pemerintah Membuka Lapangan Kerja, 18 May 2017, <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/upaya-nyata-pemerintah-membuka-lapangan-kerja.html>, diakses 15 September 2017.
- ¹ Utsany, Royan, *Tajdid Ushul Fiqh Pasca Imam Syafi'i (2)*, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/03/11/tajdid-ushul-fiqh-pasca-imam-syafii-2/>, diakses 14 September 2017
- Widodo, Joko, *Perubahan Sangat Cepat, Presiden Jokowi: Berbahaya Sekali Pemimpin Yang Tidak Menyadari*, (ed. Humas), <http://setkab.go.id/perubahan-sangat-cepat-presiden-jokowi-berbahaya-sekali-pemimpin-yang-tidak-menyadari/>, diakses 23 Juli 2017.
- Widodo, Joko, *Arahan Presiden Republik Indonesia Mengenai Antisipasi Pengendalian Kebakaran Hutan* di Kantor Daops Manggala Agni, Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Tanggal 20 Januari 2015, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8688&Itemid=, diakses 26 Juni 2016.
- Widodo, Joko, *Hadiri Haul ke-124 Syekh Nawawi Al-Bantani, Presiden Jokowi Ingatkan Jaga Persatuan dan Kebinekaan* (ed. Humas), <http://setkab.go.id/hadiri-haul-ke-124-syekh-nawawi-al-bantani-presiden-jokowi-ingatkan-jaga-persatuan-dan-kebinekaan/> diakses 23 Juli 2017.
- Widodo, Joko, *Kuliah Umum Presiden Republik Indonesia Dies Natalis ke-47 dan Lustrum ke-8* Universitas Negeri Sebelas Maret Solo, Jawa Tengah 11 Maret 2016, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11489&Itemid=26 diakses 4 Juni 2016.
- Widodo, Joko, *Pengantar Presiden Republik Indonesia Rapat Terbatas Tentang Harmonisasi Peraturan Perizinan Terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan, dan Izin Gangguan*, Kantor Presiden, Jakarta 15 Maret 2016, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11235&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016 ¹⁴
- Widodo, Joko, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Acara Peringatan Nuzulul Qur'an Nasional*, di Istana Negara, Jakarta, Tanggal 3 Juli

- 2015, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9534&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.
- Widodo, Joko, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia* di Halaman Belakang Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Tanggal 5 Juni 2015, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9387&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.
- Widodo, Joko, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pembukaan International Conference On Family Planning*, Nusa Dua, Bali 25 Januari 2016, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11057&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.
- Widodo, Joko, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Penganjangan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar Kepulauan Seribu*, Jakarta, 14 April 2016, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11385&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.
- Widodo, Joko, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Haul Ke-7 Wafatnya KH Abdurrahman Wahid*, Ciganjur, Jakarta, 23 Desember 2016, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=13106&Itemid=26, diakses 3 Juni 2017.
- Widodo, Joko, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw 1437 H dan Silaturahmi Bersama Kiai Sepuh*, Gedung GP Ansor, Jakarta 11 Desember 2016, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=13113&Itemid=26, diakses 3 Juni 2017.
- Widodo, Joko, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw 1437 H Istana Negara*, Jakarta 23 Desember 2015, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=10678&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.
- Widodo, Joko, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Peringatan Isra Mir'aj Nabi Muhammad Saw Tahun 1436 Hijriah* di Istana Negara, Jakarta Tanggal 15 Mei 2015, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9365&Itemid=, diakses 26 Juni 2016.
- Widodo, Joko, *Tutup Rakernas APEKSI, Presiden Jokowi Tekankan Perlunya Diferensiasi Kota*, (ed. Humas), <http://setkab.go.id/tutup-rakernas-apeksi-presiden-jokowi-tekanan-perlunya-diferensiasi-kota/>, diakses 23 Juli 2017
- [www.wapresri.go.id/wapres-jk-hanya-ilmu-yang dapat-memajukan-negeri/](http://www.wapresri.go.id/wapres-jk-hanya-ilmu-yang-dapat-memajukan-negeri/), diakses 24 Desember 2017.
- Zainol, Nur Zainatul Nadra, Latifah Abd Majid dan Muhd Najib Abdul Kadir, "Nasr Hamid Abu Zayd as a Modern Muslim Thinker", *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 5: (June) 2014.
- Zakariyah, Luqman, "Harmonising legality with morality in Islamic banking and finance: A quest for Maqāṣid alShari'ah paradigm", *Intellectual Discourse*, Vol 26, No 1, 2018.

membangun bersama rakyat 2

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.suaramuhammadiyah.id Internet Source	1%
2	klangable.com Internet Source	1%
3	www.scribd.com Internet Source	1%
4	setkab.go.id Internet Source	1%
5	presidenri.go.id Internet Source	1%
6	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%
7	setneg.go.id Internet Source	<1%
8	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
9	ejournal.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1%

10	infosekitarkarawang.blogspot.com Internet Source	<1%
11	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1%
12	muhammadbaidhowi.blogs.uny.ac.id Internet Source	<1%
13	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
14	docplayer.info Internet Source	<1%
15	jurnal.ugm.ac.id Internet Source	<1%
16	www.youtube.com Internet Source	<1%
17	bintangplus.com Internet Source	<1%
18	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%
19	www.laraspostonline.com Internet Source	<1%
20	ejournal.iaingawi.ac.id Internet Source	<1%

docobook.com

21	Internet Source	<1%
22	ml.scribd.com Internet Source	<1%
23	libcat.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
24	mafiadoc.com Internet Source	<1%
25	nasional.tempo.co Internet Source	<1%
26	www.readbag.com Internet Source	<1%
27	tangkasnews.com Internet Source	<1%
28	pengetahuanmuamalah.blogspot.com Internet Source	<1%
29	muslimlife.com Internet Source	<1%
30	maidanypos.blogspot.com Internet Source	<1%
31	www.siagaindonesia.com Internet Source	<1%
32	Nurul Annisa Hamudy, Moh Ilham A Hamudy.	<1%

"Cak Nur on politics: Indonesian Political Islam and the Role of Islamic Politics", Al-Risalah, 2020

Publication

33

media.neliti.com

Internet Source

<1%

34

Submitted to Universitas Sebelas Maret

Student Paper

<1%

35

www.beritarayaonline.co.id

Internet Source

<1%

36

www.thejakartapost.com

Internet Source

<1%

37

journal.walisongo.ac.id

Internet Source

<1%

38

Moh Mufid. "Fikih Ekowisata Berbasis Maqāṣid Al-Syarī'ah (Studi Pengelolaan Wisata Alam Hutan Mangrove di Wonorejo Kota Surabaya)", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2019

Publication

<1%

39

kerincitime.co.id

Internet Source

<1%

40

es.scribd.com

Internet Source

<1%

41

www.umm.ac.id

Internet Source

<1%

42	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
43	irep.iium.edu.my Internet Source	<1%
44	habibi8899.wordpress.com Internet Source	<1%
45	hildahalida.wordpress.com Internet Source	<1%
46	beritatrans.com Internet Source	<1%
47	m.tempoco.com Internet Source	<1%
48	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
49	www.jitunews.com Internet Source	<1%
50	henihendrayani.blogspot.com Internet Source	<1%
51	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1%
52	www.mpr.go.id Internet Source	<1%
53	mazzhariez.blogspot.com Internet Source	<1%

54	issuu.com Internet Source	<1%
55	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
56	ksp.go.id Internet Source	<1%
57	ejurnal.litbang.pertanian.go.id Internet Source	<1%
58	jurnalnu.com Internet Source	<1%
59	minanews.net Internet Source	<1%
60	laksitohdn.wordpress.com Internet Source	<1%
61	Taufiq Kurniawan, Asmak Ab Rahman. "ANALISIS PELAKSANAAN AKAD IJÂRAH DALAM SUKUK PROJECT BASED SUKUK DI INDONESIA", Al-Risalah, 2019 Publication	<1%
62	oscartigasembilan03.blogspot.com Internet Source	<1%
63	muhammadiyahstudies.blogspot.co.uk Internet Source	<1%

64

Internet Source

<1%

65

core.ac.uk

Internet Source

<1%

66

medialogika.org

Internet Source

<1%

67

edoc.pub

Internet Source

<1%

68

www.metrolangkatbinjai.com

Internet Source

<1%

69

Moh Dahlan. "The Hermeneutics Of Authentic Jurisprudence Of Gus Dur In Indonesia", Al-Risalah, 2018

Publication

<1%

70

www.pesantrenbisnis.com

Internet Source

<1%

71

Susy Ella, Rosita Novi Andari. "Developing a Smart Village Model for Village Development in Indonesia", 2018 International Conference on ICT for Smart Society (ICISS), 2018

Publication

<1%

72

www.fetgame.com

Internet Source

<1%

73

www.mamhtroso.com

Internet Source

<1%

74

aljamiah.or.id

Internet Source

<1%

75

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1%

76

repository.unpar.ac.id

Internet Source

<1%

77

simperdededemak.wordpress.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 40 words

Exclude bibliography On